



BAPPEDA  
KAB. MOROWALI



KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

# RKPD Kabupaten Morowali Tahun 2023

LAYURANDA



TELUK LASOLO

Kabupaten Banggai Kepulauan





BUPATI MOROWALI  
PROPINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN BUPATI MOROWALI  
NOMOR..23.....TAHUN 2022

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH  
TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MOROWALI,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Pasal 104 ayat (2) perlu menetapkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 Tentang tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah perlu menetapkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali

- dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan keuangan Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah;
  7. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang sistem informasi Pemerintah Daerah;
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023:
10. Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Morowali (Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Tahun 2021 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Nomor 0137);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2023.

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan :

1. Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan- tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan didalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumberdaya yang ada, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu.
2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun.
3. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah Dokumen Perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun atau disebut dengan rencana Pemerintah Tahunan Daerah.
4. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
5. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada setiap Perangkat Daerah untuk setiap Program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-PD sebelum dibahas bersama dengan DPRD.

6. Daerah adalah Kabupaten Morowali.
7. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
8. Bupati adalah Bupati Morowali.
9. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
10. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah.
11. Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah yang selanjutnya disingkat BAPELITBANGDA adalah unsur perencanaan penyelenggaraan pemerintah yang melaksanakan tugas dan mengkoordinasikan, mensinergikan dan mengharmonisasi penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah.

## BAB II

### RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2023

#### Pasal 2

RKPD Tahun 2023 merupakan dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yakni Tahun 2023;

#### Pasal 3

Dokumen RKPD Tahun 2023 yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas :

BAB I	:	PENDAHULUAN
BAB II	:	GAMBARAN KONDISI UMUM DAERAH
BAB III	:	RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH
BAB IV	:	PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH
BAB V	:	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH
BAB VI	:	KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH
BAB VII	:	PENUTUP

#### Pasal 4

Dokumen RKPD Tahun 2023 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan peraturan Bupati ini.

#### Pasal 5

- (1) RKPD tahun 2023 disusun mengacu pada RPJMD 2019-2023 sesuai ketentuan Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2019;
- (2) RKPD tahun 2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pedoman bagi Perangkat Daerah dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah dan penyusunan KUA dan PPAS serta Rancangan Anggaran dan Belanja Daerah Tahun 2023.

#### Pasal 6

Pemerintah Daerah menggunakan RKPD Tahun 2023 sebagai bahan pembahasan KUA dan PPAS dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam rangka penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023.

#### Pasal 7

- (1) Perangkat Daerah membuat laporan kinerja triwulan dan tahunan atas pelaksanaan rencana kerja dan anggaran yang berisi uraian tentang keluaran kegiatan dan indikator kinerja masing-masing program dan kegiatan.
- (2) Laporan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada kepala BAPELITBANGDA paling lambat 14 (empat belas) hari setelah berakhirnya triwulan bersangkutan.
- (3) Laporan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi masukan dan bahan pertimbangan bagi analisis dan evaluasi usulan anggaran tahun berikutnya yang diajukan oleh Perangkat Daerah yang bersangkutan.

#### Pasal 8

Kepala BAPELITBANGDA menelaah kesesuaian antara Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah dengan RKPD Tahun 2023.

BAB III  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Morowali

Ditetapkan di Bungku  
pada tanggal 1 Juli 2022  
BUPATI MOROWALI,

ttd

TASLIM

Diundangkan di Bungku  
pada tanggal 1 Juli 2022  
Pj.SEKERTARIS DAERAH KABUPATEN MOROWALI,

ttd

YUSMAN MAHBUB

BERITA DAERAH KABUPATEN MOROWALI TAHUN 2022 NOMOR: 023

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum  
Sekretariat Daerah Kab.Morowali



BAHDIN BAID, SH.,MH  
Pembina, IV/a  
NIP. 19820602 200604 1 005

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI MOROWALI  
NOMOR 23 TAHUN 2022  
TENTANG  
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH  
KABUPATEN MOROWALI  
TAHUN 2023

## DAFTAR ISI

	<b>Hal.</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	i
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	I-1
1.1 Latar Belakang.....	I-1
1.2 Dasar Hukum Penyusunan.....	I-2
1.3 Hubungan Antar Dokumen.....	I-5
1.4 Maksud dan Tujuan.....	I-7
1.5 Sistematika Dokumen RKPD.....	I-7
<b>BAB II GAMBARAN KONDISI UMUM DAERAH</b> .....	II-1
2.1 Kondisi Umum Daerah.....	II-1
2.1.1 Aspek Geografi dan Demografi.....	II-1
2.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat.....	II-26
2.1.3 Aspek Pelayanan Umum.....	II-40
2.2 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Sampai Tahun Berjalan Dan Realisasi RPJMD.....	II-63
2.3 Evaluasi Capaian Keuangan dan Indikator Kinerja Utama (IKU) Berdasarkan Urusan Pemerintah Daerah .....	II-67
2.3.1 Urusan Pemerintah Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar.....	II-67
2.3.2 Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar.....	II-79
2.3.3 Urusan Pilihan .....	II-90
2.3.4 Urusan Pendukung Urusan Pemerintahan .....	II-96
2.4 Capaian Kinerja Makro Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 .....	II-101
2.4.1 Capaian PDRB .....	II-101
2.4.2 Capaian Penurunan Angka Kemiskinan.....	II-101
2.5 Permasalahan Daerah Yang Berhubungan Dengan Prioritas Dan Sasaran Pembangunan Daerah .....	II-102
2.6 Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah.....	II-103
2.6.1 Urusan pendidikan.....	II-103
2.6.2 Urusan Kesehatan.....	II-103
2.6.3 Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.....	II-104
2.6.4 Urusan Perumahan Rakyat dan Pemukiman.....	II-104
2.6.5 Urusan Sosial.....	II-104
2.6.6 Urusan Tenaga Kerja.....	II-105
2.6.7 Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak .....	II-105
2.6.8 Urusan Pangan.....	II-105
2.6.9 Urusan Lingkungan Hidup.....	II-105
2.6.10 Urusan Administrasi Kependudukan dan Catatan .....	II-106

	Sipil.....	
	2.6.11 Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.....	II-106
	2.6.12 Urusan Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana.....	II-106
	2.6.13 Urusan Perhubungan.....	II-107
	2.6.14 Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.....	II-107
	2.6.15 Urusan Penanaman Modal.....	II-107
	2.6.16 Urusan Kepemudaan dan Olahraga.....	II-108
	2.6.17 Urusan Perpustakaan.....	II-108
	2.6.18 Urusan Kelautan dan Perikanan.....	II-108
	2.6.19 Urusan Pariwisata.....	II-108
	2.6.20 Urusan Pertanian.....	II-109
	2.6.21 Urusan Perdagangan.....	II-109
	2.6.22 Urusan Perindustrian.....	II-109
<b>BAB III</b>	<b>RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH.....</b>	<b>III-1</b>
	3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah.....	III-1
	3.1.1 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan struktur Ekonomi Periode 2016-2023.....	III-1
	3.1.2 Pertumbuhan Ekonomi.....	III-4
	3.1.3 PDRB Per Kapita.....	III-5
	3.1.4 Ketenagakerjaan.....	III-6
	3.1.5 Kemiskinan.....	III-7
	3.1.6 Ketimpangan Pendapatan.....	III-8
	3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah.....	III-8
	3.2.1 Arah Kebijakan Pendapatan Daerah.....	III-10
	3.2.2 Arah Kebijakan Belanja Daerah.....	III-15
	3.2.3 Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah.....	III-19
<b>BAB IV</b>	<b>SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH.....</b>	<b>IV-1</b>
	4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan.....	IV-1
	4.2 Sasaran dan Prioritas Pembangunan Tahun 2023.....	IV-5
	4.2.1 Sasaran Pembangunan Tahun 2023.....	IV-5
	Keterkaitan antara Prioritas Nasional, Prioritas Provinsi Sulawesi Tengah dan Prioritas Kabupaten Morowali	IV-9
<b>BAB V</b>	<b>RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH.....</b>	<b>V-1</b>
	5.1 Rencana Program Prioritas.....	V-1
<b>BAB VI</b>	<b>KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH.....</b>	<b>VI-1</b>
<b>BAB VII</b>	<b>PENUTUP.....</b>	<b>VII-1</b>
	7.1 Kaidah Pelaksanaan.....	VII-1
	7.2 Kesimpulan.....	VII-3



# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Morowali Tahun 2023 adalah dokumen perencanaan tahunan sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Morowali Tahun 2005-2025 dan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (P-RPJMD) Periode 2018-2023 yang disusun melalui proses klarifikasi, sinkronisasi dan seleksi usulan program/kegiatan yang terpadu, terhubung dan terintegrasi dengan berbasis elektronik sebagai bagian dari proses penyelenggaraan pembangunan daerah dalam musyawarah perencanaan pembangunan di tingkat desa, kecamatan, kabupaten dan provinsi. Sesuai amanat Pasal 25 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional bahwa Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) menjadi pedoman penyusunan RAPBD, maka untuk menjaga konsistensi antara perencanaan dan penganggaran perlu disusun RKPD Kabupaten Morowali Tahun 2023 sebagai pedoman penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) serta Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023.

RKPD Kabupaten Morowali Tahun 2023 merupakan pelaksanaan tahun kelima dari Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (P-RPJMD) Tahun 2018-2023. Bagi Perangkat Daerah (PD), Rancangan Akhir RKPD merupakan pedoman untuk menyempurnakan Rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) dalam rangka mempersiapkan Rencana Kerja Anggaran (RKA-PD) Tahun 2023.

Mengingat RKPD merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional, maka RKPD 2023 merujuk pada dokumen-dokumen perencanaan yang sudah ada yaitu RPJP Nasional, RPJM Nasional, RKP Tahun 2023, RPJP Provinsi Sulawesi Tengah, RPJPD Kabupaten Morowali, Perubahan RPJMD Kabupaten Morowali, dan RKPD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023 terutama dilihat dari keterkaitan prioritas pembangunan, kebijakan dan arah pembangunan yang akan dilaksanakan Tahun 2023.

Penyusunan RKPD dilaksanakan melalui tahapan penyusunan rancangan awal RKPD, rancangan RKPD, rancangan akhir RKPD dan penetapan RKPD. Pada orientasi proses, penyusunan RKPD menggunakan pendekatan teknokratik, partisipatif, politis, atas-bawah dan bawah-atas. Pendekatan teknokratik dilakukan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan Daerah. Pendekatan partisipatif dilakukan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Pendekatan politis dilaksanakan dengan menerjemahkan visi dan misi Kepala Daerah terpilih kedalam dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah yang dibahas bersama dengan DPRD. Sementara pendekatan atas-bawah dan bawah-atas merupakan hasil perencanaan yang diselaraskan dalam musyawarah pembangunan yang dilaksanakan mulai dari desa, kecamatan, daerah kabupaten, daerah provinsi, hingga nasional.

Pada orientasi substansi, penyusunan RKPD menggunakan pendekatan holistik-tematik, integratif dan spasial. Pendekatan holistik-tematik dilaksanakan dengan mempertimbangkan keseluruhan unsur/bagian/kegiatan pembangunan sebagai satu kesatuan faktor potensi, tantangan, hambatan dan/atau permasalahan yang saling berkaitan satu dengan lainnya. Pendekatan integratif dilaksanakan dengan menyatukan beberapa kewenangan ke dalam satu proses terpadu dan fokus yang jelas dalam upaya pencapaian tujuan pembangunan daerah. Sementara pendekatan spasial dilaksanakan dengan mempertimbangkan dimensi keruangan dalam perencanaan.

## **1.2. Dasar Hukum Penyusunan**

Dasar hukum penyusunan RKPD Kabupaten Morowali Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 Perubahan Undang-Undang Nomor
2. 51 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47)
  4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104.)
  5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
  6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
  7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
  9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6332);

11. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
13. Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 17/PMK.07/2021 Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan Dampaknya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 149)
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 No. 288,)
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781)

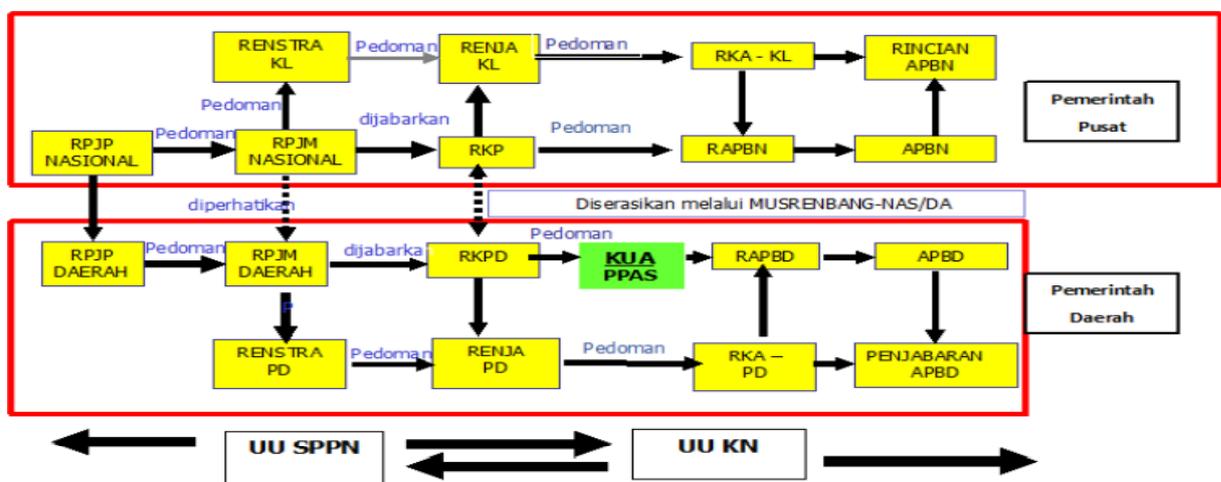
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023;
21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Kalasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklator Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Nomor 8 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Morowali 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Tahun 2008 Nomor 08, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Nomor 0136 );
23. Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Nomor 11 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Morowali (Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Tahun 2016 Nomor 11 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Nomor 0185);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Nomor 25 Tahun 2021 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (P-RPJMD) Kabupaten Morowali Periode 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Tahun 2021 Nomor 112,25);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Nomor 26 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Morowali Tahun Anggaran 2022:
26. Peraturan Bupati Morowali Nomor 46 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Morowali Tahun Anggaran 2022;
27. Peraturan Bupati Morowali Nomor 20 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022.

### **1.3. Hubungan Antar Dokumen**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah, Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang berangkat dan disusun dari sebuah proses penjabaran atas visi, misi dan program Kepala Daerah. RPJMD berperan sebagai acuan dasar dalam menentukan arah kebijakan dan strategi pembangunan daerah yang pada intinya memuat mengenai arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, dan program PD, lintas PD dan

program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. Adapun RKPD merupakan penjabaran dari Perubahan RPJMD yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Sebagai suatu produk perencanaan, RKPD tidak dapat dipisahkan dengan dokumen perencanaan dan penganggaran lainnya. RKPD ini terintegrasi dan merupakan satu kesatuan dengan dokumen perencanaan lainnya baik di tingkat nasional maupun daerah, terutama dengan dokumen perencanaan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah. Adapun dokumen perencanaan tersebut meliputi (1) RPJPD, (2) P-RPJMD, (3) P-Renstra-PD, (4) RKPD dan (5) Renja-PD. Semua dokumen perencanaan sebagaimana dimaksud di atas, dari sisi waktu mencakup 3 kerangka waktu, yaitu rencana jangka panjang (20 tahun), rencana jangka menengah (5 tahun) dan rencana jangka pendek (1 tahun). Secara substansi, keberadaan RKPD dengan dokumen perencanaan tersebut membentuk keterkaitan yang bersifat hierarkis, yaitu dokumen dengan jangka waktu yang lebih panjang menjadi rujukan bagi dokumen dengan jangka waktu yang lebih pendek. Secara diagramatis keterkaitan hubungan RKPD dengan dokumen perencanaan dan penganggaran lainnya tersebut dapat dilihat pada Gambar 1.2 berikut:



Sumber : diolah dari Permendagri No. 86 Tahun 2017

Gambar 1.2  
keterkaitan hubungan RKPD dengan dokumen perencanaan  
dan penganggaran lainnya

Mengacu pada Gambar 1.2 dapat diketahui bahwa secara rinci hubungan RKPD dengan dokumen perencanaan dan penganggaran lainnya, adalah sebagai berikut :

1. RKPD disusun dengan memperhatikan pokok-pokok arah kebijakan dalam RKP Nasional melalui mekanisme Musrenbang.
2. RKPD disusun dengan berpedoman pada RPJM Daerah yang didalamnya memuat visi, misi dan arah pembangunan daerah.
3. RKPD menjadi pedoman bagi penyusunan Renja PD yang disusun sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dari tiap Perangkat Daerah.
4. RKPD nantinya dijabarkan ke dalam RAPBD dengan berpedoman juga kepada Renja Perangkat Daerah.

Dalam penyusunan RKPD Tahun 2023 harus mengacu dan berpedoman pada dokumen RKP Nasional Tahun 2023, RKPD Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023, RPJPD Kabupaten Morowali Tahun 2005 - 2025, dan Perubahan RPJMD Kabupaten Morowali Tahun 2018 - 2023. Selain itu kedudukan RKPD Kabupaten tidak dapat dipisahkan dari dokumen perencanaan tata ruang wilayah Kedudukan RKPD Morowali.

#### **1.4. Maksud dan Tujuan**

Maksud penyusunan RKPD Kabupaten Morowali Tahun 2023 adalah untuk memberikan arah pembangunan tahunan Kabupaten Morowali dan sinergitas program dan kegiatan di daerah, baik yang dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Sulawesi Tengah, dan Kabupaten Morowali maupun yang dilaksanakan bersama- sama masyarakat.

Adapun tujuan penyusunan RKPD Tahun 2023 adalah sebagai :

1. Pedoman bagi Pemerintah Kabupaten Morowali dalam penyusunan KUA dan PPAS Tahun 2023;
2. Kerangka acuan dalam penyusunan RAPBD Tahun 2023;
3. Pedoman bagi Perangkat Daerah untuk menyusun Renja PD Tahun 2023; dan
4. Alat untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan.

## **1.5. Sistematika Dokumen RKPD**

RKPD Kabupaten Morowali Tahun 2023 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

### **BAB I PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar Belakang**

Mengemukakan pengertian ringkas tentang RKPD, proses penyusunan RKPD, kedudukan RKPD tahun rencana dalam periode dokumen P-RPJMD, keterkaitan antara dokumen RKPD dengan dokumen P-RPJMD, Perubahan Renstra Perangkat Daerah, Renja Perangkat Daerah serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

#### **1.1. Dasar Hukum Penyusunan**

Memberikan uraian ringkas tentang dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan RKPD, baik yang berskala nasional, maupun lokal.

#### **1.2. Hubungan Antar Dokumen**

Bagian ini menjelaskan hubungan RKPD dengan dokumen lain yang relevan beserta penjelasannya. Keterhubungan dengan dokumen lain, seperti: RPJMD Pemerintah Daerah Sulawesi Tengah dan P- RPJMD Pemerintah Kabupaten Morowali, RKP/program strategis nasional, dan RKPD Pemerintah Daerah Sulawesi Tengah untuk penyusunan RKPD Kabupaten Morowali.

#### **1.3. Maksud dan Tujuan**

Memberikan uraian ringkas tentang tujuan penyusunan dokumen RKPD bagi daerah yang bersangkutan dan sasaran penyusunan dokumen RKPD bagi daerah.

#### **1.4. Sistematika Dokumen RKPD**

Mengemukakan organisasi penyusunan dokumen RKPD terkait dengan pengaturan bab serta garis besar isi setiap bab di dalamnya.

### **BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH**

#### **2.1. Kondisi Umum Daerah**

Memberikan gambaran kondisi umum daerah meliputi aspek geografi, demografi, potensi sumber daya, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek daya saing daerah dan aspek pelayanan umum.

## **2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai tahun berjalan dan Realisasi RPJMD**

Mencakup telaahan terhadap hasil evaluasi status dan kedudukan pencapaian kinerja pembangunan daerah, berdasarkan rekapitulasi hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPD tahun lalu dan realisasi RPJMD yang bersumber dari telaahan hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan realisasi Renstra Perangkat Daerah oleh masing-masing Perangkat Daerah dan/atau dari laporan pertanggung jawaban APBD menurut tahun-tahun yang berkenaan.

## **2.3. Permasalahan Pembangunan Daerah**

Berisi uraian rumusan umum permasalahan pembangunan yang berhubungan dengan prioritas pembangunan daerah, dan permasalahan lainnya yang berhubungan dengan layanan dasar dan tugas fungsi Perangkat Daerah.

# **BAB III KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH**

## **3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah Mengemukakan tentang arahan nasional di bidang ekonomi yang bersumber dari dokumen RKP (Nasional), juga kebijakan dibidang ekonomi dalam dokumen RPJMD provinsi/kabupaten**

Arah kebijakan ekonomi daerah ditujukan untuk mengimplementasikan program dan mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah, serta permasalahan daerah, sebagai payung untuk perumusan prioritas program dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun rencana.

## **3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah**

Berisikan uraian mengenai kebijakan yang akan ditempuh oleh Pemerintah Daerah berkaitan dengan pendapatan daerah, pembiayaan daerah dan belanja daerah.

# **BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH**

## **1.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan**

Menjelaskan tentang hubungan visi/misi dan tujuan/sasaran pembangunan 5 (lima) tahunan yang diambil dari dokumen RPJMD Kabupaten Morowali.

## **1.2. Tema, Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2023**

Suatu prioritas pembangunan daerah tahun (n) pada dasarnya adalah gambaran prioritas pembangunan tahun rencana yang diambil dan dikaitkan dengan program pembangunan daerah (RPJMD) tahun rencana.

Berisi Tema, Prioritas, Sasaran, Indikator sasaran dan interkoneksi diantaranya.

Disajikan pula interkoneksi dengan RPJMD Sulawesi Tengah dan RPJMN.

## **BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH**

### **5.1. Rencana Program Prioritas**

Memuat Rencana Program beserta besaran pagu dana yang akan dilaksanakan guna mendukung prioritas dan sasaran pembangunan pada Tahun 2023, rekapitulasi belanja tidak langsung dan usulan belanja langsung di setiap Perangkat Daerah.

### **5.2. Telaahan Pokok-pokok Pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)**

Memuat saran dan pendapat berupa pokok-pokok pikiran DPRD kepada Bupati untuk Perencanaan Tahun 2023. Selanjutnya, Bupati memberikan telaahan terkait dengan arah kebijakan dan program yang akan dilaksanakan sebagai tindak lanjut pokok-pokok pikiran DPRD dimaksud.

### **5.3. Arah Pembangunan Kewilayah**

Berisi arahan pembangunan kewilayahan di Kabupaten Morowali yang mendukung pengembangan potensi ekonomi lokal Kabupaten Morowali.

### **5.4. Program dan Kegiatan Perangkat Daerah**

Berisi tabel rencana program dan kegiatan prioritas Perangkat Daerah Kabupaten Morowali Tahun 2023.

## **BAB VI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH**

Penetapan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah bertujuan untuk memberi panduan dalam pencapaian kinerja tahunan yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU).

## **BAB VII PENUTUP**



## BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

### 2.1. Kondisi Umum Daerah

#### 2.1.1. Aspek Geografi Dan Demografi

##### 2.1.1.1. Kondisi Geografi

##### 2.1.1.1.1. Luas dan Batas wilayah administrasi

Secara Adiministrasi Kabupaten Morowali memiliki batas-batas : - Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Morowali Utara; - Sebelah Selatan berbatasan dengan Provinsi Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Selatan; - Sebelah Barat berbatasan dengan Provinsi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tenggara; - Sebelah Timur merupakan Wilayah Perairan Teluk Tolo. Berdasarkan data BPS Kabupaten Morowali (2022), luas wilayah daratan Kabupaten Morowali mencapai 5.472,00 km<sup>2</sup> atau 8,85 persen dari total wilayah daratan Provinsi Sulawesi Tengah. Kecamatan Bahodopi merupakan kecamatan terluas 1.080,98 km<sup>2</sup> sedangkan kecamatan dengan luas wilayah terkecil adalah Kecamatan Menui Kepulauan yang hanya memiliki luas 223,63 km<sup>2</sup>. selengkapnya tertera pada Tabel 2.1 Berikut ini :

Tabel 2.1

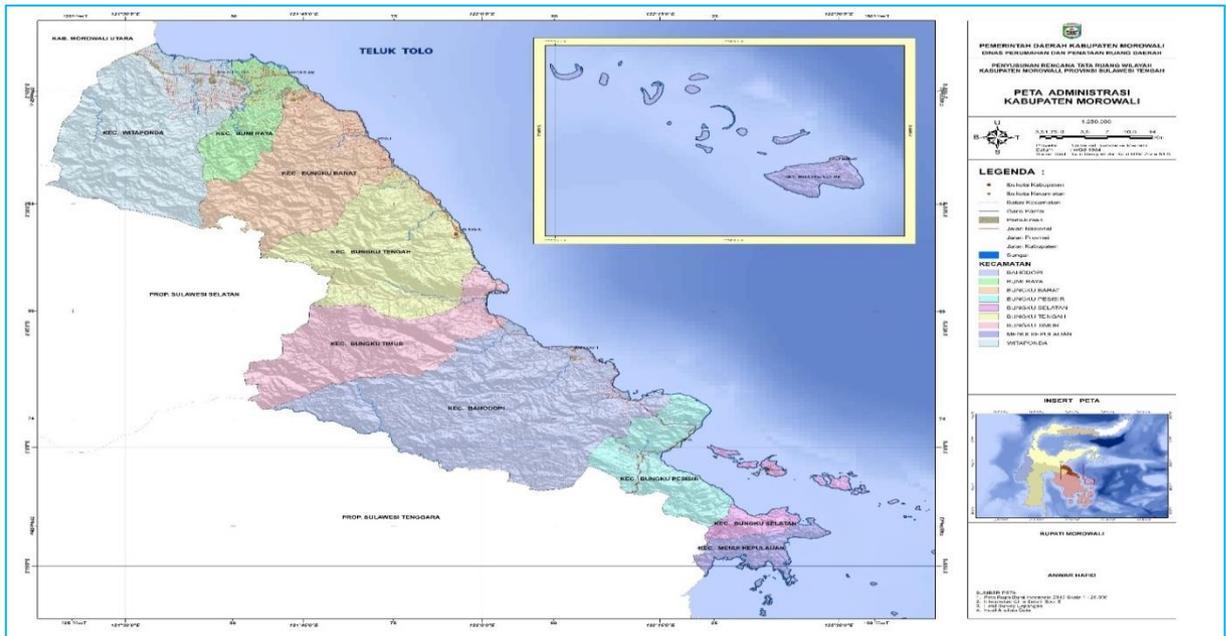
Luas Wilayah Daratan, Jumlah Desa dan Jarak dengan Ibu Kota Kabupaten Menurut Kecamatan di Kabupaten Morowali Tahun 2021

Kecamatan	Luas (Km <sup>2</sup> )	Persentase (%)	Jumlah Desa/Kel	Keterangan	
				Ibu Kota Kecamatan	Jarak (mil Laut/Km)
Menui Kepulauan	223,63	4,09	23/1	Ulunambo	99
Bungku Selatan	403,90	7,38	26	Kaleroang	64
Bahodopi	1.080,98	19,75	12	Bahodopi	41
Bungku Pesisir	867,29	15,85	10	Lafeu	75
Bungku Tengah	725,57	13,26	13/6	Marsaoleh	0
Bungku Timur	387,23	7,08	10	Kolono	18
Bungku Barat	758,93	13,87	10	Wosu	27
Bumi Raya	504,77	9,22	13	Bahonsuai	48
Witaponda	519,70	9,50	9	Laantula Jaya	61
<b>Luas Kabupaten</b>	<b>5.472,00</b>	<b>100,00</b>	<b>133</b>		

Sumber: Kabupaten Morowali Dalam Angka Tahun 2021

Jumlah Kecamatan Kabupaten Morowali sebanyak 9 kecamatan yang meliputi Kecamatan Wita Ponda, Kecamatan Bumi Raya, Kecamatan Bungku Barat, Kecamatan Bungku Tengah, Kecamatan Bungku Timur, Kecamatan Bahodopi,

Kecamatan Bungku Pesisir, Kecamatan Bungku Selatan dan Kecamatan Menui Kepulauan. Adapun luas wilayah, jumlah desa/kelurahan dan jarak setiap Kecamatan dengan ibukota kabupaten di Kabupaten Morowali, i selengkapnya tertera pada peta administratif Kabupaten Morowali pada Gambar 2.1.



Sumber: Kabupaten Morowali Dalam Angka Tahun 2021

Gambar 2.1  
Peta Administrasi

### 2.1.1.1.2. Letak Dan Kondisi Geografis

Kabupaten Morowali terletak antara 01° 31'12" Lintang Selatan dan 03°46' 48" Lintang Selatan serta antara 121°02' 24" Bujur Timur dan 123°15'36" Bujur Timur. Jika ditinjau dari posisi geografis Kabupaten Morowali wilayahnya membentang dari arah Tenggara ke Barat dan melebar ke Bagian Timur, sebagian besar (88,55 persen) berada di daratan Pulau Sulawesi, dan sebagian kecil lainnya (11,45 persen) merupakan pulau-pulau kecil terutama bagian paling selatan Kabupaten Morowali terdapat wilayah Kecamatan Menui Kepulauan yang terdiri dari beberapa pulau-pulau kecil. Berdasarkan letak dan kondisi geografis yang dimiliki Kabupaten Morowali tersebut, maka wilayah kabupaten ini dapat dipetakan menjadi dua wilayah yakni wilayah daratan utama Pulau Sulawesi dan wilayah kepulauan.

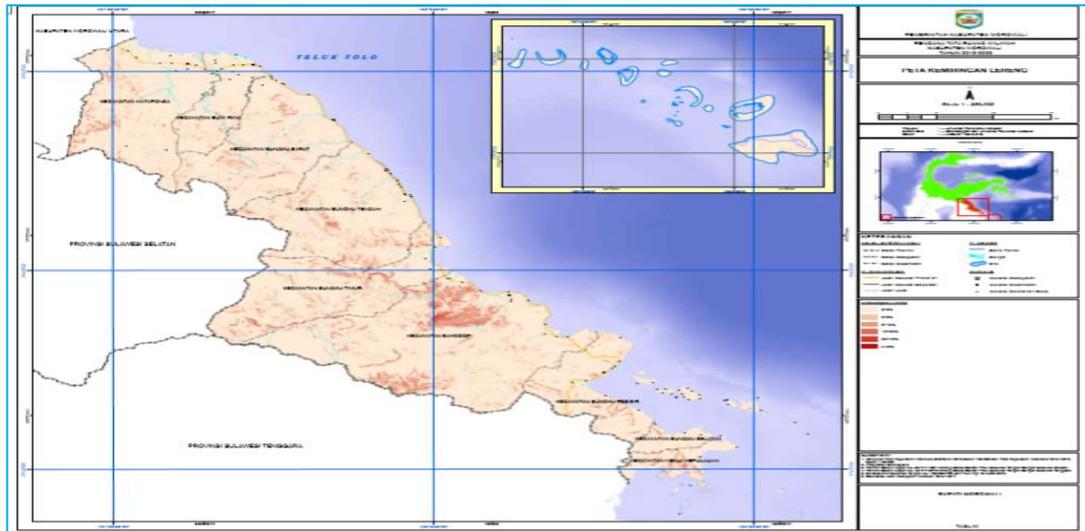
Selengkapnya dapat diuraikan sebagai berikut: 1) Wilayah daratan Pulau Sulawesi meliputi Kecamatan Wita Ponda, Bumiraya, Bungku Barat, Bungku Tengah,

Bungku Timur, Bahodopi, dan Bungku Pesisir merupakan kecamatan yang ada di sekitar wilayah pesisir dan non pesisir yang memiliki potensi sumberdaya alam dominan pada pertanian tanaman pangan, perkebunan, dan sumberdaya tambang mineral, serta sumberdaya alam pendukung seperti tanaman hortikultura, peternakan dan perikanan darat; 2) Wilayah kepulauan meliputi Kecamatan Menui Kepulauan dan Bungku Selatan merupakan daerah yang relatif didominasi oleh potensi sumberdaya laut, pesisir dan pulau-pulau kecil guna dimanfaatkan untuk pengembangan sektor perikanan, dan pariwisata bahari. Dari jumlah 126 (seratus dua puluh enam) Desa dan 7 (tujuh) Kelurahan tersebut terdapat 110 desa berada di wilayah pesisir dan pulau, serta 23 desa dikategorikan sebagai desa non pesisir (BPS Kabupaten Morowali, 2019). Di antara 110 desa pesisir dan pulau tersebut, terdapat 45 desa yang berada di wilayah pulau-pulau kecil dan 5 desa yang berada di wilayah pesisir, yang tersebar di dua kecamatan yakni Menui Kepulauan dan Bungku Selatan. Sisanya merupakan desa-desa pesisir yang berada di wilayah daratan utama Pulau Sulawesi dan tersebar di 7 (tujuh) kecamatan lainnya di Kabupaten Morowali. Dari 23 desa non pesisir, terdapat 5 desa yang berada pada kondisi topografi wilayah yang dikategorikan memiliki kelerengan, dan 18 desa non pesisir pada kondisi topografi datar, terutama desa-desa yang berada di Kecamatan Bumi Raya dan Kecamatan Wita Ponda.

#### **2.1.1.1.3. Topografi dan Kemiringan Lereng**

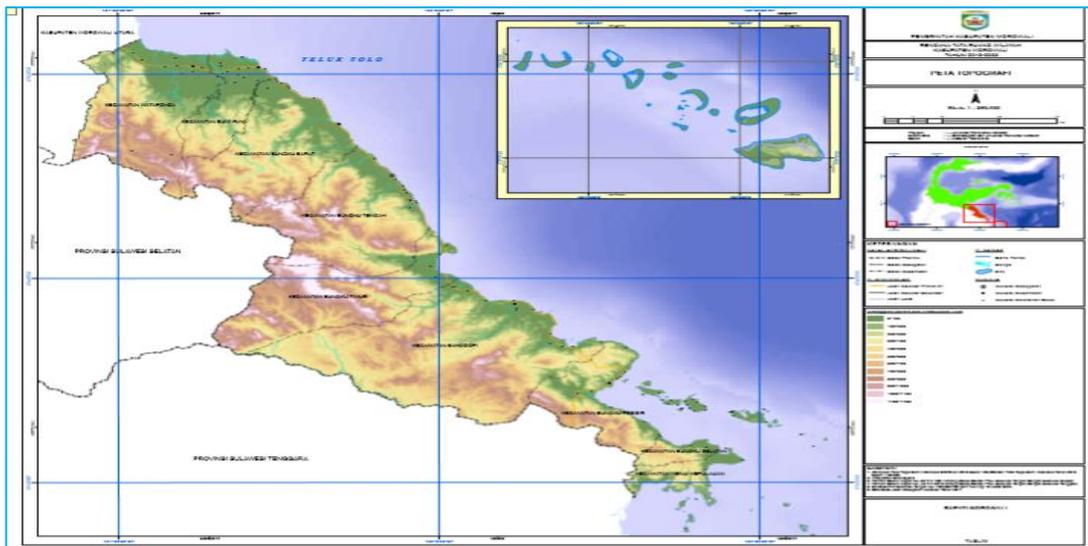
Wilayah Kabupaten Morowali umumnya terletak pada pesisir pantai di perairan Teluk Tolo, serta kawasan lainnya terletak di kawasan hutan dan lereng pegunungan. Kondisi geografis ini berpengaruh pada kemiringan dan ketinggian lahan dari permukaan laut (dpl). Kondisi topografi Kabupaten Morowali bervariasi, sebagian besar (52,74 persen) berada pada ketinggian antara 100-200 meter dpl, kemudian seluas 33,74 persen berada pada ketinggian antara 200-500 meter dpl, dan selebihnya seluas 13,52 persen berada pada ketinggian di bawah 100 meter dpl. Tingkat kelerengannya, yaitu seluas 52,30 persen kemiringan topografi lebih besar dari 40 persen (curam-sang at curam), 11,70 % luas wilayah dengan kemiringan di bawah 2 persen (datar agak landai), 12,56 % luas wilayah dengan kemiringan 3 – 15 % dan 23,30 % luas wilayah dengan kemiringan antara 16 - 40 % (miring agak curam) dan danau seluas 0,14 %. Namun demikian, berdasarkan elevasi (ketinggian

tempat) setiap ibukota kecamatan, dataran ibukota kecamatan di Kabupaten Morowali seluruhnya berada pada ketinggian 0 m - 100 m dpl (100 persen). Ini berarti bahwa umumnya, ibukota kecamatan di Kabupaten Morowali berada pada wilayah pesisir dan pulau kecil dengan kondisi topografi yang datar. selengkapnya tertera pada peta Topografi Kabupaten Morowali pada Gambar 2.2 Peta Topografi dan Gambar 2.3 Peta Kemiringan Lereng berikut ini :



Sumber: Kabupaten Morowali Dalam Angka Tahun 2021

Gambar 2.2  
Peta Kemiringan



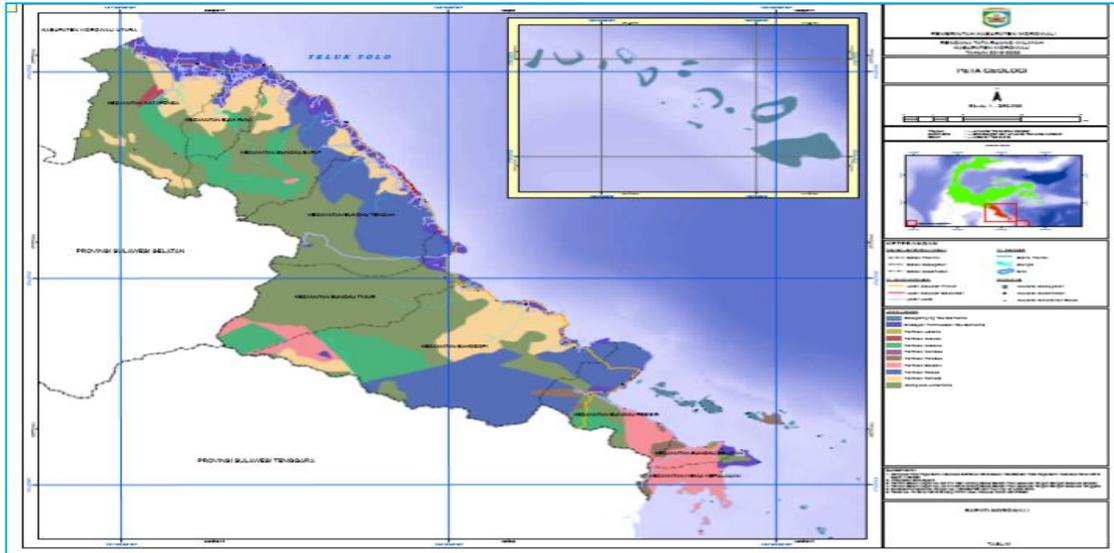
Sumber: Kabupaten Morowali Dalam Angka Tahun 2021

Gambar 2.3.  
Peta Topografi

#### **2.1.1.1.4. Geologi**

Secara geologis, wilayah Kabupaten Morowali tersusun atas beberapa jenis batuan yaitu: Batuan Mollase, Batuan kapur, Batuan skiss, Batuan basic, Batuan ultra basic, dan Batuan sedimen. Sedangkan dari sisi geomorfologinya, wilayah ini merupakan beberapa bentukan lahan (landform) yaitu: - Aluvial (A) tersebar di dataran rendah (0 - 3 persen), dijumpai di sekitar sungai besar; - Marine (M) tersebar di wilayah agak cekung di sepanjang pantai; - Vulkanik (V) tersebar pada relief yang bergelombang dan bergunung; - Tektonik dan struktural (T) tersebar pada relief yang bergelombang dan bergunung.

Berikut adalah uraian tentang kondisi aktual eksplorasi dan produksi bahan galian yang terdapat di daerah ini tersebut (Uno, 2010): di wilayah Sulawesi Tengah, tiga jenis bahan galian utama yang telah nampak survey dan produksinya adalah minyak, gas bumi dan nikel. Kegiatan eksplorasi minyak bumi dilakukan di wilayah perairan Morowali (Teluk Tomori) sedangkan Gas bumi terletak di Senoro (Sinorang) Kabupaten Banggai dan telah melakukan produksinya. Adapun nikel yang terdapat di wilayah Banggai dan Morowali (menerus sampai ke wilayah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tenggara) sampai saat ini masih dalam tahapan eksplorasi. Berdasarkan data statistik Tahun 2006, produksi minyak dan gas bumi telah berlangsung sejak Tahun 2005, dengan nilai produksi Tahun 2005 dan 2006 masing-masing sebesar Rp 63,2 milyar dan Rp 225,1 milyar, dengan laju pertumbuhan sebesar 158,79 persen. Dengan persentase kontribusi masih senilai 1,16 persen jika nilai ini digabungkan dengan produksi pertambangan bahan galian mineral yang berkontribusi sebesar 1,75 persen, maka total kontribusi sektor pertambangan adalah 2,91 persen, masih rendah dibandingkan dengan sektor pertanian yang merupakan penyumbang terbesar yaitu 44,80 persen. Kegiatan penambangan nikel sebetulnya berskala besar telah dan sedang dilakukan bahkan dengan melakukan perubahan fungsi lahan di mana sebagian lahan permukiman (umumnya transmigrasi) dan pertanian menjadi wilayah konsesi tambang sebagaimana terjadi di Kecamatan Petasia, Witaponda, Bumi Raya, Bungku Barat, Bungku Tengah, Bahodopi dan Bungku Selatan (Morowali). Selengkapnyanya tertera pada peta Geologi Kabupaten Morowali pada Gambar 2.4



Sumber: Kabupaten Morowali Dalam Angka Tahun 2021

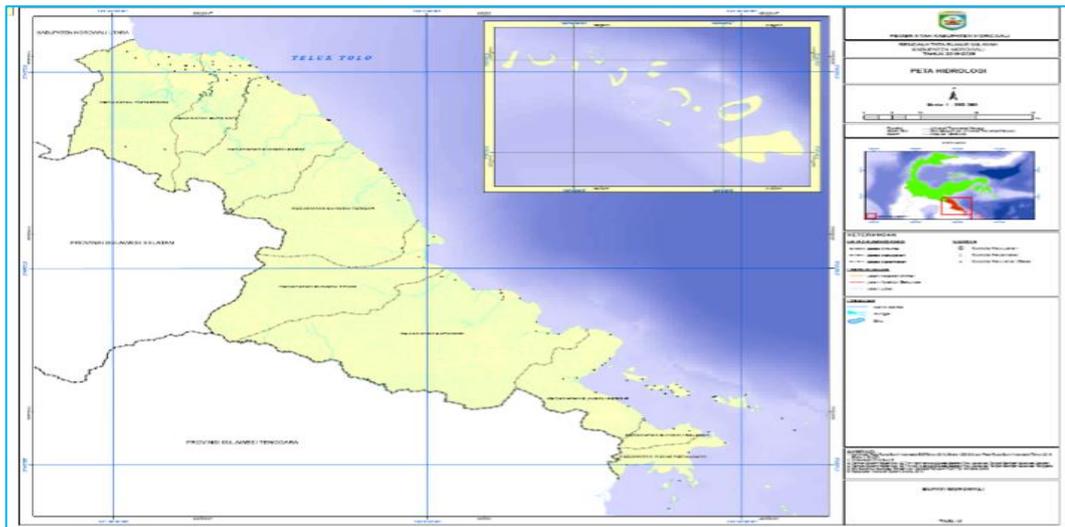
Gambar 2.4.  
Peta Geologi

#### 2.1.1.1.5. Hidrologi

Beberapa sumber air permukaan terutama sungai-sungai kecil tersebar dari Kecamatan Wita Ponda sampai Kecamatan Bungku Pesisir. Sumber air sungai tersebut umumnya dimanfaatkan sebagai sumber air untuk kebutuhan rumah tangga dan pertanian. Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum nomor: 11A/PRT/M/2006 tentang kriteria dan penetapan wilayah sungai, bahwa wilayah sungai yang ada di Kabupaten Morowali termaksud dalam wilayah sungai strategis nasional.

Adapun wilayah sungai tersebut adalah wilayah sungai Laa-Tambalako (1045,6Ha), yang meliputi daerah sungai laa (2.875,6 Ha), DAS Tirongan, DAS Salato, DAS Morowali, DAS Sumare (237,5Ha), DAS Bahombelu dan DAS Bahodopi (246,87Ha). Ketersediaan air permukaan dan air tanah juga dipengaruhi oleh kondisi hutan. Penggundulan hutan karena penebangan dan pertambangan nikel, serta konversi hutan menjadi perkebunan kelapa sawit di kemudian hari dapat memperburuk masalah pengelolaan daerah tangkapan air. Daerah yang gundul dan tidak ditanami kembali sangat rentan terhadap erosi. Hujan deras menggerakkan sejumlah besar sedimen ke arah daerah tangkapan air, sehingga memperburuk banjir dan mempengaruhi bangunan dan infrastruktur secara signifikan. Peningkatan sedimentasi juga telah menyebabkan terhadap hilangnya tanaman mangrove di

pantai. Selengkapnya dijelaskan pada peta Hidrologi Kabupaten Morowali pada Gambar 2.5

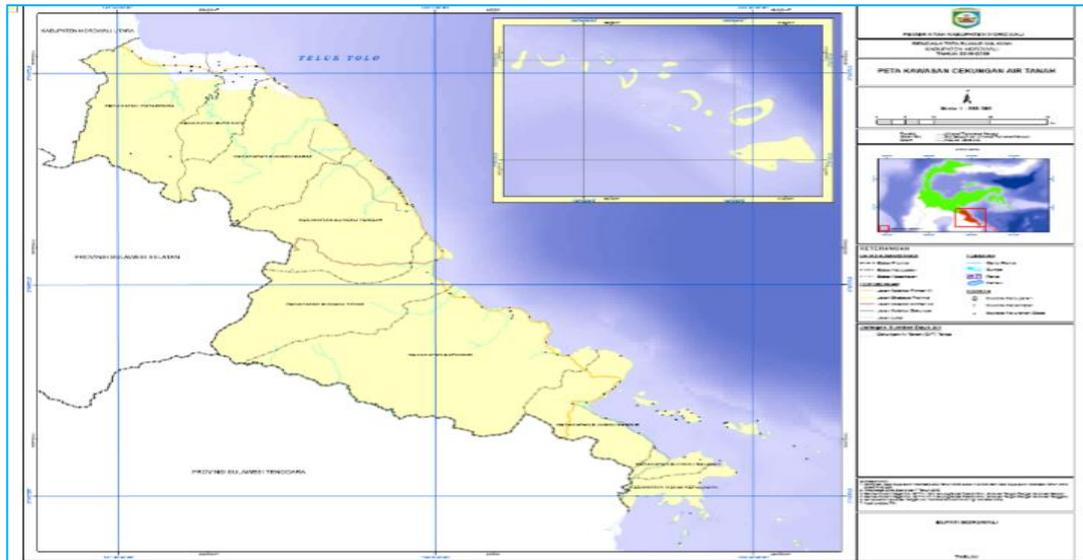


Sumber: Kabupaten Morowali Dalam Angka Tahun 2021

Gambar 2.5.  
Peta Hidrologi

Berdasarkan peta potensi penyebaran hidrologi yang merujuk kepada peta Geologi Regional menunjukkan bahwa sekitar 40 persen wilayah Kabupaten Morowali termasuk dalam zona akuifer produktif dengan penyebaran luas artinya memiliki formasi batuan dengan potensi air tanah yang baik dan dapat dimanfaatkan untuk kepentingan rumah tangga maupun industri. Sisanya 60 persen lagi termasuk dalam zona akuifer dengan produktivitas kecil yang berarti memiliki formasi batuan dengan potensi air tanah rendah tetapi dalam pemanfaatannya dapat diusahakan melalui teknologi geolistrik dan pemboran dengan diameter besar

Terdapat sejumlah sumber air kecil dan besar, serta cadangan air tanah yang cukup besar di Kabupaten Morowali, karena menjadi daerah resapan air (catchment area). Beberapa potensi air tanah yang dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan air minum dalam bentuk air kemasan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada peta Cekungan Air Tanah Kabupaten Morowali pada Gambar 2.6



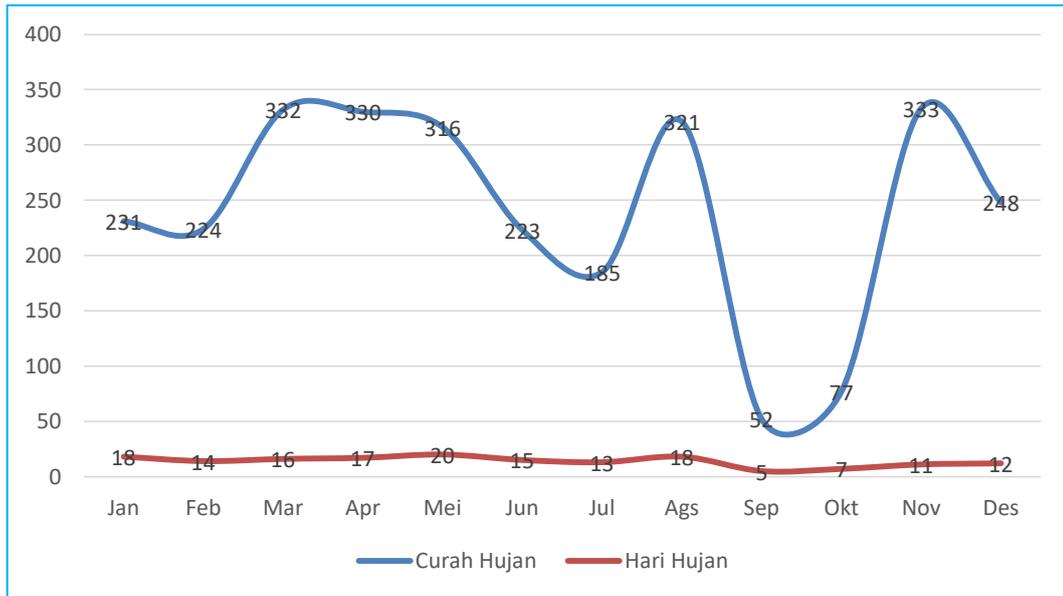
Sumber: Kabupaten Morowali Dalam Angka Tahun 2021

Gambar 2.6  
Peta Cekungan Air Tanah

#### 2.1.1.1.6. Klimatologi

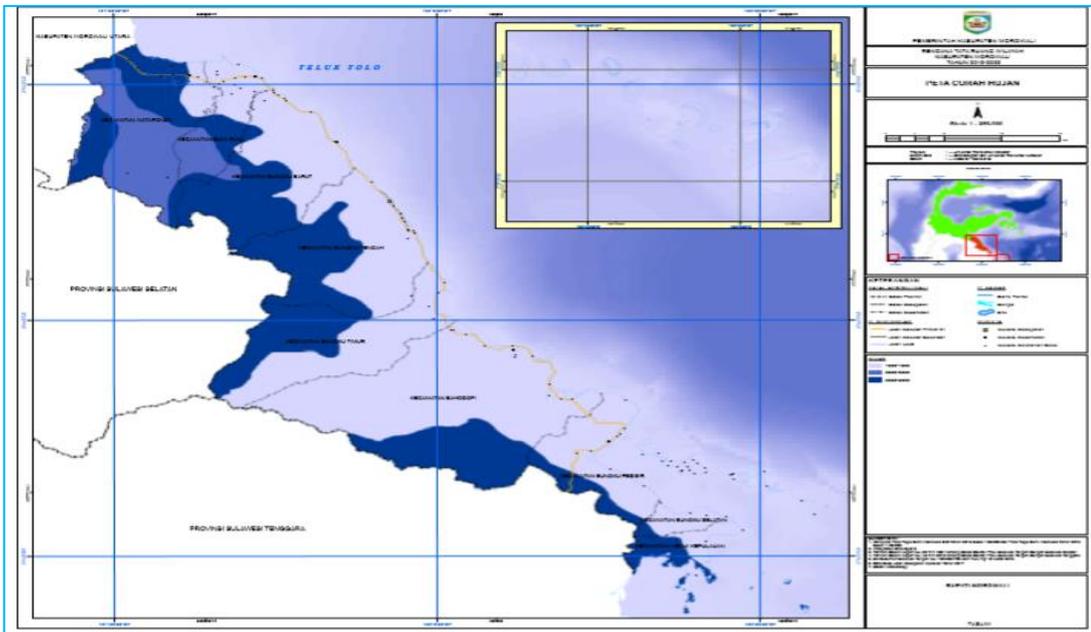
Kabupaten Morowali merupakan daerah tropis yang memiliki dua musim yaitu musim kemarau dan musim hujan sehingga wilayah tergolong iklim A atau sangat basah. Karena itu, wajar jika daerah ini memiliki sungai yang cukup banyak sebagai sumber daya air yang potensial di dimanfaatkan untuk pengairan.

Komponen yang memiliki peranan penting dalam mempengaruhi aliran air permukaan (run off) pada lokasi kegiatan antara lain curah hujan, bentang lahan, jenis tanah dan vegetasi sebagai tutupan lahan. Curah hujan sebagai input utama dalam besarnya aliran air permukaan di daerah tangkapan air (catchment area), daerah tangkapan air merupakan fungsi dari vegetasi yang dapat menyimpan air hujan yang turun pada daerah tersebut. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Morowali, Curah hujan tertinggi pada bulan November dengan Curah Hujan 333 mm<sup>3</sup> dengan selama 11 hari hujan, Selanjutnya diikuti dengan Bulan Maret dengan Curah Hujan 332 mm<sup>3</sup> selama 16 hari hujan, pada Bulan Mei masa paling lama hari hujan. Sedangkan, Curah Hujan paling sedikit yaitu bulan September dengan Curah Hujan 52 mm<sup>3</sup> selama 5 hari hujan, disusul pada bulan Oktober dengan Curah Hujan 77 mm<sup>3</sup> selama 7 hari hujan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Gambar 2.7 dan gambar 2.8 peta Klimatologi Kabupaten Morowali



Sumber: Kabupaten Morowali dalam Angka, Tahun 2019

Gambar 2.7  
Kondisi Iklim Morowali 2018



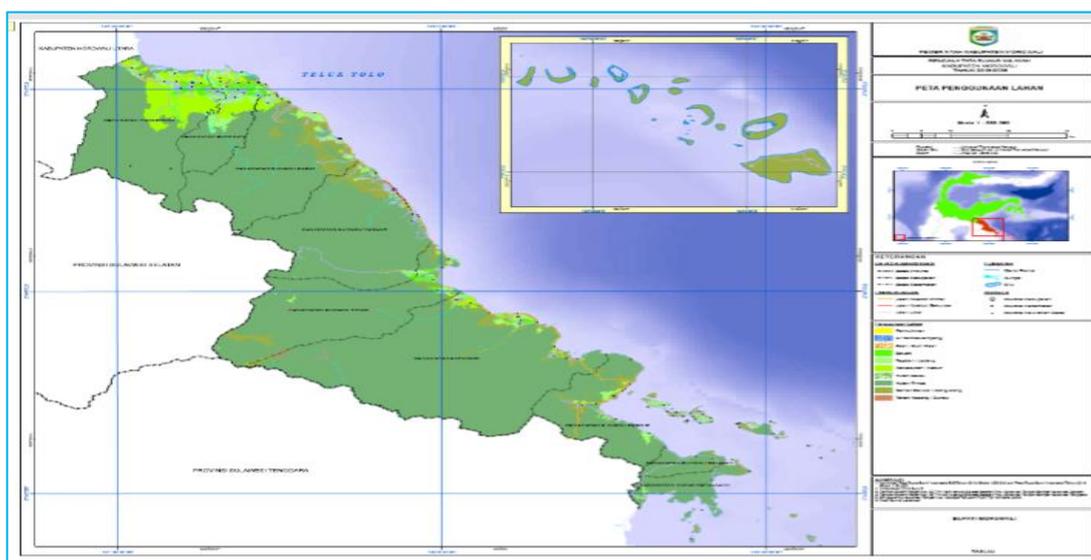
Sumber: Kabupaten Morowali Dalam Angka Tahun 2021

Gambar 2.8  
Peta Curah Hujan

### 2.1.1.1.7. Penggunaan Lahan

Penggunaan Lahan di Kabupaten Morowali terdiri dari lahan kering dan lahan basah. Lahan basah sebagian besar digunakan untuk sawah, sementara lahan

kering digunakan untuk lahan pertanian, perkebunan, kehutanan, industri, perumahan dan bangunan lainnya. Penggunaan Lahan di Kabupaten Morowali didominasi oleh lahan Kehutanan seluas kemudian Lahan Pertanian dan Perkebunan. Selengkapnya dijelaskan pada tabel 2.3 dan peta Penggunaan Lahan Kabupaten Morowali pada Gambar 2.9.



Sumber: Kabupaten Morowali Dalam Angka Tahun 2021

Gambar 2.9  
Peta Penggunaan Lahan

#### 2.1.1.1.8. Peruntukkan Lahan

Peruntukkan Lahan di Kabupaten Morowali diuraikan pada Rencana Pola Ruang Kota mencakup rencana pengembangan kawasan lindung dan kawasan budidaya. Dengan memperhatikan ketentuan penyusunan pola ruang, kebijakan pola ruang nasional dan provinsi, kebijakan pembangunan daerah, kondisi objektif wilayah, daya tampung dan kebutuhan ruang untuk masa mendatang, maka dapat dirumuskan rencana pola ruang untuk Kabupaten Morowali yang terdiri dari kawasan lindung dan kawasan budidaya.

##### 2.1.1.1.8.1. Kawasan Lindung

Kawasan Lindung adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumberdaya alam, sumberdaya buatan, dan nilai sejarah serta budaya bangsa guna kepentingan

pembangunan berkelanjutan. Luas kawasan lindung tersebar di wilayah Kabupaten Morowali seluas ± 99.576,41 ha yang terdiri atas hutan lindung, kawasan lindung lainnya, sempadan sungai, sempadan pantai berdasarkan RTRW Kabupaten Morowali Tahun 2019-2039 .

Kawasan lindung terdapat Kecamatan Witaponda, Kecamatan Bumi Raya, Kecamatan Bungku Barat, Kecamatan Bungku Tengah, Kecamatan Bungku Timur, Kecamatan Bungku Pesisir, Kecamatan Bahodopi dan Kecamatan Menui Kepulauan.

Kawasan konservasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil terdapat di Kecamatan Bungku Selatan dan Kecamatan Menui Kepulauan dan taman bawah laut berupa terumbu karang terdapat di Kecamatan Bungku Selatan dan Kecamatan Menui Kepulauan.

Kawasan cagar alam geologi, berupa kawasan keunikan bentang alam karst yang terdapat di kawasan hutan produksi terbatas di Kecamatan Menui Kepulauan.

Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap air tanah kawasan imbuhan Cekungan air tanah pada CAT Tonoa di Kecamatan Witaponda, Kecamatan Bumi Raya, dan Kecamatan Bungku Barat dan kawasan sekitar mata air terdapat di setiap kecamatan dengan garis sempadan mata air ditentukan mengelilingi mata air paling sedikit berjarak 200 (dua ratus) meter dari pusat mata air.

Kawasan cagar budaya terdiri atas : a. kawasan cagar budaya Masjid Tua Bungku terdapat di Kecamatan Bungku Tengah; b. kawasan cagar budaya Benteng Fafontofure di Kecamatan Bungku Tengah; dan c. Kawasan cagar budaya Goa di Kecamatan Bungku Barat dan Kecamatan Menui Kepulauan.

#### **2.1.1.1.8.2. Kawasan Budidaya**

Kawasan Budidaya adalah kawasan yang diperuntukan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumberdaya alam, sumberdaya manusia dan sumberdaya buatan. Adapun rincian luas kawasan budidaya yang tersebar dalam wilayah Kabupaten Morowali berdasarkan RTRW Kabupaten Morowali Tahun 2019-2039 adalah sebagai berikut:

- a. Kawasan hutan produksi terbatas (HPT) seluas 120.665,27 hektar yang terdapat di Kecamatan Bungku Tengah, Kecamatan Bungku Timur, Kecamatan Bahodopi,

Kecamatan Bungku Pesisir, Kecamatan Bungku Selatan, dan Kecamatan Menui Kepulauan;

- b. Kawasan hutan produksi tetap (HP) seluas 28.280,57 hektar yang terdapat di Kecamatan Witaponda, Kecamatan Bumi Raya, Kecamatan Bungku Barat, Kecamatan Bungku Tengah, Kecamatan Bungku Pesisir, Kecamatan Bungku Selatan, Kecamatan Bahodopi dan Kecamatan Menui Kepulauan;
- c. Kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi (HPK) seluas 40.207,91 hektar yang terdapat di Kecamatan Bumi Raya, Kecamatan Bungku Barat, Kecamatan Bungku Tengah, Kecamatan Bungku Timur, Kecamatan Bahodopi, Kecamatan Bungku Pesisir dan Kecamatan Menui Kepulauan;
- d. Kawasan pertanian tanaman pangan terdapat di setiap kecamatan;
- e. Kawasan hortikultura terdiri atas tanaman sayur, tanaman buah-buahan dan tanaman biofarma tersebar di kawasan pertanian tanaman pangan, perkebunan dan permukiman perdesaan disetiap Kecamatan;
- f. Kawasan perkebunan terdiri atas kawasan perkebunan rakyat dengan komoditi tanaman perkebunan campuran yang terdapat di setiap kecamatan;
- g. Kawasan peternakan terdiri atas : (a). kawasan integrasi tanaman dan ternak meliputi semua komoditi ternak terdapat di setiap kecamatan; (b). rencana lahan penggembalaan ternak di Kecamatan Witaponda dan Kecamatan Bahodopi; (c). rencana sentra peternakan rakyat di Kecamatan Bungku Timur dan Kecamatan Bungku Barat; (d). rencana pengembangan kawasan Budidaya Ternak terdapat di setiap Kecamatan; (e). rumah Pemotongan Hewan terdapat di kecamatan Wita Ponda, Kecamatan Bumi Raya, Kecamatan Bungku Barat, Kecamatan Bungku Tengah dan Kecamatan Bahodopi, (f). rencana Rumah Pemotongan Hewan di Kecamatan Bungku Pesisir; (g). pasar dan terminal hewan terdapat di Kecamatan Bungku Barat; dan (h). rencana pasar dan terminal hewan di Kecamatan Bumi Raya dan Kecamatan Bungku Pesisir;
- h. Kawasan perikanan tangkap (a). seluruh perairan Kabupaten Morowali yang memiliki potensi hasil perikanan tangkap; (b). Kawasan Minapolitan di Kecamatan Bungku Selatan; dan (c). rencana pengembangan Kawasan Minapolitan Kepulauan Menui dan sekitarnya di Kecamatan Menui Kepulauan, Kawasan Minapolitan Moahino dan sekitarnya di Kecamatan Witaponda, dan Kawasan Minapolitan Umbele dan sekitarnya di Kecamatan Bumi Raya;

- i. Kawasan perikanan budidaya laut terdiri atas: (a). perikanan budidaya keramba, komoditi ikan kerapu, ikan kuwe, dan lobster di Kecamatan Bumi Raya, Kecamatan Bungku Timur, Kecamatan Bahodopi, Kecamatan Bungku Selatan, dan Kecamatan Menui Kepulauan; (b). rencana pengembangan perikanan budidaya keramba di Kecamatan Menui Kepulauan, Kecamatan Bungku Selatan dan Kecamatan Bungku Pesisir; dan (c). perikanan budidaya rumput laut di Kecamatan Witaponda, Kecamatan Bumi Raya, Kecamatan Bungku Selatan, dan Kecamatan Menui Kepulauan;
- j. Kawasan budidaya perikanan air Payau terdiri atas: (a). tambak udang, ikan bandeng dan rumput laut terdapat di Kecamatan Bungku Pesisir, Kecamatan Bungku Timur, Kecamatan Bungku Tengah, Kecamatan Bungku Barat, Kecamatan Bumi Raya dan Kecamatan Witaponda; dan (b). kawasan budidaya perikanan tambak yang berada dalam outline kawasan hutan lindung (HL) seluas  $\pm 26$  (dua puluh enam) hektar di Kecamatan Bahodopi;
- k. Kawasan budidaya perikanan kolam air tawar berupa kolam air tawar dengan komoditi ikan lele, ikan nila dan ikan mas, ikan patin terdapat di Kecamatan Witaponda, Kecamatan Bumi Raya Kecamatan Bungku Barat Kecamatan Bungku Tengah, Kecamatan Bungku Timur, Kecamatan Bahodopi;
- l. Kawasan Pertambangan Mineral Logam meliputi: (a). pertambangan mineral logam terdapat di Kecamatan Bungku Timur, Kecamatan Bahodopi, dan Kecamatan Bungku Pesisir, Kecamatan Menui Kepulauan, Kecamatan Wita Ponda, Kecamatan Bungku Barat; (b). pertambangan mineral logam yang berada dalam outline kawasan hutan produksi terbatas seluas 6.451,95 (enam ribu empat ratus lima puluh satu koma sembilan lima) hektar di Kecamatan Bungku Timur, Kecamatan Bahodopi, dan Bungku Pesisir; (c). pertambangan mineral logam yang berada dalam outline kawasan hutan produksi konversi seluas 423,57 (empat ratus dua puluh tiga koma lima tujuh) hektar di Kecamatan Bungku Timur, Kecamatan Bahodopi, dan Bungku Pesisir; (d). rencana WUP mineral logam terdapat di setiap kecamatan; dan (e). Wilayah usaha pertambangan khusus (WUPK) yang terdapat di Kecamatan Bungku Timur dan Kecamatan Bahodopi;
- m. Kawasan Pertambangan bukan Logam meliputi rencana WUP mineral bukan logam yang terdapat di Kecamatan Witaponda, Kecamatan Bumi Raya,

- Kecamatan Bungku Barat, Kecamatan Bungku Tengah, Kecamatan Bungku Timur, Kecamatan Bahodopi, dan Kecamatan Menui Kepulauan;
- n. Kawasan Pertambangan Batuan meliputi: (a). pertambangan batuan terdapat di Wita Ponda, Kecamatan Bungku Barat, Kecamatan Bungku Tengah, Kecamatan Bungku Timur, Kecamatan Bahodopi, Kecamatan Bungku Pesisir, dan Kecamatan Bungku Selatan; dan (b). Wilayah pertambangan rakyat (WPR) direncanakan pada lokasi dilakukannya kegiatan usaha pertambangan rakyat yang memenuhi kriteria dalam ketentuan peraturan perundangundangan, dengan komoditi tambang rakyat terdiri atas Pasir batu di setiap kecamatan, Batu kali disetiap kecamatan, Batu gunung disetiap kecamatan, Tanah liat di Kecamatan Witaponda, Kecamatan Bumi Raya dan Kecamatan Bungku Tengah;
  - o. Kawasan industri besar terdiri atas: (a) Kawasan Industri Logam; (b) Kawasan Industri perkebunan; (c) Kawasan Industri (KI) Morowali terdapat di Kecamatan Bahodopi; (d) kawasan Industri (KI) Morowali yang berada dalam outline kawasan hutan lindung (HL) seluas 30.39 hektar di Kecamatan Bahodopi, dan kawasan hutan produksi konversi (HPK) seluas 6,35 hektar; (e) pengembangan kawasan industri pengolahan hasil tambang terdapat di Kecamatan Bungku Timur dan Bungku Pesisir; dan (f) rencana industri pengolahan hasil tambang di Kecamatan Bungku Barat dan Kecamatan Menui Kepulauan;
  - p. Kawasan sentra industri kecil dan menengah merupakan pengembangan sentra industri kecil dan industri menengah dengan kegiatan industri terdiri atas: (a). industri pengolahan hasil pertanian pangan berupa Sentra Industri Kecil Menengah (Sikim) Pangan terdapat di Kecamatan Bungku Barat; dan (b). industri pengolahan hasil perkebunan terdiri atas: (a). industri pengolahan kelapa sawit terdapat di Kecamatan Witaponda; dan (b). rencana industri pengolahan kelapa sawit di Kecamatan Bungku Barat dan Kecamatan Bumi Raya;
  - q. Industri pengolahan hasil hutan terdiri atas : (a). industri meubel kayu terdapat di Kecamatan Bungku Tengah; dan (b). rencana industri meubel rotan di Kecamatan Bungku Barat dan Kecamatan Bungku Tengah;
  - r. Industri pengolahan hasil perikanan terdiri atas : (a). Industri pengolahan ikan di Kecamatan Menui Kepulauan, Kecamatan Bungku Selatan, Kecamatan Bungku Pesisir, Kecamatan Bungku Tengah, Kecamatan Bungku Barat, dan Kecamatan Witaponda;

- s. Kawasan pariwisata alam pegunungan/ hutan terdiri atas: (a). Wisata Goa terdiri atas: 1). Goa Petakoa di Desa Solonsa Kecamatan Wita Ponda; 2). Goa Fafompogaro, Goa Kotaeya, Goa Tengkorak di Kecamatan Bungku Barat; 3). Goa Kumapa, Goa Tambeanpana Api, Goa Fumbunsanua di Kecamatan Bungku Tengah; 4). Goa Berlian, Goa Alo, Kecamatan Menui Kepulauan; (b). Wisata Puncak/Pegunungan terdiri atas: 1). Puncak Fafobaho di Kecamatan Bungku Tengah; 2). Puncak Mateantina, Puncak Unsongi di Kecamatan Bungku Timur; dan 3). Puncak Kayangan, Puncak Narita Kecamatan Menui Kepulauan. (c). Wisata air terjun terdiri atas: 1). Kecamatan Bungku Barat Air Terjun Batu Kapal; 2). Kecamatan Bungku Tengah: Air Terjun Mempoeno, Air Terjun Sampa laa, Air Terjun Veranomata, Permandian Tompaika, Air Terjun Vera Inense, Air Terjun Perawan; 3). Kecamatan Bungku Timur Permandian Lofi; 4). Kecamatan Bahodopi, Air Terjun Bahoumumpa; 5). Kecamatan Bungku Pesisir Air terjun Buleleng; dan 6). Kecamatan Menui Kepulauan Air Terjun Sombori, (d). Penangkaran Rusa dan Penangkaran Burung Maleo di Kecamatan Bungku Barat;
- t. Kawasan pariwisata maritim/bahari terdiri atas: (a). wisata alam Bentang Laut meliputi: 1). Ekowisata Tracking Mangrove di Kecamatan Bungku Tengah; dan 2). Ekowisata Mangrove Nambo–Laroue di Kecamatan Bungku Timur. (b). Wisata alam pantai/pesisir dan Pulau-pulau kecil meliputi: 1). Pantai pasir Putih Pebotoa, Pantai Lambelu di Kecamatan Bumi Raya; 2). Pantai Raha-Raha ada rasa, Pantai Raha-raha ada Bio di Kecamatan Bungku Barat; 3). Pantai Tanjung Karang, Pantai Tapuno Bahomante, Pantai Tapuno Bente ,Pantai Tudua Di Kecamatan Bungku Tengah; 4). Pantai Pasir Besi, Pantai Puluti, Pulau Pasir Hitam di Kecamatan Bungku Timur; 5). Pulau Langala, Pulau Kanda Pute, Pantai Kea kea di Kecamatan Bahodopi; 6). Pantai Panjang, Pasir Putih Tangofa di Kecamatan Bungku Pesisir; 7). Pulau Dua Laut, Pulau Umbeleyang kecamatan Bungku Selatan; dan 8). Pulau Sombori, Pasir Putih Koi-koila, Pulau Koko, Rumah Nenek, Danau Air Asin, Konservasi perairan pulau tiga Kecamatan Menui Kepulauan; (c). Wisata alam bawah laut meliputi perairan di sekitar Pantai Kecamatan Menui Kepulauan;
- u. Kawasan pariwisata sejarah dan budaya terdiri atas: (a). Situs Istana Raja Bungku di kecamatan bungku tengah; (b). Makam Raja Bungku di kecamatan

- Bungku Tengah; (c). Masjid Tua Bungku, Masjid Agung dan Islamic center di kecamatan Bungku Tengah; dan (d). Benteng Fafontofure di Kecamatan Bungku Tengah;
- v. Kawasan pariwisata buatan antara lain: (a). Taman Kota Fonuasingko, Alun-alun Rumah Jabatan Bupati, Taman Sangiang Kinambuka di Kecamatan Bungku tengah; dan (b). Permandian Bahoruru di Kecamatan Bungku Tengah;
  - w. Rencana kawasan potensi parawisata lainnya di setiap kecamatan;
  - x. Kawasan permukiman terdiri atas: (a). kawasan permukiman perkotaan terdiri atas : 1). kawasan perkotaan bungku Tengah; 2). permukiman kawasan Kota Terpadu Mandiri (KTM) / Kawasan Pembangunan Baru (KPB) Bungku di Kecamatan Bungku Tengah; 3). permukiman perkotaan di Kecamatan Bahodopi; 4). rencana permukiman perkotaan pada Kawasan Perkotaan di Kecamatan Bungku Pesisir; dan 5). rencana kawasan Kota Terpadu Mandiri (KTM) / Kawasan Pembangunan Baru (KPB) Bungku di Kecamatan Bungku Barat, Kecamatan Bumi Raya dan Kecamatan Witaponda; (b). kawasan permukiman perdesaan terdiri atas: 1). permukiman perdesaan terdapat di setiap Kecamatan; 2). kawasan permukiman Transmigrasi Terdapat di Kecamatan Bungku Barat, Kecamatan Bungku Tengah dan Kecamatan Bungku Pesisir; 3). rencana kawasan permukiman Transmigrasi Nelayan di kecamatan Bungku Selatan dan Kecamatan Menui Kepulauan; dan 4). rencana pengembangan kawasan permukiman Transmigrasi di kecamatan Bahodopi, kecamatan Bungku Pesisir, kecamatan Bungku Barat, Kecamatan Bumi Raya dan Kecamatan Wita Ponda.

#### **2.1.1.1.9. Potensi Pengembangan Wilayah Perkawasan**

##### **2.1.1.1.9.1. Pertanian**

Sektor pertanian merupakan sektor memegang peranan penting dan strategis dalam upaya peningkatan taraf hidup masyarakat Kabupaten Morowali. Hal tersebut ditunjukkan, sektor ini memegang peranan penting, lebih dari 50 persen tiap tahunnya dalam perekonomian di wilayah ini. Keberhasilan program pembangunan sektor pertanian menjadi faktor penting terwujudnya Ketahanan Pangan Nasional. Sektor pertanian terdiri dari beberapa sub sektor, yaitu Subsektor Hortikultura, Subsektor Perkebunan, Subsektor Peternakan, Subsektor Perikanan dan Subsektor Kehutanan. Sebagai gambaran dan dasar evaluasi serta perencanaan

pengembangan selanjutnya, berikut ini disajikan keadaan sub sektor pertanian di Kabupaten Morowali.

## 1. Pertanian Tanaman Pangan

Potensi tanaman pangan di Kabupaten Morowali meliputi tanaman padi (sawah dan ladang), jagung, ubi kayu, ubi jalar, kacang kedelai, kacang tanah dan kacang hijau. Lahan untuk tanaman padi umumnya beririgasi, dan juga terdapat lahan non irigasi (sawah tadah hujan dan padi ladang). Luas lahan padi (Ha) menurut jenis irigasi dan jenis padi pada setiap kecamatan di Kabupaten Morowali disajikan pada Tabel 2.2.

Tabel 2.2

Luas lahan padi (Ha) menurut Jenis Irigasi dan Jenis Padi pada Setiap Kecamatan di Kabupaten Morowali Tahun 2021

No.	Kecamatan	Luas Lahan 2020 (Ha)			Luas Tanam 2021 (Ha)		
		Irigasi	Non Irigasi	Total Luas Sawah	Sawah	Ladang	Total
1	Menui Kepulauan	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Bungku Selatan	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Bahodopi	25,3	0,0	25,3	11,40	12,00	23,40
4	Bungku Pesisir	53,9	10,0	63,9	54,80	0	54,80
5	Bungku Tengah	37,5	10,0	47,5	12,70	0	12,70
6	Bungku Timur	432,6	30,0	462,6	464,60	0	464,60
7	Bungku Barat	438,0	300,0	738,0	751,70	17	768,70
8	Bumi Raya	1.847,8	20,0	1.867,8	3.617,70	24	3.641,70
9	Witaponda	2.039,0	17,0	2.056,0	3.982,30	26	4.008,30
	<b>Total</b>	<b>4.874,1</b>	<b>387,0</b>	<b>5.261,1</b>	<b>8.895,20</b>	<b>79,00</b>	<b>8.974,20</b>

Sumber Data : Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kab. Morowali Tahun 2022

Tabel 2.2 menunjukkan bahwa potensi sumberdaya lahan untuk tanaman padi berada di Kecamatan Wita Ponda, Bumi Raya dan Bungku Barat. Dua kecamatan pertama memiliki lahan irigasi mencapai 2.000 Ha. Berdasarkan kondisi geografis, ketiga kecamatan dengan luas lahan padi terbesar memiliki topografi yang datar.

Potensi usaha tani untuk padi ladang hanya terdapat di dua kecamatan yakni Bungku Barat dan Bahodopi. Potensi lahan untuk tanaman pangan lain selain untuk tanaman padi juga terdapat di kecamatan lain dengan kondisi topografi landai sampai bergunung. Berdasarkan data BPS (2019), potensi lahan tegalan di Kabupaten Morowali seluas 4.476 Ha (terluas di Bungku Pesisir 1.549 Ha), lahan huma/ladang mencapai 1.900 Ha (terluas di Bungku Barat (871 Ha) dan tidak digunakan seluas 27.875 Ha (terluas di Bungku Barat 26.756 Ha). Luas panen

tanaman padi di Kabupaten Morowali Tahun 2021 mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2019, 2020. Namun luas panen komoditas palawija seperti mengalami penurunan dari tahun sebelumnya. Sementara untuk komoditas tanaman palawija seperti kacang tanah luas panennya mengalami peningkatan pada Tahun 2021 dibanding tahun sebelumnya. Data perkembangan luas panen tanaman pangan di Kabupaten Morowali Tahun 2016-2021 dapat dilihat pada Tabel 2.3.

Tabel 2.1  
Luas Panen Tanaman Pangan Menurut Jenis (Ha) Di Kabupaten Morowali,  
Tahun 2016-2021

Jenis Tanaman	Produksi Tahun (Ha)						Luas Tanam (Ha)
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2021
Padi :							
√ Padi Sawah	10.767,6	9.588,2	10.695,50	11.264,30	9.852,00	9343,00	8895,20
√ Padi Ladang						90,00	79,00
Palawija :							
Jagung	1.112,6	784,4	1.530,40	1.179,70	1.814,40	1.040,10	945,30
Ubi Kayu	113,0	123,00	160,00	144,00	173,00	224,50	228,00
Ubi jalar	66,0	42,50	46,50	38,50	68,90	87,00	81,00
Kacang Tanah	45,0	32,0	51,50	52,50	53,00	69,90	60,90
Kacang Kedelai	192,0	26,0	1.543,70	61,00	229,00	190,00	63,50
Kacang Hijau	45,9	18,0	137,80	61,00	73,40	57,50	53,50

.Sumber : Dinas Pertanian & Ketahanan Pangan Kab. Morowali Tahun 2022

Seperti yang terlihat pada Tabel 2.3, luas panen tanaman padi di Kabupaten Morowali tahun 2021 mengalami penurunan menjadi 9.433,00 Ha, di mana pada tahun sebelumnya Tahun 2019 luas panen tanaman padi seluas 11.264,30 Ha, Tahun 2020 seluas 9.852,00 Ha, demikian pula halnya dengan tanaman pangan lainnya juga mengalami penurunan seperti jagung, kedelai, kacang hijau. Namun di beberapa komoditas palawija luas panen mengalami peningkatan seperti ubi kayu, ubi jalar dan kacang tanah. Akan tetapi dalam kurun waktu Tahun 2016-2021 luas panen tanaman padi tertinggi yaitu di Tahun 2019 sebesar 11.264,30 Ha.

Untuk lebih jelasnya mengenai jumlah produksi padi dan tanaman pangan di Kabupaten Morowali Tahun 2016-2021 menurut jenis (ton) dapat dilihat pada Tabel 2.4. Sebagaimana terlihat pada Tabel 2.4, produksi tanaman padi tertinggi yaitu sebesar 54.890,93 ton pada Tahun 2019 meningkat dari tahun sebelumnya yaitu 52.119,93 ton, namun kembali menurun hingga Tahun 2020 menjadi 44.915,27

ton, dan mengalami peningkatan tahun 2021 sebesar 46.221,70 Ton. Sama halnya dengan tanaman padi, jumlah produksi tanaman kacang kedelai tertinggi yaitu sebesar 2.046,95 ton pada Tahun 2018 meningkat dari tahun sebelumnya yaitu 34,5 ton, namun kembali menurun menjadi 190,00 ton Tahun 2021.

Tabel 2.4  
Produksi Padi dan Tanaman Pangan Menurut Jenis (Ton) Kabupaten Morowali,  
Tahun 2016-2021

Jenis Tanaman	Produksi (Ton)					
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Padi	51.038,4	46.723,3	52.119,17	54.890,93	44.915,27	46.221,70
Jagung	5.077,9	2.898,4	5.654,83	4.358,99	80.190,58	4.368,42
Ubi Kayu	2.046,5	3.280,3	4.267,04	3.840,34	4.823,76	6.259,73
Ubi jalar	794,2	553,9	605,76	501,54	1.091,51	1.378,25
Kacang Tanah	54,6	40,3	64,84	66,10	59,47	78,43
Kacang Kedelai	236,5	34,5	2.046,95	80,89	303,88	190,00
Kacang Hijau	36,8	14,4	110,52	48,92	57,99	45,43

Sumber : Dinas Pertanian & Ketahanan Pangan Kab. Morowali Tahun 2022

Untuk jenis tanaman pangan lokal lainnya di Kabupaten Morowali Tahun 2016-2021, secara keseluruhan mengalami penurunan produksi seperti padi, jagung dan kacang kedelai masing-masing menurun dari 51.038,4 ton, 5.077,9 ton dan 236,5 Ton tahun 2016, menjadi 46.221,70 ton, 4.368,42 ton dan 190,00 ton pada Tahun 2021. Sebaliknya, Tanaman ubi kayu, ubi jalar, kacang tanah mengalami peningkatan produksi dari tahun ke tahun dan pada tahun 2021 masing-masing mencapai 6.259,73 Ton, 1.378,25 Ton dan 78,43 Ton.

## 2. Pertanian Tanaman Hortikultura

Tanaman hortikultura merupakan jenis tanaman yang terkait keperluan bahan pangan dan kebutuhan keindahan atau seni. Dilihat dari segi umur, tanaman hortikultura umumnya tergolong tanaman semusim dan ada juga yang berumur jangka panjang. Tanaman hortikultura digolongkan dalam tiga kelompok tanaman yakni tanaman sayuran, buah-buahan, biofarmaka dan hias. Tanaman sayuran semusim adalah tanaman sumber vitamin, garam mineral dan lain-lain yang

dikonsumsi dari bagian tanaman yang berupa daun, bunga, buah, dan umbinya, yang berumur kurang dari satu tahun. Tanaman buah-buahan semusim adalah tanaman sumber vitamin, garam mineral, dan lain-lain yang dikonsumsi dari bagian tanaman yang berupa buah, berumur kurang dari satu tahun, tidak berbentuk pohon/rumpun tetapi menjalar dan berbatang lunak. Tanaman buah-buahan tahunan adalah tanaman sumber vitamin, garam mineral, dan lain-lain yang dikonsumsi dari bagian tanaman yang berupa buah dan merupakan tanaman tahunan. Tanaman sayuran tahunan adalah tanaman sumber vitamin, garam mineral, dan lain-lain yang dikonsumsi dari bagian tanaman yang berupa daun dan atau buah yang berumur lebih dari satu tahun semusim adalah tanaman sumber vitamin, garam mineral, dan lain-lain yang dikonsumsi dari bagian tanaman yang berupa buah, berumur kurang dari satu tahun, tidak berbentuk pohon/rumpun tetapi menjalar dan berbatang lunak. Tanaman buah-buahan tahunan adalah tanaman sumber vitamin, garam mineral, dan lain-lain yang dikonsumsi dari bagian tanaman yang berupa buah dan merupakan tanaman tahunan. Tanaman sayuran tahunan adalah tanaman sumber vitamin, garam mineral, dan lain-lain yang dikonsumsi dari bagian tanaman yang berupa daun dan atau buah yang berumur lebih dari satu tahun.

Tabel 2.5 menunjukkan bahwa tanaman cabe rawit dan terung merupakan tanaman yang memiliki produksi terbesar dibanding tanaman lain di Kabupaten Morowali. Selain potensi tanaman hortikultura jenis sayuran, Kabupaten Morowali juga memiliki potensi produksi tanaman buah yang selanjutnya disajikan pada Tabel 2.5.

Tabel 2.5  
Produksi (Ku) Beberapa Jenis Tanaman Sayuran Utama

Jenis Tanaman	Produksi (Ku)				
	Tahun				
	2017	2018	2019	2020	2021
Bawang Merah	126	34	143	268	2.142,00
Cabe Rawit	5.161	5.87	2.624	8.516	9.619,00
Tomat	1.414	1.774	1.458	5.142	3.818,50
Kacang Panjang	-	2.505	1.54	3.351	3.431,40
Kangkung	-	2.5	1.138	3.259	3.499,10
Terung	-	2.201	1.554	2.745	3.984,00

Sumber Data : Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kab. Morowali Tahun 2021

Tabel 2.6  
Produksi (Ku) Beberapa Jenis Tanaman Buah

Jenis Tanaman	Produksi (Ku)				
	Tahun				
	2017	2018	2019	2020	2021
Mangga	6.993	6.593	3.350	707	1.043,10
Durian	10.315	5.551	2.625	222	140
Jeruk Siam	884	474	286	428	776,2
Pisang	9.121	8.133	10.073	7.250	5.236,91
Pepaya	2.361	2.769	2.438	1.167	-
Salak	55	66	17	36	34,9
Rambutan	-	3.140	491	1.234	337,76
Langsat	-	8.605	5.667	2.425	4.620,00
Nangka	-	3.775	1.186	1.254	-

Sumber: Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kab. Morowali Tahun 2021

#### 2.1.1.1.10. Kawasan Rawan Bencana

Kabupaten Morowali rentan terhadap proses-proses tektonik aktif karena dilewati oleh sesar aktif Matano. Oleh karena itu, kabupaten ini sangat rentan terhadap gempa bumi besar, tsunami, dan banjir. Perubahan iklim di masa mendatang cenderung memperbesar intensitas badai ekstrem yang mengakibatkan banjir besar. Selain itu, intensitas dan curah hujan yang tinggi dan semakin berkurangnya daerah tangkapan hujan akibat kegiatan pertambangan dan perkebunan di wilayah Kabupaten Morowali berpotensi untuk lebih meningkatkan terjadinya banjir dan longsor. Banjir besar terjadi di Kecamatan Bungku Tengah terjadi pada Tahun 2013 yang merendam pemukiman masyarakat yang mencapai 1 (satu) meter lebih. Kabupaten Morowali memiliki Angka Indeks Risiko Bencana BNPB 189 (tinggi) dan menempati peringkat ke-80 dari 496 kabupaten yang memiliki risiko bencana (BNPB, 2013)

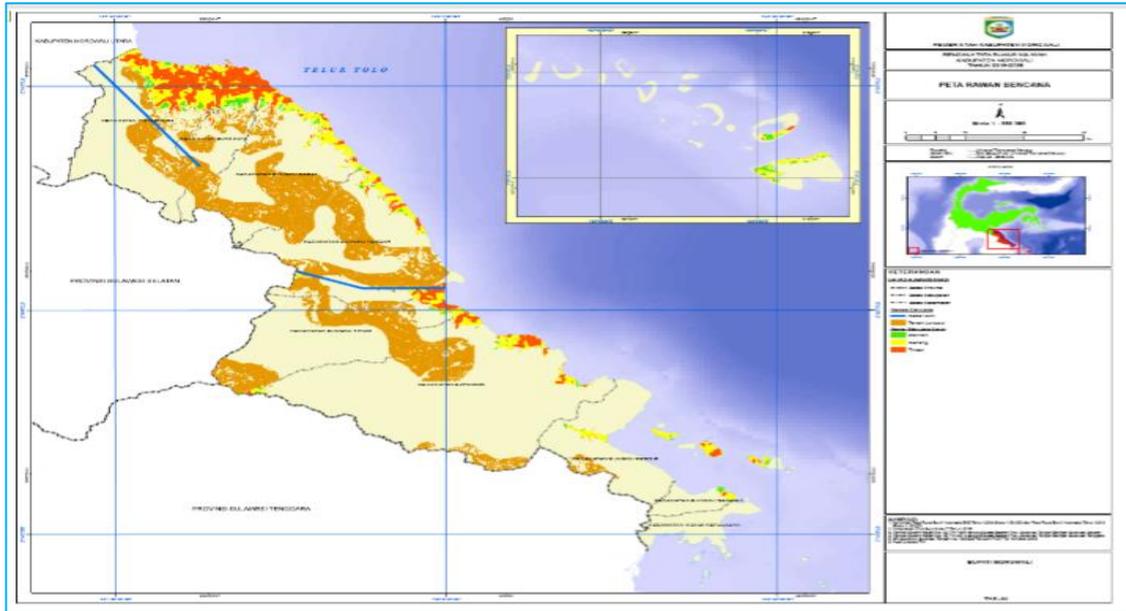
Kondisi Topografi di Kabupaten Morowali yang merupakan perbukitan dan pegunungan, membuat kabupaten ini rawan longsor, aliran debris, dan erosi. Potensi-potensi bahaya ini menghasilkan sejumlah besar sedimen yang mengisi dasar sungai dan menyebabkan lebih banyak terjadi banjir dan penambahan sedimen di daerah pesisir. Di daerah pesisir, hilangnya hutan bakau juga telah menyebabkan meningkatnya abrasi pantai. Daerah dataran rendah di pantai juga berisiko terkena intrusi air laut akibat gelombang pasang dan tsunami. Banjir sering terjadi di Kabupaten Morowali selama musim hujan, sedangkan kekeringan sering

terjadi di musim kemarau. Perkiraan adanya perubahan iklim di masa depan, diperkirakan akan meningkatkan intensitas bencana banjir dan kekeringan.

Terjadinya penggundulan hutan karena penebangan dan pertambangan, serta konversi hutan menjadi perkebunan di kemudian hari dapat memperburuk masalah pengelolaan daerah tangkapan air. Daerah yang gundul dan tidak ditanami kembali sangat rentan terhadap erosi. Hujan deras menggerakkan sejumlah besar sedimen ke arah daerah tangkapan air, sehingga memperburuk banjir dan mempengaruhi bangunan dan infrastruktur secara signifikan. Peningkatan sedimentasi juga telah menyebabkan terhadap hilangnya tanaman mangrove di pantai. Akibat dari fenomena iklim yang ekstrim dan semakin berkurangnya daerah tangkapan air di kawasan hutan Kecamatan Bungku tengah, pada Tahun 2013 telah terjadi bencana banjir yang merendam Kota Lama Bungku dengan perkiraan ketinggian air mencapai 2 meter. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Peta Kawasan rawan bencana di Kabupaten Morowali Pada Gambar 2.11

Adapun Kawasan rawan bencana dalam wilayah Kabupaten Morowali berdasarkan RTRW Kabupaten Morowali Tahun 2019-2039 adalah sebagai berikut :

- Kawasan rawan tanah longsor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdapat di Kecamatan Witaponda, Kecamatan Bumi Raya, Kecamatan Bungku Barat, Kecamatan Bungku Tengah, Kecamatan Bungku Timur, Kecamatan Bahodopi dan Kecamatan Bungku Pesisir
- Kawasan rawan banjir terdapat di Kecamatan Witaponda, Kecamatan Bumi Raya, Kecamatan Bungku Barat, Kecamatan Bungku Tengah dan Kecamatan Bahodopi.
- Kawasan rawan bencana gempa bumi berupa kawasan sempadan sesar aktif terdapat di Kecamatan Bahodopi, Kecamatan Bungku Barat, Kecamatan Bungku Tengah, Kecamatan Bungku Timur
- Kawasan rawan bencana gelombang pasang, terdapat di Kecamatan Wita Ponda, Kecamatan Bumi Raya, Kecamatan Bungku Barat, Kecamatan Bungku Tengah dan sebagian Kecamatan Bungku Timur



Sumber: Kabupaten Morowali Dalam Angka Tahun 2021

Gambar 2.10  
Peta Rawan Bencana

### 2.1.1.2. Kondisi Demografi

Istilah kependudukan (population) dihubungkan dengan hal-hal yang menyangkut perubahan-perubahan dalam struktur kependudukan, yang meliputi pertumbuhan penduduk, jumlah penduduk, komposisi, dan persebaran penduduk. Perubahan-perubahan tersebut dapat terjadi karena kelahiran (natalitas), kematian (mortalitas), perkawinan, perpindahan penduduk (migration) dan mobilitas sosial. Permasalahan kependudukan adalah merupakan topik yang tetap menarik untuk dibahas, karena berbagai aspek kependudukan yang saling terkait dengan berbagai aspek pembangunan lainnya.

Jumlah penduduk suatu daerah dapat berarti positif dan dapat pula berarti negatif bila dilihat dari dimensi waktu dan daerah yang berbeda. Pada waktu jumlah penduduk masih sedikit dan disertai dengan kualitas sumber daya manusia rendah merupakan suatu masalah kependudukan tersendiri yang mengakibatkan lambatnya perkembangan peradaban manusia. Pada waktu yang berbeda ketika perkembangan jumlah penduduk yang tinggi justru dapat menjadi ancaman bagi kesejahteraan penduduk itu sendiri karena berhubungan dengan masalah-masalah sosial dan ekonomi. Suatu daerah yang jumlah penduduknya sudah sangat banyak merupakan masalah yang sangat sulit untuk ditanggulangi, karena berkaitan dengan

berbagai aspek kehidupan, misalnya sulitnya menyiapkan lapangan kerja sehingga menimbulkan pengangguran yang berakibat munculnya pemukiman-pemukiman kumuh, timbulnya masalah gangguan keamanan dan masalah sosial lainnya. Sementara itu, pada daerah-daerah yang mempunyai wilayah luas dengan sumber daya alamnya yang cukup potensial justru masih kekurangan penduduk (tenaga kerja) untuk mengelolanya agar dapat bermanfaat bagi kehidupan. Sehubungan dengan hal tersebut, maka salah satu masalah yang perlu mendapat perhatian dalam proses pembangunan adalah masalah kependudukan yang mencakup berbagai aspek antara lain jumlah dan laju pertumbuhan penduduk, persebaran dan kepadatan penduduk serta komposisi penduduk

#### 2.1.1.2.1. Laju Pertumbuhan dan Kepadatan Penduduk

Jumlah penduduk akan terus bertambah yang disebabkan oleh tingkat kelahiran lebih tinggi dari tingkat kematian dan migrasi masuk (in migration) lebih besar dari pada migrasi keluar (out migration). Penduduk Kabupaten Morowali Tahun 2019 sebanyak 121.296 jiwa meningkat sebesar 14,30 persen pada Tahun 2020 menjadi 161.727 jiwa, yang kemudian meningkat menjadi sebanyak 161.727 jiwa pada Tahun 2020 dengan laju pertumbuhan penduduk sebesar 1,92 persen antara Tahun 2010-2018 dan 0,953 persen antara 2010-2020.

Tabel 2.7  
Laju Pertumbuhan Penduduk, kepadatan Penduduk dan Rasio Jenis Kelamin Menurut Kecamatan Kabupaten Morowali, Tahun 2010-2020

No	Kecamatan	Penduduk			Laju Pertumbuhan Penduduk per Tahun (%)		Persentase Penduduk	
		2010	2019	2020	2010–2018	2010–2020	2010	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Menui Kepulauan	12.064	13.609	13.232	1,35	0,991	11,8	8,18
2	Bungku Selatan	17.273	14.831	13.914	-1,68	-0,021	16,90	8,60
3	Bahodopi	6.594	7.754	37.322	1,82	0,811	6,45	23,08
4	Bungku Pesisir	-	4.745	6.625	-	...2	-	4,10
5	Bungku Tengah	27.774	26.193	29.203	-0,65	0,995	27,17	18,12
6	Bungku Timur	-	8.989	12.061	-	...2	-	7,46
7	Bungku Barat	10.093	12.331	14.061	2,25	0,966	9,87	8,69
8	Bumi Raya	11.488	12.952	14.524	1,34	0,976	11,24	8,98
9	Witaponda	16.942	19.892	20.686	1,80	0,980	16,57	12,79
	<b>Morowali</b>	<b>102.228</b>	<b>121.296</b>	<b>161.727</b>	<b>1,92</b>	<b>0,953</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

Sumber Morowali Dalam Angka 2021

Lanjutan Tabel 2.7

No	Kecamatan	Kepadatan Penduduk (km <sup>2</sup> )		Rasio Jenis Kelamin		Laki-laki	Perempuan
		2010	2020	2010	2020	2020	
1	2	10	11	12	13	14	15
1	Menui Kepulauan	53,95	59,17	96,35	100,2	6,623	6,603
2	Bungku Selatan	42,77	34,45	100,94	104,8	7,121	6,793
3	Bahodopi	6,10	34,53	113,67	181,1	24,044	13,278
4	Bungku Pesisir	-	7,64	-	113,8	3,526	3,099
5	Bungku Tengah	38,28	40,34	105,25	114,8	15,661	13641
6	Bungku Timur	-	31,15		110,2	6,322	5,739
7	Bungku Barat	13,30	18,53	111,50	115,4	7,532	6,529
8	Bumi Raya	22,76	2877	107,81	109,0	7,576	6,946
9	Witaponda	32,60	39,80	108,59	108,6	10,769	9,917
	<b>Morowali</b>	<b>18,68</b>	<b>29,56</b>	<b>104,91</b>	<b>122,9</b>	<b>89,174</b>	<b>72,553</b>

Sumber Morowali Dalam Angka 2021

Jumlah penduduk terbanyak pada tahun 2020 terdapat di Kecamatan Bahodopi sebanyak 37.322 jiwa dengan pertumbuhan penduduk antara tahun 2010-2019 sebesar 1,82 % dan pada tahu 2010-2020 sebesar 0,811% dengan persentase penduduk sebesar 23,08%. Sedangkan Kecamatan paling sedikit penduduknya pada tahun 2020 adalah Kecamatan Bungku Pesisir sebesar 6.625 jiwa dengan laju pertumbuhan penduduk antara tahun 2010-2020 sebesar ...2% dengan persentase penduduk sebesar 4,10%.

Seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk, maka tingkat kepadatan penduduk juga mengalami peningkatan. Pada Tahun 2020, rata - rata kepadatan penduduk Kabupaten Morowali adalah 29,56 jiwa per km<sup>2</sup>. Persebaran penduduk di wilayah Kabupaten Morowali tidak merata jumlahnya pada semua wilayah kecamatan, yakni Kecamatan Bungku Tengah sebagai pusat pemerintahan dan pusat pemerintahan Kabupaten Morowali memiliki luas wilayah kecamatan sebesar 725,57 km<sup>2</sup>, dengan kepadatan penduduk sebanyak 40,34 jiwa per km<sup>2</sup>. Kecamatan dengan tingkat kepadatan penduduk tertinggi adalah Kecamatan Menui Kepulauan yaitu 59,17 jiwa per km<sup>2</sup>. Sedangkan kecamatan yang memiliki kepadatan penduduk terendah adalah Kecamatan Bungku Pesisir dengan tingkat kepadatan sebesar 7,64 jiwa per km<sup>2</sup>. Untuk melihat perkembangan penduduk seluruh Kecamatan selengkapnya dapat dilihat pada tabel 2.7.

#### **2.1.1.2.2. Komposisi Penduduk Menurut Jenis Kelamin**

Perbandingan jumlah penduduk laki-laki dengan jumlah penduduk perempuan di suatu daerah pada waktu tertentu yang selanjutnya disebut dengan "Sex Ratio" adalah merupakan profil untuk mengetahui komposisi penduduk menurut jenis kelamin. Komposisi penduduk menurut jenis kelamin sangat besar kaitannya dengan masalah fertilitas dan natalitas, yakni semakin besar porsi penduduk perempuan, maka potensi keduanya semakin tinggi. Rasio penduduk Kabupaten Morowali pada tahun 2020 mencapai 122,9% yang artinya mayoritas penduduk Morowali adalah laki-laki. Secara keseluruhan Kecamatan di Kabupaten Morowali rasio penduduknya di atas 100% dan yang tertinggi adalah Kecamatan Bahodopi dengan rasio 181,1%. Komposisi penduduk menurut jenis kelamin dapat dilihat pada tabel 2.7.

#### **2.1.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat**

##### **2.1.2.1. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi**

###### **2.1.2.1.1. PDRB dan Laju Pertumbuhan Ekonomi**

Keberhasilan pembangunan Provinsi Sulawesi Tengah maupun kabupaten Morowali tidak hanya menitikberatkan pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga bagaimana pembangunan tersebut diarahkan pada aspek pemerataan kesejahteraan masyarakat. Suatu pembangunan akan kurang berarti apabila tidak berdampak pada kesejahteraan masyarakatnya.

Perekonomian Sulawesi Tengah cenderung mengalami pertumbuhan yang melambat. Perlambatan tersebut terjadi selama 3 tahun terakhir. Pada tahun 2020, laju pertumbuhan PDRB mencapai 4,86 persen. Peningkatan ini melambat bila dibandingkan dengan tahun 2017 dengan laju 7,10 persen, namun salah satu Kabupaten yang berperan penting dalam pertumbuhan ekonomi Provinsi Sulawesi Tengah yaitu Kabupaten Morowali dengan menempati urutan teratas di Provinsi Sulawesi Tengah dengan Laju Pertumbuhan PDRB pada tahun 2018 sebesar 112,20 persen namun menurun di tahun 2019 dan kembali meningkat pada tahun 2020 menjadi 28,93 persen Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.8  
PDRB dan Laju Pertumbuhan PDRB Provinsi Sulawesi Tengah Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2017-2021

Kabupaten /Kota	ADHB (Miliar Rupiah)					ADHK (Miliar Rupiah)					Pertumbuhan (%)				
	2017	2018	2019*	2020**	2021***	2017	2018	2019*	2020**	2021***	2017	2018	2019*	2020**	2021***
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
<b>Banggai Kepulauan</b>	<b>3.299,74</b>	<b>3.601,97</b>	<b>3.865,67</b>	<b>3.820,81</b>		<b>2.461,85</b>	<b>2.563,11</b>	<b>2.666,09</b>	<b>2.586,58</b>		<b>8,71</b>	<b>4,11</b>	<b>4,02</b>	<b>2,98</b>	
Banggai	23.843,66	26.853,27	29.664,11	27.447,07		17.294,28	18.360,50	19.512,50	18.579,16		6,00	6,17	6,27	4,78	
<b>Morowali</b>	<b>17.035,85</b>	<b>37.356,48</b>	<b>45.229,73</b>	<b>61.985,63</b>	<b>72.884,37</b>	<b>13.363,84</b>	<b>28.358,40</b>	<b>34.085,70</b>	<b>43.947,50</b>	<b>54.806,24</b>	<b>6,26</b>	<b>112,20</b>	<b>20,20</b>	<b>28,93</b>	<b>10-15</b>
Poso	8.021,44	8.687,02	9.466,92	9.219,87		5.744,15	6.098,17	6.476,30	6.224,31		4,00	6,16	6,20	3,89	
<b>Donggala</b>	<b>10.765,79</b>	<b>11.260,13</b>	<b>12.110,73</b>	<b>11.720,48</b>		<b>7.961,07</b>	<b>8.165,23</b>	<b>8.522,09</b>	<b>8.107,03</b>		<b>5,08</b>	<b>2,56</b>	<b>4,37</b>	<b>4,87</b>	
Toli - Toli	7.137,85	7.866,88	8.452,10	8.326,92		5.193,13	5.467,26	5.779,04	5.539,12		5,31	5,28	4,79	3,31	
<b>Buol</b>	<b>5.146,51</b>	<b>5.521,97</b>	<b>5.719,68</b>	<b>5.644,14</b>		<b>3.765,18</b>	<b>3.873,90</b>	<b>3.961,65</b>	<b>3.847,27</b>		<b>14,08</b>	<b>2,89</b>	<b>2,27</b>	<b>2,89</b>	
Parigi Moutong	15.802,17	16.971,88	17.834,98	17.182,67		11.143,11	11.424,82	11.689,90	11.114,29		6,02	2,53	2,32	4,92	
<b>Tojo Una-Una</b>	<b>4.989,82</b>	<b>5.302,05</b>	<b>5.691,81</b>	<b>5.586,54</b>		<b>3.571,75</b>	<b>3.668,56</b>	<b>3.847,33</b>	<b>3.723,86</b>		<b>6,10</b>	<b>2,71</b>	<b>4,87</b>	<b>3,21</b>	
Sigi	7.876,67	8.422,17	8.964,95	8.985,82		5.770,00	5.993,14	6.207,21	6.084,93		5,53	3,87	3,57	1,97	
<b>Banggai Laut</b>	<b>2.006,46</b>	<b>2.233,05</b>	<b>2.379,65</b>	<b>2.332,41</b>		<b>1.542,83</b>	<b>1.617,64</b>	<b>1.674,27</b>	<b>1.601,65</b>		<b>5,26</b>	<b>4,85</b>	<b>3,50</b>	<b>4,34</b>	
Morowali Utara	8.968,53	10.161,29	11.091,33	11.203,76		6.578,53	7.691,89	8.090,29	8.072,84		5,62	16,92	5,18	0,22	
<b>Kota Palu</b>	<b>20.416,02</b>	<b>22.726,17</b>	<b>25.046,37</b>	<b>24.175,89</b>		<b>14.585,80</b>	<b>15.315,03</b>	<b>16.203,29</b>	<b>15.467,48</b>		<b>6,13</b>	<b>5,00</b>	<b>5,79</b>	<b>4,54</b>	
<b>Sulawesi Tengah</b>	<b>133.951,16</b>	<b>167.135,77</b>	<b>185.740,09</b>	<b>197.440,78</b>		<b>97.474,86</b>	<b>117.555,83</b>	<b>127.935,06</b>	<b>134.152,69</b>		<b>7,10</b>	<b>20,60</b>	<b>8,83</b>	<b>4,86</b>	

Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Tengah

Berdasarkan tabel diatas kemampuan perekonomian Tahun 2018 di Sulawesi Tengah ditinjau dari PDRB atas dasar harga berlaku mencapai 167.135,77 miliar rupiah, meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar 133.951,16 miliar rupiah. Sedangkan ditinjau atas dasar harga konstan 2010, PDRB Sulawesi Tengah tahun 2018 mencapai 117.555,83 miliar rupiah, meningkat dari tahun sebelumnya yang sebesar 97.474,86 miliar rupiah. Pertumbuhan ekonomi suatu daerah dapat dilihat dengan membandingkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan tahun aktif dengan tahun sebelumnya. PDRB atas dasar harga konstan 2010 Kabupaten Morowali tahun 2020 mencapai 28,93 mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya yaitu hanya 20,20 persen. Adapun PDRB kabupaten Morowali dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.9  
Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)- ADH Konstan 2010  
Morowali Menurut Lapangan Usaha (persen), 2016 – 2020

Lapangan Usaha		Tahun					
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	10,94	4,12	3,59	1,28	1,84	(2,76)
B	Pertambangan dan Penggalian	110,95	15,93	15,93	51,25	19,77	34,40
C	Industri Pengolahan	338,2	27,6	21,90	277,16	24,00	35,72
D	Pengadaan Listrik dan Gas	11,95	11,71	14,07	15,25	1,98	4,47
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	7,98	8,23	9,53	5,17	0,17	0,11
F	Konstruksi	0,28	-8,68	6,81	6,27	13,31	(14,62)
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	24,27	9,92	6,23	5,81	2,90	(4,98)
H	Transportasi dan Pergudangan	28,77	7,29	6,42	3,42	6,47	(28,38)
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	11,41	5,43	6,99	(5,26)	4,01	(10,48)
J	Informasi dan Komunikasi	10,74	9,16	9,16	12,87	6,80	7,09
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	8,51	9,81	7,23	5,29	0,17	13,23
L	Real Estat	18,68	5,01	2,76	2,12	0,90	0,15
M,N	Jasa Perusahaan	7,6	7,92	9,22	(10,02)	4,98	(1,17)
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	7,45	6,04	7,42	2,83	5,05	1,06
P	Jasa Pendidikan	7,31	6,89	5,60	1,21	3,00	(0,18)
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	9,64	9,89	10,03	6,16	8,35	6,91
R,S,T,U	Jasa lainnya	6,58	6,8	8,19	4,93	2,59	(0,44)
<b>Produk Domestik Regional Bruto</b>		<b>67,82</b>	<b>12,42</b>	<b>14,08</b>	<b>112,20</b>	<b>20,20</b>	<b>28,93</b>

Sumber : BPS Kabupaten Morowali 2021

Tabel 2.9 menjelaskan dari 17 lapangan usaha ekonomi yang ada, seluruhnya mengalami pertumbuhan yang positif terkecuali lapangan usaha pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang yang mengalami pertumbuhan negative. Dari 15 lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan positif, lapangan usaha lainnya tercatat mengalami pertumbuhan positif namun lebih rendah, yaitu kurang dari lima persen.

Lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan positif lima hingga sepuluh persen tersebut antara lain: lapangan usaha Pertambangan dan Penggalian sebesar 17,94 persen, Industry Pengolahan 17,33 persen, Konstruksi 13,31 persen, Transportasi dan Pergudangan 14,58 persen, Jasa Keuangan dan Asuransi 7,52 persen, Jasa Perusahaan 8,63 persen, Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib 8,89 persen, dan Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 9,40 persen.

Sedangkan satu lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan positif kurang dari 5 (lima) persen adalah lapangan usaha Real Estate 2,51 persen, dan Pertanian, Kehutanan, Perkebunan sebesar 2,85 persen, Pengadaan Listrik dan Gas 1,85 persen, Perdagangan Besar dan Eceran 4,74 persen, Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 0,28 persen, Informasi dan Komunikasi 1,19 persen, Jasa Pendidikan 4,49 persen dan Jasa lainnya 2,10 persen

#### **2.1.2.1.2. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga**

Sebagaimana diketahui bahwa sejak tahun 2015, PDRB diestimasi dengan menggunakan tahun dasar yang baru, tahun 2010 (2010=100) menggantikan tahun dasar lama, tahun 2000 (2000=100). Penyusunan PDRB dengan tahun dasar baru juga disertai dengan upaya untuk mengimplementasikan *System of National Accounts (SNA)* yang baru, SNA 2008. Ke dua hal tersebut tentu berdampak pada besaran maupun struktur PDRB serta indikator ekonomi yang diturunkan dari data PDB/PDRB tersebut.

Secara total, PDRB Kabupaten Morowali atas dasar harga (atas dasar harga) Berlaku di tahun 2019 meningkat sebesar 18,63 persen, yakni dari 20.507 miliar Rupiah (2010=100) menjadi 24.327 miliar Rupiah (2010=100). Jika dinilai atas dasar harga (atas dasar harga) Konstan 2010, maka peningkatan ini jauh lebih kecil, yakni dari 15.021 miliar Rupiah (2010=100) menjadi 17.200 miliar Rupiah (2010=100), atau meningkat sebesar 14,51 persen.

Di tengah kondisi pertumbuhan ekonomi Indonesia yang cenderung melemah, perekonomian Kabupaten Morowali periode 2015 - 2019 dapat tetap tumbuh di atas 5 persen, yakni sebesar 67,82 persen; 12,42 persen; 14,08 persen; 12,40 persen; dan 14,51 persen. Peningkatan volume ekonomi tersebut tercermin baik dari sisi produksi (*supply side*) maupun sisi permintaan akhir (*demand side*). Dari sisi produksi, pertumbuhan ekonomi tertinggi terjadi pada kategori Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) yang selalu tumbuh di atas 10 persen setiap tahunnya. Dari sisi permintaan akhir, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Morowali didominasi pertumbuhan komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah tangga (PK-RT), yang menyumbang lebih dari separuh total PDRB.

Pada periode tahun 2015 - 2019 PDRB Kabupaten Morowali atas dasar harga Berlaku meningkat cukup signifikan, yakni sebesar 12.818 miliar Rupiah (2015); 14.533 miliar Rupiah (2016); 17.036 miliar Rupiah (2017); 20.507 miliar Rupiah (2018); dan 24.327 miliar Rupiah (2019). Peningkatan ini dipengaruhi baik oleh perubahan harga maupun perubahan volume. Peningkatan PDRB sisi produksi diikuti oleh peningkatan PDRB dari sisi permintaan akhir atau PDRB pengeluaran. Peningkatan PDRB menurut komponen pengeluaran Kabupaten Morowali pada periode 2015-2019 dapat dilihat dari tabel 2.10 berikut ini:

Tabel 2.10  
PDRB atas dasar harga Berlaku Menurut Pengeluaran,  
Kabupaten Morowali 2015 – 2019 (Miliar Rp.)

Komponen Pengeluaran	2015	2016	2017	2018*	2019**
1	2	3	4	5	6
1. Konsumsi Rumah Tangga	3.326	3.640	4.006	4.495	5.034
2. Konsumsi LNPRT	77	86	98	117	138
3. Konsumsi Pemerintah	596	629	701	712	798
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	8.332	9.639	10.898	11.503	19.844
5. Perubahan Inventori	810	1.477	560	2.430	-148
6. Net Ekspor	-322	-938	773	1.251	-1.340
<b>PDRB</b>	<b>12.818</b>	<b>14.533</b>	<b>17.036</b>	<b>20.507</b>	<b>24.327</b>

Sumber : BPS Kabupaten Morowali 2020

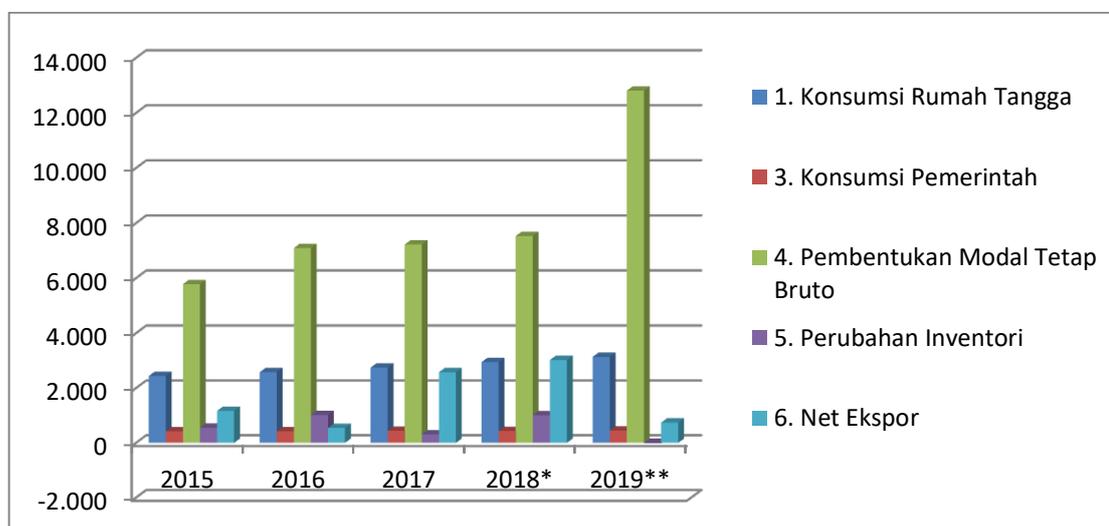
PDRB pengeluaran juga dapat dinilai atas dasar harga Konstan 2010 atau atas dasar harga dari berbagai jenis produk yang divalusi dengan harga tahun 2010. Melalui pendekatan ini, nilai PDRB pada masing-masing tahun memberikan

gambaran tentang perubahan PDRB secara volume atau kuantitas (tanpa dipengaruhi oleh perubahan harga). PDRB pengeluaran atas dasar harga Konstan 2010 menggambarkan terjadinya perubahan atau pertumbuhan ekonomi secara riil, utamanya terkait dengan peningkatan volume permintaan atau konsumsi akhir. Peningkatan nilai PDB atas dasar harga Konstan 2010 Kabupaten Morowali pada periode 2015-2019 dapat dilihat dari tabel 2.11 dan gambar grafik 2.11 berikut ini:

Tabel 2.11  
PDRB atas dasar harga Konstan Menurut Pengeluaran,  
Kabupaten Morowali 2015 – 2019 (Miliar Rp.)

Komponen Pengeluaran	2015	2016	2017	2018*	2019**
1	2	3	4	5	6
1. Konsumsi Rumah Tangga	2.442	2.581	2.748	2.950	3.138
3. Konsumsi Pemerintah	421	421	439	432	447
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	5.780	7.093	7224	7.530	12.809
5. Perubahan Inventori	552	1.018	310	1.009	-19
6. Net Ekspor	1.168	542	2.577	3.024	740
<b>PDRB</b>	<b>10.420</b>	<b>11.714</b>	<b>13.364</b>	<b>15.021</b>	<b>17.200</b>

Sumber : BPS Kabupaten Morowali 2020



Sumber : BPS Kabupaten Morowali 2020

Gambar 2.11  
Grafik PDRB atas dasar harga Konstan Menurut Pengeluaran, Kabupaten Morowali  
2015 – 2019

Dari tabel 2.11, terlihat bahwa nilai PDRB atas dasar harga Konstan di Kabupaten Morowali meningkat, yakni sebesar 10.420 miliar Rupiah (2015); 11.714

miliar Rupiah (2016); 13.364 miliar Rupiah (2017); 15.021 miliar Rupiah (2018); dan 17.200 miliar Rupiah (2019). Sedangkan dari grafik 2.14 terlihat bahwa pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Morowali cenderung meningkat, yakni dari 12,40 persen pada tahun 2018 menjadi 14,51persen pada tahun 2019.

### 2.1.2.1.3. Nilai Tukar Petani (NTP)

Salah satu inidkator yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat kesejahteraan atau kemampuan daya beli petani adalah indeks nilai tukar petani. Indeks nilai tukar petani merupakan rasio antara indeks harga yang diterima dengan indeks harga yang harus dibayar petani dikalikan dengan 100 %. Adapun Nilai tukar petani Provinsi Sulawesi Tengah Menurut Kabupaten/Kota adalah sebagai berikut :

Tabel 2.12  
 Nilai Tukar Petani Sulawesi Tengah Menurut Kabupaten/Kota  
 Tahun 2019

Wilayah	Nilai Tukar Petani	
	2015	2019
Kab.Morowali	100.49	100,14
Prov.Sulawesi Tengah		96,22

Sumber: Dinas Pertanian, Peternakan dan Ketahanan Pangan Kab. Morowali

Dari tabel 2.12 di ketahui Nilai Tukar Petani Kabupaten Morowali tahun 2015 yaitu sebesar 100,49 dan pada tahun 2019 menjadi 100,14. Peranan sector pertanian masih cukup besar terhadap perekonomian Kabupaten Morowali. Sedangkan pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Morowali Secara agreat sudah mencapai 14,51 %. Dimana pertumbuhan sector pertanian menunjukkan penurunan yang signifikan dari tahun 2017 mencapai 3,78% menjadi 0,8 % Tahun 2018 kemudian kembali peningkatan menjadi 2,85 % pada Tahun 2019.

Mengingat jumlah penduduk di Kabupaten Morowali berkembang cukup pesat terutama dari pendatang, maka sector pertanian merupakan sector yang penting untuk dikembangkan lebih lagi. Hal ini karena berkaitan dengan kebutuhan penduduk akan bahan pangan yang tentu mengalami peningkatan yang drastis. Jangan sampai dengan tingginya permintaan akan hasil pertanian di Kabupaten Morowali, justru tidak searah dengan tingkat kesejahteraan petani di Kabupaten Morowali. Hal ini kan membahayakan pembangunan di Kabupaten Morowali sendiri

dikarenakan potensi sektor pertanian cukup besar malah tidak dimanfaatkan dengan baik.

## 2.1.2.2. Fokus Kesejahteraan Sosial

### 2.1.2.2.1. Indeks Pembangunan Manusia

Sulawesi Tengah merupakan salah satu dari 12 provinsi di Indonesia dengan nilai IPM berkategori “Sedang”. IPM yang dicapai Sulawesi Tengah Tahun 2020 tercatat sebesar 69,55. Dilihat dari posisinya, IPM Sulawesi Tengah berada pada peringkat 25 dari 34 Provinsi di Indonesia. Peringkat ini mengalami perubahan dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang berada di peringkat 26. Adapun Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Sulawesi Tengah Menurut Komponen dan Kabupaten/Kota Tahun 2016-2020 yaitu sebagai berikut :

Tabel 2.13  
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Sulawesi Tengah Menurut Kabupaten/Kota,  
2016 – 2021

Kabupaten/Kota	Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Kota					
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
Banggai Kepulauan	63,45	64,07	64,68	65,13	65,42	65,61
Banggai	68,17	69,00	69,85	70,36	70,52	70,60
Morowali	<b>69,69</b>	<b>70,41</b>	<b>71,14</b>	<b>72,02</b>	<b>72,21</b>	<b>72,29</b>
Poso	68,83	69,78	70,68	71,40	71,28	71,45
Donggala	64,42	64,66	65,14	65,49	65,56	65,72
Toli-toli	63,27	64,05	64,60	65,42	65,69	66,30
Buol	66,37	66,69	67,30	67,69	67,82	68,25
Parigi Moutong	63,60	64,09	64,85	65,47	65,44	65,82
Tojo Una-una	62,27	62,61	63,38	64,52	64,59	64,74
Sigi	65,95	66,72	67,66	68,16	68,12	68,49
Banggai Laut	63,49	64,08	64,80	65,27	65,43	65,65
Morowali Utara	66,57	67,35	67,95	68,45	68,36	68,48
Kota Palu	79,73	80,24	80,91	81,50	81,47	81,70

Sumber : BPS Provinsi Sulawesi Tengah

Tabel 2.13 menunjukkan nilai pertumbuhan IPM Kabupaten Morowali berada pada urutan ke dua setelah kota palu sejak tahun 2016 sampai tahun 2021 terjadi peningkatan, dimana pada tahun 2016 dengan nilai 69,69 % sedangkan pada tahun 2021 yaitu mencapai 72,29 % sehingga mengalami perubahan status dari “ Sedang “ menjadi “Tinggi” dengan adanya perubahan status ini menunjukkan adanya perbaikan pembangunan manusia di Kabupaten Morowali.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan salah satu alat untuk mengetahui tingkat kesejahteraan atau kualitas pembangunan manusia. Indeks ini disusun dari tiga dimensi yakni: umur panjang dan hidup sehat (*a long and healthy life*), pengetahuan (*knowledge*), dan standard hidup layak (*decent standard of living*). adapun Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Sulawesi Tengah Menurut Komponen dan Kabupaten/Kota dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.14  
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Sulawesi Tengah Menurut Komponen dan Kabupaten/Kota, 2017 – 2021

KABUPATEN/KOTA	Umur Harapan Hidup (Tahun)					Angka Harapan Lama Sekolah (Tahun)				
	2017	2018	2019	2020	2021*	2017	2018	2019	2020	2021*
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Banggai Kepulauan	64,53	65,12				13,03	13,04			
Banggai	70,02	70,32				12,89	13,22			
<b>Morowali</b>	<b>68,07</b>	<b>68,45</b>	<b>68,82</b>	NA	69,18	<b>12,77</b>	<b>12,89</b>	<b>13,33</b>	NA	13,34
Poso	70,16	70,51				13,38	13,68			
Donggala	65,89	66,37				12,46	12,47			
Tolitoli	64,12	64,71				12,7	12,71			
Buol	67	67,59				13,06	13,07			
Parigi Moutong	63,19	63,57				12,44	12,45			
Tojo Una-una	64,07	64,61				11,81	11,82			
Sigi	68,72	69,15				12,51	12,85			
Banggai Laut	63,62	64,21				12,87	12,88			
Morowali Utara	68,34	68,77				12,21	12,22			
Kota Palu	69,93	70,31				15,92	16,2			
<b>Sulawesi Tengah</b>	<b>67,32</b>	<b>67,78</b>				<b>13,04</b>	<b>13,13</b>			
<b>Nasional</b>	<b>71,06</b>	<b>71,2</b>				<b>12,85</b>	<b>12,91</b>			

Lanjutan Tabel 2.14

Rata-Rata Lama Sekolah (Tahun)					Pengeluaran Perkapita disesuaikan (Ribu Rupiah)				
2017	2018	2019	2020	2021*	2017	2018	2019	2020	2021*
12	13	14	15	16	12	13	14	15	16
7,99	8,14				7.440	7.545			
7,92	8,06				9.516	9.712			
<b>8,73</b>	<b>8,98</b>	<b>9,11</b>	NA	9,33	<b>11.012</b>	<b>11.159</b>	<b>11.277</b>	NA	NA
8,81	9,04				8.781	8.936			
7,84	7,85				7.924	8.106			
7,85	7,96				7.916	8.017			
8,63	8,74				7.934	8.079			
6,98	7,18				9.488	9.808			
7,9	8,16				7.465	7.608			
8,22	8,43				8.113	8.236			
8,21	8,44				7.693	7.810			
8,39	8,58				8.842	8.985			
11,26	11,33				14.871	15.074			
<b>8,29</b>	<b>8,52</b>				<b>9.311</b>	<b>9.488</b>			
<b>8,1</b>	<b>8,17</b>				<b>10.664</b>	<b>11.059</b>			

Sumber : BPS Provinsi Sulawesi Tengah

Jika dilihat dari tiga dimensi pembentuk IPM, secara umum Kabupaten Morowali mengalami peningkatan di seluruh dimensi. Dimensi pertama yaitu umur panjang dan hidup sehat yang diukur dengan indikator Umur Harapan Hidup saat Lahir (UHH). Indikator ini mencerminkan derajat kesehatan di suatu wilayah, baik dari sisi sarana prasarana, akses, maupun kualitas kesehatan. Pada tahun 2019, UHH Kabupaten Morowalu mencapai 68,82 tahun. Artinya, bayi yang baru lahir diharapkan dapat bertahan hidup hingga usia 68,82 tahun. Kecenderungan Umur Harapan Hidup tahun 2011-2019 di Sulawesi Tengah menunjukkan perkembangan dari tahun ke tahun. Kondisi ini menunjukkan bahwa bayi yang baru lahir hidup diharapkan dapat hidup lebih lama karena membaiknya derajat kesehatan masyarakat.

Dimensi kedua pembentuk IPM yaitu pengetahuan yang diukur dengan indikator Harapan Lama Sekolah dan Rata-rata Lama Sekolah. Secara umum, Harapan Lama Sekolah dan Rata-rata Lama Sekolah di Kabupaten Morowali mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2019, harapan lama sekolah di Kabupaten Morowali sebesar 13,33 tahun dan angka rata-rata lama sekolah sebesar 9,11 tahun sedangkan Pada dimensi standar hidup layak, rentang nilai pengeluaran per kapita disesuaikan pada tahun 2019 berkisar antara 11.277ribu rupiah per tahun.

#### **2.1.2.2.2. Kemiskinan**

Kemiskinan terjadi karena ketidakberdayaan masyarakat untuk keluar dari permasalahan kemiskinan yang dihadapinya. Oleh karena itu, pemberdayaan masyarakat dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di daerah sangat penting dikemukakan sebagai bagian terpenting dari berbagai strategi kebijakan yang dilaksanakan oleh daerah. Melalui strategi yang terencana dengan baik, pemberdayaan masyarakat dilakukan tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan formal organisasi dan bersifat sporadis seolah-olah mempunyai tujuan nyata, serta substansinya hanya administratif. Berbagai kebijakan dan program pemerintah selama ini telah dilaksanakan dalam rangka menanggulangi kemiskinan di Indonesia, antara lain: Inpres Desa Tertinggal (IDT), Bantuan Langsung Tunai (BLT), Program Pengembangan Kecamatan (PPK), Program Raskin dan Subsidi BBM, serta Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP)

Seseorang dikatakan miskin bila pendapatannya berada di bawah ambang batas miskin. Pendapatan ambang batas miskin adalah setara dengan harga 2.100 kalori bahan makanan ditambah 10 (sepuluh) persen dari padanya untuk keperluan lainnya. Dengan demikian, seseorang dikatakan miskin tergantung kepada besarnya pendapatannya dan pendapatan ambang batas miskin. Pendapatan ambang batas miskin sangat dipengaruhi oleh tingkat harga bahan makanan utama masyarakat dan tingkat harga barang konsumsi lainnya. Adapun kondisi kemiskinan di Kabupaten Morowali dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.15  
Garis Kemiskinan dan Penduduk Miskin Menurut Kabupaten/Kota Di Provinsi Sulawesi Tengah, 2017 – 2021

Kabupaten/ Kota	Garis Kemiskinan (Rp/Kapita/Bln)				Jumlah Penduduk Miskin (Ribu) Jiwa					Persentase Penduduk Miskin (%)				
	2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
Banigai Kepulauan	317.475	317.475			18,56	18,38	17,54			15,92	15,65	14,84		
Banggai	373.695	373.695			33,5	33,72	29,30			9,20	9,12	7,80		
<b>Morowali</b>	<b>402.292</b>	<b>402.292</b>	<b>428.744</b>	<b>-</b>	<b>16,99</b>	<b>17,03</b>	<b>16,61</b>	<b>16,50</b>	<b>85.456</b>	<b>14,55</b>	<b>14,34</b>	<b>13,75</b>	<b>13,43</b>	<b>13,75</b>
Poso	449.834	449.834			41,88	41,75	39,92			17,16	16,71	15,65		
Dfonggala	308.212	308.212			54,44	54,28	55,83			18,17	18,03	18,40		
Tolit-toli	299.052	299.052			30,64	31,79	30,79			13,3	13,66	13,09		
Buol	332.163	332.163			25,76	25,39	24,51			16,65	16,08	15,19		
Parigi Moutong	388.440	388.440			82,88	83,66	81,36			17,55	17,41	16,64		
Tojo Una-Una	442.186	442.186			27,3	27,78	26,36			18,15	18,27	17,16		
Sigi	316.949	316.949			29,55	29,78	30,82			12,66	12,6	12,91		
Banggai Laut	324.734	324.734			11,63	11,97	11,46			16,17	16,32	15,34		
Morowali Utara	412.942	412.942			19,25	19,4	19,25			15,73	15,53	15,08		
Kota Palu	492.085	492.085			25,49	25,26	26,62			6,74	6,58	6,83		
Sulawesi Tengah	413.785	413.785			417,87	420,21	410,36	398,73		14,14	14,01	13,48	12,92	

Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021

Berdasarkan pada tabel 2.15 terjadi kenaikan garis kemiskinan di Kabupaten Morowali dari tahun 2018 yaitu sebesar Rp. 402.292 menjadi Rp. 428.744 pada tahun 2019, yang artinya bahwa apabila pengeluaran dalam satu bulan di bawah garis kemiskinan maka dikategorikan miskin. Sedangkan penduduk miskin Tahun 2019 jumlah penduduk miskin di Kabupaten Morowali mencapai 16,61 ribu orang (13,75 persen), berkurang dibandingkan dengan kondisi Tahun 2018 yang sebesar 17,03 ribu orang (14,34 persen). hal ini disebabkan karena terbukanya lapangan

pekerjaan disektor pertambangan dan penggalian dan juga beberapa program kegiatan yang menyentuh pada sektor pertanian, sektor perikanan dan sektor lainnya. Namun pada tahun 2021 persentase penduduk miskin di Morowali meningkat menjadi 13,75% dari tahun 2020 13,43%, hal ini disebabkan oleh tingginya beban pengeluaran masyarakat yang tidak dibarengi dengan tingkat pendapatan akibat adanya pandemi Covi-19, juga tingkat pengangguran yang tinggi karena adanya ketambahan jumlah penduduk dari wilayah lain masuk ke wilayah Kab. Morowali terutama di wilayah Kecamatan Bahodopi.

### 2.1.2.2.3. Pengangguran

Tingkat Pengangguran adalah rasio Jumlah Pengangguran terhadap Jumlah Angkatan Kerja. Penganggur adalah Tenaga Kerja yang sedang mencari pekerjaan atau yang bekerja kurang dari dua jam pada minggu yang lalu. Tingkat pengangguran adalah rasio Jumlah Pengangguran terhadap Jumlah Angkatan Kerja. Seseorang dikatakan Bekerja bila yang bersangkutan bekerja lebih dari 2 jam pada minggu yang lalu. Rasio Orang yang Bekerja adalah rasio Jumlah Orang yang Bekerja terhadap Jumlah Angkatan Kerja. Adapun Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kabupaten Morowali yaitu sebagai berikut :

Tabel 2.16  
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Tengah (Agustus), 2017 – 2021)

Kabupaten/Kota	2017	2018	2019	2020	2021*
1	2	3	4	5	6
Banggai Kepulauan	70.72	70.18	73.55	72.97	
Banggai	69.4	71.49	66.93	69.79	
<b>Morowali</b>	<b>60.72</b>	<b>60.8</b>	<b>62.6</b>	<b>64.7</b>	<b>65,55</b>
Poso	76.84	75.48	72.36	74.78	
Donggala	60.33	63.82	65.52	63.93	
Toli-Toli	60.79	66.57	62.25	65.95	
Buol	64.56	67.02	66.93	69.75	
Parigi Moutong	67.3	72.05	68.09	72.5	
Tojo Una-Una	68.87	76.58	78.59	75.33	
Sigi	67.8	69.1	69	69.24	
Banggai Laut	62.13	69.3	65,17	67.2	
Morowali Utara	75.30	74.45	65.65	69.85	
Kota Palu	66.28	65.82	65.28	66.46	
Sulawesi Tengah	67.14	69.52	67.59	69.44	

Sumber Data : BPS Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021

Tabel 2.17  
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Tengah, 2017 – 2021

Kabupaten/Kota	2017	2018	2019	2020	2021*
1	2	3	4	5	6
Banggai kepulauan	3.24	3.57	2.00	2.47	
Banggai	2.94	2.95	2.18	2.42	
<b>Morowali</b>	<b>2.72</b>	<b>2.80</b>	<b>2.97</b>	<b>5.21</b>	<b>4,01</b>
Poso	3.69	2.39	2.18	2.39	
Donggala	3.32	2.77	2.76	2.58	
Toli-Toli	4.35	3.13	3.10	3.74	
Buol	4.40	4.48	4.01	4.36	
Parigi Moutong	2.66	2.67	2.36	2.70	
Tojo Una-Uno	2.88	3.68	2.92	2.84	
Sigi	5.29	3.73	2.54	3.36	
Banggai Laut	3.21	3.28	3.04	3.09	
Morowali Utara	2.00	2.13	3.05	5.16	
Kota Palu	6.56	5.73	6.32	8.36	
Sulawesi Tengah	3.81	3.37	3.11	3.77	

Sumber Data : BPS Provinsi Sulawesi Tengah

Dibalik perekonomian yang tinggi di Provinsi Sulawesi Tengah terdapat juga ketimpangan dalam masalah ketenagakerjaan salah satunya adalah Kabupaten Morowali. Berdasarkan tabel 2.17 Tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Morowali termasuk kategori sedang karena tingkat pengangguran terbuka Kabupaten Morowali Tahun 2019 hanya mencapai 3,03 % berada pada urutan ke tiga dari 13 kabupaten/kota lainnya di Provinsi Sulawesi Tengah. Pada tahun 2020 tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Morowali meningkat 5,21% dari 2,97% pada tahun 2019. Hal ini disebabkan adanya ketambahan jumlah penduduk dari wilayah lain masuk ke wilayah Kab. Morowali terutama di wilayah Kecamatan Bahodopi.

#### 2.1.2.2.4. Gini Ratio

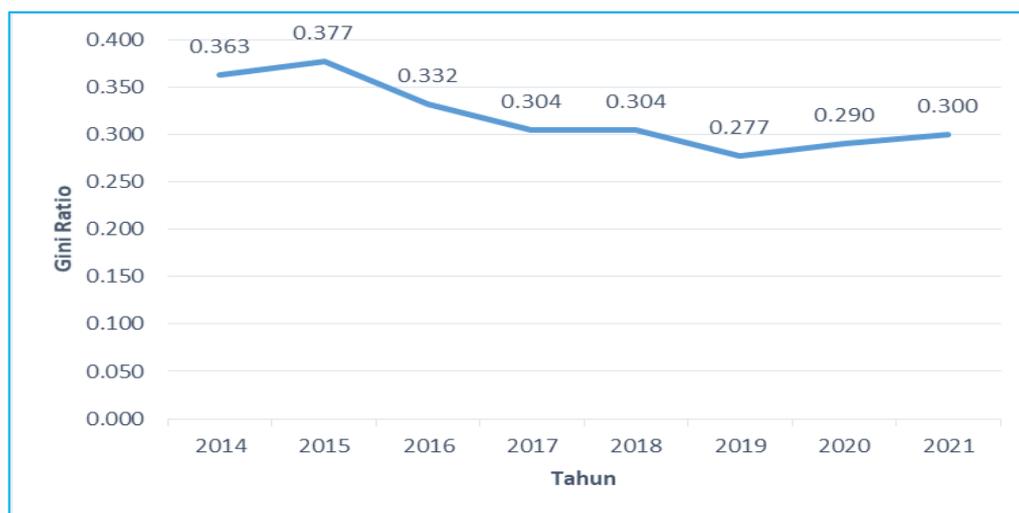
Gini Ratio adalah Ukuran pemerataan pendapatan yang dihitung berdasarkan kelas pendapatan. Nilai Gini Ratio berkisar antara 0-1, semakin tinggi nilai Gini Ratio menunjukkan ketimpangan yang semakin tinggi. Adapun Indeks Gini ratio Provinsi Sulawesi Tengah dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.18  
Gini Ratio Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Tengah, 2017 – 2021

KABUPATEN/KOTA	GINI RASIO									
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Banggai Kepulauan	0,338	0,315	0,301	0,320	0,302	0,338	0,345			
Banggai	0,374	0,407	0,317	0,321	0,319	0,302	0,311			
<b>Morowali</b>	<b>0,371</b>	<b>0,396</b>	<b>0,363</b>	<b>0,377</b>	<b>0,332</b>	<b>0,304</b>	<b>0,304</b>	<b>0,277</b>	<b>0,290</b>	<b>0,300</b>
Poso	0,331	0,304	0,317	0,382	0,357	0,302	0,300			
Donggala	0,329	0,260	0,274	0,312	0,316	0,348	0,326			
Tolitoli	0,329	0,337	0,334	0,306	0,375	0,382	0,369			
Buol	0,368	0,321	0,336	0,307	0,313	0,329	0,348			
Parigi Moutong	0,310	0,300	0,289	0,343	0,310	0,304	0,305			
Tojo Una-una	0,341	0,340	0,339	0,338	0,338	0,330	0,313			
Sigi	0,337	0,357	0,310	0,330	0,315	0,330	0,303			
Banggai Laut	-	-	-	0,308	0,306	0,307	0,307			
Morowali Utara	-	-	-	0,337	0,335	0,336	0,314			
Kota Palu	0,369	0,410	0,397	0,430	0,363	0,358	0,357			
<b>Sulawesi Tengah</b>	<b>0,374</b>	<b>0,389</b>	<b>0,362</b>	<b>0,374</b>	<b>0,362</b>	<b>0,355</b>	<b>0,346</b>			

Sumber Data : Gini Ratio Kabupaten Morowali Tahun 2021

Berdasarkan Tabel 2.18 Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat Pada Tahun 2018, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Sulawesi Tengah yang diukur oleh Gini Ratio adalah sebesar 0,346. Angka ini relatif stagnan jika dibandingkan dengan Gini Ratio Tahun 2017 yang sebesar 0,355, sementara itu jika dibandingkan dengan Gini Ratio Tahun 2018 yang sebesar 0,346, angka tersebut turun sebesar 0,019 poin. dibandingkan dengan Kabupaten lainnya Kabupaten Morowali masih berada pada Tingkat ketimpangan rendah hal ini disebabkan karena Gini ratio Kabupaten Morowali pada Tahun 2016 sebesar 0,332 dan untuk tahun 2017 mencapai 0,304 sedangkan tahun 2018 tetap dengan nilai 0,304. Namun Gini ratio di Kabupaten Morowali di tahun 2018 berada di urutan ketiga setelah kabupaten Poso dan Kabupaten sigi. Kemudian pada tahun 2019 untuk pertama kali ketimpangan masuk golongan relatif rendah dengan angka 0,277, kemudian naik menjadi 0,290 tahun 2020. Namun meningkat kembali menjadi 0,300 tahun 2021 yang termasuk golongan ketimpangan relatif sedang.



Sumber Data : Gini Ratio Kabupaten Morowali Tahun 2021

Gambar 2.12  
Gini Ratio Kabupaten Morowali Tahun 2014-2021

Jika dilihat dari gambar 2.12 diatas, terlihat bahwa Gini Ratio Kabupaten Morowali dari tahun 2015 – 2019 memiliki trend menurun. Kemudian mengalami peningkatan pada pada tahun 2020 – 2021 menjadi 0,300. Hal ini tentu saja mengkhawatirkan karena disaat pertumbuhan ekonomi Kabupaten Morowali sedang tinggi namun distribusi pendapatan yang terjadi di masyarakat malah semakin kurang merata. Ketika pertumbuhan ekonomi Kabupaten Morowali mulai menunjukkan pertumbuhan yang positif dan diharapkan bisa terus meningkat, distribusi pendapatan penduduk di Kabupaten Morowali ternyata semakin timpang.

### 2.1.3 Aspek Pelayanan Umum

#### 2.1.3.1 Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar

##### 2.1.3.1.1 Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan

##### A. Angka Partisipasi Murni Dan Angka Partisipasi Kasar

Angka partisipasi murni adalah perbandingan penduduk usia antara 7 hingga 18 tahun yang terdaftar sekolah pada tingkat pendidikan SD/SLTP/SLTA dibagi dengan jumlah penduduk berusia 7 hingga 18 tahun. Angka Partisipasi Murni (APM) adalah persentase siswa dengan usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikannya dari jumlah penduduk di usia yang sama. APM menunjukkan partisipasi sekolah penduduk usia sekolah di tingkat pendidikan tertentu. Seperti APK, APM juga merupakan indikator daya serap penduduk usia sekolah di setiap jenjang pendidikan.

Tetapi, jika dibandingkan APK, APM merupakan indikator daya serap yang lebih baik karena APM melihat partisipasi penduduk kelompok usia standar di jenjang pendidikan yang sesuai dengan standar tersebut. APM Kabupaten Morowali dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.19  
APM dan APK Menurut Kabupaten Morowali, 2019 – 2021

Jenjang Pendidikan	Capaian					
	Angka Partisipasi Murni			Angka Partisipasi Kasar		
	2019	2020	2021*	2019	2020	2021*
SD/MI/Paket A	94,79	94,72	95,55	...	108,95	107,55
SMP/MTs/Paket B	72,73	73,49	74,86	...	103,84	102,60
SMA/SMK/MA/PAket B	67,59	67,54	69,02	...	81,03	80,89

Sumber: BPS Kabupaten Morowali Tahun 2021

APM dan APK Kabupaten Morowali pada semua jenjang pendidikan terus mengalami peningkatan, capaian tersebut harus terus di jaga untuk menjamin pelayanan pendidikan kepada masyarakat kabupaten morowali. Permasalahan lain adalah sarana dan prasarana sekolah yang belum memadai. Khusus pada wilayah kepulauan yang menjadi permasalahan adalah kurangnya ketersediaan guru serta keterjangkauan dan aksesibilitas murid bersekolah. Pada beberapa wilayah kecamatan khususnya kepulauan masih banyak terdapat gedung sekolah dengan kondisi belum layak dalam menjalankan proses belajar mengajar serta belum memadainya sarana prasarana seperti buku dan peralatan mengajar, sehingga mengakibatkan proses belajar mengajar menjadi tidak optimal.

## B. Angka Putus Sekolah

Angka putus sekolah menunjukkan tingkat putus sekolah disuatu jenjang pendidikan, misalnya angka putus sekolah SD menunjukkan persentase anak yang berhenti sekolah sebelum tamat SD yang dinyatakan dalam persen. Adapun angka putus sekolah dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.20  
APSMenurut Kabupaten Morowali, 2019 – 2021

Bidang Urusan/Indikator	Capaian		
	2019	2020	2021*
Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI	0,45	0,00	98,92
Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs	3,65	0,00	95,69
Angka Putus Sekolah (APS) SMA/SMK/MA	0,34	0,44	90,40

Sumber: BPS Kabupaten Morowali Tahun 2021

Terjadi peningkatan angka putus sekolah pada jenjang pendidikan SMA/SMK/MA, hal ini di sebabkan karena beberapa faktor yaitu masih adanya budaya lokal yang berpemahaman bahwa anak memiliki kewajiban membantu orang tua mencari nafkah sehingga banyak anak yang berhenti sekolah dan membantu orang tuanya bekerja padahal program pendidikan gratis telah menyentuh jenjang pendidikan SMA. Hal ini menjadi masukan untuk pemerintah provinsi dikarenakan kewenangan pendidikan SMA sudah menjadi tanggung jawab dari pemerintah provinsi.

### C. Angka Kelulusan Sekolah

Angka kelulusan sekolah menunjukkan tingkat kelulusan sekolah disuatu jenjang pendidikan, misalnya angka kelulusan sekolah SD menunjukkan persentase anak yang lulus sekolah yang dinyatakan dalam persen. Adapun angka kelulusan sekolah dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.21  
Angka Kelulusan Sekolah Berdasarkan Jenjang Pendidikan

Bidang Urusan/Indikator	Capaian		
	2019	2020	2021*
Angka Kelulusan SD/MI	100		100
Angka Kelulusan SMP/MTS	100	100	100
Angka Kelulusan SMA/SMK/MA	100	100	100

Sumber: BPS Kabupaten Morowali Tahun 2021

Angka melanjutkan sekolah menunjukkan tingkat kelulusan sekolah disuatu jenjang pendidikan yang kemudian melanjutkan kejenjang pendidikan selanjutnya, misalnya tingkat kelulusan sekolah SD yang kemudian melanjutkan kejenjang

sekolah SMP yang dinyatakan dalam persen. Adapun angka melanjutkan sekolah dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.22  
Angka Melanjutkan Sekolah Berdasarkan Jenjang Pendidikan

Indikator	Capaian		
	2019	2020	2021*
Angka Melanjutkan dari SD/MI ke SMP/MTs	100	100	100
Angka Melanjutkan dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA	100	100	100

Sumber: BPS Kabupaten Morowali Tahun 2021

### 2.1.3.1.2 Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan

#### A. Persentase Balita Stunting

Stunting adalah kondisi dimana balita memiliki panjang atau tinggi badan yang kurang jika dibandingkan dengan umur. Kondisi ini diukur dengan panjang atau tinggi badan yang lebih dari minus dua standar deviasi median standar pertumbuhan anak dari WHO. Balita stunting termasuk masalah gizi kronik yang disebabkan oleh banyak faktor seperti kondisi social ekonomi, gizi ibu saat hamil, kesakitan pada bayi dan kurangnya asupan gizi pada bayi. Balita stunting dimasa yang akan datang mengalami kesulitan dalam mencapai perkembangan fisik dan kognitif yang optimal. Persentase balita stunting di Kabupaten Morowali dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.23  
Presentase Balita Stunting Kabupaten Morowali  
Pada Tahun (2019 -2020)

Indikator	2019		2020		2021	
	Total Balita Stunting (Orang)	persentase stunting (%)	Total Balita Stunting (Orang)	persentase stunting (%)	Total Balita Stunting (Orang)	persentase stunting (%)
Angka Stunting	1.042	12	849	7,8	556	5,2

Sumber Data : Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2022

#### B. Angka Kematian Ibu dan Bayi

Angka kematian ibu (AKI) adalah jumlah kematian selama kehamilan atau dalam periode 42 hari setelah berakhirnya kehamilan, akibat semua sebab yang

terkait dengan atau diperberat oleh kehamilan atau penanganannya, tetapi bukan disebabkan oleh kecelakaan atau cedera (WHO, 2014), sedangkan Angka kematian bayi (AKB) adalah jumlah kematian bayi dalam usia 1 tahun pertama kehidupan per 1000 kelahiran hidup. Angka ini merupakan salah satu indikator derajat kesehatan suatu bangsa. Angka kematian ibu dan bayi di Kabupaten Morowali dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.24  
Angka Kematian Ibu Bayi Kabupaten Morowali,  
Pada Tahun (2019 – 2021)

INDIKATOR	Capaian		
	2019	2020	2021
Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup	13	13.5	14.5
Angka Kelangsungan hidup bayi	12.95	13.4	14.4
Angka Kematian Balita per 1000 kelahiran bayi	0.7	1	0.64
Angka Kematian Neonatal per 1000 kelahiran hidup	10.5	10,8	12.5
Angka Kematian Ibu per 100,000 kelahiran hidup	315	66	353

Sumber Data : Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2022

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa Angka kematian ibu/100.000 Kelahiran Hidup mengalami fluktuasi dimana Tahun 2019 kematian ibu mencapai 9 orang (315/100.000 KH) dan menurun pada tahun 2020 berjumlah 2 orang (66/100.000 KH). Data tersebut menunjukkan adanya trend peningkatan dalam mengatasi kematian ibu dan bayi. Hal tersebut harus di pertahankan sehingga tidak terjadi kematian ibu dan bayi di karenakan pelayanan kesehatan yang kurang optimal, mengingat urusan kesehatan adalah urusan wajib yang harus di lakukan oleh pemerintah yang mana masyarakat memiliki hak atas setiap pelayanan kesehatan. Namun pada tahun 2021 mengalami peningkatan sejumlah 11 Orang (353/100.000 KH), hal ini dikarenakan kurangnya sarana dan prasarana ter standar di Puskesmas juga kurangnya tenaga kesehatan yang terlatih dan penerapan Inovasi Gemasebumi yang tidak diterapkan secara maksimal karena kurang keterlibatan dari lintas sekktor.

### **C. Rasio puskesmas, poliklinik, pustu persatuan penduduk**

Rasio puskesmas, poliklinik dan pustu bermanfaat untuk mengetahui cakupan pelayanan kesehatan tersebut dalam memenuhi pelayannya kepada penduduk, dengan demikian pelayanan kesehatan dapat terpenuhi sesuai dengan

standar pelayanan. Data rasio puskesmas, poliklinik, pustu persatuan penduduk dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.25  
Data Rasio Puskesmas, Poliklinik dan Pustu Persatuan Penduduk

INDIKATOR	Capaian		
	2019	2020	2021
Rasio puskesmas, poliklinik, pustu persatuan penduduk (puskesmas per 1000 pddk)	0.08	0.08	0,08

Sumber Data : Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2022

#### D. Rasio Rumah Sakit persatuan penduduk

Rasio rumah sakit per satuan penduduk adalah jumlah rumah sakit per 10.000 penduduk. Rasio ini mengukur ketersediaan fasilitas rumah sakit berdasarkan jumlah penduduk. Data rasio rumah sakit persatuan penduduk dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.26  
Rasio Rumah Sakit Per Satuan Penduduk

INDIKATOR	Capaian		
	2019	2020	2021
Rasio Rumah Sakit persatuan penduduk (1000 pddk)	0.02	0.02	0,02

Sumber Data : Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2022

Dari data tersebut menunjukkan bahwa terdapat dua rumah sakit, dengan jumlah penduduk morowali 162.098 berarti satu rumah sakit melayani 81.049 penduduk. Jika melihat ideal rasio pelayanan penduduk, maka perlu adanya penambahan sarana prasarana, baik itu dari kamar pasien maupun peningkatan manajemen pelayanan sehingga bisa sejalan dengan standar pelayanan kesehatan Bed Occupancy Ratio (BOR). BOR berfungsi untuk melihat sejauh mana rumah sakit di gunakan oleh masyarakat, dan sejauh mana masyarakat menggunakan pelayanan rawat inap.

#### E. Rasio dokter per satuan penduduk

Rasio dokter per jumlah penduduk menunjukkan tingkat pelayanan yang dapat diberikan oleh dokter dibandingkan jumlah penduduk yang ada.

Tabel 2.27  
Rasio Dokter Per satuan Penduduk

INDIKATOR	Capaian		
	2019	2020	2021
Rasio dokter per satuan penduduk (1000 pddk)	0.32	0.32	0,32

Sumber Data : Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2022

Jika dilihat pada tabel di atas maka diketahui bahwa rasio dokter per 100.000 penduduk di Kabupaten Morowali yaitu 0,00026 pada tahun 2018 dan tetap sama pada tahun 2018 sehingga dapat diartikan bahwa 1 dokter melayani 3.125 penduduk. Hal ini menunjukkan bahwa Kabupaten Morowali masih membutuhkan ketersediaan tenaga dokter untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Indikator rasio dokter per jumlah penduduk menunjukkan tingkat pelayanan yang dapat diberikan oleh dokter dibandingkan jumlah penduduk yang ada. Apabila dikaitkan dengan standar sistem pelayanan kesehatan terpadu, idealnya satu orang dokter melayani 2.500 penduduk. Tetapi jika di bandingkan dengan standar kementerian kesehatan yaitu 26 dokter per 100.000 penduduk maka jumlah dokter tersebut sudah ideal hanya saja penyebarannya yang belum merata.

#### F. Rasio tenaga paramedis per satuan penduduk (1000 pddk)

Rasio Tenaga Medis per jumlah penduduk menunjukkan seberapa besar ketersediaan tenaga kesehatan dan cakupan pelayanan dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada penduduk

Tabel 2.28  
Data Rasio Tenaga Paramedis Per Satuan Penduduk

INDIKATOR	Capaian		
	2019	2020	2021
Rasio tenaga paramedis per satuan penduduk (1.000 pddk)	6.23	6.18	7,12

Sumber Data : Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2022

Jika dilihat pada tabel di atas maka diketahui bahwa rasio tenaga paramedis per 1.000 penduduk di Kabupaten Morowali yaitu 0,00623 pada tahun 2019 dengan artian bahwa 1 tenaga paramedis melayani 159 penduduk. Ini kemudian menunjukkan penurunan pada tahun 2020 yaitu 0,00618 bahwa 1 tenaga paramedis

melayani 161 penduduk. Kondisi tersebut menjelaskan bahwa terjadi penurunan ketersediaan tenaga paramedis di tengah populasi penduduk yang semakin bertambah. Selanjutnya pada tahun 2021 menunjukkan peningkatan yaitu 0,00712 dengan artian bahwa 1 tenaga paramedis melayani 140 penduduk. Kondisi tersebut menjelaskan bahwa terjadi peningkatan ketersediaan tenaga paramedis di tengah populasi penduduk yang semakin bertambah.

### G. Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani

Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani adalah ibu dengan komplikasi kebidanan di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu yang mendapat penanganan definitif sesuai dengan standar oleh tenaga kesehatan terlatih pada tingkat pelayanan dasar dan rujukan (Polindes, Puskesmas, Puskesmas PONED, Rumah Bersalin, RSIA/RSB, RSUD, RSUD PONEK). Pada prinsipnya, semua indikator pelayanan kesehatan terkait dengan pelayanan ibu dan bayi terjadi tren positif di Kabupaten Morowali. Adapun data cakupan tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.29  
Data Cakupan Komplikasi Kebidanan Yang Ditangani

BIDANG URUSAN / INDIKATOR	Capaian		
	2019	2020	2021
Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani	100	100	100

Sumber Data : Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2022

Adapun yang terkait dengan indikator cakupan diatas dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.30  
Cakupan Indikator Komplikasi Kebidanan Yang Ditangani

BIDANG URUSAN / INDIKATOR	Capaian		
	2019	2020	2021
Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan kompetensi kebidanan	100	100	100
Cakupan desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	94.48	96.28	97

Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan (jumlah gizi buruk)	100	100	100
Cakupan balita pneumonia yang ditangani	100	100	100
Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA	100	100	100
Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD	100	100	100
Penderita diare yang ditangani	2.525	2802	2.183
Angka Kejadian Malaria	0.26	0.13	0,06
Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin	100	100	100
Cakupan kunjungan bayi	100	100	100
Cakupan puskesmas (rasio puskesmas)	100	100	100
Cakupan pembantu puskesmas	25.65	25.65	29,65
Cakupan kunjungan ibu hamil K4 9(rasio kunjungan K4)	83.07	94	99
Cakupan pelayanan anak balita	65.61	56	100

Sumber Data : Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2022

### 2.1.3.1.3 Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

#### A. Infrastruktur Jalan

Indikator Infrastruktur jalan yang akan dijelaskan pada pembahasan ini adalah Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik, Rasio panjang jalan dengan jumlah penduduk, Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik ( > 40 KM/Jam). Terkait dengan ketiga indikator tersebut kondisinya dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.31  
Data Capaian Proporsi Jalan Dalam Kondisi Baik Pada Tahun (2019 – 2021)

BIDANG URUSAN/ INDIKATOR	Capaian		
	2019	2020	2021
Proporsi panjang Jaringan jalan dalam kondisi baik (%)	31,87	35,9	36,07
Rasio panjang jalan dengan jumlah penduduk	0.008	0.006	0,006
Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik ( > 40 KM/Jam)	14,53	19,98	26,82

Sumber Data : Dinas Pekerjaan Umum dan Penata Ruang Kab. Morowali Tahun 2022

Terjadi peningkatan yang signifikan untuk jaringan jalan dalam kondisi baik, tetapi terjadi penurunan pada rasio panjang jalan dengan jumlah penduduk. Hal ini disebabkan oleh semakin meningkatnya populasi penduduk di kabupaten morowali sehingga perlu menjadi pertimbangan terkait populasi penduduk. Meskipun begitu

program pembangunan jalan terus mengalami peningkatan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat untuk kelancaran aktivitas ekonomi.

## **B. Persentase rumah tinggal bersanitasi**

Persentase rumah tinggal bersanitasi adalah rumah tinggal yang mempunyai akses layanan sanitasi, sekurang-kurangnya memiliki fasilitas air bersih, pembuangan air besar/tinja, pembuangan limbah (air bekas) dan pembuangan sampah. Adapun persentase rumah tinggal bersanitasi pada Kabupaten Morowali dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.32  
Data Capaian Presentase Rumah Tinggal Bersanitasi Pada Tahun (2019 – 2021)

INDIKATOR	Capaian		
	2019	2020	2021*
Persentase rumah tinggal bersanitasi	74,58	75,13	82,84

Sumber Data : Dinas Pekerjaan Umum dan Penata Ruang Kab. Morowali Tahun 2020

Terjadi peningkatan rumah tinggal bersanitasi dari tahun 2019-2020, hal ini harus terus ditingkatkan mengingat angka tersebut masih jauh dari kondisi ideal khususnya di wilayah kepulauan. Sanitasi merupakan indikator wajib atau dengan kata lain menjadi standar pelayanan minimal pemerintah daerah sehingga wajib untuk di laksanakan dan di tingkatkan kinerjanya karena dengan membaiknya sanitasi maka secara tidak langsung mempengaruhi kondisi perekonomian atau kondisi angka kemiskinan masyarakat.

## **C. Proporsi rumah tangga pengguna air bersih**

Proporsi rumah tangga pengguna air bersih adalah rumah tangga yang mempunyai layanan air bersih. Bentuk penyediaan air bersih selain pemasangan pipa secara gravitasi juga dilakukan pemasangan pompa dan pembangunan sumur yang mana sumber air yang digunakan berasal dari mata air. Proporsi rumah tangga pengguna air bersih dapat dilihat pada tabel dibawah :

Tabel 2.33 Data Capaian Rumah Tangga Pengguna Air Bersih Pada Tahun (2019 – 2021)

Bidang Urusan/ Indikator	Capaian		
	2019	2020	2021*
Proporsi rumah tangga pengguna air bersih (%)	45.47	44.66	90,00

Sumber data: Dinas Pekerjaan umum dan Penata Ruang Kabupaten Morowali Tahun 2020

Pada Tahun 2020 terjadi penurunan rumah tangga pengguna air bersih sebesar 0,81 persen, maksudnya adalah adanya rumah tangga yang belum tersentuh layanan air bersih atau terbatasnya akses untuk menggunakan air bersih. Kondisi tersebut banyak terjadi di wilayah kepulauan. Hal tersebut menyebabkan adanya peningkatan penggunaan air sebesar 50% pada tahun 2021 dan menjadi tantangan tersendiri di karenakan kondisi topografi kepulauan, sehingga program air bersih di wilayah kepulauan tersebut harus tepat penanganannya dan terus mengevaluasi program-program yang sudah berjalan. Hal ini harus terus di tingkatkan dan menjadi perhatian pemerintah mengingat air bersih adalah kebutuhan dasar masyarakat dan menjadi indikator kinerja wajib oleh pemerintah daerah.

#### D. Rasio Jaringan Irigasi

Rasio jaringan irigasi adalah perbandingan panjang jaringan irigasi terhadap lahan budidaya. Rasio jaringan irigasi ini memberikan gambaran ketersediaan saluran irigasi untuk kebutuhan budidaya pertanian. Rasio jaringan irigasi dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.33  
Data Capaian Rasio Jaringan Irigasi, Pada Tahun (2018 – 2021)

BIDANG URUSAN/ INDIKATOR	Capaian			
	2018	2019	2020	2021*
Rasio Jaringan Irigasi	33,5	42,4		0,72

Sumber data: Dinas Pekerjaan umum dan Penata Ruang Kabupaten Morowali Tahun 2019

Dari tabel tersebut di atas, maka dapat di ketahui bahwa masih besarnya kebutuhan jaringan irigasi untuk memenuhi kebutuhan lahan budidaya. Hal ini juga dapat dilihat dari produktivitas pertanian yang masih rendah, sehingga untuk

meningkatkan produktivitas tersebut maka perlu adanya peningkatan jaringan irigasi untuk mencapai target produktivitas pertanian.

#### 2.1.3.1.4 Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Pemukiman

##### A. Persentase Rumah Layak Huni

Rumah layak huni adalah rumah atau tempat tinggal yang layak untuk dijadikan hunian dari sisi atap, lantai dan dinding bagi penduduk kategori rumah tangga miskin. Layak atau tidak layaknya suatu tempat tinggal dinilai berdasarkan perhitungan teknis dan peninjauan lapangan. Semua data yang terkumpul dilakukan analisis kualitatif dan kuantitatif sampai mencapai rumusan kesepakatan untuk menilai layak atau tidak layak rumah tersebut untuk dijadikan hunian atau tempat tinggal. Rumah layak huni di Kabupaten Morowali dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.34  
Data Rumah Layak Huni (Unit), Pada Tahun (2019 – 2021)

BIDANG URUSAN / INDIKATOR	Capaian		
	2019	2020	2021
Rumah Layak Huni (unit )	770	1.082	555

Sumber data: Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kabupaten Morowali Tahun 2022

Dari tabel diatas diketahui bahwa terjadi peningkatan yang signifikan capaian rumah layak huni dari tahun 2019, 2020. Ini disebabkan karena adanya program unggulan pemerintah daerah untuk pembangunan rumah layak huni bagi rumah tangga miskin. Sehingga indikator program kegiatan ini masih butuh perhatian yang sangat tinggi guna mengejar target RPJMD tersebut dan di sisi lain indikator ini merupakan program pendukung dalam pengentasan kemiskinan. Program ini kategori berhasil, karena dengan adanya program ini maka pengentasan kemiskinan dari bidang infrastruktur dapat di atasi secara perlahan berdasarkan data angka kemiskinan. Namun bantuan rumah layak huni menurun tahun 2021. Program ini akan terus berlanjut khususnya di wilayah pesisir dan kepulauan.

Secara umum target RPJMD 2.000 Unit Rumah Layak Huni sampai dengan Tahun 2023 sudah melebihi dari target RPJMD, sampai pada Tahun 2021 sudah terbangun sejumlah 2.407 Unit atau sudah mencapai 120,35%.

## B. Persentase Rumah Tangga Pengguna Listrik

Listrik merupakan kebutuhan dasar saat ini yang perlu menjadi perhatian pemerintah. Kondisi kabupaten morowali saat ini masih ada beberapa wilayah yang belum teraliri listrik, sehingga saat ini pemerintah daerah terus menggenjot untuk memberikan pelayanan listrik kepada daerah-daerah tersebut sehingga terjadi peningkatan tren penggunaan listrik. Kondisi tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.35  
Persentase Rumah Tangga Pengguna Listrik Pada tahun (2019 – 2021)

BIDANG URUSAN / INDIKATOR	Capaian		
	2019	2020	2021*
Persentase Rumah Tangga Pengguna Listrik	93	94	93-95

Sumber data: Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kabupaten Morowali Tahun 2022

### 2.1.3.1.5. Urusan Pemerintahan Bidang Sosial

Urusan bidang sosial dapat dilihat dari data kemiskinan sebagaimana tabel di bawah ini :

Tabel 2.36  
Persentase Penduduk Miskin  
Pada Tahun (2019 – 2021)

Indikator	Tahun		
	2019	2020	2021
Persentase Penduduk Miskin	13.75	13.43	13,75
Rasio Kesenjangan Kemiskinan/Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)	0.5	0.67	0,32

Sumber data: BPS Provinsi Sulawesi Tengah

Berdasarkan pada tabel diatas, terjadi penurunan garis kemiskinan di Kabupaten Morowali dimana pada Tahun 2019 jumlah penduduk miskin (penduduk dengan pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan) di Kabupaten Morowali mencapai 16,61 ribu orang (13,75 persen), berkurang dibandingkan dengan kondisi Tahun 2018 yang sebesar 17,03 ribu orang (14,34 persen). hal ini disebabkan karena terbukanya lapangan pekerjaan disektor pertambangan dan penggalian dan juga beberapa program kegiatan yang menyentuh pada sektor pertanian, namun pada sektor perikanan di wilayah kepulauan program kegiatannya

belum terlaksana dengan baik. Namun pada tahun 2021 persentase penduduk miskin di Morowali meningkat menjadi 13,75% dari tahun 2020 13,43%, hal ini disebabkan oleh tingginya beban pengeluaran masyarakat yang tidak dibarengi dengan tingkat pendapatan akibat adanya pandemi Covi-19, juga tingkat pengangguran yang tinggi karena adanya ketambahan jumlah penduduk dari wilayah lain masuk ke wilayah Kab. Morowali terutama di wilayah Kecamatan Bahodopi.

### 2.1.3.2 Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar

#### 2.1.3.2.1 Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja

Tabel 2.37

Jumlah Angkatan Kerja Dan Tingkat Pengangguran Terbuka Pada Tahun (2018 – 2021)

Indikator	Tahun			
	2018	2019	2020	2021*
Jumlah Angkatan Kerja	16,123	53.988	57.727	NA
Tingkat Pengangguran terbuka	2,89	3,03	5,21	4,01

Sumber Data : Kabupaten Morowali dalam Angka Tahun 2021

Dibalik perekonomian yang tinggi di Provinsi Sulawesi Tengah terdapat juga ketimpangan dalam masalah ketenagakerjaan salah satunya adalah Kabupaten Morowali. Berdasarkan tabel di atas Tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Morowali termasuk kategori sedang karena tingkat pengangguran terbuka Kabupaten Morowali Tahun 2019 hanya mencapai 3,03 % berada pada urutan ke enam dari 13 kabupaten/kota lainnya di Provinsi Sulawesi Tengah. Pada tahun 2020 tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Morowali meningkat 5,21% dari 2,97% pada tahun 2019. Hal ini disebabkan adanya ketambahan jumlah penduduk dari wilayah lain masuk ke wilayah Kab. Morowali terutama di wilayah Kecamatan Bahodopi.

### 2.1.3.2.2 Urusan Pemerintahan Bidang Pangan

- a) Analisis Indikator SKPG
  - Aspek Ketersediaan Pangan

Tabel 2.37  
Aspek Ketersediaan Pangan

No.	KECAMATAN	Rasio Ketersediaan (r)	Skor_Pertanian
1	Menui Kepulauan	0.53	3
2	Bungku Selatan	16.33	1
3	Bahodopi	0.21	3
4	Bungku Pesisir	1.08	2
5	Bungku Tengah	0.58	3
6	Bungku Timur	2.48	1
7	Bungku Barat	3.09	1

Sumber data: Bappeda Kabupaten Morowali (Di Olah)

Ket : ■ Aman  
■ Rawan  
■ Waspada

- b) Aspek Akses Pangan Tahunan
  - Data Keluarga Miskin

Tabel 2.38  
Data Keluarga Miskin

No	KECAMATAN	Jml Keluarga	KK_Pra Sejahtera	KK_Sejahtera I	KK_Pra dan sejahtera I (Total)	% Pra dan Sejahtera I (r)	Skor_Miskin
1	Menui Kepulauan	4,122	3,048	-	3,048	74	3
2	Bungku Selatan	4,202	3,082	-	3,082	73	3
3	Bahodopi	14,529	1,232	-	1,232	8	1
4	Bungku Pesisir	1,897	1,030	-	1,030	54	3
5	Bungku Tengah	8,967	2,557	-	2,557	29	2
6	Bungku Timur	3,639	1,120	-	1,120	31	2
7	Bungku Barat	4,315	1,815	-	1,815	42	3
8	Bumi Raya	4,551	1,905	-	1,905	42	3
9	Wita Ponda	6,309	1,729	-	1,729	27	2
10	<b>MOROWALI</b>	<b>52,531</b>	<b>17,518</b>	-	<b>17,518</b>	<b>33</b>	<b>2</b>

Sumber data: Bappeda Kabupaten Morowali (Di Olah)

Ket ■ Aman  
■ Rawan  
■ Waspada

c) Aspek Pemanfaatan Pangan

➤ Data Status Gizi

Tabel 2.39  
Data Status Gizi Menurut Kecamatan Kabupaten Morowali

No	KECAMATAN	Total KEP	% KEP (r)	Skor KEP
1	Menui Kepulauan	4	1.01	1
2	Bungku Selatan	53	20.23	3
3	Bahodopi	14	2.88	1
4	Bungku Pesisir	13	6.10	1
5	Bungku Tengah	8	2.34	1
6	Bungku Timur	1	0.42	1
7	Bungku Barat	3	2.78	1
8	Bumi Raya	13	4.81	1
9	Wita Ponda	5	2.54	1
	<b>MOROWALI</b>	<b>114</b>	<b>4.54</b>	<b>1</b>

Sumber data: Dinas Kesehatan Kabupaten Morowali

Ket :   
 Aman  
 Rawan  
 Waspada

d) Indek Komposit

➤ Situasi Pangan dan Gizi

Tabel 2.40  
Data Situasi Pangan Dan Gizi

No	KECAMATAN	S_Pertanian	S_Pra dan Sejahtera I	S_KEP	Skor_Komposit	Indeks Komposit Tahunan (IKT)
1	Menui Kepulauan	3	3	1	7	3
2	Bungku Selatan	1	3	3	7	3
3	Bahodopi	3	1	1	5	3
4	Bungku Pesisir	2	3	1	6	3
5	Bungku Tengah	3	2	1	6	3
6	Bungku Timur	1	2	1	4	1
7	Bungku Barat	1	3	1	5	3
8	Bumi Raya	1	3	1	5	3
9	Wita Ponda	1	2	1	4	1
10	<b>MOROWALI</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>1</b>

Sumber data: Dinas Kesehatan Kabupaten Morowali

Ket :   
 Aman  
 Rawan  
 Waspada

### 2.1.3.2.3 Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Tabel 2.41  
Laju pertumbuhan penduduk (LPP)

Indikator	Tahun		
	2010-2019	2010-2020	2010-2021
Laju pertumbuhan penduduk (LPP)	1.92	0.953	

Sumber data: Kabupaten Morowali Dalam Angka Tahun 2021

### 2.1.3.2.4 Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan

Tabel 2.42  
Capaian Indikator Bidang Kinerja Bidang Perhubungan

Indikator	CAPAIAN		
	2019	2020	2021
Jumlah arus penumpang angkutan umum (kapal laut)	17.000	17.000	18.24.180
Jumlah kapal berangkat	300	300	304
Jumlah penumpang turun	9.000	5.000	13.080
Jumlah Penumpang naik	8.000	6.000	11.100
Jumlah barang bongkar (ton)	200.000	15.000	10.640
Jumlah barang muat (ton)	400.000	35.000	9.120
Rasio Ijin Trayek	17	17	10
Jumlah uji kir angkutan umum	-	150	-
Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis	3	1	3
Persentase layanan angkutan darat	33.5	35	30
Persentase kepemilikan KIR angkutan umum	-	150	-
Pemasangan rambu-rambu	350	-	45
Rasio panjang jalan per jumlah kendarann	4.97	4,7	1;15
Jumlah orang/ barang yang terangkut angkutan umum	6.521	6.000	105.120
Jumlah orang/barang melalui dermaga/bandara/terminal pertahun	17.000	17.000	181.566

Sumber data: Dinas Perhubungan Kabupaten Morowali tahun 2022

## 2.1.3.2.5 Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika

### a. Data Tower

Tabel 2.43  
Data Tower Kabupaten Morowali

NO	SITEID	SITE NAME	KOTA_KABUPATEN	KECAMATAN	DESA	JENIS JARINGAN		
						2G	3G	4G
1	COI097	COMBAT MOROWALI	MOROWALI	BAHODOPI	FATUFIA	Ya	-	Ya
2	LWK038	IPI	MOROWALI	BUNGKU TENGAH	IPI	Ya	Ya	Ya
3	MRW002	BUNGKU	MOROWALI	BUNGKU TENGAH	MARSAOLEH	Ya	Ya	Ya
4	MRW003	BAHONSUAI	MOROWALI	BUMI RAYA	PARILANGKE	Ya	Ya	Ya
5	MRW006	LAANTULA JAYA	MOROWALI	WITA PONDA	LANTULA JAYA	Ya	Ya	Ya
6	MRW008	WOSU	MOROWALI	BUNGKU BARAT	WOSU	Ya	Ya	Ya
7	MRW016	BAHODOPI	MOROWALI	BAHODOPI	BAHODOPI	Ya	Ya	Ya
8	MRW017	BUMI RAYA	MOROWALI	BUMI RAYA	PEBATAE	Ya	Ya	Ya
9	MRW019	UNGKAYA	MOROWALI	WITA PONDA	UNGKAYA	Ya	Ya	Ya
10	MRW022	KANTOR BUPATI MOROWALI	MOROWALI	BUNGKU TENGAH	BENTE	Ya	Ya	Ya
11	MRW023	LIMBO MAKMUR	MOROWALI	BUMI RAYA	LIMBO MAKMUR	Ya	Ya	Ya
12	MRW024	BENTE	MOROWALI	BUNGKU TENGAH	BENTE	Ya	Ya	Ya
13	MRW025	KEPULAUAN MENUI	MOROWALI	MENUI KEPULAUAN	ULUNAMBO	Ya	-	-
14	MRW028	DMT ATANANGA	MOROWALI	BUMI RAYA	SAMARENDA	Ya	-	Ya
15	MRW033	TBG LANONA	MOROWALI	BUNGKU TENGAH	LANONA	Ya	Ya	Ya
16	MRW034	TBG MATANSALAH	MOROWALI	BUNGKU TENGAH	MATANSALA	Ya	Ya	Ya
17	MRW035	TBG TOPUTI	MOROWALI	BUNGKU TENGAH	TOFUTI	Ya	Ya	Ya
18	MRW044	DMT BAHOMOLEO	MOROWALI	BUNGKU TENGAH	BAHOMOLEO	Ya	Ya	Ya
19	MRW120	TBG BUNGKU TIMUR	MOROWALI	BUNGKU TIMUR	KAPALA	Ya	-	-
20	MRW045	DMT BAHOMETEFE	MOROWALI	BUNGKU TIMUR	BAHOMETEFE	Ya	Ya	Ya
21	MRW046	DMT FATUFIA	MOROWALI	BAHODOPI	FATUFIA	Ya	Ya	Ya
22	MRW117	TBG FATUFIA	MOROWALI	BAHODOPI	FATUFIA	Ya	Ya	Ya
23	MRW051	TBG BAHOMAKMUR	MOROWALI	BAHODOPI	BAHOMAKMUR	Ya	Ya	Ya
24	MRW052	TBG LEULEA	MOROWALI	BAHODOPI	BAHODOPI	Ya	Ya	-
25	MRW058	TBG SALONSA JAYA	MOROWALI	WITA PONDA	SOLONSA JAYA	Ya	-	-
26	MRW059	TBG TOFOGARO	MOROWALI	BUNGKU BARAT	TOFOGARO	Ya	Ya	Ya
27	MRW060	TBG KALEROANG	MOROWALI	BUNGKU SELATAN	KALEROANG	Ya	-	-
28	MRW072	IMIP FERROCHROME FACTORY	MOROWALI	BAHODOPI	FATUFIA	Ya	Ya	Ya
29	MRW076	BDM MOROWALI	MOROWALI	BAHODOPI	FATUFIA	Ya	Ya	Ya
30	MRW077	TBG ARTHABUMI MOROWALI	MOROWALI	BUNGKU PESISIR	LAROENAI	Ya	Ya	Ya
31	MRW078	BDM MOROWALI 2	MOROWALI	BAHODOPI	FATUFIA	Ya	Ya	Ya
32	MRW083	API BUNGKU TENGAH	MOROWALI	BUNGKU TENGAH	BAHOMOHONI	Ya	Ya	Ya
33	MRW084	BDM BROLY	MOROWALI	BAHODOPI	LABOTA	Ya	Ya	Ya
34	MRW086	MCR PASAR BUNGKU	MOROWALI	BUNGKU TENGAH	BUNGI	Ya	Ya	Ya
35	MRW087	DMT UMBELE	MOROWALI	BUMI RAYA	UMBELE	Ya	Ya	Ya
36	MRW088	DMT BAHOMOHONI	MOROWALI	BUNGKU TENGAH	BAHOMOHONI	Ya	Ya	Ya
37	MRW089	WANXIANG	MOROWALI	BUNGKU TIMUR	BAHOMETEFE	Ya	Ya	Ya
38	MRW092	IMIP FERROCHROME FACTORY	MOROWALI	BAHODOPI	LABOTA	Ya	Ya	Ya
39	MRW093	IMIP RUSUNAWA APARTEMENT	MOROWALI	BAHODOPI	LABOTA	Ya	Ya	Ya
40	MRW098	BDM MESS LIME STONE	MOROWALI	BAHODOPI	FATUFIA	Ya	Ya	Ya
41	MRW099	BDM MESS BLOK M	MOROWALI	BAHODOPI	FATUFIA	Ya	Ya	Ya
42	MRW114	EBT MOAHINO	MOROWALI	WITA PONDA	MOAHINO	Ya	Ya	Ya
43	MRW100	BO DMT ISAT MOAHINO	MOROWALI	WITA PONDA	MOAHINO	Ya	Ya	Ya
44	MRW106	IMIP BDM MESS 2 A	MOROWALI	BAHODOPI	BAHODOPI	Ya	Ya	Ya
45	MRW107	IMIP GUEST HOUSE	MOROWALI	BAHODOPI	FATUFIA	Ya	Ya	Ya
46	MRW130	BDM WORKSHOP KM6	MOROWALI	BAHODOPI	FATUFIA	Ya	Ya	Ya
47	MRW131	BDM OFFICE	MOROWALI	BAHODOPI	FATUFIA	Ya	Ya	Ya
48	MRW094	DMT BETE-BETE	MOROWALI	BUNGKU PESISIR	BETE-BETE	Ya	-	-
49	MRW095	DMT TANGOFA	MOROWALI	BUNGKU PESISIR	TANGOFA	Ya	-	-

Sumber data: Bappeda Kabupaten Morowali Tahun 2020 (Di Olah)

b. Jaringan Telekomunikasi Untuk Kabupaten Morowali

Tabel 2.44  
Jaringan Telekomunikasi Kabupaten Morowali

No	Lokasi	Status Sinyal Komunikasi				Ket.
		4G	3G	2G	No Signal	
1	Kec. Bungku Tengah	1	15	1	2	
2	Kec. Bungku Timur	0	5	0	5	
3	Kec. Bahodopi	0	7	2	2	
4	Kec. Bungku Pesisir	1	4	2	2	
5	Kec. Bungku Selatan	0	2	4	20	
6	Kec. Menui Kepulauan	0	3	3	18	Signal untuk desa Dongkalan berasal dari desa Molore, Provinsi SulTra
7	Kec. Bungku Barat	0	10	0	0	
8	Kec. Bumi Raya	0	13	0	0	
9	Kec. Witaponda	0	9	0	0	

Sumber data: Bappeda Kabupaten Morowali Tahun 2020 (Di Olah)

### 2.1.3.2.5 Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi Usaha Kecil dan Menengah

Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas azas kekeluargaan. Koperasi mendapatkan perhatian dalam pembangunan Morowali mengingat perannya dalam menggerakkan ekonomi kerakyatan di Morowali. Sedangkan Usaha mikro kecil dan menengah merupakan kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil dengan bidang usaha yang secara mayoritas merupakan kegiatan usaha kecil dan perlu dilindungi untuk mencegah dari usaha persaingan yang tidak sehat. Secara umum ada tiga aspek untuk melihat UMKM yaitu dari segi kekayaan yang dimiliki pelaku usaha, jumlah tenaga kerja yang dimiliki dan dari segi penjualan/omset pelaku UMKM. Adapun kondisi koperasi dan UKM Kabupaten Morowali dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.45  
Data Jumlah Koperasi Aktif (2019 – 2021)

INDIKATOR	Capaian		
	2019	2020	2021
Jumlah Koperasi Aktif	30	52	52
Jumlah Seluruh Koperasi	129	142	148
Persentase UKM non BPR/LKM aktif (Jumlah UKM non BPR/LKM UKM)	87	95	95
Persentase BPR/LKM aktif (Jumlah BPR/LKM Aktif)	41	33	45
Persentase Usaha Mikro dan kecil (Jumlah usaha mikro dan kecil)	4.360	4.589	5.202

Sumber data: Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Morowali Tahun 2021

### 2.1.3.3 Urusan Pemerintahan Pilihan

#### 2.1.3.3.1 Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan Perikanan

Peran sektor kelautan dan perikanan dalam pengembangan perekonomian di Kabupaten Morowali sangat strategis, karena sektor ini sangat diperlukan dalam upaya mendukung pemenuhan kebutuhan pangan (protein hewani), menciptakan lapangan kerja dan kesempatan berusaha, mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan. Pemenuhan kebutuhan protein hewani dapat dilihat dari indikator sebagai berikut :

Tabel 2.46

Produksi Kebutuhan Protein Hewani Kabupaten Morowali, Tahun (2019 – 2021)

INDIKATOR	Capaian		
	2019	2020	2021
Produksi perikanan tangkap (ton)	3,4126.6	28.457,4	33.309,3
Produksi perikanan budi daya	65.91	173	197,8
Produksi rumput laut	545.58	23.138	5.962

Sumber data: Dinas Perikanan Kabupaten Morowali Tahun 2021

#### 2.1.3.3.2 Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata

Pengembangan pariwisata dapat dilakukan jika terdapat potensi objek pariwisata dan cara untuk mempromosikan objek wisata tersebut. Oleh karena itu, pengembangan dapat dilihat dari dua indikator sebagaimana pada tabel berikut :

Tabel 2.47

Jumlah Kunjungan Wisatawan Dan Objek Wisata

INDIKATOR	Capaian		
	2019	2020	2021
Jumlah kunjungan wisatawan	5.190	5.495	7.223
Objek wisata	31	31	31

Sumber data: Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata Kabupaten Morowali Tahun 2021

Kedatangan wisatawan ke objek wisata mengalami peningkatan yang didominasi oleh melonjaknya wisatawan domestik. Sementara itu, jumlah kunjungan wisatawan mancanegara belum maksimal yang di karenakan oleh beberapa factor yang salah satunya yaitu pembatasan kunjungan keluar negeri oleh beberapa negara.

Pada tahun 2019 kunjungan pengunjung objek wisata sebanyak 5.190 wisatawan domestic maupun mancanegara dan pada tahun 2020 terdapat kenaikan sebesar 5.494 atau 0.94 %. Sedangkan pada tahun 2021 menjadi 7.223 wisatawan atau sebesar 131% dari tahun sebelumnya. Selain dari pencabutan pembatasan kunjungan akibat covid 19 hal ini dikarenakan adanya program pengembangan destinasi pariwisata yang merupakan upaya menata kawasan/obyek wisata, serta melengkapi sarana dan prasarana pariwisata dengan tujuan untuk meningkatkan kunjungan wisatawan (tourist arrival).

Program Pengembangan pemasaran pariwisata dimaksudkan untuk lebih mengenalkan, memberikan informasi dan promosi pariwisata di Morowali kepada pasar wisata potensial baik regional maupun nasional bahkan internasional. Saat ini pemerintah Kabupaten Morowali dalam upaya pengembangan pariwisata dalam bidang infrastruktur sehingga dengan infrastruktur pariwisata yang memadai maka akan menarik wisatawan untuk berkunjung ke Kabupaten Morowali yang secara tidak langsung akan memberi dampak terhadap perekonomian daerah.

#### **2.1.3.3.3 Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian**

Sektor pertanian merupakan basis sumber penyediaan bahan pangan, penyediaan lapangan kerja pada wilayah perdesaan, dan juga pemberi input bagi sektor industri. Sektor pertanian merupakan sektor yang memberikan kontribusi besar dalam perekonomian Kabupaten Morowali. Hal tersebut dapat dilihat dari kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB.

Arah pembangunan pertanian sangat erat dengan isu ketahanan pangan. Pertumbuhan penduduk dan gejala penurunan produksi tanaman pangan (beras) karena alih fungsi lahan, ditengarai akan mengganggu tingkat ketersediaan pangan secara kewilayahan. Untuk itu, pembangunan sub sektor pertanian tanaman pangan tidak terlepas atas kebijakan pemenuhan pangan masyarakat yang bermuara pada isu kedaulatan pangan sebagai salah satu strategi renaisans pangan yang berintegrasi dengan strategi renaisans ekonomi. Berpijak pada hal itu, pasokan pangan suatu wilayah sangat bergantung pada ketersediaan dari aspek produksi dan tingkat konsumsi masyarakat dalam wilayah itu, termasuk komoditas yang dibudidayakan untuk mendukung konsumsi pangan setempat.

Upaya strategis yang terus digiatkan dalam rangka meningkatkan produksi pertanian sub sektor tanaman pangan, diantaranya melalui upaya peningkatan produktifitas. Dua indikator untuk melihat capaian kinerja pada urusan pertanian adalah sebagai berikut :

Tabel 2.48  
Produksi Padi dan Tanaman Pangan Menurut Jenis (TON) Kabupaten Morowali Tahun (2018 – 2021)

Jenis Komoditi	CAPAIAN									
	2018					2019				
	Luas Tanam (Ha)	Luas Panen (Ha)	Luas Puso (Ha)	Produktivitas (Ton/Ha)	Produksi (Ton)	Luas Tanam (Ha)	Luas Panen (Ha)	Luas Puso (Ha)	Produktivitas (Ton/Ha)	Produksi (Ton)
PADI SAWAH+	12,146.50	10,695.50	2.00	4.873	52,119.17	9,880.30	11,264.30	252.50	4.873	54,890.93
PADI LADANG										
PADI SAWAH	11,891.50	10,458.50	2.00	4.89	51,131.61	9,743.30	11,129.30	250.50	4.89	54,411.15
PADI LADANG	255.00	237.00	-	2.44	578.99	137.00	135.00	2.00	2.44	329.81
JAGUNG	628.00	1,530.4	4.00	3.695	5,654.83	1,347.30	1,179.7	3.00	3.695	4,358.99
KEDELAI	1,978.20	1,543.70	514.50	1.326	2,046.95	56.00	61.00	1.00	1.33	80.89
KACANG TANAH	54.00	51.50	1.00	1.259	64.84	49.50	52.50	1.00	1.26	66.10
UBI KAYU	127.00	160.00	6.00	26.669	4,267.04	133.00	144.00	-	26.669	3,840.34
UBI JALAR	40.50	46.50	1.00	13.027	605.76	41.00	38.50	-	13.027	501.54
KACANG HIJAU	136.80	137.80	-	0.802	110.52	58.00	61.00	-	0.802	48.92
TALAS	22.00	35.00	-	-	-	17.50	19.50	-	-	-

Lanjutan Tabel 2.48

Jenis Komoditi	CAPAIAN									
	2020					2021				
	Luas Tanam	Luas Panen	Luas Puso	Produktivitas	Produksi	Luas Tanam	Luas Panen	Luas Puso	Produktivitas	Produksi
	(Ha)	(Ha)	(Ha)	(Ton/Ha)	(Ton)	(Ha)	(Ha)	(Ha)	(Ton/Ha)	(Ton)
PADI SAWAH + PADI LADANG	10.443,30	9.852,00	45,00	4,559	44.915,27	8.974,20	9.433,00	21,00	4,900	46.221,70
PADI SAWAH	10.362,30	9.766,00	45,50	4,560	44.532,96	8.895,20	9.343,00	21,00	4,950	46.247,85
PADI LADANG	81,00	86,00		3,720	319,92	79,00	90,00	-	3,500	315,00
JAGUNG	2.405,20	1.814,40	48,00	4,415	80.190,58	945,30	1.040,10	2,00	4,200	4.368,42
KEDELAI	426,00	229,00	8,00	1,327	303,88	63,50	190,00	4,00	1,000	190,00
KACANG TANAH	59,00	53,00	1,00	1,122	59,47	60,90	69,90	-	1,122	78,43
UBI KAYU	182,00	173,00	4,50	27,883	4.823,76	228,00	224,50	-	27,883	6.259,73
UBI JALAR	75,90	68,90		15,842	1.091,51	81,00	87,00	-	15,842	1.378,25
KACANG HIJAU	73,90	73,40	3,00	0,790	57,99	53,50	57,50	-	0,790	45,43
TALAS						44,50	55,00	-	0,790	43,45

Sumber data: Dinas Pertanian dan ketahanan pangan Kabupaten Morowali Tahun 2022

#### 2.1.3.3.4 Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan

Kontribusi sektor perdagangan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.49  
Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB

INDIKATOR	Capaian		
	2019	2020	2021*
Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB	2,9	-4,98	1,24
Rasio Ekspor + Impor terhadap PDB (Indikator Keterbukaan Ekonomi)	2.08		

Sumber data: Dinas Perdagangan dan Industri Kabupaten Morowali Tahun 2020

Sektor perdagangan memberikan andil yang cukup baik dalam pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Morowali. Perkembangan sektor perdagangan tidak terlepas dari dukungan sektor ekonomi lainnya serta dukungan infrastruktur yang berupa sarana dan prasarana penunjang pertumbuhan sektor perdagangan seperti pergudangan, pasar modern, pasar tradisional dan lainnya.

#### 2.1.3.3.6 Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian

Kontribusi sektor industri pada PDRN dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.50  
Indikator Capaian Kinerja Bidang Perindustrian

INDIKATOR	Capaian		
	2019	2020	2021*
Kontribusi Sektor Industri terhadap PDRB (HK 2000)	19,77	34,40	81,03
Pertumbuhan Industri (HK 2000)	652	769	0-2
Pertumbuhan IKM	-18	98	NA

Sumber data: Bappeda Kabupaten Morowali Tahun 2020(Di Olah)

Terjadi penurunan PDRB di sektor perindustrian sebesar 2,05 persen. Meskipun terjadi penurunan, tetapi sektor industri masih menjadi sektor yang paling tinggi dalam berkontribusi pada PDRB hal ini di karenakan adanya aktifitas pertambangan sebagai kategori dari industri pengolahan besar. Peningkatan ini kemudian yang tidak di ikuti oleh industri kecil atau industri rumah tangga sehingga terjadi ketimpangan antara level industri sehingga perlu menjadi perhatian pemerintah untuk mengkoneksikan industri kecil dengan kawasan perindustrian. Terjadinya koneksi antara industri kecil dengan kawasan perindustrian diharapkan

dapat menunjang PDRB sektor industri dan mengurangi gap antara industri besar dan kecil.

## 2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program Dan Kegiatan RKPD Sampai Tahun Berjalan Serta Realisasi RPJMD

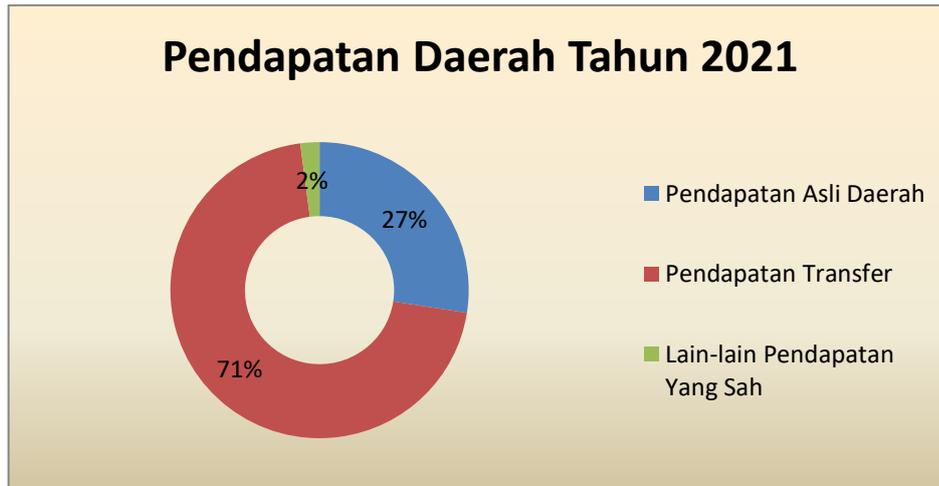
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2021 sebelum pergeseran sebesar Rp. 1.351.431.399.190,00,- setelah Pergeseran Rp. 1.425.268.641.994,00,- berkurang sebesar Rp. 15.175.373.000,- atau sebesar 0,99%. Pergeseran anggaran ini dilakukan adanya instruksi Pemerintah Pusat yang tertuang melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19). Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Morowali tahun anggaran 2021 selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel: 2.50  
Alokasi Anggaran APBD Kabupaten Morowali Tahun 2021

No	Uraian Belanja	Anggaran 2021	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan
1	2	3	4
<b>1</b>	<b>Pendapatan Daerah</b>	<b>1.351.431.399.190,00</b>	<b>1.425.268.641.994,00</b>
	Pendapatan Asli Daerah	308.289.079.209,00	391.060.889.788,00
	Pendapatan Transfer	1.013.627.426.981,00	1.004.692.859.206,00
	Lain-lain Pendapatan Yang Sah	29.514.893.000,00	29.514.893.000,00
<b>2</b>	<b>Belanja Daerah</b>		
	Belanja Operasi	847.822.489.520,00	932.891.055.227,00
	Belanja Modal	301.516.065.230,00	294.670.925.839,00
	Belanja Tidak Terduga	10.500.000.000,00	21.911.713.375,00
	Belanja Transfer	215.139.508.550,00	232.337.458.744,00

Sumber : Bappeda Kabupaten Morowali Data Diolah Kembali

Persentase Pendapatan dan Belanja terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2021, selengkapnya dapat dilihat pada grafik berikut ini.



Sumber : BPKAD Kabupaten Morowali

Gambar 2.13

#### Persentase Pendapatan Kabupaten Morowali Tahun 2021

Untuk komposisi belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBD) tahun 2021, belanja operasi masih lebih tinggi dengan persentase 63%. Belanja ini fokus untuk membiayai gaji pegawai, gaji honor guru kontrak tenaga kesehatan, honor petugas kebersihan dan petugas rumah ibadah, belanja modal sebesar 20% dengan focus belanja pada infrastruktur dasar khususnya daerah kepulauan dan bantuan kepada masyarakat untuk meningkatkan pendapatan ekonomi masyarakat. Belanja tak terduga sebesar 1% fokus pada penanganan bencana seperti percepatan penanganan covid-19. Persentase belanja dapat digambarkan pada tabel sebagai berikut:



Sumber : BPKAD Kabupaten Morowali

Gambar 2.14

#### Persentase Belanja Kabupaten Morowali Tahun 2021

Realisasi belanja daerah sampai desember tahun 2021 anggaran pendapatan belanja daerah kabupaten morowali masih dikategorikan *rendah* baru mencapai 84,78%. capaian realisasi anggaran daerah dapat dilihat pada table sebagai berikut:

Tabel: 2.51  
Realisasi Belanja APBD Kabupaten Morowali s/d Tahun 2021

Perangkat Daerah	Pagu Setelah Perubahan	Realisasi	Capaian
1	2	3	4
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	276.234.772.751	231.832.497.620	83,93
Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	129.515.929.843	111.459.612.688	86,06
Rumah Sakit Umum Daerah Morowali	74.553.815.321	67.256.515.372	90,21
Rumah Sakit Pratama	14.321.548.121	13.691.148.591	95,60
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	151.783.245.617	143.302.230.470	94,41
Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	54.756.075.095	53.053.262.701	96,89
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	7.350.154.796	6.739.996.979	91,70
Satuan Polisi Pamong Praja	16.267.404.539	15.776.402.960	96,98
Dinas Sosial	10.090.548.028	10.000.853.508	99,11
Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Daerah	10.767.529.388	9.802.496.687	91,04
Dinas Lingkungan Hidup Daerah	15.216.706.366	15.091.801.339	99,18
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Daerah	5.527.284.926	5.344.922.532	96,70
Dinas Perhubungan Daerah	16.935.800.149	14.083.659.145	83,16
Dinas Komunikasi dan Informatika	6.370.328.191	6.167.545.322	96,82
Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	7.942.617.581	7.284.194.509,00	91,71
Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu	6.436.494.102	6.179.315.713	96,00
Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata	12.250.266.955	11.930.931.143	97,39
Dinas Perpustakaan Daerah	4.158.206.650	4.009.098.355	96,41
Dinas Perikanan Daerah	35.574.478.695	33.200.989.564,00	93,33

Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	64.941.116.776	62.878.113.174	96,82
Dinas Perdagangan dan Perindustrian	14.284.799.773	13.995.094.682	97,97
Sekretariat Daerah	71.310.991.778	69.823.935.018	97,91
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	27.845.115.550	27.376.508.259	98,32
Inspektorat Daerah	10.693.345.117	10.078.244.890	94,25
Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	12.617.319.511	11.626.786.972	92,15
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	275.973.532.602	161.831.651.185	58,64
Badan Pengelola Pendapatan Daerah	21.905.478.743	18.942.792.312	86,48
Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	8.049.948.386	7.496.781.218	93,13
Kecamatan Bahodopi	4.101.382.680	3.913.590.056	95,42
Kecamatan Bumi Raya	3.699.415.661	3.465.325.575	93,67
Kecamatan Bungku Barat	3.490.768.941	3.190.480.333	91,40
Kecamatan Bungku Pesisir	3.184.234.316	3.095.348.429	97,21
Kecamatan Bungku Selatan	3.991.815.655	3.827.573.979	95,89
Kecamatan Bungku Tengah	14.894.997.323	14.425.616.159	96,85
Kecamatan Bungku Timur	2.740.447.836	2.519.074.265	91,92
Kecamatan Menui Kepulauan	6.477.987.335	6.253.373.762	96,53
Kecamatan Wita Ponda	3.180.866.691	2.992.349.928	94,07
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah	5.414.199.669	5.295.471.027	97,81
Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	9.612.018.264	8.464.531.479	88,06
Total	1.424.462.989.721	1.207.700.117.901	84,78

Sumber : Bappeda Kabupaten Morowali Data Diolah Kembali

## **2.3 Evaluasi Capaian Keuangan dan Indikator Kinerja Utama (IKU) Berdasarkan Urusan Pemerintah Daerah**

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Rencana kerja pemerintah daerah Kabupaten Morowali tahun 2021 bahwa target kinerja dan penganggaran yang ditetapkan pada penetapan RKPD mengalami penurunan dan pergeseran, hal ini disebabkan adanya instruksi Pemerintah Pusat yang tertuang melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID- 19) yang mengharuskan Pemda untuk melakukan percepatan pengutamakan penggunaan alokasi anggaran kegiatan tertentu (refocusing) dan/atau perubahan alokasi anggaran belanja dalam rangka penanganan wabah Pandemi covid- 19. Hal ini terjadi setelah mewabahnya Pandemi covid-19 secara global pada awal Januari 2021 yang juga mewabah di Indonesia. Pergeseran target indikator kinerja dan penganggaran Kabupaten Morowali tahun 2021 telah disesuaikan dalam perubahan atas Peraturan Bupati Morowali nomor 19 tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali tahun 2021. Secara umum hasil evaluasi program kegiatan rencana kerja pemerintah daerah Kabupaten Morowali tahun 2021 sebagai berikut.

### **2.3.1 Urusan Pemerintah Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar**

#### **2.3.1.1 Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan**

Kinerja Pembangunan Bidang Urusan Pendidikan merupakan misi 3 dari RPJMD 2018-2023 yaitu *Meningkatkan pelayanan pendidikan yang berkualitas melalui Pembiayaan Pendidikan Gratis, peningkatan kuantitas dan kualitas tenaga pengajar, Pemberian beasiswa dan penambahan sarana pendidikan guna menciptakan SDM yang cerdas, kreatif, inovatif dan bertaqwa; sehingga merupakan bidang yang prioritas dilaksanakan, kinerja* bidang pendidikan berdasarkan target RPJMD semakin meningkat, beberapa indikator pendidikan mengalami peningkatan kinerja seperti indeks pembangunan manusia berdasarkan target kinerja RPJMD tahun 2021 sebesar 73 % realisasi ditahun 2021 mencapai 70,52%, hal ini dapat dilihat pada gambar grafik sebagai berikut:

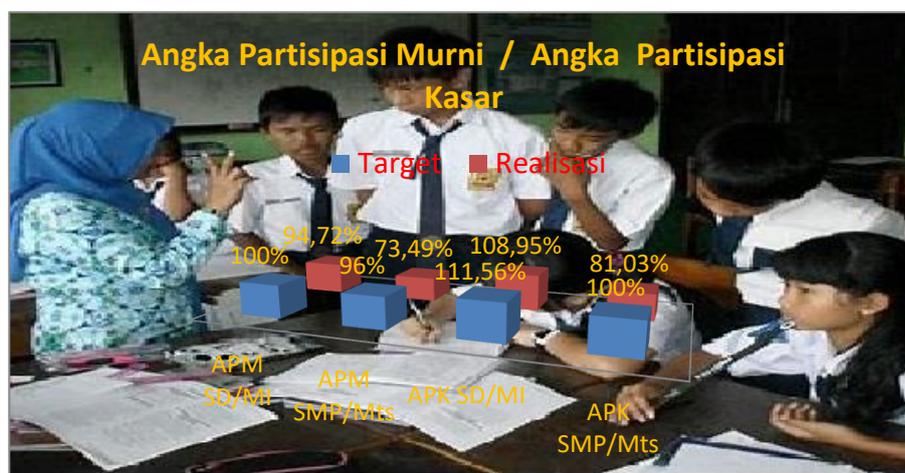


Sumber : Bappeda Kabupaten Morowali Data Diolah Kembali

Gambar 2.15

Capaian Indikator Indeks Pembangunan Manusia Berdasarkan Target RPJMD

Indikator lainnya yang menunjukkan kinerja bidang pendidikan semakin baik yaitu Angka partisipasi murni (APM) SD/MI/Paket A target RPJMD tahun 2021 sebesar 100% dan realisasi tahun 2020 mencapai 94,72%, SMP/Mts/Paket B target 2021 76% capaian tahun 2020 73,49% dan Angka partisipasi sekolah (APS) SD/MI/Paket A target tahun 2021 sebesar 111,56% capaian tahun 2020 108,93%, SMP/Mts/Paket B target tahun 2021 sebesar 100% capaian tahun 2020 sebesar 81,03%, hal ini dapat dilihat pada gambar grafik sebagai berikut :



Gambar : 2.16

Capaian Indikator Pendidikan APK/APM Berdasarkan Target RPJMD

Untuk capaian kinerja pembangunan bidang pendidikan berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Morowali tahun 2021, capaian realisasi keuangan sebesar 32,92% dengan kategori *Rendah* dan capaian realisasi kinerja pembangunan sebesar 55,3% dengan kategori *rendah*. Capaian realisasi keuangan dan kinerja bidang pendidikan dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel : 2.52  
Capaian Realisasi Anggaran  
Program Pendidikan Tahun 2021

PROGRAM	PAGU ANGGARAN SEBELUM PERGESERAN	PAGU ANGGARAN SETELAH PERGESERAN	REALISASI	CAPAIAN	KET
	Rp	Rp	Rp		
PENDIDIKAN				32.92	RENDAH
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	109.894.476.607	109.894.476.607	98.181.582.737	89,34	SEDANG
PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	300.534.870	300.534.870	3.180.000	1,06	SANGAT RENDAH
PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	2.313.560.240	2.313.560.240	15.840.000	0,68	SANGAT RENDAH
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	146.225.680.935	145.855.550.935	80.396.228.991	55,12	SEDANG
PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	1.038.003.675	1.038.003.675	265.969.130	25,62	RENDAH

Sumber : Bappeda Kabupaten Morowali Data Diolah Kembali

Tabel : 2.53  
Capaian Indikator Kinerja Utama Pendidikan Tahun 2021

Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Tahun 2021		Capaian	Ket
		Target	Realisasi		
1	2	3	4	5	6
<b>Pendidikan</b>				<b>55,3</b>	<b>Rendah</b>
<b>Angka Partisipasi Murni</b>		–	–	–	
Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A	%	100	94,72	94,72	Sangat Tinggi
Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/Mts/Paket B	%	96	73,49	76,6	Tinggi

<b>Angka partisipasi kasar</b>					
Angka partisipasi sekolah (APS) SD/MI/Paket A	%	111,56	108,93	97,6	Sangat Tinggi
Angka partisipasi sekolah (APS) SMP/Mts/Paket B	%	100	81,03	81,03	Tinggi
<b>Angka Putus Sekolah:</b>					
Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI	%	0	0,01	0,01	Sangat Rendah
Angka Putus Sekolah (APS) SMP/Mts	%	0	0,44	0,44	Sangat Rendah
<b>Angka Kelulusan:</b>					
Angka Kelulusan (AL) SD/MI	%	100	0	0	Sangat Rendah
Angka Kelulusan (AL) SMP/Mts	%	100	0	0	Sangat Rendah
<b>Angka Melanjutkan (AM):</b>					
Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs (%)	%	97,89	0	0	Sangat Rendah
Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA (%)	%	100	0	0	Sangat Rendah
<b>Fasilitas Pendidikan</b>					
Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik	Unit	148	148	100	Sangat Tinggi
Sekolah pendidikan SMP/Mts dan SMA/SMK/MK kondisi bangunan baik	Unit	47	47	100	Sangat Tinggi
Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah pendidikan dasar	%	0,120139	0,120139	100	Sangat Tinggi
Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah pendidikan SLP	%	0,159722	0,159722	100	Sangat Tinggi
Rasio guru/murid sekolah pendidikan dasar	%	01:24	01:24	100	Sangat Tinggi
Rasio guru terhadap murid pendidikan SLP	%	01:20	01:20	100	Sangat Tinggi
<b>Kebudayaan</b>					
Penyelenggara festival seni dan budaya	kegiatan	3	0	0	Sangat Rendah
Benda, Situs dan kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	Unit	1	1	100	Sangat Tinggi
Sarana Penyelenggaraan seni dan budaya	Sarana	2	0	0	Sangat Rendah

Sumber : Bappeda Kabupaten Morowali Data Diolah Kembali

### 2.3.1.2 Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan

Kinerja Pembangunan Bidang Urusan Kesehatan merupakan misi 4 dari RPJMD 2018-2023 yaitu *Meningkatkan pelayanan kesehatan melalui Pembiayaan Kesehatan Gratis, peningkatan kuantitas dan kualitas fasilitas kesehatan, tenaga Kesehatan dan ketersediaan obat yang berkualitas, serta mendorong kebersihan, Kesehatan dan keindahan lingkungan agar tercipta suasana sehat dan nyaman;* dengan adanya misi ini diyakini dapat meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat. Hal ini dapat di kinerja indikator kesehatan semakin baik , beberapa indikator Kesehatan mengalami peningkatan kinerja seperti usia harapan hidup berdasarkan target kinerja RPJMD tahun 2021 sebesar 67,6 tahun realisasi ditahun 2021 mencapai 67,5 tahun, hal ini dapat dilihat pada gambar grafik sebagai berikut :



Sumber : Bappeda Kabupaten Morowali Data Diolah Kembali

Gambar : 2.17  
Capaian Realisasi Usia Harapan Hidup Berdasarkan Target RPJMD

Indikator lainnya yang menunjukkan kinerja bidang kesehatan semakin baik yaitu Angka kematian bayi target RPJMD tahun 2021 sebesar 0,87% dan realisasi tahun 2021 mencapai 0,13%, angka kelangsungan hidup bayi target 2021 0,28% capaian tahun 2021 0,35% dan angka kematian balita target tahun 2021 sebesar 10,42 capaian tahun 2021 0,51%, angka kematian neonatal per 100 kelahiran Hidup target tahun 2021 sebesar 10,66% capaian tahun 2021 sebesar 11,96%, hal ini dapat dilihat pada gambar grafik sebagai berikut :



Sumber : Bappeda Kabupaten Morowali Data Diolah Kembali

Gambar : 2.18

Capaian Realisasi Angka kematian bayi angka kelangsungan hidup bayi, angka kematian balita dan angka kematian neonatal per 100 kelahiran Hidup Berdasarkan Target RPJMD

Untuk capaian kinerja pembangunan bidang kesehatan berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Morowali tahun 2021, capaian realisasi keuangan sebesar 25,40% dengan kategori **Sangat Rendah** dan capaian realisasi indikator kinerja utan sebesar 99,37% dengan kategori **Sangat tinggi**. Capaian realisasi keuangan dan kinerja bidang kesehatan dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel : 2.54

Capaian Realisasi Anggaran Program Kesehatan Tahun 2021

PROGRAM	PAGU ANGGARAN SEBELUM PERGESERAN	PAGU ANGGARAN SETELAH PERGESERAN	REALISASI ANGGARAN	CAPAIAN	KET
	Rp	Rp	Rp		
<b>Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana</b>				<b>25,40</b>	<b>SANGAT RENDA</b>
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	34.912.048.242	34.145.138.242	15.392.573.646	45,08	RENDAH
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	61.117.890.519	60.665.110.519	9.071.929.115	14,95	SANGAT RENDA

PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	10.067.734.000	7.115.474.000	3.615.780.000	50,82	RENDAH
PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	672.019.420	653.236.420	-	-	SANGAT RENDA
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	661.973.930	661.973.930	7.885.000	1,19	SANGAT RENDA
PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	491.714.635	491.714.635	2.400.000	0,49	SANGAT RENDA
PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	4.139.555.935	4.139.555.935	11.100.000	0,27	SANGAT RENDA
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	143.202.000	143.202.000	62.124.140	43,38	RENDAH

Sumber : Bappeda Kabupaten Morowali Data Diolah Kembali

Tabel : 2.55  
Capaian Indikator Kinerja Utama Bidang Kesehatan Tahun 2021

Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Tahun 2021		Capaian	Ket
		Target	Realisasi		
1	2	3	4	5	6
<b>Kesehatan</b>				<b>99,37</b>	<b>Sangat Tinggi</b>
Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup	%	0,87	0,13	14,94	Sangat Rendah
Angka kelangsungan hidup bayi	%	0,28	0,35	125,00	Sangat Tinggi
Angka Kematian Balita per 1000 kelahiran hidup	%	0,42	0,51	121,43	Sangat Tinggi
Angka Kematian Neonatal per 1000 kelahiran hidup	%	10,66	11,96	112,20	Sangat Tinggi
Rasio posyandu per satuan balita	%	15,79	15,79	100,00	Sangat Tinggi
Rasio puskesmas, poliklinik, pustu persatuan penduduk (puskesmas per 1000 pddk)	%	0,07	0,07	100,00	Sangat Tinggi

Rasio Rumah Sakit persatuan penduduk (1000 pddk)	%	0,02	0,02	100,00	Sangat Tinggi
Rasio dokter per satuan penduduk (1000 pddk)	%	0,31	0,32	103,23	Sangat Tinggi
Rasio tenaga medis persatuan penduduk (1000 pddk)	%	6,13	6,18	100,82	Sangat Tinggi
Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani	%	19,09	21,21	111,11	Sangat Tinggi
Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	%	58,18	48,49	83,34	Tinggi
Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	%	97,48	96,48	98,97	Sangat Tinggi
Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan (jumlah gizi buruk)	%	7	8	114,29	Sangat Tinggi
Cakupan balita pneumonia yang ditangani	%	0,08	0,08	100,00	Sangat Tinggi
Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA	%	100	100	100,00	Sangat Tinggi
Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD	%	100	100	100,00	Sangat Tinggi
Penderita diare yang ditangani	Orang	1841	2045	111,08	Sangat Tinggi
Angka kejadian Malaria	%	55	60	109,09	Sangat Tinggi
Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin	%	100	100	100,00	Sangat Tinggi
Cakupan kunjungan bayi	%	18	16	88,89	Sangat Tinggi
Cakupan puskesmas (rasio puskesmas)	%	100	100	100,00	Sangat Tinggi
Cakupan pembantu puskesmas	%	25,56	25,56	100,00	Sangat Tinggi
Cakupan kunjungan Ibu hamil K4 (rasio kunjungan K4)	%	85,59	84,74	99,01	Sangat Tinggi
Cakupan pelayanan anak balita	%	87,33	79,39	90,91	Tinggi
<b>Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana</b>					
Laju pertumbuhan penduduk (LPP)	%	1,9	1,9	100,00	Sangat Tinggi

Sumber : Bappeda Kabupaten Morowali Data Diolah Kembali

### 2.3.1.3 Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Kinerja Pembangunan Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang merupakan misi 4 dari RPJMD 2018-2023 yaitu *Meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui peningkatan fasilitas air bersih, Listrik, fasilitas olahraga, perumahan, obyek wisata, serta seni dan budaya sehingga tercipta kehidupan masyarakat yang harmonis dan bahagia.* indikator Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang merupakan mengalami peningkatan

kinerja antara lain persentase panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik, berdasarkan target kinerja RPJMD tahun 2021 sebesar 36,7% realisasi ditahun 2021 mencapai 34,6%, hal ini dapat dilihat pada gambar grafik sebagai berikut :



Sumber : Bappeda Kabupaten Morowali Data Diolah Kembali

Gambar : 2.19 Capaian Realisasi Panjang Jalan Kabupaten Dalam Kondisi Baik Berdasarkan RPJMD

Untuk capaian kinerja pembangunan Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Morowali tahun 2021, capaian realisasi keuangan sebesar 17,56% dengan kategori *Rendah* dan capaian realisasi indikator kinerja utama sebesar 94,50% dengan kategori **sedang**. Capaian realisasi keuangan dan kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 2.56 Capaian Realisasi Anggaran Program PU dan Penataan Ruang Tahun 2021

PROGRAM	PAGU ANGGARAN SEBELUM PERGESERAN	PAGU ANGGARAN SETELAH PERGESERAN	REALISASI ANGGARAN	CAPAIAN	KET
	Rp	Rp	Rp		
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	151.316.923.119	150.386.743.119	26.404.451.352	17,56	RENDAH
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	9.561.900.183	8.631.720.183	4.394.140.932	50,91	SEDANG
PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	25.116.006.613	25.116.006.613	2.363.546.590	9,41	SANGAT RENDAH

PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	9.026.181.063	9.026.181.063	145.265.700	1,61	SANGAT RENDAH
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	11.724.152.676	11.724.152.676	99.437.700	0,85	SANGAT RENDAH
PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	15.919.602.294	15.919.602.294	153.030.000	0,96	SANGAT RENDAH
PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	78.356.068.330	78.356.068.330	19.134.414.980	24,42	RENDAH
PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	210.552.860	210.552.860	72.733.000	34,54	RENDAH
PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	1.402.459.100	1.402.459.100	41.882.450	2,99	SANGAT RENDAH

Sumber : Bappeda Kabupaten Morowali Data Diolah Kembali

Tabel 2.57  
Capaian Indikator Kinerja Utama PU dan Penataan Ruang Tahun 2021

Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Tahun 2021		Capaian	Ket
		Target	Realisasi		
1	2	3	4	5	6
<b>Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</b>				<b>94,5</b>	<b>sedang</b>
<b>Pekerjaan Umum</b>					
Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik (%)	%	38	36	94,74	Tinggi
Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik (> 40 KM/Jam)	%	36,7	34,6	94,28	Tinggi
Persentase rumah tinggal bersanitasi	%	75,69	75,13	99,26	Sangat Tinggi
Rumah tangga pengguna air bersih (%)	%	85,47	85,11	99,58	Sangat Tinggi
Rasio Jaringan Irigasi	%	53,7	42,4	78,96	Sedang
Persentase penduduk berakses air minum	%	0,0078	0,0063	80,77	Sedang
Rasio tempat ibadah per satuan penduduk	%	3	3	100,00	Sangat Tinggi
<b>Penataan Ruang</b>					

Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB	%	31,5	31,5	100,00	Sangat Tinggi
Rumah tangga pengguna air bersih (%)		93	92	98,92	Sangat Tinggi

Sumber : Bappeda Kabupaten Morowali Data Diolah Kembali

### 2.3.1.4 Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan

Kinerja Pembangunan Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan merupakan misi 4 dari RPJMD 2018-2023 yaitu *Meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui peningkatan fasilitas air bersih, Listrik, fasilitas olahraga, perumahan, obyek wisata, serta seni dan budaya sehingga tercipta kehidupan masyarakat yang harmonis dan bahagia.* indikator Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan dikategorikan rendah, seperti indikator Jumlah rumah layak huni terbangun, berdasarkan target kinerja RPJMD sebesar 2000 unit rumah realisasi ditahun 2021 baru mencapai 702 unit rumah atau baru kisaran baru terealisasi 35,10%, hal ini dapat dilihat pada gambar grafik sebagai berikut:



Sumber : Bappeda Kabupaten Morowali Data Diolah Kembali

Gambar 2.20  
Capaian Realisasi Rumah Layak Huni Berdasarkan RPJMD

Indikator lainnya yang menunjukkan kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan juga yang belum memenuhi target yaitu indikator jumlah rumah tangga miskin pengguna listrik target RPJMD tahun 2021 sebesar 700 rumah tangga baru terealisasi 70 rumah tangga atau 10 %, seperti dapat disajikan pada gambar grafik sebagai berikut :



Sumber : Bappeda Kabupaten Morowali Data Diolah Kembali

Gambar 2.21  
Realisasi Rumah Tangga Miskin Pengguna Listrik Berdasarkan RPJMD

Untuk capaian kinerja pembangunan Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Morowali tahun 2021, capaian realisasi keuangan sebesar 13,70% dengan kategori *Rendah* dan capaian realisasi indikator kinerja utama sebesar 5% dengan kategori **sangat rendah**. Capaian realisasi keuangan dan kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 2.58  
Capaian Realisasi Anggaran Program Perumahan dan Kawasan Pemukiman Tahun 2021

PROGRAM	PAGU ANGGARAN SEBELUM PERGESERAN	PAGU ANGGARAN SETELAH PERGESERAN	REALISASI ANGGARAN	CAPAIAN	KET
	Rp	Rp	Rp		
Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan	46.356.811.021	46.110.180.541	6.316.628.227	13,70	RENDAH
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.966.553.957	4.720.553.477	2.493.898.338	52,83	SEDANG
PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	1.030.051.225	1.030.051.225	21.295.000	2,07	SANGAT RENDAH
PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	16.599.303.480	16.599.303.480	52.080.000	0,31	SANGAT RENDAH
PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	20.464.939.797	20.464.939.797	3.681.926.393	17,99	RENDAH

PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	3.215.316.512	3.214.686.512	58.388.496	1,82	SANGAT RENDAH
PROGRAM PENETAPAN TANAH ULAYAT	30.265.400	30.265.400	8.450.000	27,92	RENDAH
PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG	50.380.650	50.380.650	590.000	1,17	SANGAT RENDAH

Sumber : Bappeda Kabupaten Morowali Data Diolah Kembali

Tabel 2.59  
Capaian Indikator Kinerja Utama Perumahan dan Kawasan Pemukiman Tahun 2021

Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Tahun 2021		Capaian	Keterangan
		Target	Realisasi		
1	2	3	4	5	6
<b>Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman</b>				<b>5</b>	<b>Sangat Renda</b>
Jumlah Rumah layak huni terbangun	Unit	312	0	0	Sangat Renda
Jumlah rumah tangga miskin pengguna listrik	Unit	700	70	10	Sangat Renda

Sumber : Bappeda Kabupaten Morowali Data Diolah Kembali

### 2.3.2 Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar

#### 2.3.2.1 Urusan Pemerintahan Bidang Ketenaga Kerjaan

Kinerja Pembangunan Urusan Pemerintahan Bidang Ketenaga Kerjaan merupakan misi 2 dari RPJMD 2018-2023 yaitu *Meningkatkan pengelolaan SDA guna meningkatkan PAD dengan melibatkan UKM lokal dan Koperasi agar dapat meningkatkan taraf ekonomi masyarakat dan menyerap TK lokal dengan tetap menjaga hak-hak pekerja, iklim investasi yang baik dan kelestarian alam*;. indikator Urusan Pemerintahan Bidang Ketenaga Kerjaan dikategorikan tinggi, seperti indikator angka partisipasi angkatan kerja, berdasarkan target kinerja RPJMD tahun 2021 sebesar 53.589 orang realisasi ditahun 2021 mencapai 52.787 orang, tingkat partisipasi angkatan kerja target 2021 59% realisasi tahun 2021 sebesar 64,7%, indikator tingkat pengangguran terbuka target tahun 2021sebesar 2,2 % realisasi tahun 2021 sebesar 5,21%. seperti dapat dilihat pada gambar grafik sebagai berikut :



Sumber : Bappeda Kabupaten Morowali Data Diolah Kembali

Gambar 2.22  
Capaian Realisasi Indikator Ketenaga Kerjaan Berdasarkan RPJMD

Untuk capaian kinerja pembangunan Urusan Pemerintahan Bidang Ketenaga Kerjaan berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Morowali tahun 2021, capaian realisasi keuangan sebesar 16,53% dengan kategori *Rendah* dan capaian realisasi indikator kinerja utama sebesar 85,7% dengan kategori **sangat Sedang**. Capaian realisasi keuangan dan kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Ketenaga Kerjaan dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 2.60  
Capaian Realisasi Anggaran Program Ketenaga Kerjaan Tahun 2021

PROGRAM	PAGU ANGGARAN SEBELUM PERGESERAN	PAGU ANGGARAN SETELAH PERGESERAN	REALISASI ANGGARAN	CAPAIAN	KET
	Rp	Rp	Rp		
Dinas Transmigrasi Dan Tenaga Kerja Daerah	11.307.117.783	11.126.167.783	1.839.417.794	16,53	RENDAH
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.235.016.693	4.059.458.193	1.496.285.808,00	36,86	RENDAH
PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	1.585.280.810	1.579.889.310	174.867.600	11,07	RENDAH
PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	340.934.520	340.934.520	96.531.386	28,31	RENDAH
PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	230.301.800	230.301.800	17.693.000	7,68	RENDAH
PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	361.712.400	361.712.400	3.700.000	1,02	SANGAT RENDAH
PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI	4.553.871.560	4.553.871.560	50.340.000	1,11	SANGAT RENDAH

Sumber : Bappeda Kabupaten Morowali Data Diolah Kembali

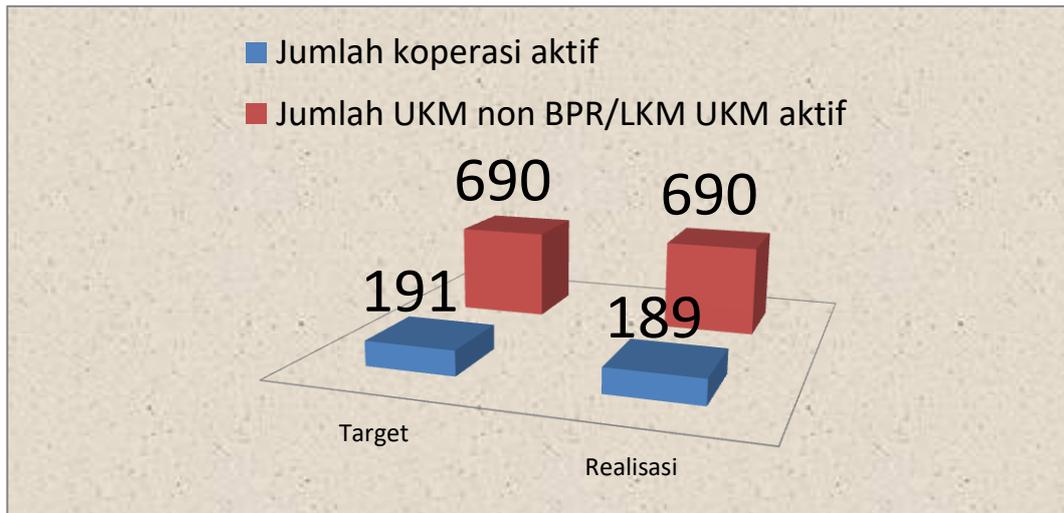
Tabel 2.61  
Capaian Indikator Ketenaga Kerjaan Tahun 2021

Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Tahun 2021		Capain	Ket
		Target	Realisasi		
1	2	3	4	5	6
<b>Tenaga Kerja</b>				<b>85,7</b>	<b>Sedang</b>
Angka partisipasi angkatan kerja	%	53,589	52,787	98,50	Sangat Tinggi
Tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK)	%	59	64,7	109,66	Sangat Tinggi
Tingkat pengangguran terbuka	%	2,2	5,21	42,23	Renda
Angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun	kasus	27	28	96,43	Sangat Tinggi

Sumber : Bappeda Kabupaten Morowali Data Diolah Kembali

### 2.3.2.2 Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Kinerja Pembangunan Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah merupakan misi 2 dari RPJMD 2018-2023 yaitu *Meningkatkan pengelolaan SDA guna meningkatkan PAD dengan melibatkan UKM lokal dan Koperasi agar dapat meningkatkan taraf ekonomi masyarakat dan menyerap TK lokal dengan tetap menjaga hak-hak pekerja, iklim investasi yang baik dan kelestarian alam*; indikator Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dikategorikan tinggi, seperti indikator jumlah koperasi aktif, berdasarkan target kinerja RPJMD tahun 2021 sebesar 191 koperasi realisasi ditahun 2021 mencapai 189 koperasi, Jumlah UMKM non BPR/LKM UMKM aktif target tahun 2021 sebesar 690 UMKM realisasi tahun 2021 sebesar 690 UMKM atau 100% seperti dapat dilihat pada gambar grafik sebagai berikut :



Sumber : Bappeda Kabupaten Morowali Data Diolah Kembali

Gambar 2.23  
Capaian Realisasi Jumlah Koperasi Aktif dan Jumlah UMKM non BPR/LKM Aktif Berdasarkan Target RPJMD

Untuk capaian kinerja pembangunan Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Morowali tahun 2021, capaian realisasi keuangan sebesar 13,87% dengan kategori *Rendah* dan capaian realisasi indikator kinerja utama sebesar 99,65% dengan kategori **sangat Sangat Tinggi**. Capaian realisasi keuangan dan kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2.62  
Capaian Realisasi Anggaran Program Koperasi, Usaha Kecil Menengah Tahun 2021

PROGRAM	PAGU ANGGARAN SEBELUM PERGESERAN	PAGU ANGGARAN SETELAH PERGESERAN	REALISASI ANGGARAN	CAPAIAN	KET
	Rp	Rp	Rp		
Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah	11.286.862.416	11.063.312.416	1.534.427.413	13,87	RENDAH
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.460.224.276	3.236.674.276	1.386.286.863	42,83	RENDAH
PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	19.814.800	19.814.800	19.504.400	98,43	SANGAT TINGGI

PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	73.514.950	73.514.950	70.725.950	96,21	SANGAT TINGGI
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	5.216.982.800	5.216.982.800	27.079.200	0,52	SANGAT RENDAH
PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	653.893.650	653.893.650	30.831.000	4,71	SANGAT RENDAH
PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	1.862.431.940	1.862.431.940		-	SANGAT RENDAH

Sumber : Bappeda Kabupaten Morowali Data Diolah Kembali

Tabel 2.63  
Capaian Indikator Kinerja Utama Koperasi, Usaha Kecil Menengah Tahun 2021

Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Tahun 2021		Capaian	Ket
		Target	Realisasi		
1	2	3	4	5	6
<b>Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah</b>				<b>99,65</b>	<b>Sangat Tinggi</b>
Persentase koperasi aktif	%	100	99	99,00	Sangat Tinggi
Jumlah koperasi aktif	Unit	191	189	98,95	Sangat Tinggi
Jumlah seluruh koperasi	Unit	256	256	100,00	Sangat Tinggi
Persentase UKM non BPR/LKM aktif (Jumlah UKM non BPR/LKM UKM)	%	3,201	3,201	100,00	Sangat Tinggi
Persentase BPR/LKM aktif (Jumlah BPR/LKM)	%	15	15	100,00	Sangat Tinggi
Persentase Usaha Mikro dan kecil (Jumlah usaha mikro dan kecil)	%	690	690	100,00	Sangat Tinggi

Sumber : Bappeda Kabupaten Morowali Data Diolah Kembali

### 2.3.2.3 Urusan Pemerintahan Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Capaian kinerja pembangunan Urusan Pemerintahan Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Morowali tahun 2021, capaian realisasi keuangan sebesar 33,62% dengan kategori *Rendah* dan capaian realisasi indikator kinerja utama sebesar 96,77% dengan kategori **sedang**. Capaian realisasi keuangan dan kinerja Urusan

Pemerintahan Urusan Pemerintahan Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2.64

Capaian Realisasi Keuangan  
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2021

PROGRAM	PAGU ANGGARAN SEBELUM PERGESERAN	PAGU ANGGARAN SETELAH PERGESERAN	REALISASI ANGGARAN	CAPAIAN	KET
	Rp	Rp	Rp		
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Daerah	5.460.064.244	5.267.028.490	1.770.547.869	33,62	RENDAH
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.951.944.993	5.003.934.300	1.685.251.589	33,68	RENDAH
PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	559.565.770	88.030.770	41.070.000	46,65	RENDAH
PROGRAM PENCATATAN SIPIL	191.200.280	57.480.280	2.068.270	3,60	SANGAT RENDAH
PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	696.448.546	117.583.140	42.158.010	35,85	RENDAH
PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	60.904.655,00	-	-	-	SANGAT RENDAH

Sumber : Bappeda Kabupaten Morowali Data Diolah Kembali

Tabel 2.65

Capaian Indikator Kinerja Utama Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2021

Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Tahun 2021		Capaian	Ket
		Target	Realisasi		
1	2	3	4	5	6
Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil				96,77	Tinggi
Rasio penduduk ber-KTP per satuan penduduk	%	1	1	100	Sangat Tinggi
Persentase kepemilikan akte kelahiran	%	31	29	93,55	Tinggi

Sumber : Bappeda Kabupaten Morowali Data Diolah Kembali

Administrasi kependudukan Kabupaten Morowali sangat tinggi dimana Rasio penduduk ber-KTP persatuan penduduk yang berarti setiap warga masyarakat Kabupaten Morowali yang telah cukup umur telah memiliki identitas atau kartu tanda penduduk sehingga target indicator mencapai 100%, sedangkan persentase kepemilikan akte kelahiran yaitu 93,55% atau 29 dari 31 kelahiran bayi telah memiliki akta kelahiran.

### 2.3.2.4 Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

#### Capaian kinerja pembangunan Urusan Pemerintahan Bidang

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Morowali tahun 2021, capaian realisasi keuangan sebesar 33,30% dengan kategori Rendah dan capaian realisasi indikator kinerja utama sebesar 100% dengan kategori **sangat tinggi**. Capaian realisasi keuangan dan kinerja Urusan Pemerintahan Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2.66  
Capaian Realisasi Keuangan  
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2021

PROGRAM	PAGU ANGGARAN SEBELUM PERGESERAN	PAGU ANGGARAN SETELAH PERGESERAN	REALISASI ANGGARAN	CAPAIAN	KET
	Rp	Rp	Rp		
<b>Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak</b>	<b>8.025.097.644</b>	<b>7.875.947.644</b>	<b>2.622.670.055</b>	<b>33,30</b>	<b>RENDAH</b>
PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	60.804.320	60.804.320	20.795.350	34,20	RENDAH
PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	78.324.745	78.324.745	47.532.995	60,69	SEDANG
PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	1.060.644.440	1.060.644.440	129.385.000,00	12,20	RENDAH
PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	256.560.290	256.560.290	28.171.400,00	10,98	RENDAH
PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	88.510.020	88.510.020	3.300.950	3,73	SANGAT RENDAH
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.443.582.064	5.294.432.064	2.313.489.660	43,70	RENDAH
PROGRAM PENATAAN DESA	42.168.750	42.168.750	-	-	SANGAT RENDAH
PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA	35.918.000	35.918.000	3.180.000	8,85	RENDAH
PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	725.818.215	725.818.215	63.214.700	8,71	RENDAH
PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	232.766.800	232.766.800	13.600.000	5,84	SANGAT RENDAH

Sumber : Bappeda Kabupaten Morowali Data Diolah Kembali

Tabel 2.67  
Capaian Indikator Kinerja Utama  
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2021

Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Tahun 2021		Capaian	Ket
		Target	Realisasi		
1	2	3	4	5	6
<b>Pemberdayaan Masyarakat dan Desa</b>				100	Sangat Tinggi
Persentase kantor desa dalam kondisi baik	%	100	100	100	Sangat Tinggi
Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK	Kelompok	143	143	100	Sangat Tinggi
PKK aktif	PKK	143	143	100	Sangat Tinggi
Posyandu aktif	Posyandu	154	154	100	Sangat Tinggi

Sumber : Bappeda Kabupaten Morowali Data Diolah Kembali

### 2.3.2.5 Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal

Capaian kinerja pembangunan Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Morowali tahun 2021, capaian realisasi keuangan sebesar 42,06% dengan kategori Rendah dan capaian realisasi indikator kinerja utama sebesar 97,64% dengan kategori **tinggi**. Capaian realisasi keuangan dan kinerja Urusan Pemerintahan Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2.68  
Capaian Realisasi Keuangan  
Pemerintahan Bidang Penanaman Modal Tahun 2021

PROGRAM	PAGU ANGGARAN SEBELUM PERGESERAN	PAGU ANGGARAN SETELAH PERGESERAN	REALISASI ANGGARAN	CAPAIAN	KET
	Rp	Rp	Rp		
<b>Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu</b>	<b>6.271.727.877</b>	<b>6.039.287.877</b>	<b>2.539.564.948</b>	<b>42,05</b>	<b>RENDAH</b>
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.948.046.977	4.715.606.977	2.293.406.798	48,63	RENDAH
PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	46.414.000	46.414.000	8.583.250,00	18,49	RENDAH
PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	422.476.000	422.476.000	6.360.000	1,51	SANGAT RENDA
PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	428.854.650	428.854.650	58.399.750	13,62	RENDAH

PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	367.015.800	367.015.800	161.848.100	44,10	RENDAH
PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	58.920.450	58.920.450	10.967.050	18,61	RENDAH

Sumber : Bappeda Kabupaten Morowali Data Diolah Kembali

Tabel 2.69

Capaian Indikator Kinerja Utama Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2021

Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Tahun 2021		Capaian	Ket
		Target	Realisasi		
1	2	3	4	5	6
<b>Penanaman Modal</b>				97,64	Sangat Tinggi
Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)	Investor	114	113	99,12	Sangat Tinggi
Jumlah nilai investasi berskala nasional(PMDN/PMA) (juta)	Rp	58.526.418	53.526.418	91,46	Sangat Tinggi
Rasio daya serap tenaga kerja (TK/PMA dn PMDN)	%	3,166	3,166	100,00	Sangat Tinggi
Kenaikan /penurunan Nilai Realisasi PMDN (juta)	Rp	8.057.693	8.057.693	100,00	Sangat Tinggi

Sumber : Bappeda Kabupaten Morowali Data Diolah Kembali

### 2.3.2.6 Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan

Kinerja Pembangunan Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan merupakan misi 4 dari RPJMD 2018-2023 yaitu *Meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui peningkatan fasilitas air bersih, Listrik, fasilitas olahraga, perumahan, obyek wisata, serta seni dan budaya sehingga tercipta kehidupan masyarakat yang harmonis dan bahagia.* indikator Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan dikategorikan tinggi, seperti indikator Jumlah barang muat, berdasarkan target kinerja RPJMD tahun 2021 sebesar 464.808 realisasi ditahun 2021 mencapai 456.186, Jumlah Barang Turun target tahun 2021 sebesar 208,411 ton realisasi tahun 2021 sebesar 204,545 ton, Jumlah Penumpang Naik target tahun 2021 sebesar 8.905 orang realisasi tahun 2021 sebesar 8.740 orang, Jumlah Penumpang turun target tahun 2021 sebesar 9.050 orang realisasi tahun 2021 sebesar 8.891 orang, seperti dapat dilihat pada gambar grafik sebagai berikut :



Sumber : Bappeda Kabupaten Morowali Data Diolah Kembali

Gambar 2.24  
 Capaian Realisasi Jumlah Barang Muat,  
 Jumlah Barang Turun, Jumlah Penumpang Naik  
 dan Jumlah Penumpang Turun Berdasarkan Target RPJMD

Capaian kinerja pembangunan Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Morowali tahun 2021, capaian realisasi keuangan sebesar 19,24% dengan kategori **Rendah** dan capaian realisasi indikator kinerja utama sebesar 88,82% dengan kategori **sedang**. Capaian realisasi keuangan dan kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2.70  
 Capaian Realisasi Anggaran Program Perhubungan Tahun 2021

PROGRAM	PAGU ANGGARAN SEBELUM PERGESERAN	PAGU ANGGARAN SETELAH PERGESERAN	REALISASI ANGGARAN	CAPAIAN	KET
	Rp	Rp	Rp		
Dinas Perhubungan Daerah	16.541.232.252	15.929.312.852	3.065.527.918	19,24	RENDAH
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.496.766.022	4.884.847.422	2.491.911.392	51,01	SEDANG
PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	2.314.873.953	2.314.873.953	19.300.000	0,83	SANGAT RENDAH
PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	8.729.592.277	8.729.591.477	554.316.526	6,35	SANGAT RENDAH

Sumber : Bappeda Kabupaten Morowali Data Diolah Kembali

Tabel 2.71  
Capaian Indikator Kinerja Utama Perhubungan Tahun 2021

Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Tahun 2021		Capaian	Ket
		Target	Realisasi		
1	2	3	4	5	6
<b>Perhubungan</b>				<b>88,82</b>	<b>Sedang</b>
Jumlah arus penumpang angkutam umum (kapal laut)					
Jumlah kapal berangkat	Unit	371	371	100,00	Sangat Tinggi
Jumlah penumpang turun	Orang	9,059	8,891	98,15	Sangat Tinggi
Jumlah penumpang naik	Orang	8,905	8,74	98,15	Sangat Tinggi
Jumlah barang bongkar (ton)	Ton	208,411	204,545	98,15	Sangat Tinggi
Jumlah barang muat (ton)	Ton	464,808	456,186	98,15	Sangat Tinggi
Rasio Ijin Trayek	%	23	22	95,65	Sangat Tinggi
Jumlah uji kir angkutan umum	Angkutan	650	650	100,00	Sangat Tinggi
Jumlah PelabuhanLaut /Udara/ Terminal Bis	Pelabuhan	3	3	100,00	Sangat Tinggi
Pemasangan rambu-rambu	Rambu	310	310	100,00	Sangat Tinggi

Sumber : Bappeda Kabupaten Morowali Data Diolah Kembali

### 2.3.2.7 Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika

Capaian kinerja pembangunan Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Morowali tahun 2021, capaian realisasi keuangan sebesar 30,29% dengan kategori *Rendah* dan capaian realisasi indikator kinerja utama sebesar 100% dengan kategori **sangat tinggi**. Capaian realisasi keuangan dan kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2.72  
Capaian Realisasi Anggaran Program Komunikasi dan Informatika Tahun 2021

PROGRAM	PAGU ANGGARAN SEBELUM PERGESERAN	PAGU ANGGARAN SETELAH PERGESERAN	REALISASI ANGGARAN	CAPAIAN	KET
	Rp	Rp	Rp		
<b>Dinas Komunikasi dan Informatika</b>	<b>6.270.180.281</b>	<b>6.031.580.281</b>	<b>1.827.100.910</b>	<b>30,29</b>	<b>RENDAH</b>
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.503.162.827	3.264.562.827	1.368.464.960	41,92	RENDAH
PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	346.380.650	346.380.650	57.938.000	16,73	RENDAH
PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	2.420.636.804	2.420.636.804	400.697.950	16,55	RENDAH

Sumber : Bappeda Kabupaten Morowali Data Diolah Kembali

Tabel 2.73  
Capaian Indikator Kinerja Utama Komunikasi dan Informatika Tahun 2021

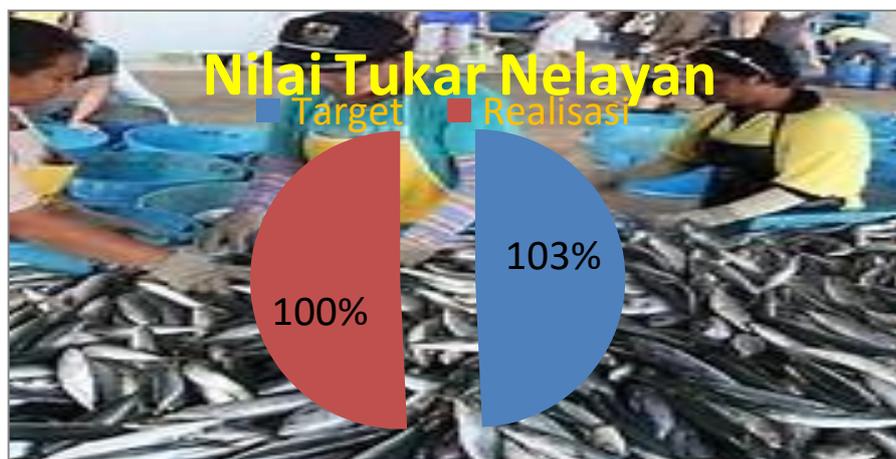
Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Tahun 2021		Capaian	Ket
		Target	Realisasi		
1	2	3	4	5	6
<b>Komunikasi dan Informatika</b>				<b>100</b>	<b>Sangat Tinggi</b>
Jumlah penyiaran radio/TV Lokal	Siaran	1	1	1	Sangat Tinggi
Web Side milik Pemerintah Daerah	Web	1	1	1	Sangat Tinggi

Sumber : Bappeda Kabupaten Morowali Data Diolah Kembali

### 2.3.3 Urusan Pemerintahan Pilihan

#### 2.3.3.1 Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan

Kinerja Pembangunan Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan merupakan misi 5 dari RPJMD 2018-2023 yaitu *Meningkatkan produksi pangan melalui peningkatan dan pengembangan bidang infrastruktur pertanian, peternakan, perikanan, kehutanan dan kelautan yang didukung oleh kemudahan modal usaha dan TTG agar tercipta kepastian harga dan pasar.* indikator Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan dikategorikan tinggi, indikator Nilai Tukar Nelayan, berdasarkan target kinerja RPJMD tahun 2021 sebesar 100% realisasi ditahun 2021 mencapai 103% seperti dapat dilihat pada gambar grafik sebagai berikut :



Gambar : 2.25  
Capaian Realisasi Nilai Tukar Nelayan Berdasarkan Target RPJMD

Capaian kinerja pembangunan Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Morowali tahun 2021, capaian realisasi keuangan sebesar 7,94% dengan kategori **Rendah** dan capaian realisasi indikator kinerja utama sebesar 85,36% dengan

kategori **sedang**. Capaian realisasi keuangan dan kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2.74  
Capaian Realisasi Anggaran Program Kelautan dan Perikanan Tahun 2021

PROGRAM	PAGU ANGGARAN SEBELUM PERGESERAN	PAGU ANGGARAN SETELAH PERGESERAN	REALISASI ANGGARAN	CAPAIAN	KET
	Rp	Rp	Rp		
<b>Dinas Perikanan Daerah</b>	<b>34.752.807.876</b>	<b>34.562.841.626</b>	<b>2.745.102.605</b>	<b>7,94</b>	<b>RENDAH</b>
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.407.710.280	5.118.960.280	2.181.712.405	42,62	RENDAH
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	21.751.844.565	21.688.914.565	421.775.200	1,94	SANGAT RENDAH
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	3.084.826.271	3.211.540.021	78.310.000	2,44	SANGAT RENDAH
PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	53.660.000	53.660.000	9.000.000	16,77	RENDAH
PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	4.454.766.760	4.489.766.760	54.305.000	1,21	SANGAT RENDAH

Sumber : Bappeda Kabupaten Morowali Data Diolah Kembali

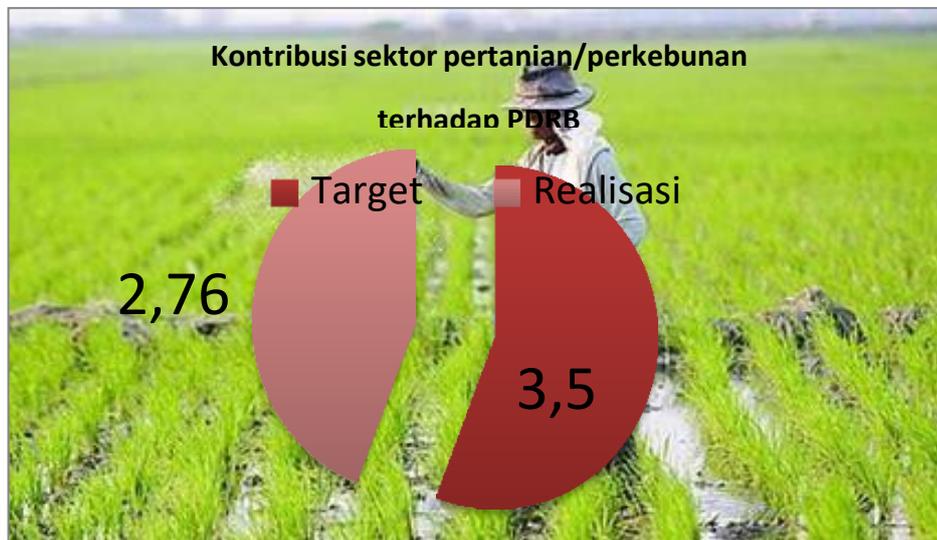
Tabel 2.75  
Capaian Indikator Kinerja Utama Kelautan dan Perikanan Tahun 2021

Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Tahun 2021		Capaian	Ket
		Target	Realisasi		
1	2	3	4	5	6
<b>Kelautan dan Perikanan</b>				<b>85,36</b>	<b>Sedang</b>
Produksi perikanan (ton)					
Produksi perikanan laut	ton	33,556	30,505	90,91	Tinggi
Produksi perikanan darat	ton	6,218	5,653	90,91	Tinggi
Konsumsi ikan	ton	52	51	98,08	Sangat Tinggi
Cakupan bina kelompok nelayan	%	40	40	100,00	Sangat Tinggi
Proporsi tangkapan ikan yang berada dalam batasan biologis yang aman	%	48,42	48,42	100,00	Sangat Tinggi
Rasio kawasan lindung perairan terhadap total luas perairan teritorial	%	46	46	100,00	Sangat Tinggi
Nilai tukar nelayan	%	103	103	103,00	Sangat Tinggi

Sumber : Bappeda Kabupaten Morowali Data Diolah Kembali

### 2.3.3.2 Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian dan Peternakan

Kinerja Pembangunan Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian dan Peternakan merupakan misi 5 dari RPJMD 2018-2023 yaitu *Meningkatkan produksi pangan melalui peningkatan dan pengembangan bidang infrastruktur pertanian, peternakan, perikanan, kehutanan dan kelautan yang didukung oleh kemudahan modal usaha dan TTG agar tercipta kepastian harga dan pasar.* indikator Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian dan Peternakan dikategorikan sedang, indikator Kontribusi sector pertanian/perkebunan terhadap PDRB, berdasarkan target kinerja RPJMD tahun 2021 sebesar 3,5% realisasi ditahun 2021 mencapai 2,76% seperti dapat dilihat pada gambar grafik sebagai berikut :



Sumber : Bappeda Kabupaten Morowali Data Diolah Kembali

Gambar 2.26  
Capaian Realisasi Kontribusi Sektor Pertanian/Perkebunan Terhadap PDRB  
Berdasarkan Target RPJMD

Capaian kinerja pembangunan Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian dan Peternakan berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Morowali tahun 2021, capaian realisasi keuangan sebesar 33,61% dengan kategori **Rendah** dan capaian realisasi indikator kinerja utama sebesar 96,97% dengan kategori **tinggi**. Capaian realisasi keuangan dan kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian dan Peternakan dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2.76  
Capaian Realisasi Anggaran Program Pertanian dan Peternakan Tahun 2021

PROGRAM	PAGU ANGGARAN SEBELUM PERGESERAN	PAGU ANGGARAN SETELAH PERGESERAN	REALISASI ANGGARAN	CAPAIAN	KET
	Rp	Rp	Rp		
<b>Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan</b>	<b>57.888.757.321</b>	<b>56.449.257.321</b>	<b>18.972.464.285</b>	<b>33,61</b>	<b>RENDAH</b>
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	12.998.799.145	11.559.299.145	5.759.468.569	49,83	RENDAH
PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	922.056.257	922.056.257	-	-	SANGAT RENDAH
PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	53.594.250	53.594.250	-	-	SANGAT RENDAH
PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	27.016.000	27.016.000	-	-	SANGAT RENDAH
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	31.066.769.313	31.066.769.313	000	-	SANGAT RENDAH
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	12.624.252.906	12.624.252.906	12.553.451.530	99,44	SANGAT TINGGI
PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	196.269.450	196.269.450	95.260.980	48,54	RENDAH
PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	2.427.527.001	2.427.527.001	564.283.206	23,25	RENDAH

Sumber : Bappeda Kabupaten Morowali Data Diolah Kembali

Tabel 2.77  
Capaian Indikator Kinerja Utama  
Pertanian dan Peternakan Tahun 2021

Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Tahun 2021		Capaian	Ket
		Target	Realisasi		
1	2	3	4	5	
<b>Pertanian</b>				<b>96,97</b>	<b>Sangat Tinggi</b>
Kontribusi sektor pertanian/perkebunan terhadap PDRB	%	3,5	2,76	78,86	Sedang
Kontribusi sektor pertanian (palawija) terhadap PDRB	%	2,8	2,8	100,00	Sangat Tinggi
Kontribusi sektor perkebunan (tanaman keras) terhadap PDRB	%	5,9	5,9	100,00	Sangat Tinggi

Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar					
Padi	Ton	4,9	4,9	100,00	Sangat Tinggi
Jagung	Ton	4,5	4,5	100,00	Sangat Tinggi
Kedelai	Ton	1,2	1,2	100,00	Sangat Tinggi
Ketersediaan energi dan protein perkapita	%	3.468,10	3.468,10	100,00	Sangat Tinggi

Sumber : Bappeda Kabupaten Morowali Data Diolah Kembali

### 2.3.3.3 Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan Olah Raga dan Pariwisata Kinerja Pembangunan Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan

Kinerja Pembangunan Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan Olah Raga dan Pariwisata merupakan misi 5 dari RPJMD 2018-2023 yaitu *Meningkatkan produksi pangan melalui peningkatan dan pengembangan bidang infrastruktur pertanian, peternakan, perikanan, kehutanan dan kelautan yang didukung oleh kemudahan modal usaha dan TTG agar tercipta kepastian harga dan pasar.* indikator Urusan Pemerintahan Pemerintahan Bidang Kepemudaan Olah Raga dan Pariwisata dikategorikan sedang, indikator jumlah kunjungan wisata, berdasarkan target kinerja RPJMD tahun 2021 sebesar 5.569 orang realisasi ditahun 2021 mencapai 4.877 orang seperti dapat dilihat pada gambar grafik sebagai berikut:



Sumber : Bappeda Kabupaten Morowali Data Diolah Kembali

Gambar 2.27  
Capaian Realisasi Jumlah Kunjungan Wisata Berdasarkan Target RPJMD

Capaian kinerja pembangunan Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan Olah Raga dan Pariwisata berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Morowali tahun 2021, capaian realisasi keuangan sebesar 20,83% dengan kategori **Rendah** dan capaian realisasi indikator kinerja utama sebesar 50,47% dengan kategori **rendah**. Capaian realisasi keuangan dan kinerja Urusan Pemerintahan Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan Olah Raga dan Pariwisata dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2.78  
Capaian Realisasi Anggaran Program Kepemudaan Olah Raga dan Pariwisata Tahun 2021

PROGRAM	PAGU ANGGARAN SEBELUM PERGESERAN	PAGU ANGGARAN SETELAH PERGESERAN	REALISASI ANGGARAN	CAPAIAN	KET
	Rp	Rp	Rp		
<b>Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata</b>	<b>12.136.992.100</b>	<b>11.787.510.300</b>	<b>2.455.567.338</b>	<b>20,83</b>	<b>RENDAH</b>
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.304.319.778	4.978.429.548	2.209.226.908	44,38	RENDAH
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	641.453.310	641.453.310	21.030.000	3,28	SANGAT RENDAH
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	4.579.832.810	4.580.243.060	82.596.830	1,80	SANGAT RENDAH
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	171.813.640	171.812.520	8.588.000	5,00	SANGAT RENDAH
PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	304.359.918	304.359.918	000	-	SANGAT RENDAH
PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	579.937.360	579.937.360	61.041.500	10,53	RENDAH
PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	555.275.284	531.274.584	73.084.100	13,76	RENDAH

Sumber : Bappeda Kabupaten Morowali Data Diolah Kembali

Tabel 2.79  
Capaian Indikator Kinerja Utama Kepemudaan Olah Raga dan Periwisata  
Tahun 2021

Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Tahun 2021		Capaian	Ket
		Target	Realisasi		
1	2	3	4	5	6
<b>Pariwisata dan Kepemudaan dan Olah Raga</b>				<b>50,47</b>	<b>Sedang</b>
Kunjungan Wisata	Wisatawan	55,698	48,773	87,57	Sedang
Persentase organisasi pemuda yang aktif (jumlah organisasi pemuda)	%	6	6	100,00	Sangat Tinggi
Jumlah prestasi olahraga	Prestasi				
- Emas	Keping	8	0	0,00	Sangat Rendah
- Perak	Keping	7	0	0,00	Sangat Rendah
- Perunggu	Keping	6	0	0,00	Sangat Rendah
Jumlah organisasi olah raga	Organisasi	11	11	100,00	Sangat Tinggi
Jumlah kegiatan kepemudaan	Kegiatan	6	6	100,00	Sangat Tinggi
Jumlah kegiatan olah raga	Kegiatan	6	4	66,67	Sedang
Lapangan olah raga	Unit	4	0	0,00	Sangat Rendah

Sumber : Bappeda Kabupaten Morowali Data Diolah Kembali

## 2.3.4 Urusan Pendukung Urusan Pemerintahan

### 2.3.4.1 Perencanaan

Capaian kinerja pembangunan Urusan Pemerintahan Bidang Perencanaan berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Morowali tahun 2021, capaian realisasi keuangan sebesar 37,58% dengan kategori **Rendah** dan capaian realisasi indikator kinerja utama sebesar 87,50,% dengan kategori **sedang**. Capaian realisasi keuangan dan kinerja Urusan Pemerintahan Urusan Pemerintahan Bidang Perencanaan dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

**Tabel 2.80**  
**Capaian Realisasi Anggaran Program Pendukung Urusan Pemerintahan**  
**Perencanaan Tahun 2021**

PROGRAM	PAGU ANGGARAN SEBELUM PERGESERAN	PAGU ANGGARAN SETELAH PERGESERAN	REALISASI ANGGARAN	CAPAIAN	KET
	Rp	Rp	Rp		
<b>Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah</b>	<b>12.167.990.160</b>	<b>11.751.370.160</b>	<b>4.415.621.752</b>	<b>37,58</b>	<b>RENDAH</b>
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	8.332.297.078	7.915.677.078	3.298.499.792	41,67	RENDAH
PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	1.365.016.400	1.365.016.400	500.532.500	36,67	RENDAH
PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	1.182.356.643	1.182.356.643	341.453.460		SANGAT RENDAH
PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	1.288.320.039	1.288.320.039	275.136.000	21,36	RENDAH

Sumber : Bappeda Kabupaten Morowali Data Diolah Kembali

**Tabel 2.81**  
**Capaian Indikator Kinerja Utama Perencanaan Tahun 2021**

Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Tahun 2021		Capaian	Ket
		Target	Realisasi		
1	2	3	4	5	6
<b>Perencanaan Pembangunan</b>				<b>87,5</b>	<b>Sedang</b>
Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA	Ada	Ada	Ada	Ada	Sangat Tinggi
Tersedianay Dokumen Perencanaan: RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA	Ada	Ada	Ada	Ada	Sangat Tinggi
Tersedianya Dokumen Perencanaan: RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA	Doc	2	1	50	Sedang
Tersedianya Dokumen RTRW yang telah ditetapkan dengan PERDA	Ada	Ada	Ada	Ada	Sangat Tinggi

Sumber : Bappeda Kabupaten Morowali Data Diolah Kembali

### 2.3.3.2 Keuangan

Capaian kinerja pembangunan Urusan Pemerintahan Bidang Keuangan berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Morowali tahun 2021, capaian realisasi keuangan sebesar 9,71% dengan kategori **Rendah** dan capaian realisasi indikator kinerja utama sebesar 100% dengan kategori **sangat tinggi**. Capaian realisasi keuangan dan kinerja Urusan Pemerintahan Urusan Pemerintahan Bidang Keuangan dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2.82  
Capaian Realisasi Anggaran Program Pendukung Urusan Pemerintahan Keuangan Tahun 2021

PROGRAM	PAGU ANGGARAN SEBELUM PERGESERAN	PAGU ANGGARAN SETELAH PERGESERAN	REALISASI ANGGARAN	CAPAIAN	KET
	Rp	Rp	Rp		
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	245.872.086.207	270.422.618.687	26.252.949.372	9,71	RENDAH
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	12.319.081.702	11.377.373.682	4.334.973.470	38,10	RENDAH
PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	230.851.820.340	256.376.704.840	19.851.680.902	7,74	RENDAH
PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	2.701.184.165	2.668.540.165	2.066.295.000	77,43	SEDANG

Sumber : Bappeda Kabupaten Morowali Data Diolah Kembali

Tabel 2.83  
Capaian Indikator Kinerja Utama Keuangan Tahun 2021

Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Tahun 2021		Capaian	Ket
		Target	Realisasi		
1	2	3	4	5	6
Keuangan				100	Sangat Baik
Opini BPK terhadap laporan Keuangan	Opini	WTP	WTP	WTP	Sangat Baik

Sumber : Bappeda Kabupaten Morowali Data Diolah Kembali

### 2.3.3.3 Kepegawaian

Capaian kinerja pembangunan Urusan Pemerintahan Bidang kepegawaian berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Morowali tahun 2021, capaian realisasi keuangan sebesar 34,62% dengan kategori **Rendah** dan capaian realisasi indikator kinerja utama sebesar 90,04% dengan kategori **tinggi**. Capaian realisasi keuangan dan kinerja Urusan Pemerintahan Urusan Pemerintahan Bidang Kepegawaian dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2.84  
Capaian Realisasi Anggaran Program Pendukung Urusan Pemerintahan Kepegawaian Tahun 2021

PROGRAM	PAGU ANGGARAN SEBELUM PERGESERAN	PAGU ANGGARAN SETELAH PERGESERAN	REALISASI ANGGARAN	CAPAIAN	KET
	Rp	Rp	Rp		
<b>Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia</b>	<b>8.556.220.141</b>	<b>8.381.820.141</b>	<b>2902114581</b>	<b>34,62</b>	<b>Rendah</b>
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.188.974.083	4.014.574.083	1.014.574.083	36%	Sedang
PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	1.034.365.310	1.034.365.310	534.365.310	21%	Rendah
PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	3.332.880.748	3.332.880.748	1.332.880.748	42%	Rendah

Sumber : Bappeda Kabupaten Morowali Data Diolah Kembali

Tabel 2.85  
Capaian Indikator Kinerja Utama Kepegawaian Tahun 2021

Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Tahun 2021		Capaian	Ket
		Target	Realisasi		
1	2	3	4	5	6
<b>Kepegawaian Serta Pendidikan dan Pelatihan</b>				<b>90,08</b>	<b>Tinggi</b>
Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan structural dan fungsional	%	28,83	25,97	90,08	Tinggi

Sumber : Bappeda Kabupaten Morowali Data Diolah Kembali

### 2.3.3.4 Pengawasan

Capaian kinerja pembangunan Urusan Pemerintahan Bidang Pengawasan berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Morowali tahun 2021, capaian realisasi keuangan sebesar 47,85% dengan kategori **Rendah** dan capaian realisasi indikator kinerja utama sebesar 104,76% dengan kategori sangat **tinggi**. Capaian realisasi keuangan dan kinerja Urusan Pemerintahan Urusan Pemerintahan Bidang Pengawasan dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2.86  
Capaian Realisasi Anggaran Program Pendukung Urusan Pemerintahan Pengawasan Tahun 2021

PROGRAM	PAGU ANGGARAN SEBELUM PERGESERAN	PAGU ANGGARAN SETELAH PERGESERAN	REALISASI ANGGARAN	CAPAIAN	KET
	Rp	Rp	Rp		
<b>Inspektorat Daerah</b>	<b>8.793.854.003</b>	<b>8.585.854.003</b>	<b>4.107.994.961</b>	<b>47,85</b>	<b>Rendah</b>
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6.766.842.603	6.558.842.603	2.958.842.603	38.54	Rendah
PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	1.741.886.350	1.741.886.350	741.886.000	33%	Rendah
PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	285.125.050	285.125.050	100.124.000	50%	Sedang

Sumber : Bappeda Kabupaten Morowali Data Diolah Kembali

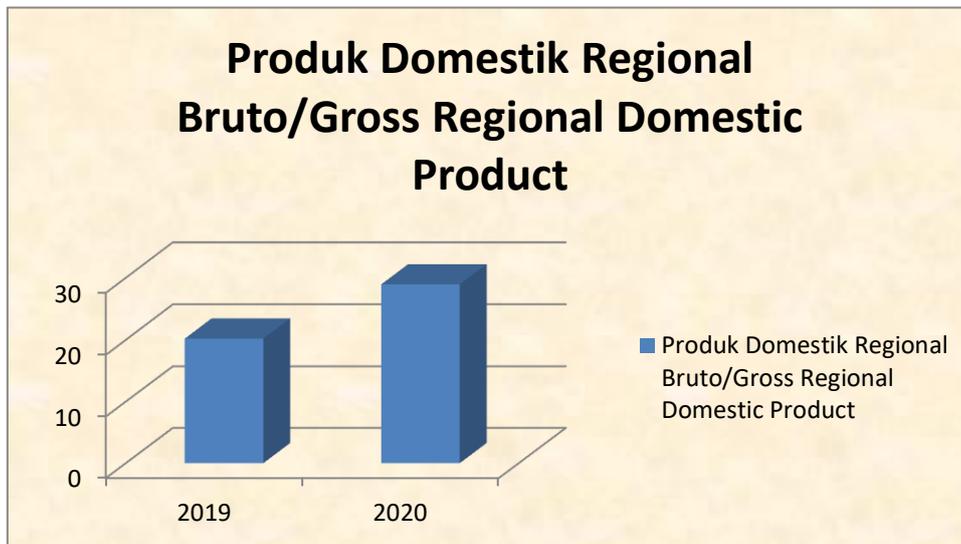
Tabel 2.87  
Capaian Indikator Kinerja Utama Pengawasan Tahun 2021

Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Tahun 2021		Capaian	Ket
		Target	Realisasi		
1	2	3	4	5	6
<b>Pengawasan</b>				<b>104,76</b>	<b>Sangat Tinggi</b>
Persentase Tindak Lanjut Temuan	%	100	100	100	Sangat Tinggi
Jumlah Temuan BPK	Kasus	7	8	114	Sangat Tinggi
Nilai LAKIP/SAKIP	Opini	B	B	100	Sangat Tinggi

Sumber : Bappeda Kabupaten Morowali Data Diolah Kembali

## 2.4 Capaian Kinerja Makro Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021

### 2.4.1 Capaian PDRB

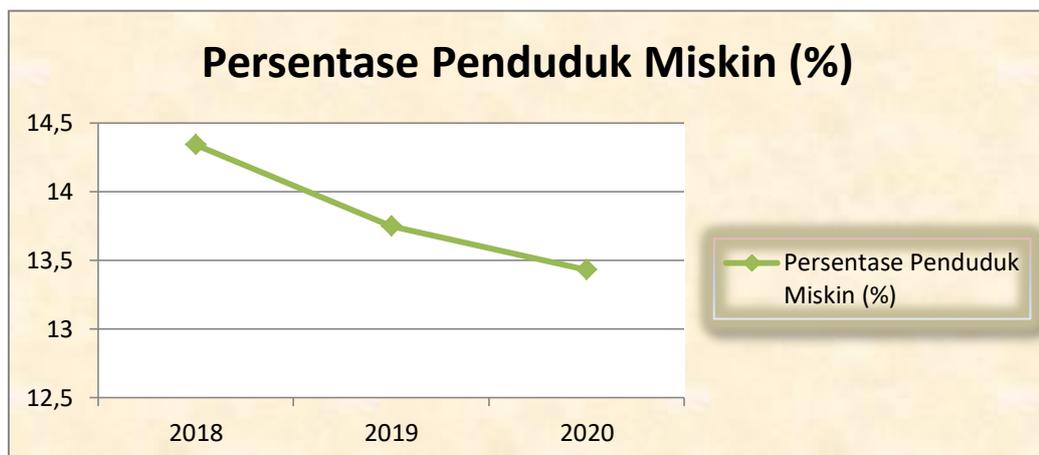


Sumber : Morowali Dalam Angka (BPS 2021)

**Gambar 2.27**  
**Grafik Capaian Pertumbuhan PDRB 2019-2021**

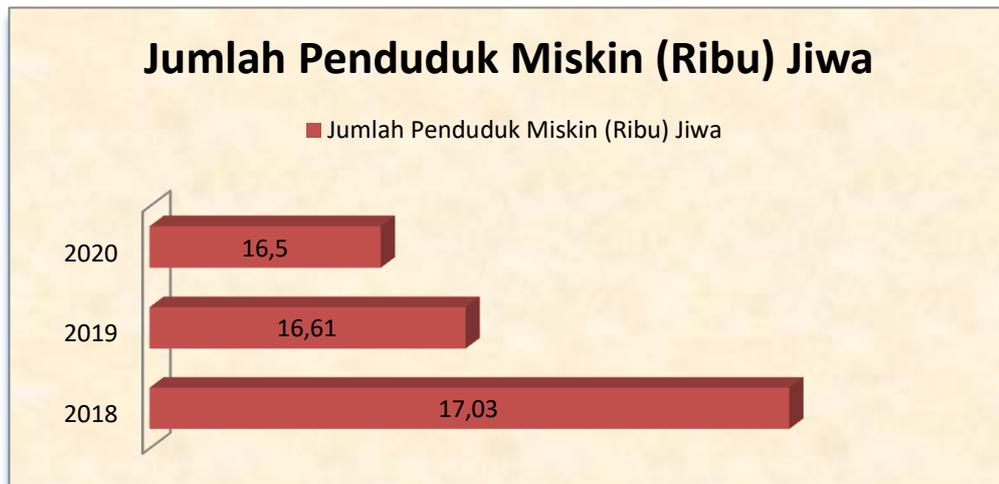
Berdasarkan grafik diatas harga konstan nilai PDRB Morowali pada tahun 2021 meningkat. Peningkatan tersebut dipengaruhi oleh meningkatnya produksi di seluruh lapangan usaha terutama di lapangan usaha industri pengolahan (pengolahan industry nikel) serta pertambangan & penggalian. Nilai PDRB Morowali tahun 2019 atas dasar harga konstan mencapai 20.20 Persen dan meningkat pada tahun 2021 sebesar 28,93 persen.

### 2.4.2 Capaian Penurunan Angka Kemiskinan



Sumber : Morowali Dalam Angka (BPS 2021)

Gambar 2.28  
Grafik Capaian Penurunan Persentase Penduduk Miskin tahun 2018-2021



Sumber : Morowali Dalam Angka (BPS 2021)

Gambar 2.29  
Penurunan Jumlah Penduduk Miskin tahun 2018-2020

Berdasarkan grafik diatas, terjadi penurunan garis kemiskinan di Kabupaten Morowali dari tahun 2018 yaitu sebesar 14,34 % menjadi menjadi Rp. 13,75% pada tahun 2019, dan pada tahun 2021 menurun menjadi 13,43 % sedangkan jumlah penduduk miskin menurun dari 2018 sebesar 420,21 jiwa menurun menjadi 410,36 jiwa dan pada tahun 2021 menurun menjadi 398,73 jiwa.

## 2.5 Permasalahan Daerah Yang Berhubungan Dengan Prioritas Dan Sasaran Pembangunan Daerah

Berdasarkan hasil capaian pembangunan dan evaluasi kinerja RPJMD maka di tetapkan permasalahan daerah yang berhubungan dengan prioritas dan sasaran pembangunan daerah adalah sebagai berikut :

1. Kualitas sumber daya manusia yang masih perlu untuk di tingkatkan. Ini dapat dilihat dari capaian IPM 72,02 yang merupakan peringkat kedua setelah Kota Palu, tetapi pada angka harapan hidup 68,82 kita masih jauh dari kata ideal dan masih berada di bawah beberapa kabupaten di sulawesi tengah yang mana di ikuti oleh beberapa permasalahan pada gizi buruk dan stunting.
2. Angka kemiskinan yang masih sangat tinggi yaitu 13,75%. Jika dilihat dari persentase penurunan dari tahun sebelumnya termasuk cukup baik yaitu 13,47% tetapi masih berada dibawah angka kemiskinan beberapa kabupaten.

3. Penurunan ini juga tidak berbanding lurus dengan pengentasan kemiskinan pada wilayah kepulauan.
4. PDRB kabupaten yang masih di dominasi oleh sektor industri dan pertambangan mengharuskan pemerintah daerah lebih fokus memprioritaskan sektor lainnya sehingga tidak terjadi ketimpangan antar sektor. Ketimpangan antar sektor ini akan berdampak pada ketimpangan pendapatan antar wilayah.
5. Pemerataan pembangunan khususnya kecamatan yang berada pada wilayah kepulauan. Infrastruktur merupakan salah satu indikator untuk menunjang pengentasan kemiskinan, antara lain rumah layak huni, jalan, air bersih, jaringan irigasi bagi para petani, dan lainnya.

## **2.6 Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah**

### **2.6.1 Urusan Pendidikan**

Permasalahan daerah yang berhubungan dengan urusan pendidikan adalah sebagai berikut :

1. Aspek keterjangkauan dan aksesibilitas kewilayahan terutama pada daerah terpencil dan terisolir.
2. Distribusi dan jumlah sebaran guru yang tidak merata.
3. Kesiapan anak usia sekolah dasar untuk mengikuti pendidikan dasar terutama di pedesaan belum optimal.
4. Kemampuan penyediaan layanan PAUD relatif masih rendah.
5. Sarana dan prasarana pendidikan belum memadai, termasuk buku dan peralatan belajar-mengajar.
6. Ketersediaan Guru Berdasarkan Bidang Keahlian

### **2.6.2 Urusan Kesehatan**

Permasalahan daerah yang berhubungan dengan urusan kesehatan adalah sebagai berikut :

1. Sarana dan prasarana kesehatan belum optimal dan jaringannya masih kurang memadai.
2. Kuantitas dan kualitas tenaga kesehatan belum sesuai dengan kebutuhan
3. Tingginya Angka Stunting

4. Ketersediaan Obat Yang Belum Merata
5. Usia Harapan Hidup masih dibawah usia harapan nasional
6. Angka Kematian Ibu masih tinggi
7. Angka Kematian Bayi masih tinggi
8. Status Gizi balita masih rendah.
9. Masih Tingginya tingkat penularan Virus COVID-19

### **2.6.3 Urusan Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang**

Permasalahan daerah yang berhubungan dengan urusan pekerjaan umum dan penataan ruang adalah sebagai berikut :

1. Ketimpangan Pembangunan Infrastruktur Dasar Antar Wilayah
2. Belum Optimalnya infrastruktur di sektor pariwisata.
3. Masih rendahnya ketersediaan air bersih, listrik di daerah kepulauan

### **2.6.4 Urusan Perumahan Rakyat Dan Kawasan Pemukiman**

Permasalahan daerah yang berhubungan dengan urusan perumahan rakyat dan kawasan pemukiman adalah sebagai berikut :

1. Masih banyaknya rumah yang kondisinya tidak layak huni.
2. Masih terbatasnya penyediaan fasilitas dasar bagi masyarakat miskin termasuk air bersih dan sanitasi.
3. Belum adanya data base lingkungan permukiman perumahan, jamban keluarga, dan air buangan.

### **2.6.5 Urusan Sosial**

Permasalahan daerah yang berhubungan dengan urusan sosial adalah sebagai berikut :

1. Masih tingginya jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) khususnya fakir miskin dan penyandang disabilitas.
2. Terbatasnya sarana dan prasarana pelayanan dan rehabilitasi sosial, termasuk Panti Pelayanan Sosial yang memadai.
3. Terbatasnya akses jaminan sosial, perlindungan sosial bagi PMKS dan Pemberdayaan sosial bagi PMKS.

4. Terbatasnya akses informasi dan jejaring kerjasama bagi pelayanan penanganan PMKS.

#### **2.6.6 Urusan Tenaga Kerja**

Permasalahan daerah yang berhubungan dengan urusan tenaga kerja adalah sebagai berikut :

1. Masih tingginya angka pengangguran.
2. Belum tersedianya sistem informasi ketenagakerjaan.
3. Belum tersedianya data yang akurat tentang ketenagakerjaan.
4. Kompetensi tenaga kerja lokal yang masih rendah sehingga masih sulit bersaing dengan tenaga kerja asing.
5. Terbatasnya sarana dan prasarana pelatihan ketenagakerjaan yang sesuai stándar kebutuhan peralatan berbasis kompetensi dan perkembangan teknologi;

#### **2.6.7 Urusan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak**

Permasalahan daerah yang berhubungan dengan urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak adalah sebagai berikut :

1. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam hal peran serta penanganan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak
2. Belum tersedianya pusat pelayanan perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan

#### **2.6.8 Urusan Pangan**

Permasalahan daerah yang berhubungan dengan urusan pangan adalah sebagai berikut :

1. Masih Banyaknya desa rawan pangan di sebabkan oleh akses pangan dan ketersediaan pangan.
2. Konsumsi pangan masyarakat masih kurang beragam, bergizi, dan berimbang.
3. Rendahnya kemampuan daya beli disebabkan kemiskinan khususnya di wilayah kepulauan.

#### **2.6.9 Urusan Lingkungan Hidup**

Permasalahan daerah yang berhubungan dengan urusan lingkungan hidup adalah sebagai berikut :

1. Jumlah armada kebersihan tidak sebanding dengan jumlah perkembangan penduduk
2. Ketersediaan TPA dan TPS yang belum sebanding dengan jumlah desa dan volume sampah.
3. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam menjaga kebersihan dan segala fasilitas sarana prasarana persampahan.
4. Tidak adanya teknologi pengelolaan sampah/limbah yg dihasilkan masyarakat.

#### **2.6.10 Urusan Administrasi Kependudukan Dan Catatan Sipil**

Permasalahan daerah yang berhubungan dengan urusan Administrasi Kependudukan Dan Catatan Sipil adalah sebagai berikut :

1. Sarana dan prasarana pendukung pelayanan dokumen administrasi kependudukan ( KTP-EI, KK, Akte Kelahiran, Akte Kematian, Akte Nikah) belum memadai yakni jaringan yang sering terganggu, server (alat perekam) perlu perawatan setiap tahunnya serta mobil pelayanan Adminduk.
2. Gedung Kantor yang tidak memadai untuk mendukung proses pelayanan diantaranya ruangan perekaman dan data yang kurang representatif.

#### **2.6.11 Urusan Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa**

Permasalahan daerah yang berhubungan dengan urusan Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa adalah sebagai berikut :

1. Masih banyaknya desa yang belum memiliki BUMDES.
2. BUMDES yang sudah terbentuk belum berjalan optimal.
3. Belum optimalnya pemberdayaan kelompok masyarakat.
4. Belum optimalnya pemberdayaan desa baik perencanaan maupun pengawasan dalam menggunakan dana desa.

#### **2.6.12 Urusan Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana**

Permasalahan daerah yang berhubungan dengan urusan Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana adalah sebagai berikut :

1. Belum mencukupinya tenaga penyuluh KB untuk menjangkau seluruh wilayah penduduk Kabupaten Morowali.

2. Peran keikutsertaan KB masih perlu di optimalkan upaya untuk meningkatkan jumlah peserta KB

### **2.6.13 Urusan Perhubungan**

Permasalahan daerah yang berhubungan dengan urusan perhubungan adalah sebagai berikut :

1. Tidak tersedianya sarana dan prasarana pengujian kendaraan bermotor
2. kebutuhan akan fasilitas perlengkapan jalan berupa rambu, marka, guradrail dan LPJU yang belum dapat optimal dipenuhi
3. Masih kurangnya pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap kedisiplinan berlalu lintas.

### **2.6.14 Urusan Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah**

Permasalahan daerah yang berhubungan dengan urusan Koperas, Usaha Kecil dan Menengah adalah sebagai berikut :

1. Distribusi produk atau komoditi unggulan daerah seperti bidang perkebunan dan pertanian (agribisnis) yang di kelola oleh koperasi masih sangat terbatas.
2. Kurangnya kemampuan UMKM untuk meningkatkan akses, pangsa pasar, menjalin kemitraan, mengembangkan jaringan usaha, penguasaan dan pemanfaatan teknologi serta pengembangan manajemen.
3. Terbatasnya akses modal dan informasi pasar
4. Masih minimnya pendampingan bagi UKM dan Koperasi
5. Masih terbatasnya koneksi UKM dengan kawasan perindustrian
6. Belum optimalnya sarana bagi UKM dan koperasi

### **2.6.15 Urusan Penanaman Modal**

Permasalahan daerah yang berhubungan dengan urusan penanaman modal adalah sebagai berikut :

1. Pelayanan perizinan yang belum menggunakan sistem informasi teknologi
2. Sarana dan prasarana dalam menjalankan pelayanan perizinan belum memadai seperti ruang pelayanan dan perangkatnya.
3. Penanaman investasi pada kecamatan di luar lingkaran tambang belum maksimal.
4. Promosi potensi serta keunggulan daerah yang belum berjalan optimal.

### **2.6.16 Urusan Kepemudaan Dan Olahraga**

Permasalahan daerah yang berhubungan dengan urusan kepemudaan dan olahraga adalah sebagai berikut :

1. Kurangnya Minat dan Kemauan dikalangan Pemuda dalam Kegiatan Organisasi
2. Kurangnya Minat dan Kesadaran kalangan pemuda dalam ikut serta kegiatan sosialisasi
3. Masih kurangnya sarana dan prasarana olahraga
4. Pembinaan olahraga yang belum berjalan optimal.

### **2.6.17 Urusan Perpustakaan**

Permasalahan daerah yang berhubungan dengan urusan perpustakaan adalah sebagai berikut :

1. Tingginya minat baca masyarakat namun tidak didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai seperti masih kurangnya gedung perpustakaan, literatur bacaan, serta ruang baca yang nyaman.
2. Aksesibilitas dalam pelayanan perpustakaan desa sangat sulit di jangkau.
3. Pelayanan pengunjung serta pengadministrasian buku belum berbasis informasi teknologi.

### **2.6.18 Urusan Kelautan Dan Perikanan**

Permasalahan daerah yang berhubungan dengan urusan kelautan dan perikanan adalah sebagai berikut :

1. Masih terbatasnya sarana prasarana perikanan bagi para nelayan maupun kelompok nelayan.
2. Sarana prasarana perikanan yang belum berbasis teknologi atau belum optimalnya pemanfaatan teknologi tepat guna.
3. Keterbatasan modal usaha bagi para pelaku usaha perikanan.
4. Jaringan pemasaran dan produk perikanan masih kurang
5. Belum optimalnya produksi dan produktivitas perikanan

### **2.6.19 Urusan Pariwisata**

Permasalahan daerah yang berhubungan dengan urusan pariwisata adalah sebagai berikut :

1. Infrastruktur pariwisata pada Destinasi Wisata sebagian besar belum tersedia.

2. Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungan serta membantu mengembangkan objek wisata.
3. Belum optimalnya penarikan retribusi pada objek wisata.

#### **2.6.20 Urusan Pertanian**

Permasalahan daerah yang berhubungan dengan urusan pertanian adalah sebagai berikut :

1. Masih rendahnya produksi, produktivitas dan mutu produk pertanian
2. Modal usaha yang dimiliki oleh para petani belum termanfaatkan secara optimal.
3. Adanya alih fungsi lahan pertanian yang produktif.
4. Sarana prasarana pertanian yang belum memadai dan belum terdistribusi secara merata.
5. Masih kurangnya intensifikasi dalam rangka peningkatan produksi dan produktivitas pertanian dan perkebunan
6. Belum optimalnya pemanfaatan teknologi tepat guna
7. Jaringan pemasaran produk pertanian masih kurang

#### **2.6.21 Urusan Perdagangan**

Permasalahan daerah yang berhubungan dengan urusan perdagangan adalah sebagai berikut :

1. Masih rendahnya tata kelola perdagangan yang mengakibatkan rantai distribusi barang menjadi panjang
2. Sulitnya mengontrol peredaran barang keluar masuk daerah
3. Sulitnya mengawasi barang kadaluarsa dan tidak berizin di daerah-daerah yang jauh dari ibukota
4. Masih rendahnya fasilitas penunjang untuk pemenuhan kriteria pasar tradisional modern kabupaten
- 5.

#### **2.6.22 Urusan Perindustrian**

Permasalahan daerah yang berhubungan dengan urusan perindustrian adalah sebagai berikut :

1. Masih rendahnya keterampilan manajemen usaha pelaku industri kecil dan menengah (IKM)

2. Masih rendahnya penggunaan teknologi tepat guna pelaku IKM.
3. Masih rendahnya inovasi pelaku IKM dalam menembus pasar lokal dan regional.
4. Masih rendahnya kerjasama antara pelaku IKM dengan industri besar yang ada.
5. Masih rendahnya pemanfaatan potensi sumber daya alam pertanian dan kelautan Kab. Morowali sebagai bahan baku industri.
6. Rendahnya kapasitas pembina ASN akibat kurangnya diklat-diklat teknis yang diikuti.



## BAB III

### KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH

Kerangka Ekonomi Daerah dan Keuangan Daerah merupakan kerangka implementatif Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Morowali Tahun 2023, yang memuat gambaran kondisi ekonomi makro tahun 2021, perkiraan tahun 2022, proyeksi tahun 2023, sumber-sumber pendapatan dan kebijakan pemerintah daerah yang diperlukan dalam pembangunan perekonomian daerah meliputi pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah. Gambaran kerangka ekonomi daerah tersebut dicapai dengan menyusun berbagai prioritas pembangunan serta mengambil langkah kebijakan yang disusun untuk menghadapi tantangan dan penyelesaian masalah pembangunan agar arah pembangunan daerah Tahun 2023 dapat dicapai sesuai dengan sasaran program dan kegiatan yang telah ditargetkan. Kunci dari kerangka ekonomi daerah dan kebijakan keuangan daerah meliputi interaksi antara potensi pendapatan, alokasi anggaran dan prioritas pembangunan.

Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) telah berlangsung sejak awal tahun 2020 dan masih terus berlangsung hingga saat ini, secara langsung berdampak pada kehidupan masyarakat khususnya kondisi perekonomian secara luas. Pendapatan dan konsumsi masyarakat mengalami perubahan signifikan karena menurunnya daya beli masyarakat, perubahan orientasi belanja/redistribusi pendapatan serta penurunan pada hampir seluruh aspek kehidupan. Berbagai dampak tersebut berpengaruh pada gambaran kondisi ekonomi makro tahun 2021, 2022 dan diprediksi juga masih menunjukkan dampaknya pada tahun 2023. Hal tersebut juga mempengaruhi rancangan kebijakan keuangan daerah baik pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan. Untuk lebih lengkapnya akan diuraikan pada sub bab berikut ini.

#### 3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

##### 3.1.1. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan Struktur Ekonomi Periode 2016-2023

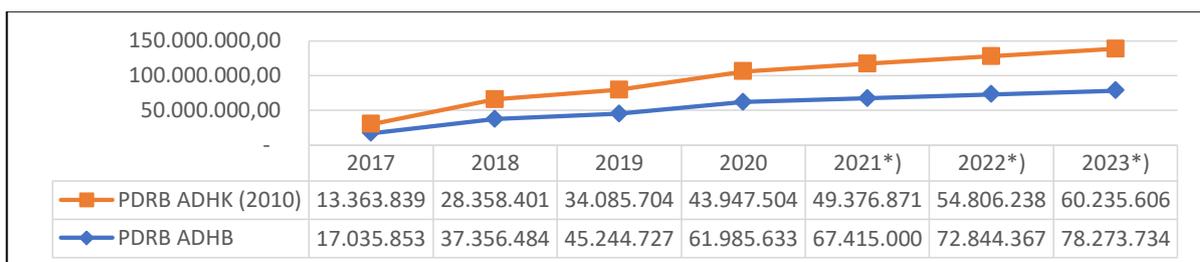
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan nilai tambah bruto seluruh barang dan jasa yang tercipta atau dihasilkan di wilayah domestik yang timbul akibat aktifitas ekonomi dalam periode tertentu tanpa memperhatikan apakah

faktor produksi yang memiliki residen atau non residen (BPS, 2017). Hal tersebut akhirnya dapat menggambarkan kemampuan suatu daerah dalam mengelola dan menggunakan sumber daya yang dimiliki untuk menghasilkan barang dan jasa. Besarannya tergantung pada hasil penggunaan potensi faktor-faktor produksi seperti sumber daya alam, sumber daya manusia, modal dan teknologi serta semangat berwirausaha masyarakatnya dalam melakukan kegiatan ekonomi.

Nilai PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) 2010 terus mengalami peningkatan selama periode 2017-2020. Pada tahun 2017 nilai PDRB ADHK sebesar 13.363.839,10 juta rupiah; 28.358.401,60 juta rupiah (2018); 34.085.704,80 juta rupiah (2019); dan 43.947.504,40 juta rupiah (2020). Pada tahun 2021, diprediksi nilai PDRB ADHK Kabupaten Morowali sebesar 49.376.871,65 juta rupiah, sedangkan tahun 2022 dan tahun 2023 diproyeksikan nilai PDRB ADHK mengalami peningkatan menjadi 54.806.238,90 juta rupiah (2022) dan 60.235.606,16 juta rupiah (2023).

Sementara itu, nilai PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) pada tahun 2020 mencapai 61.985.633,10 juta rupiah, mengalami peningkatan terus menerus dari tahun 2017 sebesar 17.035.853,40 juta rupiah menjadi 37.356.484,4 juta rupiah (2018); 45.244.727,10 juta rupiah, (2019). Pada tahun 2021, nilai PDRB ADHB diprediksi meningkat menjadi sebesar 67.415.000,45 juta rupiah, 72.844.367,70 juta rupiah (2022) sedangkan pada tahun 2023, nilai PDRB diproyeksikan kembali meningkat menjadi 78.273.734,96 juta rupiah.

Diperkirakan sektor yang berpengaruh pada tahun 2023 masih didominasi pada sektor Pertambangan dan Penggalian dan sektor Industri Pengolahan. Selengkapnya nilai PDRB ADHB dan ADHK Kabupaten Morowali disajikan pada gambar 3.1. berikut ini.



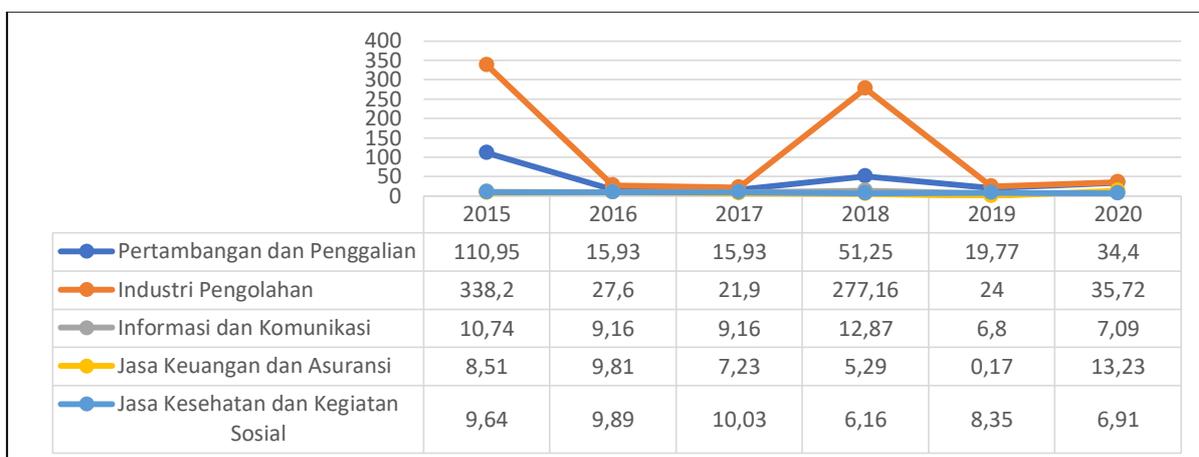
Sumber : BPS Kabupaten Morowali, 2021; Bappeda Kab. Morowali, 2022

\* angka sementara

\*) hasil proyeksi Bappeda Kab. Morowali

Gambar 3.1 PDRB dan Prediksi PDRB ADHK (2010) dan ADHB Kabupaten Morowali Tahun 2017-2023 (Juta rupiah)

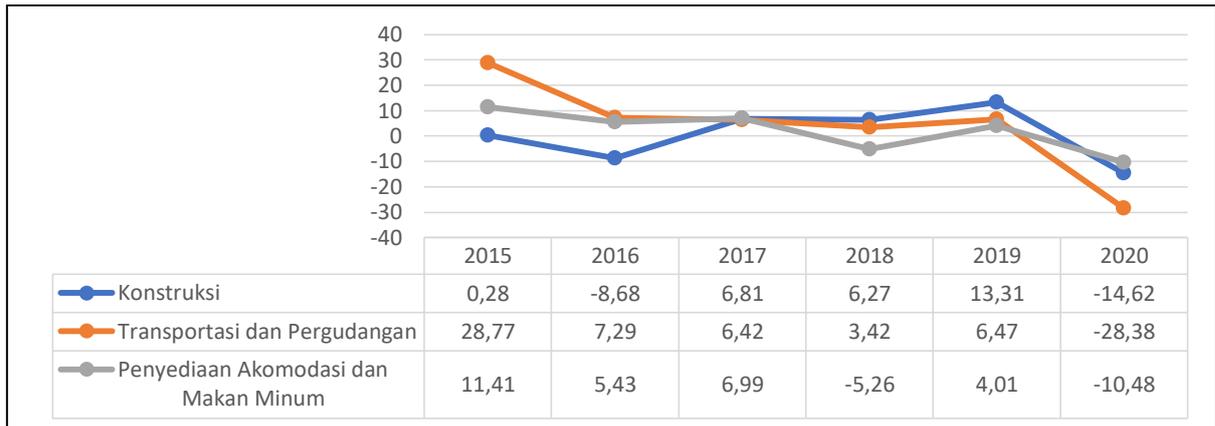
Selama periode 2016-2020 struktur perekonomian di Kabupaten Morowali didominasi oleh 5 (lima) sektor lapangan usaha, yaitu industri pengolahan; pertambangan dan penggalian; jasa keuangan dan asuransi; informasi dan komunikasi; dan jasa kesehatan dan kegiatan sosial. Pada tahun 2020 sektor industri pengolahan mempunyai kontribusi paling besar dalam perekonomian Morowali yaitu mencapai 35,72 persen (meningkat signifikan dari tahun 2016 sebesar 27,6 persen). Selanjutnya sektor pertambangan dan penggalian menyumbang sebesar 34,4 persen (meningkat signifikan dari tahun 2016 sebesar 15,93 persen), sektor jasa keuangan dan asuransi sebesar 13,23 persen (meningkat dari tahun 2016 sebesar 9,81 persen), sektor informasi dan komunikasi sebesar 7,09 persen (turun dari tahun 2016 yang sebesar 9,16 persen) dan sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial sebesar 6,91 persen (turun dari tahun 2016 yang sebesar 9,89 persen). Pada tahun 2020, dari kelima lapangan usaha tersebut sektor industri pengolahan; pertambangan dan penggalian; jasa keuangan dan asuransi; informasi dan komunikasi peranannya mampu bertahan semasa pandemi.



Sumber : BPS Kabupaten Morowali, 2021

**Gambar 3.2**  
Kontribusi Empat Sektor Terbesar Pada Struktur Perekonomian Morowali Tahun 2016-2020 (%)

Tiga sektor yang menyumbang kontribusi terendah dalam struktur perekonomian Kabupaten Morowali tahun 2020 adalah Transportasi dan Pergudangan (-28,38 persen); Konstruksi (-14,62 persen), dan Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum (-10,48 persen). Ketiga sektor tersebut di tahun 2020 mempunyai kontribusi di bawah 1% (lihat Gambar 3.3.)

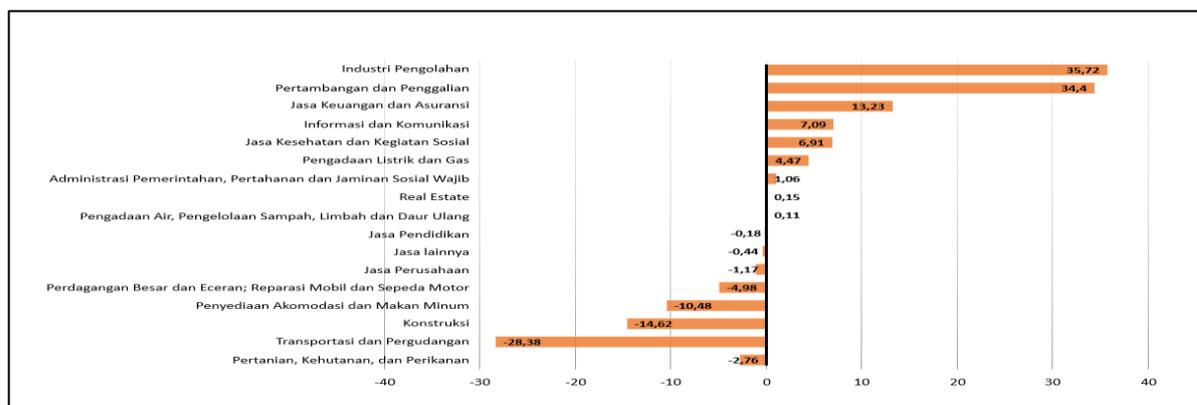


Sumber : BPS Kabupaten Morowali, 2021

Gambar 3.3  
Kontribusi Tiga Sektor Terendah Pada Struktur Perekonomian Morowali Tahun 2020 (%)

### 3.1.2. Pertumbuhan Ekonomi

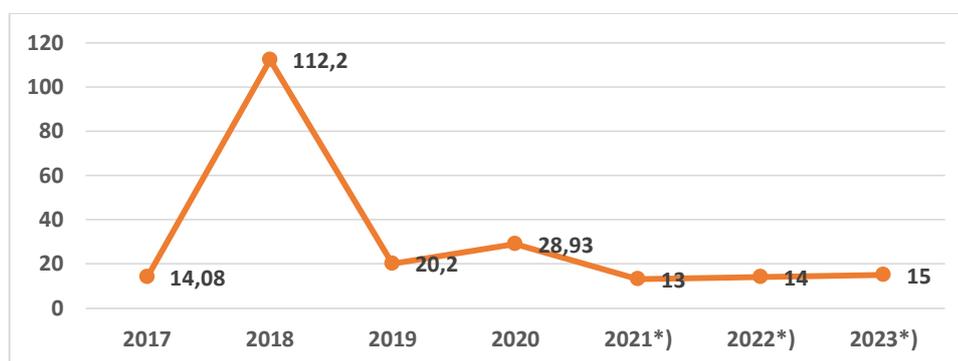
Berdasarkan analisis terhadap Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) yang dilakukan dengan menggunakan nilai PDRB Kabupaten Morowali atas dasar harga konstan 2010, mulai tahun 2016 hingga 2020 selalu mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. pada tahun 2020, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Morowali tertinggi terjadi pada sektor industri pengolahan yang menyumbang 35,72 persen. selain sektor tersebut, empat lapangan usaha masih mengalami pertumbuhan positif, yaitu pertambangan dan penggalan sebesar 34,4 persen; jasa keuangan dan asuransi sebesar 13,23 persen; lapangan usaha informasi dan komunikasi sebesar 7,09 persen; dan sektor pengadaan listrik dan gas yang mencapai 4,47 persen. Distribusi masing-masing sektor usaha ditampilkan pada Gambar 3.4.



Sumber : BPS Kabupaten Morowali, 2021

Gambar 3.4  
Distribusi Pertumbuhan Per Sektor Dalam PDRB ADHK (2010) Tahun 2020 Menurut Lapangan Usaha (%)

Pertumbuhan ekonomi pada tahun 2022 diprediksi menjadi tahun pemulihan ekonomi pasca Pandemi Covid-19. Hasil proyeksi tahun 2022 menunjukkan bahwa laju pertumbuhan ekonomi sebesar 14%. Hal ini didasarkan pada analisis bahwa kondisi Pandemi Covid-19 sudah mulai terkelola dengan internalisasi protokol kesehatan dalam kehidupan sehari-hari, dan cakupan pelaksanaan vaksinasi yang semakin luas. Meskipun demikian, kondisi Pandemi Covid-19 belum sepenuhnya dapat tertangani. Sektor yang masih menjadi penopang pertumbuhan ekonomi adalah pertanian, kehutanan, dan perikanan; sektor industri pengolahan; sektor perdagangan. Sektor konstruksi masih berkisar pada pembangunan pendukung akomodasi (hotel). Sementara itu, pada tahun 2022 pertumbuhan ekonomi juga diperkirakan terus meningkat hingga mencapai angka 15% (Gambar 3.5).



Sumber : BPS Kabupaten Morowali, 2020;  
\*) hasil proyeksi Bappeda Kab. Morowali

Gambar 3.5

Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) dan Prediksi LPE Tahun 2017 – 2023

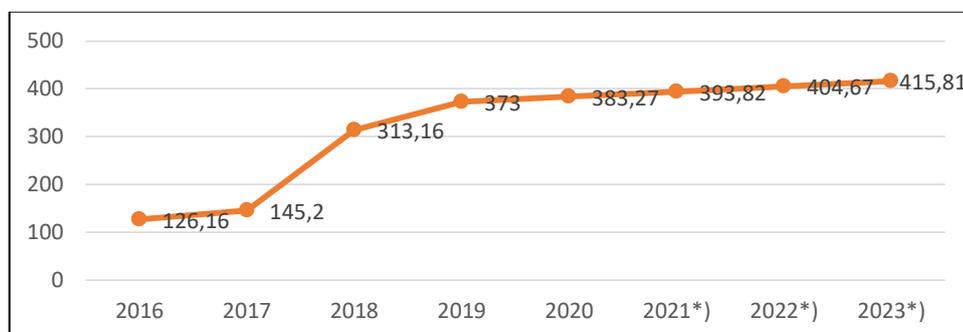
### 3.1.3. PDRB Per Kapita

PDRB Per Kapita merupakan salah satu pendekatan untuk melihat tingkat kemakmuran penduduk di suatu daerah. Meskipun tidak secara terperinci mampu menjelaskan distribusi pendapatan ke dalam sistem kelas dalam suatu klasifikasi penduduk berdasar kriteria tertentu, PDRB Per Kapita dapat digunakan sebagai indikator makro kesejahteraan masyarakat di suatu daerah. Nilai PDRB Per Kapita menggambarkan kinerja perekonomian di suatu daerah yang dilakukan oleh segenap potensi ekonomi daerah. Besar kecilnya nilai PDRB Per Kapita tergantung pada jumlah penduduk dan nilai PDRB, sedangkan besar kecilnya nilai PDRB sangat tergantung pada potensi sumber daya alam dan faktor-faktor produksi yang terdapat

di daerah tersebut, PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk.

Selama kurun waktu 2016-2020, nilai PDRB per kapita Kabupaten Morowali atas dasar harga berlaku terus mengalami peningkatan (lihat Gambar 3.6). Pada tahun 2016, nilai PDRB per kapita Kabupaten Morowali tercatat sebesar 126,16 juta rupiah sampai dengan tahun 2020 mengalami peningkatan menjadi 383,27 juta rupiah. Dengan semakin membaiknya penanganan Covid-19, cakupan pelaksanaan vaksinasi Covid-19 yang semakin meluas, serta meningkatnya kesadaran masyarakat dalam pelaksanaan protokol kesehatan, maka kondisi perekonomian juga diperkirakan makin membaik. Di prediksi pada tahun 2021, nilai PDRB Per kapita naik menjadi 393,82 juta rupiah, tahun 2022 nilai PDRB Per kapita naik menjadi 404,67 juta rupiah sedangkan pada tahun 2023 meningkat lagi menjadi 415,81 juta rupiah.

Perkembangan nilai PDRB perkapita atas dasar harga berlaku dapat dilihat pada gambar 3.6. berikut ini:



Sumber : BPS Kabupaten Morowali, 2020;  
) hasil proyeksi Bappeda Kab. Morowali

Gambar 3.6  
PDRB Per Kapita ADHB dan Prediksi PDRB Per Kapita ADHB Tahun 2016-2022  
(juta rupiah)

### 3.1.4. Ketenagakerjaan

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kabupaten Morowali periode 2016-2020 menunjukkan tren fluktuatif cenderung meningkat dan selalu berada di bawah TPT Provinsi Sulawesi Tengah maupun TPT Nasional. Angka TPT Morowali mengalami peningkatan menjadi 3,03 persen pada tahun 2019, dan pada tahun 2020 mencapai 5,21 persen. Sejalan dengan proyeksi terjadinya pemulihan ekonomi Kabupaten Morowali, maka diproyeksikan tingkat pengangguran terbuka juga mengalami penurunan. Pada tahun 2021 diproyeksikan tingkat pengangguran

terbuka sebesar 4,00 persen, kemudian menurun pada periode 2022 menjadi 3,00 persen dan di tahun 2023 turun menjadi 2,00 persen.

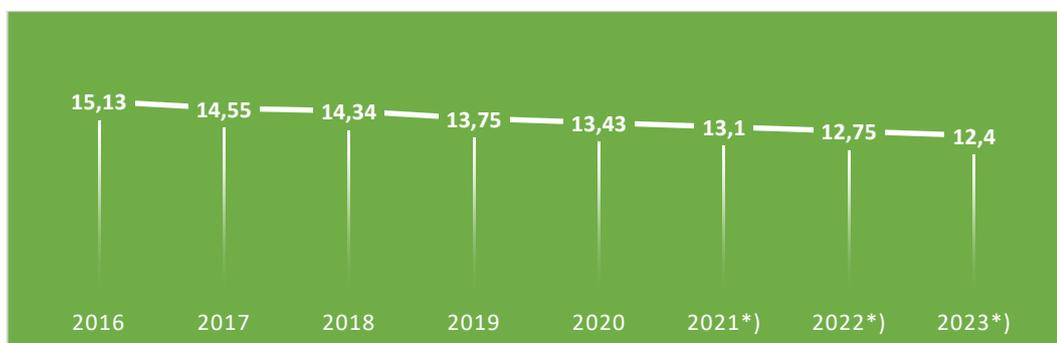


Sumber : BPS Kabupaten Morowali, 2020;  
\*) hasil proyeksi Bappeda Kab. Morowali

Gambar 3.7  
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Morowali (%) 2016-2020 dan Proyeksi Tahun 2021-2023

### 3.1.5. Kemiskinan

Pada periode 2016-2020 persentase penduduk miskin Kabupaten Morowali menunjukkan tren yang terus menurun dengan rata-rata penurunan setiap tahun hampir 1 persen. Tingkat kemiskinan di tahun 2021, 2022 dan 2023 diprediksi akan menurun. Pada tahun 2021, seiring dengan pemulihan ekonomi dan sosial, diperkirakan pendapatan perkapita penduduk akan terus meningkat, sehingga diproyeksikan persentase penduduk miskin Kabupaten Morowali mengalami penurunan menjadi 13,10 persen. Sedangkan pada tahun 2022 persentase penduduk miskin di Kabupaten Morowali diproyeksikan sebesar 12,75 persen dan di tahun 2023 sebesar 12,40 persen.



Sumber : BPS Kabupaten Morowali, 2020;  
\*) hasil proyeksi Bappeda Kab. Morowali

Gambar 3.8  
Tingkat Kemiskinan Kabupaten Morowali (%) 2016-2020 dan Proyeksi Tahun 2021-2023

### 3.1.6. Ketimpangan Pendapatan

Selama periode 2016-2020, nilai Rasio Gini Kabupaten Morowali cenderung stabil berada pada kategori sedang. Beberapa program unggulan pemerintah daerah dan adanya peningkatan investasi di sektor industri pengolahan, dan sektor pertambangan dan penggalian di Kabupaten Morowali sejak tahun 2018 khususnya mendorong peningkatan pendapatan masyarakat yang terdampak langsung. Hal tersebut berdampak pada peningkatan kemampuan belanja pada sebagian masyarakat baik yang terdampak langsung dan tidak langsung.

Pada tahun 2021 diproyeksikan nilai Rasio Gini sebesar 0,30 dan sedikit menurun pada periode 2022 menjadi 2023 sebesar 0,24. Meskipun nilai Rasio Gini terus mengalami perbaikan, namun tingkat ketimpangan antar kelompok pengeluaran ini masih termasuk dalam kategori sedang.



Sumber : BPS Kabupaten Morowali, 2020;  
) hasil proyeksi Bappeda Kab. Morowali

Gambar 3.9

Rasio Gini Kabupaten Morowali Tahun 2016-2020 dan Proyeksi Tahun 2021-2023

### 3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Perencanaan merupakan salah satu tahap dalam pengelolaan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah meliputi tahapan perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, dan pertanggungjawaban keuangan. Pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan dalam suatu sistem yang terintegrasi yang diwujudkan dalam siklus APBD. Pada dasarnya APBD memuat rencana keuangan yang diperoleh dan digunakan dalam rangka melaksanakan kewenangan dalam satu tahun anggaran. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah disusun berdasarkan money follow program dimana pendekatan penganggaran lebih fokus pada program atau kegiatan yang terkait langsung dengan prioritas daerah, prioritas nasional dan dapat memberikan dampak langsung bagi masyarakat dengan pendekatan tugas fungsi.

Dalam penyusunan anggaran harus memperhatikan 1) keterpaduan antara perencanaan dan penganggaran, 2) konsistensi dan sinkronisasi program baik vertikal maupun horisontal, dan 3) program dan kegiatan yang disusun harus mempunyai relevansi dengan permasalahan dan peluang yang dihadapi.

Dengan adanya penyebaran pandemi Corona virus-2019 (Covid-19) yang dimulai sejak triwulan pertama tahun 2020, telah menyebabkan melambatnya aktivitas perekonomian di seluruh negara dan juga Indonesia. Hal ini berdampak pada berkurangnya penerimaan Negara yang berdampak pada menurunnya pendapatan transfer ke Daerah. Oleh karenanya dalam menentukan arah kebijakan keuangan Daerah, Pemerintah Daerah memperhitungkan dampak pandemi Covid-19 ini terhadap target-target penerimaan pendapatan Daerah yang digunakan untuk mendanai program dan kegiatan pembangunan pada tahun 2023.

Selain hal tersebut diatas, arah kebijakan keuangan Daerah juga harus berpedoman pada norma dan prinsip anggaran sebagai pedoman dan kerangka acuan dalam penyusunannya. Sejumlah norma dan prinsip tersebut, meliputi:

1) Transparansi dan Akuntabilitas Anggaran Daerah

Sebagai persyaratan utama untuk mewujudkan pemerintah yang baik, bersih dan bertanggung jawab. Prinsip ini mengandung makna bahwa penganggaran merupakan instrumen evaluasi pencapaian kinerja dan tanggung jawab pemerintah daerah dalam mensejahterakan rakyat sehingga APBD harus dapat menyajikan informasi yang jelas tentang tujuan, sasaran dan manfaat yang diperoleh masyarakat dari suatu kegiatan yang dibiayai melalui anggaran yang ada.

2) Disiplin Anggaran

Adanya Berbagai program dan kegiatan yang disusun berorientasi pada kebutuhan masyarakat, tanpa meninggalkan keseimbangan antara pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat. Oleh karena itu, penyusunan anggaran dilakukan berlandaskan azas efisiensi, tepat guna, tepat waktu pelaksanaan dan penggunaannya dapat dipertanggungjawabkan.

3) Keadilan Anggaran

Pendapatan daerah pada hakekatnya diperoleh melalui mekanisme pajak dan retribusi atau beban lainnya yang ditanggung oleh segenap lapisan

masyarakat. Oleh karena itu pemerintah wajib mengalokasikan penggunaannya secara adil dan merata berdasarkan pertimbangan yang obyektif agar dapat dinikmati seluruh kelompok masyarakat, tanpa adanya diskriminasi dalam pemberian pelayanan.

#### 4) Efisiensi dan Efektivitas Anggaran

Dana yang tersedia harus dimanfaatkan dengan sebaik mungkin untuk dapat menghasilkan peningkatan pelayanan dan kesejahteraan secara optimal untuk kepentingan masyarakat. Perencanaan perlu ditetapkan secara jelas dan terarah, baik itu tujuan, sasaran dan hasil serta pemanfaatan yang diperoleh masyarakat dari sesuatu kegiatan yang diprogramkan dengan mengedepankan prinsip penggunaan sumberdaya minimal untuk mencapai hasil maksimal.

### **3.2.1. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah**

Pendapatan daerah merupakan berbagai sumber pemasukan ke kas daerah yang dipergunakan untuk keperluan pembangunan daerah. Pada prinsipnya, pendapatan daerah diperoleh dari adanya pajak dan retribusi atau pungutan lainnya yang dibebankan kepada masyarakat berdasarkan ketentuan yang berlaku. Pendapatan daerah meliputi semua rekening kas daerah yang menambah ekuitas dana, sebagai hak pemerintah daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak perlu dibayarkan kembali oleh daerah.

Pemerintah daerah selalu berupaya meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) dengan berbagai strategi dan mekanisme diantaranya dengan mengoptimalkan berbagai sumber pendapatan yang ada dengan berupaya meningkatkan realisasinya. Namun demikian masih terdapat beberapa kendala maupun permasalahan yang dihadapi diantaranya adalah:

- a. Nilai besaran pajak/retribusi yang dikenakan saat ini relatif kecil sehingga kontribusi terhadap pendapatan daerah nilainya cenderung menurun dengan adanya laju inflasi dan penurunan nilai uang. Regulasi yang mengatur tentang pajak dan retribusi sudah kurang sesuai lagi sehingga perlu dilakukan kajian ulang dan pembaruan namun tetap memperhatikan kepentingan masyarakat sehingga tidak membebani.

- b. Belum seluruh masyarakat memiliki kesadaran pajak/retribusi yang ditunjukkan dengan masih perlunya upaya jemput bola bahkan upaya paksa/penagihan terhadap wajib pajak/retribusi. Beberapa subjek pajak/retribusi bahkan ada yang berusaha menghindari pajak/retribusi daerah.
- c. Belum optimalnya pengelolaan sistem informasi database wajib pajak untuk melakukan pencarian dan pembaharuan data data obyek pajak sesuai dengan kondisi sebenarnya.
- d. Adanya pembatasan kegiatan masyarakat karena adanya pandemi Covid-19 yang belum dapat diketahui kapan selesainya menyebabkan menurunnya minat masyarakat untuk berkunjung ke obyek-obyek wisata untuk menghindari penyebaran virus Covid-19. Hal ini dapat menyebabkan berkurangnya kunjungan wisatawan ke obyek wisata.
- e. Belum optimalnya pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang menyebabkan berkurangnya kontribusi terhadap pendapatan daerah.

Berdasarkan permasalahan diatas, serta memperhatikan konstelasi pembangunan dan dinamika wilayah, maka strategi yang dilakukan dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah adalah sebagai berikut;

- a. Mewujudkan regulasi perpajakan dan retribusi yang responsif serta meningkatkan kapasitas SDM pengelola pajak/retribusi yang tangguh, mumpuni dan berintegritas.
- b. Meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat untuk meningkatkan kedisiplinan terhadap kewajiban pajak/retribusi.
- c. Mengoptimalkan pengelolaan dan pemanfaatan sistem informasi perpajakan/retribusi.
- d. Meningkatkan daya tarik pada obyek wisata sehingga meningkatkan jumlah wisatawan dengan tetap menegakkan protokol kesehatan.
- b. Meningkatkan kemampuan Badan Usaha Milik Daerah agar sehat, inovatif dan berdaya saing.

Dengan strategi tersebut di atas maka kebijakan daerah yang ditempuh dalam meningkatkan pendapatan daerah antara lain sebagai berikut:

- a. Pembaharuan penyusunan/penetapan regulasi yang berkaitan dengan pendapatan daerah.
- b. Peningkatan kapasitas SDM pengelola pajak/retribusi

- c. Peningkatan sosialisasi kepada masyarakat wajib pajak/retribusi
- d. Peningkatan sistem informasi perpajakan/retribusi
- e. Peningkatan sarana prasarana dan inovasi pada obyek wisata
- f. Peningkatan kualitas dan kinerja BUMD

Adapun upaya-upaya yang dilakukan dalam pemenuhan target pendapatan daerah antara lain:

- a. Melakukan evaluasi dan pembaharuan peraturan daerah terkait perpajakan dan retribusi,
- b. Pendidikan dan pelatihan untuk SDM pengelola pajak/retribusi
- c. Sosialisasi pajak/retribusi terhadap wajib pajak
- d. Mengintensifkan penagihan pajak/retribusi daerah
- e. Percepatan, penyederhanaan dan transparansi pelayanan perijinan
- f. Optimalisasi sistem informasi untuk pengelolaan pajak dan retribusi
- g. Pembangunan infrastruktur pendukung obyek retribusi (wisata)
- h. Peningkatan pembinaan dan pengawasan pada BUMD.
- i. Peningkatan penyertaan modal kepada BUMD.
- j. Optimalisasi sumber-sumber pendapatan.
- k. Peningkatan pendayagunaan kekayaan daerah sebagai sumber pendapatan daerah.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, sumber pendapatan daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah. Rincian sumber pendapatan daerah tersebut adalah sebagai berikut:

- 1. Pendapatan Asli Daerah, terdiri dari:
  - a. Pajak Daerah terdiri dari Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.
  - b. Retribusi Daerah terdiri dari Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha, dan Retribusi Perizinan Tertentu.
  - c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan terdiri dari Bagian Laba Atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD.

d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah terdiri dari Hasil Penjualan Aset Daerah yang tidak Dipisahkan, Penerimaan Jasa Giro, Penerimaan Bunga Deposito, Pendapatan Denda Pajak, Pendapatan Denda Retribusi, Pendapatan dari Pengembalian, pendapatan dari pemanfaatan kekayaan daerah, Pendapatan dari Badan Layanan Umum Daerah, Pendapatan dari Pengelolaan BUKP, Pendapatan Bunga Penguatan Modal, Pendapatan dari bentuk-bentuk pendapatan lainnya yang merupakan hak Daerah.

2. Pendapatan Transfer, terdiri dari:

a. Transfer Pemerintah Pusat

Transfer Pemerintah Pusat, terdiri dari dana perimbangan, dana insentif daerah, dana otonomi khusus, dana keistimewaan dan dana desa.

a) Dana Perimbangan

Dana Perimbangan terdiri dari Dana Transfer Umum (dana bagi hasil dan dana alokasi umum) dan dana transfer khusus (DAK Fisik dan Non Fisik)

i. Dana bagi hasil adalah pendapatan Negara yang bersumber dari pajak dan sumber daya alam.

ii. Dana Alokasi Umum (DAU) bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

iii. Dana Transfer Khusus bersumber dari APBN yang dialokasikan pada Daerah untuk mendanai Kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b) Dana Insentif Daerah

Dana insentif daerah bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu berdasarkan kriteria tertentu dengan tujuan untuk memberikan penghargaan atas perbaikan dan/ atau pencapaian Kinerja tertentu

c) Dana Desa

Dana desa bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui APBD kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai

penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Dana desa diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

b. Transfer antar-daerah

Transfer antar daerah terdiri dari pendapatan bagi hasil dan bantuan keuangan

a) Pendapatan bagi hasil merupakan dana yang bersumber dari Pendapatan Daerah yang dialokasikan kepada Daerah lain berdasarkan angka persentase tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya yang terdiri dari Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi yang meliputi Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor, Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Bagi Hasil dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Bagi Hasil dari Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan dan Bagi Hasil Pajak Rokok Daerah.

b) Bantuan keuangan merupakan dana yang diterima dari Daerah lainnya baik dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya. Bantuan keuangan terdiri atas : bantuan keuangan dari Daerah provinsi; dan bantuan keuangan dari Daerah kabupaten/kota.

3. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah, terdiri dari:

a. Pendapatan Hibah

Hibah merupakan bantuan berupa uang, barang, dan/atau jasa yang berasal dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lain, masyarakat, dan badan usaha dalam negeri atau luar negeri yang tidak mengikat untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

b. Dana Darurat

Dana Darurat merupakan dana yang berasal dari APBN yang diberikan kepada daerah pada tahap pasca bencana untuk mendanai keperluan mendesak yang diakibatkan oleh bencana yang tidak mampu ditanggulangi oleh daerah dengan menggunakan sumber APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. Lain-lain pendapatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan

Adapun gambaran pendapatan daerah dituangkan dalam Tabel 3.1 sebagai berikut:

Tabel 3.1  
Realisasi dan Proyeksi/Target Pendapatan Tahun 2020 s/d 2023  
Kabupaten Morowali

1	URAIAN	REALISASI 2020	REALISASI 2021	APBD TAHUN 2022	Pertumbuhan %	PROYEKSI 2023
1	2	4	3	3	4	5
<b>4</b>	<b>PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>1.276.418.663.949,19</b>	<b>1.399.297.892.827,69</b>	<b>1.466.842.480.886,00</b>		<b>1.122.728.667.918,00</b>
<b>4.1</b>	<b>Pendapatan Asli Daerah</b>	<b>295.936.100.740,19</b>	<b>336.566.473.479,69</b>	<b>394.951.348.983,00</b>		<b>400.420.232.119,00</b>
4.1.1	Pajak Daerah	81.563.564.568,46	137.273.599.494,21	128.871.116.864,00	3%	132.800.000.000,00
4.1.2	Retribusi Daerah	168.257.983.894,00	145.168.921.928,25	170.199.000.000,00	0%	170.239.000.000,00
4.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	1.810.921.029,00	2.310.289.229,27	1.810.921.029,00	0%	1.810.921.029,00
4.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	44.303.631.248,73	51.813.662.827,96	94.070.311.090,00	2%	95.570.311.090,00
<b>4.2</b>	<b>Pendapatan Transfer</b>	<b>948.178.766.652,00</b>	<b>1.058.942.419.348,00</b>	<b>1.071.891.131.903,00</b>		<b>722.308.435.799,00</b>
4.2.1	Transfer Pemerintah Pusat	923.281.539.907,00	1.024.704.497.559,00	1.033.729.748.413,00	-34%	683.689.957.000,00
4.2.2	Transfer Antar-Daerah	24.897.226.745,00	34.237.921.789,00	38.161.383.490,00	1%	38.618.478.799,00
<b>4.3</b>	<b>Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah</b>	<b>32.303.796.557,00</b>	<b>3.789.000.000,00</b>	<b>0,00</b>		<b>-</b>
4.3.1	Hibah	32.087.970.000,00	3.789.000.000,00	0,00		-
4.3.2	Dana Darurat	0	0	0		-
4.3.3	Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	215.826.557,00	0	0		-

Sumber data : Badan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Morowali, 2022

### 3.2.2. Arah Kebijakan Belanja Daerah

Berdasarkan kemampuan keuangan daerah serta memperhatikan tujuan dan sasaran pembangunan yang akan dicapai, maka alokasi pendanaan pembangunan dituntut lebih transparan, efisien, efektif, dan akuntabel serta berorientasi pada money follow program berbasis *money follow function* dimana pendekatan penganggaran lebih fokus pada program atau kegiatan yang terkait langsung dengan

prioritas daerah serta memberikan dampak langsung bagi masyarakat dengan pendekatan pada tugas dan fungsi pokok organisasi perangkat daerah (OPD).

Dalam upaya mewujudkan visi “*Morowali Sejahtera Bersama*” Pemerintah Daerah kabupaten Morowali berdasarkan rencana pembangunan jangka menengah daerah kabupaten morowali tahun 2018-2023, berbagai kebijakan dan program-program prioritas yang telah dilaksanakan, antara lain :

1. Program peningkatan tunjangan kinerja honorer dan Aparatur Sipil Negara (ASN)
2. Program alokasi dana modal usaha untuk badan usaha milik desa
3. Program pembukaan lapangan kerja dengan melibatkan usaha kecil dan tenaga kerja lokal
4. Program bantuan air bersih dan listrik, terutama bagi masyarakat kepulauan
5. Program bantuan 2.000 unit rumah layak huni bagi masyarakat, khususnya di wilayah pesisir dan kepulauan
6. Program bantuan usaha nelayan
7. Program bantuan pertanian

Berdasarkan dinamika dan konstelasi wilayah, maka kebijakan yang diambil untuk penggunaan dana Tahun Anggaran 2023 ialah Memantapkan Kesejahteraan Bersama Dengan Majukan Infrastruktur Dan Pelayanan Publik.

Dalam implementasi kebijakan, pelaksanaan pencapaian tujuan pembangunan dilaksanakan melalui anggaran belanja daerah yang terdiri atas belanja operasi, belanja modal, belanja transfer, belanja tak terduga. Penggunaan dana Belanja Operasi digunakan untuk belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bunga, belanja hibah, belanja subsidi, belanja bantuan sosial. Belanja Modal digunakan untuk belanja modal tanah, belanja modal Peralatan dan Mesin, belanja modal Gedung dan Bangunan, belanja modal Jalan, Irigasi dan Jaringan, belanja modal Aset tetap lainnya, belanja modal Aset lainnya dan Belanja Modal BLUD. Belanja Transfer digunakan untuk belanja bagi hasil dan belanja bantuan keuangan. Penjelasan mengenai belanja-belanja tersebut sebagaimana uraian berikut:

#### A. Belanja Operasi

Belanja Operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah daerah yang memberi manfaat jangka pendek, Adapun Belanja Operasi terdiri dari jenis belanja:

a. Belanja pegawai, yang meliputi:

Gaji pokok, tunjangan PNS struktural/fungsional, tunjangan gaji ketiga belas dan gaji keempat belas PNSD dan penghasilan lainnya yang sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku. Belanja representasi DPRD dan pimpinan DPRD serta operasional Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dihitung sesuai dengan ketentuan mengenai besarnya penghasilan dan penerimaan pimpinan/anggota DPRD yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Anggaran belanja pegawai tersebut selain gaji dan tunjangan PNS daerah, meliputi gaji dan tunjangan Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah dan DPRD, BPOP Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, BPOP DPRD, tunjangan komunikasi intensif DPRD, BP PBB dan juga sudah termasuk tunjangan kesejahteraan pegawai, insentif pajak dan retribusi daerah, iuran jaminan kecelakaan, iuran jaminan kematian dan subsidi iuran Askes PNS. Selain itu juga sudah dianggarkan belanja pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja. Adapun sumber pendanaan belanja pegawai sebagian besar bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU). Pada tahun 2022 sudah diperhitungkan dengan kenaikan BPJS bagi ASN sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan.

b. Belanja Bunga

Belanja bunga pada penyusunan Rancangan RKPD 2023 Kabupaten Morowali telah dianggarkan.

c. Belanja Subsidi

Belanja subsidi tidak dialokasikan.

d. Belanja Hibah

Belanja hibah dianggarkan untuk mendukung fungsi penyelenggaraan pemerintah daerah, sehingga dalam hal tersebut mengambil kebijakan memberikan hibah kepada instansi semi pemerintah (seperti KONI, PMI, Pramuka, PKK), hibah pada sekolah swasta, organisasi kemasyarakatan dan masyarakat yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukkannya. Pemberian

hibah dilakukan secara selektif sesuai dengan urgensi, kepentingan daerah dan kemampuan keuangan daerah sehingga tidak mengganggu penyelenggaraan urusan wajib dan tugas tugas pemerintah daerah lainnya dalam meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan umum kepada masyarakat.

e. Belanja Bantuan Sosial

Belanja bantuan sosial dianggarkan untuk pemberian bantuan dalam bentuk uang yang diberikan kepada masyarakat miskin dalam rangka meningkatkan kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat, bantuan sosial diberikan kepada kelompok/anggota masyarakat yang dilakukan secara selektif, tidak mengikat dan jumlahnya dibatasi. Pada tahun 2023, alokasi anggaran untuk belanja bantuan sosial

B. Belanja Modal

Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja Modal ditujukan untuk belanja prioritas program/kegiatan pembangunan mendukung pencapaian tujuan dan sasaran daerah tahun 2023

C. Belanja Tidak Terduga

Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran anggaran kas Beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya.

D. Belanja Transfer

Belanja transfer merupakan pengeluaran uang dari pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah Lainnya dan /atau dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Desa.

Realisasi dan Proyeksi/Target Belanja Tahun 2020 s/d 2023 dituangkan dalam Tabel 3.2.

Tabel 3.2  
Realisasi dan Proyeksi/Target Belanja Tahun 2020 s/d 2023 Kabupaten Morowali

	URAIAN	REALISASI 2020	REALISASI 2021	APBD TAHUN 2022	Pertumbuhan %	PROYEKSI 2023
1	2	4	3	3	4	5
5	<b>BELANJA DAERAH</b>	<b>1.234.366.803.092,70</b>	<b>1.253.248.151.354,38</b>	<b>1.475.300.370.937,00</b>		<b>1.127.166.049.368,00</b>
5.1	<b>Belanja Operasi</b>	<b>745.380.121.910,80</b>	<b>852.987.490.083,63</b>	<b>995.125.193.549,00</b>		<b>843.347.601.584,00</b>
5.1.1	Belanja Pegawai	436.131.839.330,60	358.346.136.293,00	390.251.612.218,00	-9%	356.433.617.904,00
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	285.421.772.274,00	455.226.891.894,47	532.532.453.065,00	-18%	439.135.561.330,00

5.1.3	Belanja Bunga	1.265.160.306,20	1.490.022.070,16	1.600.000.000,00	4%	1.664.000.000,00
5.1.4	Belanja Subsidi	0	0	0		-
5.1.5	Belanja Hibah	14.480.500.000,00	34.844.870.926,00	67.609.128.266,00	-36%	43.342.422.350,00
5.1.6	Belanja Bantuan Sosial	8.080.850.000,00	3.079.568.900,00	3.132.000.000,00	-11%	2.772.000.000,00
<b>5.2</b>	<b>Belanja Modal</b>	<b>282.208.881.234,40</b>	<b>256.201.557.510,15</b>	<b>267.196.702.301,00</b>		92.285.002.741,00
<b>5.3</b>	<b>Belanja Tidak Terduga</b>	<b>29.559.824.590,00</b>	<b>17.114.835.478,93</b>	<b>8.766.707.367,00</b>		<b>6.003.442.043,00</b>
5.3.1	Belanja Tidak Terduga	29.559.824.590,00	17.114.835.478,93	8.766.707.367,00	-32%	6.003.442.043,00
<b>5.4</b>	<b>Belanja Transfer</b>	<b>177.217.975.357,50</b>	<b>126.944.268.281,67</b>	<b>204.211.767.720,00</b>		<b>185.530.003.000,00</b>
5.4.1	Transfer Bagi Hasil	16.086.356.666,52	14.995.895.135,67	48.985.664.720,00	-38%	30.303.900.000,00
5.4.2	Transfer Bantuan Keuangan	161.131.618.690,98	111.948.373.146,00	155.226.103.000,00		155.226.103.000,00
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	<b>42.051.860.856,49</b>	<b>146.049.741.473,31</b>	<b>(8.457.890.051,00)</b>		<b>(4.437.381.450,00)</b>

Sumber data : Badan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Morowali, 2022

### 3.2.3. Arah Kebijakan Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah

Komponen penerimaan pembiayaan daerah meliputi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya, penerimaan pinjaman daerah dan penerimaan piutang daerah. Untuk tahun 2023 kebijakan dalam hal penerimaan pembiayaan daerah hanya bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya yakni sebesar Rp. 6.000.000.000,00 dan dalam hal pengeluaran pembiayaan daerah digunakan untuk Pembayaran Cicilan Pokok Utang Yang Jatuh Tempo. Adapun pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo sebesar Rp 1.562.618.550,00. Hasil analisis terhadap belanja dan pengeluaran pembiayaan daerah tahun 2021 dan prakiraan maju tahun 2023 kemudian dituangkan dalam Tabel 3.3 berikut

Tabel 3.3  
Realisasi dan Target/ Proyeksi Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan Kabupaten Morowali Tahun 2020 s/d 2023

	URAIAN	REALISASI 2020	REALISASI 2021	APBD TAHUN 2022	Pertumbuhan %	PROYEKSI 2023
1	2	4	3	3	4	5
<b>6</b>	<b>PEMBIAYAAN DAERAH</b>					
<b>6.1</b>	<b>Penerimaan Pembiayaan</b>	<b>26.958.556.499,30</b>	<b>67.856.489.013,03</b>	<b>23.271.867.873,00</b>		<b>6.000.000.000,00</b>
6.1.1	SiLPA	10.785.438.665,30	67.856.489.013,03	23.271.867.873,00	-74%	6.000.000.000,00
6.1.2	Pencairan Dana Cadangan	0	0	0		-
6.1.3	Hasil	0	0	0		-

	Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan					
6.1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah	0	0	0		-
6.1.5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	0	0	0		-
6.1.6	Penerimaan Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	16.173.117.834,00	0	0		-
<b>6.2</b>	<b>Pengeluaran Pembiayaan</b>	<b>1.270.966.733,34</b>	<b>10.635.483.366,67</b>	<b>14.813.977.822,00</b>		<b>1.562.618.550,00</b>
6.2.1	Pembayaran Cicilan Pokok Utang Yang Jatuh Tempo	1.270.966.733,34	635.483.366,67	1.313.977.822,00	19%	1.562.618.550,00
6.2.2	Penyertaan Modal Daerah		10.000.000.000,00	13.500.000.000,00		-
6.2.3	Pembentukan Dana Cadangan	0	0	0		-
6.2.4	Pemberian Pinjaman Daerah	0	0	0		-
6.2.5	Pengeluaran Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	0	0	0		-
	<b>PEMBIAYAAN NETTO</b>	<b>25.687.589.765,96</b>	<b>57.221.005.646,36</b>	<b>8.457.890.051,00</b>		<b>4.437.381.450,00</b>
<b>6.3</b>	<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN</b>	<b>67.739.450.622,45</b>	<b>203.270.747.119,67</b>	-		-

Sumber data : Badan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Morowali, 2022



## BAB IV

### SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

#### 4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan

Penyusunan sasaran dan prioritas pembangunan daerah tahun 2023 dirumuskan dalam rangka pencapaian target visi, misi dan tujuan Pemerintah Kabupaten Morowali sebagaimana yang tertuang dalam Dokumen Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (P-RPJMD) Kabupaten Morowali Tahun 2018 – 2023.

Visi Kabupaten Morowali yang tertuang dalam Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (P-RPJMD) Kabupaten Morowali Tahun 2018 – 2023 yaitu **“Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Morowali yang Sejahtera Bersama”**.

Sebagai harapan dan cita-cita yang ingin diwujudkan oleh Kabupaten Morowali 5 (lima) tahun ke depan, pada hakekatnya Penjabaran Visi tersebut dapat uraikan sebagai berikut :

**Masyarakat** : merupakan sekelompok orang atau warga yang membentuk sebuah sistem semi tertutup (atau semi terbuka), yang sebagian besar masyarakat berinteraksi antara individu-individu yang berada dalam kelompok tersebut, atau dengan kata lain masyarakat adalah kesatuan hidup manusia yang berinteraksi menurut suatu sistem adat istiadat tertentu yang bersifat kontinyu dan terikat oleh suatu rasa identitas yang sama.

**Morowali** : adalah kesatuan wilayah dan masyarakat Kabupaten yang terbentuk dari hasil pemekaran Kabupaten Poso berdasarkan Undang Undang Nomor 51 Tahun 1999, tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Morowali dan Banggai Kepulauan, termasuk sarana dan prasarana serta kelembagaan yang dipisahkan dari kabupaten induk. Sebagai daerah otonom, maka Kabupaten Morowali dalam kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah dan berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem negara kesatuan Republik Indonesia. Daerah menunjukkan suatu kesatuan pemerintah dan kemasyarakatan beserta semua potensi yang dimiliki.

**Sejahtera** : Gambaran masyarakat Kabupaten Morowali yang terpenuhi kebutuhan dasar meliputi: Sandang, pangan, papan dan memperoleh pelayanan dasar pendidikan dan Kesehatan secara layak serta terbukanya kesempatan kerja yang luas dan menyerap tenaga kerja dengan penghasilan yang memadai.

**Bersama** : Dimaknai sebagai suatu kondisi masyarakat yang memiliki kesetaraan Dalam hak dan kewajiban sebagai warga Negara untuk memanfaatkan Segala potensi dan sumber daya yang dimiliki daerah dalam mendukung peningkatan kesejahteraan serta menikmati hasil-hasil pembangunan.

Visi yang tertuang dalam dokumen Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (P-RPJMD) Kabupaten Morowali Tahun 2018-2023 dijabarkan lebih lanjut ke dalam misi yang merupakan rumusan umum atau pernyataan tentang apa yang harus dilakukan oleh lembaga atau pemerintah untuk menjamin terwujudnya visi yang telah ditetapkan.

Rumusan misi disusun untuk memberikan kerangka acuan bagi pencapaian tujuan dan sasaran serta arah kebijakan yang akan ditempuh untuk mewujudkan visi daerah. Rumusan misi tersebut juga sekaligus menjadi acuan untuk melakukan evaluasi terhadap keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan tahapan dan prioritas program kegiatan yang telah ditetapkan.

Sebagai penjabaran visi dari Kabupaten Morowali yang tertuang dalam dokumen P-RPJMD Kabupaten Morowali tahun 2018-2023 maka misi dirumuskan sebagai berikut :

- Misi 1 : Menciptakan Pemerintahan Yang Baik dan Bersih Melalui Peningkatan Kapabilitas, Profesionalitas dan Kesejahteraan Aparatur Pemerintah Daerah Berdasarkan Nilai-Nilai Kebenaran dan Keadilan.
- Misi 2 : Meningkatkan Pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA), Pengembangan UMKM, IKM , Koperasi dan Bumdes untuk Mencapai Kesejahteraan Bersama
- Misi 3 : Mewujudkan Pelayanan Pendidikan dan Kesejahteraan yang Berkualitas Melalui Pembiayaan Gratis, berlandaskan Kehidupan Masyarakat Yang Beriman dan Bertaqwa, sehingga tercipta Kerukunan Hidup Antar Umat Beragama

Misi 4 : Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Peningkatan Infrastruktur Daerah, Sehingga Mengurangi Kesenjangan Wilayah dan Terciptanya Kehidupan Masyarakat Yang Harmonis dan Bahagia

Misi 5 : Mewujudkan Lingkungan Hidup Berkelanjutan dan Meningkatkan Ketahanan Masyarakat Menghadapi Perubahan Iklim dan Bencana

Dalam rangka mewujudkan perencanaan pembangunan yang fokus dan berkesinambungan, visi dan misi dijabarkan dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah sebagaimana tabel berikut :

Tabel 4.1  
Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Morowali

Misi Kabupaten Morowali	Tujuan	Sasaran
1. Menciptakan Pemerintahan Yang Baik dan Bersih Melalui Peningkatan Kapabilitas, Profesionalitas dan Kesejahteraan Aparatur Pemerintah Daerah Berdasarkan Nilai-Nilai Kebenaran dan Keadilan;	1. Menciptakan pemerintahan yang baik dan bersih	1. Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerah; 2. Meningkatnya Kinerja Pelayanan Publik; 3. Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah; 4. Meningkatkan Kualitas Pembangunan dan Pemberdayaan Desa;
2. Meningkatkan Pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA), Pengembangan UMKM, IKM , Koperasi dan Bumdes untuk Mencapai Kesejahteraan Bersama;	2. Meningkatkan skala ekonomi Daerah untuk Kesejahteraan bersama;	5. Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi; 6. Tumbuhnya Investasi Daerah; 7. Meningkatnya PDRB perkapita; 8. Rendahnya ketimpangan pendapatan antar masyarakat; 9. Menurunnya Jumlah Pengangguran; 10. Meningkatkan Kesejahteraan Petani dan Nelayan; 11. Meningkatkan ketersediaan pangan; 12. Menurunnya penduduk miskin; 13. Meningkatnya

		Kesejahteraan Masyarakat
3. Mewujudkan Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan yang Berkualitas Melalui Pembiayaan Gratis, berlandaskan Kehidupan Masyarakat Yang Beriman dan Bertaqwa, sehingga tercipta Kerukunan Hidup Antar Umat Beragama;	3. Meningkatkan Daya Saing Sumberdaya Manusia (SDM);	14. Meningkatnya Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan dalam menciptakan generasi muda yang Imtaq; 15. Terpenuhinya Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan; 16. Meningkatnya partisipasi organisasi kepemudaan dan Prestasi Olahraga Daerah; 17. Meningkatnya Partisipasi Perempuan dalam Pembangunan Daerah; 18. Meningkatnya Pelestarian seni dan Budaya Lokal; 19. Meningkatkan keimanan dan ketakwaan umat beragama Kab Morowali;
4. Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Peningkatan Infrastruktur Daerah, Sehingga Mengurangi Kesenjangan Wilayah dan Terciptanya Kehidupan Masyarakat Yang Harmonis dan Bahagia	4. Meningkatkan kualitas infrastruktur dasar;	20. Meningkatnya kualitas infrastruktur dasar daerah; 21. Meningkatnya Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi;
5. Mewujudkan Lingkungan Hidup Berkelanjutan dan Meningkatkan Ketahanan Masyarakat Menghadapi Perubahan Iklim dan Bencana.	5. Meningkatkan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup (DDDTLH) dan berkurangnya Resiko Bencana.	22. Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup; 23. Meningkatnya layanan kebersihan dan penataan lingkungan Kota Bungku; 24. Meningkatnya respon dan layanan

		kebakaran kabupaten; 25. Menurunnya gangguan ketentraman dan ketertiban.
--	--	--------------------------------------------------------------------------------------

## 4.2. Sasaran dan Prioritas Pembangunan Tahun 2023

Dalam menentukan sasaran dan prioritas Pembangunan Kabupaten Morowali tidak terlepas dari arah dan kebijakan perencanaan pembangunan nasional dan provinsi. Perencanaan pembangunan daerah kabupaten diarahkan untuk mendukung pelaksanaan pembangunan provinsi dan nasional.

### 4.2.1. Sasaran Pembangunan Tahun 2023

Untuk mendukung keselarasan pencapaian tujuan pembangunan baik nasional, provinsi maupun kabupaten maka telah ditetapkan 7 (tujuh) indikator makro yang menjadi sasaran pembangunan setiap daerah. Target indikator makro pembangunan Kabupaten Morowali tahun 2023 termuat pada tabel berikut :

Tabel 1  
Target Indikator Makro Pembangunan Kabupaten Morowali Tahun 2023

Indikator	Satuan	Capaian Kabupaten Morowali Tahun 2021	Target Tahun 2023		
			Nasional	Provinsi Sulawesi Tengah	Kabupaten Morowali
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Poin	72,21*	73,31 – 73,36	72,09 – 72,11	75 – 76
Pertumbuhan Ekonomi	Persen	28,93*	5,3 – 5,9	10,36	10 – 15
Persentase Penduduk miskin	Persen	13,43*	8,5 – 7,5	9,50 – 8,85	12,40-9,8
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	Persen	3,73	6,0 – 5,30	3,36 - 2,98	3 - 2
Pendapatan Per kapita	Juta				300-400
Nilai Tukar Petani	Persen		103 - 105		100-102
Gini Rasio	Indeks	0,30	0,378 – 0,375	0,22	0,24 – 0,30

Sumber Data BPS Diolah  
Ket. \* Angka Sementara

Adapun sasaran pembangunan Kabupaten Morowali secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.3  
Sasaran Pembangunan Kabupaten Morowali Tahun 2023

Tujuan		Sasaran		Satuan	Target 2023
Uraian	Indikator	Uraian	Indikator		
Menciptakan pemerintahan yang baik dan bersih	Indeks Reformasi Birokrasi Kab. Morowali			Katagori	B
		Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerah	Nilai akuntabilitas kinerja Pemerintah (SAKIP)	Nilai	BB
		Meningkatnya Kinerja Pelayanan Publik	Indeks kepuasan masyarakat	Katagori	B
		Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah	Opini hasil pemeriksaan oleh BPK	Opini	WTP
		Meningkatkan Kualitas Pembangunan dan Pemberdayaan Desa	Indeks Desa Membangun (IDM) Kab. Morowali	Indeks	0.7647
			Persentase Status Desa Maju	Persen	12-13
Meningkatkan skala ekonomi Daerah untuk Kesejahteraan bersama	Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif			Indeks	5 – 6
		Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi	Pertumbuhan Ekonomi	Persen	10 – 15
		Tumbuhnya Investasi Daerah	Pertumbuhan Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)	Persen	4 – 6
		Meningkatnya PDRB perkapita	PDRB Perkapita	Konstan Rp. (juta)	300-400
		Rendahnya ketimpangan pendapatan antar masyarakat	Gini Rasio	Indeks	0,30-0,24
		Menunnya Jumlah Pengangguran	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	Persen	2 – 3
		Meningkatkan Kesejahteraan Petani dan Nelayan	Nilai Tukar Petani (NTP)	Persen	100-102
			Nilai Tukar Nelayan (NTN)	Persen	106
Meningkatkan	Skor Pola	Poin	86.00-		

		ketersediaan pangan	Pangan Harapan (SPPH)		88.00
		Menurunnya Penduduk Miskin	Presentase Penduduk Miskin	Persen	12,40-9,8
		Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat	Persentase PMKS yang terpenuhi Kebutuhan Dasarnya	Persen	75-80
Meningkatkan Daya Saing Sumberdaya Manusia (SDM)	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)			Indeks	75,00-76,00
		Meningkatnya Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan dalam menciptakan generasi muda yang Imtaq	Indeks Pendidikan	Indeks	50,00-55,00
			Harapan lama sekolah	Tahun	14,5
			Rata-rata lama Sekolah	Tahun	10 – 10,30
		Terpenuhinya Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan	Indeks Kesehatan	Indeks	69,50 – 70
			Usia Harapan Hidup	Tahun	69,50 – 70
			Angka Stunting	Persen	6,60 – 6,10
		Meningkatnya partisipasi organisasi kepemudaan dan	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan	Persen	100
		Prestasi Olahraga Daerah	Peningkatan prestasi olahraga	Jumlah Medali Juara	37
		Meningkatnya Partisipasi Perempuan dalam Pembangunan Daerah	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Indeks	85-90
		Meningkatnya Pelestarian seni dan Budaya Lokal	Persentase Budaya Lokal yang dilestarikan	Persen	75-80
			Persentase Kesenian Lokal yang dilestarikan	Persen	75-80
		Meningkatkan keimanan dan ketakwaan umat beragama Kab	Indeks Kerukunan Beragama	Indeks	70-80

		Morowali			
Meningkatkan kualitas infrastruktur dasar	Indeks Infrastruktur Kabupaten			Katagori (Nasional)	1.51 – 3,75 (Tinggi)
		Meningkatnya kualitas infrastruktur dasar daerah	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	Persen	30,00 - 35,00
			Rasio elektrifikasi	Persen	99 -99,20
			Presentase Rumah Layak Huni	Persen	80 – 85
			Persentase RT berakses air bersih	Persen	90-92
		Meningkatnya Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi	Persentase Desa/Kelurahan yang memiliki akses jaringan telekomunikasi	Persen	90 – 95
			Persentase Koneksi Internet Desa	Persen	80 – 90
Meningkatkan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup (DDDTLH) dan berkurangnya Resiko Bencana	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)			Indeks	55 – 60
		Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Rawan Bencana	Indeks	90 – 85
			Persentase Desa Tangguh Bencana	Indeks	19,84 – 23,80
		Meningkatnya layanan kebersihan dan penataan lingkungan Kota Bungku	Cakupan Pelayanan Persampahan Kota	Persen	100
		Meningkatnya respon dan layanan kebakaran kabupaten	Cakupan Layanan Kebakaran skala Kabupaten	Persen	100
		Menurunnya gangguan ketentraman dan ketertiban	Angka Kriminalitas	Persen	8-5

#### 4.2.2. Keterkaitan antara Prioritas Nasional, Prioritas Provinsi Sulawesi Tengah dan Prioritas Kabupaten Morowali

Prioritas dan Sasaran dalam penyusunan RKPD Tahun 2023 diselaraskan untuk mendukung pencapaian visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden melalui 5 (lima) arahan utama Presiden sebagai berikut :

1. **Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM)**, membangun SDM pekerja keras yang dinamis, produktif, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi didukung dengan kerjasam industry dan talenta global;
2. **Pembangunan Infrastruktur**, melanjutkan pembangunan infratsruktur untuk menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata, mendorong lapangan kerja baru dan mempercepat peningkatan nilai tambah perekonomian rakyat;
3. **Penyederhanaan Regulasi**, menyederhanakan segala bentuk regulasi dengan pendekatan Omnibus Law, terutama menerbitkan Undang-Undang Cipta Kerja;
4. **Penyederhanaan Birokrasi**, memprioritaskan investasi untuk penciptaan lapangan kerja, memangkas prosedur dan birokrasi yang panjang dan menyederhanakan eselonisasi; dan
5. **Transformasi Ekonomi**, melakukan transformasi ekonomi dari ketergantungan SDA menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa demi keadilan social bagi seluruh rakyat Indonesia.

Kelima arahan Presiden di atas kemudian diterjemahkan ke dalam 7 (tujuh) Agenda Pembangunan/Prioritas Pembangunan dengan sasaran sebagai berikut :

Tabel 4.3  
Prioritas dan Sasaran Pembangunan Nasional 2020 – 2024

No	Prioritas	Sasaran
1	Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan	1) Meningkatnya daya dukung dan kualitas sumber daya ekonomi sebagai modalitas bagi pembangunan ekonomi yang berkelanjutan
		2) Meningkatnya nilai tambah, lapangan kerja, investasi, ekspor, dan daya saing perekonomian
2	Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan	1) Pengembangan Kawasan Strategis
		2) Pengembangan Sektor Unggulan
		3) Pengembangan Kawasan Perkotaan
		4) Pembangunan Daerah Tertinggal, Kawasan Perbatasan, Pedesaan, dan Transmigrasi
3	Meningkatkan SDM berkualitas dan berdaya saing	1) Terkendalinya pertumbuhan penduduk dan menguatnya tata kelola kependudukan
		2) Meningkatnya perlindungan sosial bagi seluruh penduduk

		3) Terpenuhi layanan dasar
		4) Meningkatnya kualitas anak, perempuan dan pemuda
		5) Terwujudnya pengentasan kemiskinan
		6) Meningkatnya Produktivitas dan Daya Saing
4	Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan	1) Menguatnya revolusi mental dan pembinaan ideologi Pancasila untuk memantapkan ketahanan budaya
		2) Meningkatnya pemajuan kebudayaan untuk meningkatkan peran kebudayaan dalam pembangunan
		3) Meningkatnya kualitas kehidupan masyarakat dan daya rekat sosial
		4) Menguatnya moderasi beragama untuk mewujudkan kerukunan umat dan membangun harmoni sosial dalam kehidupan masyarakat
		5) Meningkatnya ketahanan keluarga untuk memperkuat karakter bangsa
		6) Meningkatnya budaya literasi untuk mewujudkan masyarakat berpengetahuan, inovatif dan kreatif
5	Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar	1) Meningkatnya penyediaan infrastruktur layanan dasar
		2) Meningkatnya konektivitas wilayah
		3) Meningkatnya layanan angkutan umum massal di 6 (enam) kota metropolitan
		4) Meningkatnya akses dan pasokan energi dan tenaga listrik yang merata, andal, dan efisien
		5) Meningkatnya pembangunan dan pemanfaatan infrastruktur TIK, serta kontribusi sektor informasi dan komunikasi dalam pertumbuhan ekonomi
6	Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim	1) Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup
		2) Peningkatan Ketahanan Bencana dan Iklim
		3) Pembangunan Rendah Karbon
7	Memperkuat stabilitas polhukhamkam dan transformasi pelayanan publik	1) Menguatnya Stabilitas Polhukhamkam dan Terlaksananya Transformasi Pelayanan Publik

Sasaran dan prioritas dalam penyusunan RKPD Tahun 2023 juga diselaraskan untuk mendukung sasaran dan prioritas yang ditetapkan pada RKPD Provinsi Sulawesi Tengah, dengan prioritas yaitu :

- (1) Penanggulangan Korban Bencana;
- (2) Peningkatan akses dan mutu pelayanan pendidikan dan kesehatan;
- (3) Peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur daerah;
- (4) Mendorong peningkatan Produktivitas Tanaman Pangan, Perkebunan, Perikanan, Peternakan dan Komoditi Pertanian lainnya.

Penentuan Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Morowali Tahun 2023 diharapkan mendukung Prioritas Pembangunan Provinsi dan Prioritas Pembangunan Nasional.

Tahun 2023 juga merupakan tahun akhir dari pelaksanaan RPJMD Kabupaten Morowali tahun 2018–2023 sehingga Pemerintah Daerah perlu menetapkan prioritas untuk mencapai target-target yang telah ditetapkan dalam pencapaian visi misi Bupati terpilih.

Di samping itu pandemi Covid-19 yang terjadi sejak semester pertama tahun 2020 membawa banyak dampak baik pada bidang ekonomi dan sosial, kendati proses vaksinasi serta upaya penegakan protokol kesehatan terus dilakukan sehingga diharapkan dapat segera menuntaskan pandemi Covid-19, namun dampak yang ditimbulkan diperkirakan masih perlu diantisipasi pada Tahun 2023.

Sehingga berdasarkan uraian di atas dan hasil evaluasi kinerja pembangunan di tahun sebelumnya, Pemerintah Kabupaten Morowali menetapkan prioritas pembangunan Daerah sebagai berikut :

1. Mewujudkan ketahanan sosial ekonomi masyarakat masa pandemi covid 19 melalui peningkatan jaring pengaman sosial, pemberdayaan masyarakat, peningkatan produksi dan produktivitas sektor pertanian, perkebunan, perikanan, UMKM, BUMDES dan IKM.
2. Memantapkan kualitas infrastruktur untuk mengurangi kesenjangan wilayah, peningkatan kualitas lingkungan dan ketahanan bencana.
3. Memantapkan kualitas pelayanan publik dan penguatan SDM yang unggul, beriman dan bertaqwa.

Penentuan Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2023 diharapkan mendukung Prioritas Pembangunan Provinsi dan Prioritas Pembangunan Nasional. Prioritas Pembangunan Nasional, Prioritas Pembangunan Provinsi Sulawesi Tengah dan Prioritas Pembangunan kabupaten terdapat pada tabel berikut :

Tabel 4.4  
 Prioritas Nasional, Prioritas Provinsi Sulawesi Tengah 2023 dan Prioritas Kabupaten  
 Morowali Tahun 2023

RKP 2023	RKP SULAWESI TENGAH 2023	RKPD KABUPATEN MOROWALI 2023
<b>TEMA</b>		
Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan berkelanjutan	Peningkatan Produktivitas untuk Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas	Memantapkan Kesejahteraan Bersama Dengan Memajukan Infrastruktur Dan Pelayanan Publik
<b>PRIORITAS PEMBANGUNAN 2023 :</b>		
<p>1 Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan</p> <p>2 Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan</p>	<p>1 Penanggulangan Korban Bencana</p> <p>2 Peningkatan akses dan mutu pelayanan pendidikan dan kesehatan</p>	<p>1 Mewujudkan ketahanan sosial ekonomi masyarakat masa pandemi covid 19 melalui peningkatan jaring pengaman sosial, pemberdayaan masyarakat, peningkatan produksi dan produktivitas sektor pertanian, perkebunan, perikanan, UMKM, BUMDES dan IKM.</p> <p>2 Memantapkan kualitas infrastruktur untuk mengurangi kesenjangan wilayah, peningkatan kualitas lingkungan dan ketahanan bencana.</p>
<p>3 Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing</p>	<p>3 Peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur daerah</p>	<p>3 Memantapkan kualitas pelayanan publik dan penguatan SDM yang unggul, beriman dan bertaqwa melalui peningkatan kapasitas aparatur, sosial masyarakat, pendidikan dan kesehatan.</p>

RKP 2023	RKP SULAWESI TENGAH 2023	RKPD KABUPATEN MOROWALI 2023
<p>4 Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan</p> <p>5 Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar</p> <p>6 Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim</p> <p>7 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik</p>	<p>4 Mendorong peningkatan Produktivitas Tanaman Pangan, Perkebunan, Perikanan, Peternakan dan Komoditi Pertanian lainnya.</p>	

Program Prioritas Tahun 2022 yang mendukung Prioritas Pembangunan termuat pada tabel berikut :

Tabel 4.5  
Program Pembangunan Kabupaten Morowali Tahun 2023

PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS KABUPATEN	PROGRAM PRIORITAS			PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
		PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Memantapkan kualitas pelayanan public dan penguatan SDM yang unggul, beriman dan bertaqwa melalui peningkatan kapasitas aparatur, sosial masyarakat, pendidikan dan kesehatan	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) Penambahan Ruang Kelas Baru Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU Pembangunan Perpustakaan Sekolah Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah Pengadaan Mebel Sekolah Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS KABUPATEN	PROGRAM PRIORITAS			PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
		PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
			<p>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar</p>	<p>Pengadaan Perlengkapan Siswa</p> <p>Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik</p> <p>Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Dasar</p> <p>Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa</p> <p>Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar</p> <p>Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar</p> <p>Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah</p> <p>Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar</p> <p>Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar</p>	<p>Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.</p>
			<p>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama</p>	<p>Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)</p> <p>Penambahan Ruang Kelas Baru</p> <p>Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU</p> <p>Pembangunan Perpustakaan Sekolah</p> <p>Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah</p>	<p>Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.</p>

PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS KABUPATEN	PROGRAM PRIORITAS			PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
		PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
				Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah Pengadaan Mebel Sekolah Pengadaan Perlengkapan Siswa Perlengkapan Belajar Peserta Didik Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
			Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan PAUD	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS KABUPATEN	PROGRAM PRIORITAS			PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
		PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
				Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
			Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD Pengelolaan Dana BOP PAUD Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
			Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
		PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Dasar Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS KABUPATEN	PROGRAM PRIORITAS			PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
		PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Memantapkan kualitas pelayanan public dan penguatan SDM yang unggul, beriman dan bertaqwa melalui peningkatan kapasitas aparatur, sosial masyarakat, pendidikan dan kesehatan		Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
		PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
			Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Memantapkan kualitas pelayanan public dan penguatan SDM yang unggul, beriman dan bertaqwa melalui peningkatan kapasitas aparatur, sosial masyarakat, pendidikan dan kesehatan	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Penetapan Cagar Budaya Kabupaten/Kota	Penetapan Cagar Budaya	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS KABUPATEN	PROGRAM PRIORITAS			PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
		PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Memantapkan kualitas pelayanan public dan penguatan SDM yang unggul, beriman dan bertaqwa melalui peningkatan kapasitas aparatur, sosial masyarakat, pendidikan dan kesehatan	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan  Pengadaan Obat, Vaksin  Pengadaan Bahan Habis Pakai Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Rumah Sakit Umum Daerah Morowali  Rumah Sakit Pratama  Rumah Sakit Pratama  Rumah Sakit Pratama
			Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Operasional Pelayanan Puskesmas	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Memantapkan kualitas pelayanan public dan penguatan SDM yang unggul, beriman dan bertaqwa melalui peningkatan kapasitas aparatur, sosial masyarakat, pendidikan dan kesehatan	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Rumah Sakit Pratama

PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS KABUPATEN	PROGRAM PRIORITAS			PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
		PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Memantapkan kualitas pelayanan public dan penguatan SDM yang unggul, beriman dan bertaqwa melalui peningkatan kapasitas aparatur, sosial masyarakat, pendidikan dan kesehatan	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Pengadaan Obat, Vaksin  Pengadaan Bahan Habis Pakai  Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Makanan dan Minuman ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana  Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana  Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
			Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil  Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif  Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut  Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi  Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus  Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat  Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis  Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS KABUPATEN	PROGRAM PRIORITAS			PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
		PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Pengelolaan Surveilans Kesehatan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana  Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
			Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan  Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	

PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS KABUPATEN	PROGRAM PRIORITAS			PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
		PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Memantapkan kualitas pelayanan public dan penguatan SDM yang unggul, beriman dan bertaqwa melalui peningkatan kapasitas aparatur, sosial masyarakat, pendidikan dan kesehatan	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
				Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Memantapkan kualitas pelayanan public dan penguatan SDM yang unggul, beriman dan bertaqwa melalui peningkatan kapasitas aparatur, sosial masyarakat, pendidikan dan kesehatan	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	<p>Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)</p> <p>Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)</p>	<p>Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana</p> <p>Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana</p>

PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS KABUPATEN	PROGRAM PRIORITAS			PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
		PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Memantapkan kualitas pelayanan public dan penguatan SDM yang unggul, beriman dan bertaqwa melalui peningkatan kapasitas aparatur, sosial masyarakat, pendidikan dan kesehatan	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Memantapkan kualitas pelayanan public dan penguatan SDM yang unggul, beriman dan bertaqwa melalui peningkatan kapasitas aparatur, sosial masyarakat, pendidikan dan kesehatan	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Terhadap Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (Program KKBPK)  Pemanfaatan Data Hasil Pemutakhiran Data Keluarga	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana  Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS KABUPATEN	PROGRAM PRIORITAS			PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
		PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Memantapkan kualitas pelayanan public dan penguatan SDM yang unggul, beriman dan bertaqwa melalui peningkatan kapasitas aparatur, sosial masyarakat, pendidikan dan kesehatan	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Memantapkan kualitas pelayanan public dan penguatan SDM yang unggul, beriman dan bertaqwa melalui peningkatan kapasitas aparatur, sosial masyarakat, pendidikan dan kesehatan	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga)	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Memperkuat infrastruktur untuk mendukung ekonomi dan pelayanan dasar	Memantapkan kualitas infrastruktur untuk mengurangi kesenjangan wilayah, peningkatan kualitas lingkungan dan ketahanan bencana	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, Drainase Utama Perkotaan dan Pengaman Pantai  Pembangunan Tanggul Sungai  Pembangunan Breakwater	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang  Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS KABUPATEN	PROGRAM PRIORITAS			PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
		PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
				Pembangunan Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya Rehabilitasi Tanggul Sungai Normalisasi/Restorasi Sungai	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
			Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan Rehabilitasi Bendung Irigasi Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Memperkuat infrastruktur untuk mendukung ekonomi dan pelayanan dasar	Memantapkan kualitas infrastruktur untuk mengurangi kesenjangan wilayah, peningkatan kualitas lingkungan dan ketahanan bencana	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim	Memantapkan kualitas infrastruktur untuk mengurangi kesenjangan wilayah, peningkatan kualitas lingkungan dan ketahanan bencana	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS KABUPATEN	PROGRAM PRIORITAS			PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
		PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim	Memantapkan kualitas infrastruktur untuk mengurangi kesenjangan wilayah, peningkatan kualitas lingkungan dan ketahanan bencana	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota  Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang  Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Memantapkan kualitas infrastruktur untuk mengurangi kesenjangan wilayah, peningkatan kualitas lingkungan dan ketahanan bencana	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase  Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang  Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Memantapkan kualitas infrastruktur untuk mengurangi kesenjangan wilayah, peningkatan kualitas lingkungan dan ketahanan bencana	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Memantapkan kualitas infrastruktur untuk mengurangi kesenjangan wilayah, peningkatan kualitas lingkungan dan ketahanan bencana	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	Supervisi Penataan/Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan  Pemberdayaan Masyarakat dalam Penataan Bangunan dan Lingkungan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang  Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS KABUPATEN	PROGRAM PRIORITAS			PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
		PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Memantapkan kualitas infrastruktur untuk mengurangi kesenjangan wilayah, peningkatan kualitas lingkungan dan ketahanan bencana	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Survey Kondisi Jalan/Jembatan Pembangunan Jalan Rekonstruksi Jalan Pemeliharaan Berkala Jalan Pembangunan Jembatan Pemeliharaan Berkala Jembatan Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan/Jembatan Pengawasan Teknis Penyelenggaraan Jalan/Jembatan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Memantapkan kualitas infrastruktur untuk mengurangi kesenjangan wilayah, peningkatan kualitas lingkungan dan ketahanan bencana	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS KABUPATEN	PROGRAM PRIORITAS			PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
		PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
Mengembangkan Wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan	Memantapkan kualitas infrastruktur untuk mengurangi kesenjangan wilayah, peningkatan kualitas lingkungan dan ketahanan bencana	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
			Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
			Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah Sistem Informasi Penataan Ruang	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
			Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS KABUPATEN	PROGRAM PRIORITAS			PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
		PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Memantapkan kualitas infrastruktur untuk mengurangi kesenjangan wilayah, peningkatan kualitas lingkungan dan ketahanan bencana	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Pendataan dan Verifikasi Penerima Rumah bagi Korban Bencana Alam atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan
			Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan
Mengembangkan Wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan	Memantapkan kualitas infrastruktur untuk mengurangi kesenjangan wilayah, peningkatan kualitas lingkungan dan ketahanan bencana	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penataan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan
			Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Penyusunan Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED) Peremajaan/Pemugaran Permukiman Kumuh Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan
Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Memantapkan kualitas infrastruktur untuk mengurangi kesenjangan wilayah, peningkatan	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan

PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS KABUPATEN	PROGRAM PRIORITAS			PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
		PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
	<p>kualitas lingkungan dan ketahanan bencana</p>	UTILITAS UMUM (PSU)		Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	
<p>Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar</p>	<p>Memantapkan kualitas infrastruktur untuk mengurangi kesenjangan wilayah, peningkatan kualitas lingkungan dan ketahanan bencana</p>	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	<p>Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</p>	<p>Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</p>	<p>Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan</p>
<p>Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim</p>	<p>Memantapkan kualitas infrastruktur untuk mengurangi kesenjangan wilayah, peningkatan kualitas lingkungan dan ketahanan bencana</p>	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	<p>Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota</p>	<p>Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)</p>	<p>Badan Penanggulangan Bencana Daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah</p>
			<p>Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana</p>	<p>Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota</p>	<p>Badan Penanggulangan Bencana Daerah</p>
				<p>Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana</p>	<p>Badan Penanggulangan Bencana Daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah</p>
			<p>Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota</p>	<p>Badan Penanggulangan Bencana Daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah</p>	

PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS KABUPATEN	PROGRAM PRIORITAS			PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
		PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
			Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah
			Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Memantapkan kualitas pelayanan public dan penguatan SDM yang unggul, beriman dan bertaqwa melalui peningkatan kapasitas aparatur, sosial masyarakat, pendidikan dan kesehatan	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Satuan Polisi Pamongpraja  Satuan Polisi Pamongpraja  Satuan Polisi Pamongpraja  Satuan Polisi Pamongpraja  Satuan Polisi Pamongpraja

PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS KABUPATEN	PROGRAM PRIORITAS			PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
		PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
			Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Satuan Polisi Pamongpraja
			Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Satuan Polisi Pamongpraja
Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim	Memantapkan kualitas infrastruktur untuk mengurangi kesenjangan wilayah, peningkatan kualitas lingkungan dan ketahanan bencana	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota  Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	Satuan Polisi Pamongpraja  Satuan Polisi Pamongpraja  Satuan Polisi Pamongpraja

PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS KABUPATEN	PROGRAM PRIORITAS			PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
		PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan Berdaya Saing	Mewujudkan ketahanan sosial ekonomi masyarakat masa pandemic covid 19 melalui peningkatan jaring pengaman social, pemberdayaan masyarakat, peningkatan produksi dan produktivitas sector pertanian, perkebunan, perikanan, UMKM, BUMDES dan IKM	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT)	Fasilitasi Pemberdayaan Sosial KAT	Dinas Sosial
Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan Berdaya Saing	Mewujudkan ketahanan sosial ekonomi masyarakat masa pandemic covid 19 melalui peningkatan jaring pengaman social, pemberdayaan masyarakat, peningkatan produksi dan produktivitas sector pertanian, perkebunan, perikanan, UMKM, BUMDES dan IKM	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Penyediaan Permakanan  Penyediaan Sandang  Penyediaan Alat Bantu	Dinas Sosial  Dinas Sosial  Dinas Sosial

PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS KABUPATEN	PROGRAM PRIORITAS			PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
		PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan Berdaya Saing	Mewujudkan ketahanan sosial ekonomi masyarakat masa pandemic covid 19 melalui peningkatan jaring pengaman social, pemberdayaan masyarakat, peningkatan produksi dan produktivitas sector pertanian, perkebunan, perikanan, UMKM, BUMDES dan IKM	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar	Penjangkauan Anak-Anak Terlantar Pemantauan Terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar	Dinas Sosial Dinas Sosial
			Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota  Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Sosial  Dinas Sosial
Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Memantapkan kualitas infrastruktur untuk mengurangi kesenjangan wilayah, peningkatan kualitas lingkungan dan ketahanan bencana	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Penyediaan Makanan  Penyediaan Sandang	Dinas Sosial  Dinas Sosial
			Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Dinas Sosial

PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS KABUPATEN	PROGRAM PRIORITAS			PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
		PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Memantapkan kualitas infrastruktur untuk mengurangi kesenjangan wilayah, peningkatan kualitas lingkungan dan ketahanan bencana	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Dinas Sosial
Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan Berdaya Saing	Memantapkan kualitas pelayanan public dan penguatan SDM yang unggul, beriman dan bertaqwa melalui peningkatan kapasitas aparatur, sosial masyarakat, pendidikan dan kesehatan	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Dinas Transmigrasi Dan Tenaga Kerja Daerah
			Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Dinas Transmigrasi Dan Tenaga Kerja Daerah
Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Memantapkan kualitas pelayanan public dan penguatan SDM yang unggul, beriman dan bertaqwa melalui peningkatan kapasitas aparatur, sosial masyarakat, pendidikan dan kesehatan	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Dinas Transmigrasi Dan Tenaga Kerja Daerah
			Penerbitan Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Transmigrasi Dan Tenaga Kerja Daerah

PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS KABUPATEN	PROGRAM PRIORITAS			PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
		PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Memantapkan kualitas pelayanan public dan penguatan SDM yang unggul, beriman dan bertaqwa melalui peningkatan kapasitas aparatur, sosial masyarakat, pendidikan dan kesehatan	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	Dinas Transmigrasi Dan Tenaga Kerja Daerah
			Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Transmigrasi Dan Tenaga Kerja Daerah
Mengembangkan Wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan	Memantapkan kualitas infrastruktur untuk mengurangi kesenjangan wilayah, peningkatan kualitas lingkungan dan ketahanan bencana	PROGRAM PERENCANAAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi	Identifikasi Potensi Kawasan Transmigrasi	Dinas Transmigrasi Dan Tenaga Kerja Daerah

PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS KABUPATEN	PROGRAM PRIORITAS			PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
		PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
Mengembangkan Wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan	Memantapkan kualitas infrastruktur untuk mengurangi kesenjangan wilayah, peningkatan kualitas lingkungan dan ketahanan bencana	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Penyiapan Lingkungan Hunian Fisik, Sosial, Ekonomi bagi Penduduk Setempat dan Transmigran	Dinas Transmigrasi Dan Tenaga Kerja Daerah
Mengembangkan Wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan	Memantapkan kualitas infrastruktur untuk mengurangi kesenjangan wilayah, peningkatan kualitas lingkungan dan ketahanan bencana	PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Kemandirian	Penguatan SDM dalam rangka Kemandirian Satuan Pemukiman	Dinas Transmigrasi Dan Tenaga Kerja Daerah
Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Mewujudkan ketahanan sosial ekonomi masyarakat masa pandemic covid 19 melalui peningkatan jaring pengaman social, pemberdayaan masyarakat, peningkatan produksi dan produktivitas sector pertanian, perkebunan, perikanan, UMKM, BUMDES dan IKM	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan  Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan  Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan

PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS KABUPATEN	PROGRAM PRIORITAS			PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
		PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
				Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan
			Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan
			Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan
Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Mewujudkan ketahanan sosial ekonomi masyarakat masa pandemic covid 19 melalui peningkatan jaring pengaman social, pemberdayaan masyarakat, peningkatan produksi dan produktivitas sector pertanian, perkebunan, perikanan, UMKM, BUMDES dan IKM	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan
			Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota	Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan

PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS KABUPATEN	PROGRAM PRIORITAS			PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
		PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Mewujudkan ketahanan sosial ekonomi masyarakat masa pandemic covid 19 melalui peningkatan jaring pengaman social, pemberdayaan masyarakat, peningkatan produksi dan produktivitas sector pertanian, perkebunan, perikanan, UMKM, BUMDES dan IKM	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan
Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Mewujudkan ketahanan sosial ekonomi masyarakat masa pandemic covid 19 melalui peningkatan jaring pengaman social, pemberdayaan masyarakat, peningkatan produksi dan produktivitas sector pertanian, perkebunan, perikanan, UMKM, BUMDES dan IKM	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan
			Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/	Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan

PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS KABUPATEN	PROGRAM PRIORITAS			PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
		PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Mewujudkan ketahanan sosial ekonomi masyarakat masa pandemic covid 19 melalui peningkatan jaring pengaman social, pemberdayaan masyarakat, peningkatan produksi dan produktivitas sector pertanian, perkebunan, perikanan, UMKM, BUMDES dan IKM	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Pembangunan Prasarana Pertanian	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan
				Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan
Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Mewujudkan ketahanan sosial ekonomi masyarakat masa pandemic covid 19 melalui peningkatan jaring pengaman social, pemberdayaan masyarakat, peningkatan produksi dan produktivitas sector pertanian, perkebunan,	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota	Penanggulangan Daerah Terdampak Wabah Penyakit Hewan Menular	Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan
			Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan	Penilaian Risiko Penyakit Hewan dan Keamanan Produk Hewan	Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan

PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS KABUPATEN	PROGRAM PRIORITAS			PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
		PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
	perikanan, UMKM, BUMDES dan IKM		Daerah Kabupaten/Kota		
Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Mewujudkan ketahanan sosial ekonomi masyarakat masa pandemic covid 19 melalui peningkatan jaring pengaman social, pemberdayaan masyarakat, peningkatan produksi dan produktivitas sector pertanian, perkebunan, perikanan, UMKM, BUMDES dan IKM	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan
Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Mewujudkan ketahanan sosial ekonomi masyarakat masa pandemic covid 19 melalui peningkatan jaring pengaman social, pemberdayaan masyarakat, peningkatan produksi dan produktivitas sector pertanian, perkebunan,	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa  Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan  Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan

PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS KABUPATEN	PROGRAM PRIORITAS			PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
		PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
	perikanan, UMKM, BUMDES dan IKM				
Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Memantapkan kualitas infrastruktur untuk mengurangi kesenjangan wilayah, peningkatan kualitas lingkungan dan ketahanan bencana	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota	Dinas Lingkungan Hidup Daerah
			Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS untuk KRP yang Berpotensi Menimbulkan Dampak/Resiko Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup Daerah
Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Memantapkan kualitas infrastruktur untuk mengurangi kesenjangan wilayah, peningkatan kualitas lingkungan dan ketahanan bencana	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Dinas Lingkungan Hidup Daerah
			Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup Daerah Dinas Lingkungan Hidup Daerah

PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS KABUPATEN	PROGRAM PRIORITAS			PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
		PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Memantapkan kualitas infrastruktur untuk mengurangi kesenjangan wilayah, peningkatan kualitas lingkungan dan ketahanan bencana	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Dinas Lingkungan Hidup Daerah
Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Memantapkan kualitas infrastruktur untuk mengurangi kesenjangan wilayah, peningkatan kualitas lingkungan dan ketahanan bencana	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Penyimpanan sementara Limbah B3	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan sementara Limbah B3 Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Dinas Lingkungan Hidup Daerah
Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Memantapkan kualitas infrastruktur untuk mengurangi kesenjangan wilayah, peningkatan kualitas lingkungan dan ketahanan bencana	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota  Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana PPLH	Dinas Lingkungan Hidup Daerah  Dinas Lingkungan Hidup Daerah

PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS KABUPATEN	PROGRAM PRIORITAS			PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
		PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Memantapkan kualitas infrastruktur untuk mengurangi kesenjangan wilayah, peningkatan kualitas lingkungan dan ketahanan bencana	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	<p>Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap PPLH Kabupaten/Kota</p> <p>Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau Melalui Pengadilan</p>	<p>Dinas Lingkungan Hidup Daerah</p> <p>Dinas Lingkungan Hidup Daerah</p>
Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Memantapkan kualitas infrastruktur untuk mengurangi kesenjangan wilayah, peningkatan kualitas lingkungan dan ketahanan bencana	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Pengelolaan Sampah	<p>Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota</p> <p>Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan</p> <p>Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan</p>	<p>Dinas Lingkungan Hidup Daerah</p> <p>Dinas Lingkungan Hidup Daerah</p> <p>Dinas Lingkungan Hidup Daerah</p>
			Penerbitan Izin Pendaurlangan Sampah/Pengelolaan Sampah, Pengangkutan Sampah dan Pemrosesan Akhir Sampah yang Diselenggarakan oleh Swasta	<p>Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik</p>	<p>Dinas Lingkungan Hidup Daerah</p>
Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Memantapkan kualitas pelayanan public dan penguatan SDM yang unggul, beriman dan bertaqwa melalui peningkatan kapasitas aparatur, sosial	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	<p>Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk</p>	<p>Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Daerah</p>
			Penataan Pendaftaran Penduduk	<p>Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan</p>	<p>Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Daerah</p>
			Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	<p>Sosialisasi Pendaftaran Penduduk</p>	<p>Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Daerah</p>

PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS KABUPATEN	PROGRAM PRIORITAS			PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
		PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
	masyarakat, pendidikan dan kesehatan		Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Pengelolaan dan Pelaporan Penggunaan Blangko Dokumen Kependudukan, Formulir, dan Buku untuk Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Daerah
Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Memantapkan kualitas pelayanan public dan penguatan SDM yang unggul, beriman dan bertaqwa melalui peningkatan kapasitas aparatur, sosial masyarakat, pendidikan dan kesehatan	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Pelayanan Pencatatan Sipil	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Daerah
			Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil  Sosialisasi Terkait Pencatatan Sipil	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Daerah  Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Daerah
Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Memantapkan kualitas pelayanan public dan penguatan SDM yang unggul, beriman dan bertaqwa melalui peningkatan kapasitas aparatur, sosial masyarakat, pendidikan dan kesehatan	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Daerah
			Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Daerah

PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS KABUPATEN	PROGRAM PRIORITAS			PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
		PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Memantapkan kualitas pelayanan public dan penguatan SDM yang unggul, beriman dan bertaqwa melalui peningkatan kapasitas aparatur, sosial masyarakat, pendidikan dan kesehatan	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Penyusunan Profil Kependudukan	Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Daerah
Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Memantapkan kualitas pelayanan public dan penguatan SDM yang unggul, beriman dan bertaqwa melalui peningkatan kapasitas aparatur, sosial masyarakat, pendidikan dan kesehatan	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Memantapkan kualitas pelayanan public dan penguatan SDM yang unggul, beriman dan bertaqwa ) melalui peningkatan kapasitas aparatur, sosial masyarakat, pendidikan dan kesehatan	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
				Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS KABUPATEN	PROGRAM PRIORITAS			PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
		PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Memantapkan kualitas pelayanan public dan penguatan SDM yang unggul, beriman dan bertaqwa melalui peningkatan kapasitas aparatur, sosial masyarakat, pendidikan dan kesehatan	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Memantapkan kualitas pelayanan public dan penguatan SDM yang unggul, beriman dan bertaqwa melalui peningkatan kapasitas aparatur, sosial masyarakat, pendidikan dan kesehatan	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelebagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Memantapkan kualitas pelayanan public dan penguatan SDM yang unggul, beriman dan bertaqwa melalui peningkatan kapasitas aparatur, sosial masyarakat, pendidikan dan kesehatan	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS KABUPATEN	PROGRAM PRIORITAS			PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
		PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Memantapkan kualitas pelayanan public dan penguatan SDM yang unggul, beriman dan bertaqwa melalui peningkatan kapasitas aparatur, sosial masyarakat, pendidikan dan kesehatan	PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA	Fasilitasi Kerja Sama antar Desa	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Memantapkan kualitas pelayanan public dan penguatan SDM yang unggul, beriman dan bertaqwa melalui peningkatan kapasitas aparatur, sosial masyarakat, pendidikan dan kesehatan	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	<p>Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa</p> <p>Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa</p> <p>Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa</p> <p>Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa</p>	<p>Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak</p> <p>Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak</p> <p>Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak</p> <p>Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak</p>

PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS KABUPATEN	PROGRAM PRIORITAS			PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
		PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
				<p>Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa</p> <p>Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa</p> <p>Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa</p> <p>Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa</p> <p>Fasilitasi Penyusunan Profil Desa</p>	<p>Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak</p> <p>Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak</p> <p>Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak</p> <p>Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak</p> <p>Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak</p>
Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Memantapkan kualitas pelayanan public dan penguatan SDM yang unggul, beriman dan bertaqwa melalui peningkatan kapasitas aparatur, sosial masyarakat, pendidikan dan kesehatan	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS KABUPATEN	PROGRAM PRIORITAS			PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
		PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
				<p>Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat</p> <p>Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa</p> <p>Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna</p> <p>Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga</p>	<p>Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak</p> <p>Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak</p> <p>Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak</p> <p>Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak</p>
Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Memantapkan kualitas infrastruktur untuk mengurangi kesenjangan wilayah, peningkatan kualitas lingkungan dan ketahanan bencana	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Dinas Perhubungan Daerah
			Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Dinas Perhubungan Daerah
			Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Dinas Perhubungan Daerah Dinas Perhubungan Daerah

PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS KABUPATEN	PROGRAM PRIORITAS			PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
		PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
			Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Dinas Perhubungan Daerah
			Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Perhubungan Daerah
Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Memantapkan kualitas infrastruktur untuk mengurangi kesenjangan wilayah, peningkatan kualitas lingkungan dan ketahanan bencana	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat bagi Orang Perorangan atau Badan Usaha yang Berdomisili dan yang Beroperasi pada Lintas Pelabuhan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Kewenangan Kabupaten/Kota	Dinas Perhubungan Daerah
			Penetapan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Lokal Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Lokal	Dinas Perhubungan Daerah
				Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Lokal	Dinas Perhubungan Daerah
Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Memantapkan kualitas infrastruktur untuk mengurangi kesenjangan wilayah, peningkatan kualitas lingkungan dan ketahanan bencana	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah Pelayanan Informasi Publik Layanan Hubungan Media	Dinas Komunikasi dan Informatika Dinas Komunikasi dan Informatika Dinas Komunikasi dan Informatika

PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS KABUPATEN	PROGRAM PRIORITAS			PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
		PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Memantapkan kualitas infrastruktur untuk mengurangi kesenjangan wilayah, peningkatan kualitas lingkungan dan ketahanan bencana	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota  Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Dinas Komunikasi dan Informatika  Dinas Komunikasi dan Informatika
			Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Penatalaksanaan dan Pengawasan E-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Dinas Komunikasi dan Informatika  Dinas Komunikasi dan Informatika Dinas Komunikasi dan Informatika Dinas Komunikasi dan Informatika  Dinas Komunikasi dan Informatika  Dinas Komunikasi dan Informatika
Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Mewujudkan ketahanan social ekonomi masyarakat ketahanan pangan, masa pandemic covid 19 melalui	PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah

PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS KABUPATEN	PROGRAM PRIORITAS			PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
		PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
	peningkatan jaring pengaman social, pemberdayaan masyarakat, peningkatan produksi dan produktivitas sector pertanian, perkebunan, perikanan,UMKM,BUMDES dan IKM		Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah
Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Mewujudkan ketahanan social ekonomi masyarakat ketahanan pangan, masa pandemic covid 19 melalui peningkatan jaring pengaman social, pemberdayaan masyarakat, peningkatan produksi dan produktivitas sector pertanian, perkebunan, perikanan,UMKM,BUMDES dan IKM	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota  Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi Terhadap Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah  Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah

PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS KABUPATEN	PROGRAM PRIORITAS			PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
		PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Mewujudkan ketahanan social ekonomi masyarakat ketahanan pangan, masa pandemic covid 19 melalui peningkatan jaring pengaman social, pemberdayaan masyarakat, peningkatan produksi dan produktivitas sector pertanian, perkebunan, perikanan,UMKM,BUMDES dan IKM	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah
Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Mewujudkan ketahanan social ekonomi masyarakat ketahanan pangan, masa pandemic covid 19 melalui peningkatan jaring pengaman social, pemberdayaan masyarakat, peningkatan produksi dan produktivitas sector pertanian, perkebunan, perikanan,UMKM,BUMDES dan IKM	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah
			Pendidikan dan Pelatihan SDM Usaha Mikro dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Usaha Mikro serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Usaha Mikro	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah

PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS KABUPATEN	PROGRAM PRIORITAS			PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
		PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Mewujudkan ketahanan social ekonomi masyarakat ketahanan pangan, masa pandemic covid 19 melalui peningkatan jaring pengaman social, pemberdayaan masyarakat, peningkatan produksi dan produktivitas sector pertanian, perkebunan, perikanan,UMKM,BUMDES dan IKM	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah
Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Mewujudkan ketahanan social ekonomi masyarakat ketahanan pangan, masa pandemic covid 19 melalui peningkatan jaring pengaman social, pemberdayaan masyarakat, peningkatan produksi dan produktivitas sector pertanian, perkebunan, perikanan,UMKM,BUMDES dan IKM	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	<p>Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro</p> <p>Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro</p> <p>Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro</p> <p>Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro</p> <p>Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro</p> <p>Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Usaha Mikro serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Usaha Mikro dan Kewirausahaan</p>	<p>Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah</p>

PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS KABUPATEN	PROGRAM PRIORITAS			PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
		PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Mewujudkan ketahanan social ekonomi masyarakat ketahanan pangan, masa pandemic covid 19 melalui peningkatan jaring pengaman social, pemberdayaan masyarakat, peningkatan produksi dan produktivitas sector pertanian, perkebunan, perikanan,UMKM,BUMDES dan IKM	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah
Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Memantapkan kualitas pelayanan public dan penguatan SDM yang unggul, beriman dan bertaqwa melalui peningkatan kapasitas aparatur, sosial masyarakat, pendidikan dan kesehatan	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal  Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
			Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota  Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS KABUPATEN	PROGRAM PRIORITAS			PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
		PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Memantapkan kualitas pelayanan public dan penguatan SDM yang unggul, beriman dan bertaqwa melalui peningkatan kapasitas aparatur, sosial masyarakat, pendidikan dan kesehatan	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Memantapkan kualitas pelayanan public dan penguatan SDM yang unggul, beriman dan bertaqwa melalui peningkatan kapasitas aparatur, sosial masyarakat, pendidikan dan kesehatan	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Memantapkan kualitas pelayanan public dan penguatan SDM yang unggul, beriman dan bertaqwa melalui peningkatan kapasitas aparatur, sosial	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS KABUPATEN	PROGRAM PRIORITAS			PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
		PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
	masyarakat, pendidikan dan kesehatan			Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Memantapkan kualitas pelayanan public dan penguatan SDM yang unggul, beriman dan bertaqwa melalui peningkatan kapasitas aparatur, sosial masyarakat, pendidikan dan kesehatan	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula  Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata  Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
			Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Memantapkan kualitas pelayanan public dan penguatan SDM yang unggul, beriman dan bertaqwa melalui peningkatan kapasitas aparatur, sosial masyarakat, pendidikan dan kesehatan	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Dasar  Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata  Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
			Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota  Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata  Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
			Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah	Pemberian Penghargaan Olahraga Kabupaten/Kota	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata

PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS KABUPATEN	PROGRAM PRIORITAS			PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
		PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
			Provinsi		
Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Memantapkan kualitas pelayanan public dan penguatan SDM yang unggul, beriman dan bertaqwa melalui peningkatan kapasitas aparatur, sosial masyarakat, pendidikan dan kesehatan	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Muwujudkan ketahanan social ekonomi masyarakat ketahanan pangan, masa pandemic covid 19 melalui peningkatan jaring pengaman social, pemberdayaan masyarakat, peningkatan produksi dan produktivitas sector pertanian, perkebunan, perikanan,UMKM,BUMDES danIKM	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota  Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata  Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata  Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata

PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS KABUPATEN	PROGRAM PRIORITAS			PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
		PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Muwujudkan ketahanan social ekonomi masyarakat ketahanan pangan, masa pandemic covid 19 melalui peningkatan jaring pengaman social, pemberdayaan masyarakat, peningkatan produksi dan produktivitas sector pertanian, perkebunan, perikanan,UMKM,BUMDES danIKM	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Muwujudkan ketahanan social ekonomi masyarakat ketahanan pangan, masa pandemic covid 19 melalui peningkatan jaring pengaman social, pemberdayaan masyarakat, peningkatan produksi dan produktivitas sector pertanian, perkebunan, perikanan,UMKM,BUMDES danIKM	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif  Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata  Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata

PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS KABUPATEN	PROGRAM PRIORITAS			PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
		PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Memantapkan kualitas pelayanan public dan penguatan SDM yang unggul, beriman dan bertaqwa melalui peningkatan kapasitas aparatur, sosial masyarakat, pendidikan dan kesehatan	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	Dinas Perpustakaan Daerah Dinas Perpustakaan Daerah
			Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	Dinas Perpustakaan Daerah Dinas Perpustakaan Daerah Dinas Perpustakaan Daerah Dinas Perpustakaan Daerah
Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Memantapkan kualitas pelayanan public dan penguatan SDM yang unggul, beriman dan bertaqwa melalui peningkatan kapasitas aparatur, sosial masyarakat, pendidikan dan kesehatan	PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	Pengembangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang Ditemukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Seleksi dan Pengadaan Koleksi Budaya Etnis Nusantara	Dinas Perpustakaan Daerah
Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Memantapkan kualitas pelayanan public dan penguatan SDM yang unggul, beriman dan bertaqwa melalui peningkatan kapasitas aparatur, sosial	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	Dinas Perpustakaan Daerah Dinas Perpustakaan Daerah
			Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN	Dinas Perpustakaan Daerah

PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS KABUPATEN	PROGRAM PRIORITAS			PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
		PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
	masyarakat, pendidikan dan kesehatan				
Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Memantapkan kualitas pelayanan public dan penguatan SDM yang unggul, beriman dan bertaqwa melalui peningkatan kapasitas aparatur, sosial masyarakat, pendidikan dan kesehatan	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun	Dinas Perpustakaan Daerah
			Pencarian Arsip Statis Kabupaten/Kota yang Dinyatakan Hilang	Penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip Statis yang Dinyatakan Hilang	Dinas Perpustakaan Daerah
Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Muwujudkan ketahanan social ekonomi masyarakat ketahanan pangan, masa pandemic covid 19 melalui peningkatan jaring pengaman social, pemberdayaan masyarakat, peningkatan produksi dan produktivitas sector pertanian, perkebunan, perikanan,UMKM,BUMDES danIKM	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan  Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Dinas Perikanan Daerah  Dinas Perikanan Daerah
			Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil Pelaksanaan Fasilitas Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil Pelaksanaan Fasilitas Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	Dinas Perikanan Daerah Dinas Perikanan Daerah Dinas Perikanan Daerah
			Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Penetapan Prosedur Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Dinas Perikanan Daerah Dinas Perikanan Daerah

PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS KABUPATEN	PROGRAM PRIORITAS			PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
		PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
			Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pelayanan Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT	Dinas Perikanan Daerah
Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Muwujudkan ketahanan social ekonomi masyarakat ketahanan pangan, masa pandemic covid 19 melalui peningkatan jaring pengaman social, pemberdayaan masyarakat, peningkatan produksi dan produktivitas sector pertanian, perkebunan, perikanan,UMKM,BUMDES danIKM	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Perikanan Daerah
				Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Perikanan Daerah
				Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Perikanan Daerah
				Perencanaan, Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan untuk Pembudidayaan Ikan di Darat	Dinas Perikanan Daerah
Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Muwujudkan ketahanan social ekonomi masyarakat ketahanan pangan, masa pandemic covid 19 melalui peningkatan jaring pengaman social,	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	Dinas Perikanan Daerah

PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS KABUPATEN	PROGRAM PRIORITAS			PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
		PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
	pemberdayaan masyarakat, peningkatan produksi dan produktivitas sector pertanian, perkebunan, perikanan,UMKM,BUMDES danIKM				
Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Muwujudkan ketahanan social ekonomi masyarakat ketahanan pangan, masa pandemic covid 19 melalui peningkatan jaring pengaman social, pemberdayaan masyarakat, peningkatan produksi dan produktivitas sector pertanian, perkebunan, perikanan,UMKM,BUMDES danIKM	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Dinas Perikanan Daerah
			Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota  Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Perikanan Daerah  Dinas Perikanan Daerah
Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Muwujudkan ketahanan social ekonomi masyarakat ketahanan pangan, masa pandemic covid 19 melalui peningkatan jaring pengaman social,	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Dinas Perdagangan Dan Perindustrian

PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS KABUPATEN	PROGRAM PRIORITAS			PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
		PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
	pemberdayaan masyarakat, peningkatan produksi dan produktivitas sector pertanian, perkebunan, perikanan,UMKM,BUMDES danIKM				
Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Muwujudkan ketahanan social ekonomi masyarakat ketahanan pangan, masa pandemic covid 19 melalui peningkatan jaring pengaman social, pemberdayaan masyarakat, peningkatan produksi dan produktivitas sector pertanian, perkebunan, perikanan,UMKM,BUMDES danIKM	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Dinas Perdagangan Dan Perindustrian
Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Memantapkan kualitas pelayanan public dan penguatan SDM yang unggul, beriman dan bertaqwa melalui	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Dinas Perdagangan Dan Perindustrian  Dinas Perdagangan Dan Perindustrian

PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS KABUPATEN	PROGRAM PRIORITAS			PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
		PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
	peningkatan kapasitas aparatur, sosial masyarakat, pendidikan dan kesehatan		Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Dinas Perdagangan Dan Perindustrian
Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Memantapkan kualitas pelayanan public dan penguatan SDM yang unggul, beriman dan bertaqwa melalui peningkatan kapasitas aparatur, sosial masyarakat, pendidikan dan kesehatan	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal  Penyidikan Metrologi Legal	Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Dinas Perdagangan Dan Perindustrian  Dinas Perdagangan Dan Perindustrian
Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Muwujudkan ketahanan social ekonomi masyarakat ketahanan pangan, masa pandemic covid 19 melalui peningkatan jaring pengaman social, pemberdayaan masyarakat, peningkatan produksi dan produktivitas sector pertanian, perkebunan, perikanan,UMKM,BUMDES danIKM	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Dinas Perdagangan Dan Perindustrian

PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS KABUPATEN	PROGRAM PRIORITAS			PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
		PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Muwujudkan ketahanan social ekonomi masyarakat ketahanan pangan, masa pandemic covid 19 melalui peningkatan jaring pengaman social, pemberdayaan masyarakat, peningkatan produksi dan produktivitas sector pertanian, perkebunan, perikanan,UMKM,BUMDES danIKM	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Dinas Perdagangan Dan Perindustrian
				Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Sumber Daya Industri	Dinas Perdagangan Dan Perindustrian
Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Muwujudkan ketahanan social ekonomi masyarakat ketahanan pangan, masa pandemic covid 19 melalui peningkatan jaring pengaman social, pemberdayaan masyarakat, peningkatan produksi dan produktivitas sector pertanian, perkebunan, perikanan,UMKM,BUMDES danIKM	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Dinas Perdagangan Dan Perindustrian
				Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/ Kota	Dinas Perdagangan Dan Perindustrian

PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS KABUPATEN	PROGRAM PRIORITAS			PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
		PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Muwujudkan ketahanan social ekonomi masyarakat ketahanan pangan, masa pandemic covid 19 melalui peningkatan jaring pengaman social, pemberdayaan masyarakat, peningkatan produksi dan produktivitas sector pertanian, perkebunan, perikanan,UMKM,BUMDES danIKM	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPU, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas	Dinas Perdagangan Dan Perindustrian
Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Memantapkan kualitas pelayanan public dan penguatan SDM yang unggul, beriman dan bertaqwa melalui peningkatan kapasitas aparatur, sosial masyarakat, pendidikan dan kesehatan	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan  Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	SEKRETARIAT DAERAH  SEKRETARIAT DAERAH SEKRETARIAT DAERAH

PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS KABUPATEN	PROGRAM PRIORITAS			PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
		PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
			Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD Pengendalian dan Distribusi Perekonomian Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	SEKRETARIAT DAERAH SEKRETARIAT DAERAH SEKRETARIAT DAERAH
			Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	SEKRETARIAT DAERAH
				Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	SEKRETARIAT DAERAH SEKRETARIAT DAERAH
			Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	SEKRETARIAT DAERAH SEKRETARIAT DAERAH SEKRETARIAT DAERAH
Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Memantapkan kualitas pelayanan public dan penguatan SDM yang unggul, beriman dan bertaqwa melalui peningkatan kapasitas aparatur, sosial masyarakat, pendidikan dan kesehatan	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah  Fasilitasi Bantuan Hukum Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	SEKRETARIAT DAERAH  SEKRETARIAT DAERAH SEKRETARIAT DAERAH

PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS KABUPATEN	PROGRAM PRIORITAS			PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
		PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
			Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	SEKRETARIAT DAERAH SEKRETARIAT DAERAH SEKRETARIAT DAERAH
			Administrasi Tata Pemerintahan	Penataan Administrasi Pemerintahan Pengelolaan Administrasi Kewilayahan Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	SEKRETARIAT DAERAH SEKRETARIAT DAERAH SEKRETARIAT DAERAH
			Fasilitasi Kerja Sama Daerah	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	SEKRETARIAT DAERAH
Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Memantapkan kualitas pelayanan public dan penguatan SDM yang unggul, beriman dan bertaqwa melalui peningkatan kapasitas aparatur, sosial masyarakat, pendidikan dan kesehatan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Penataan Organisasi	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	SEKRETARIAT DAERAH SEKRETARIAT DAERAH SEKRETARIAT DAERAH SEKRETARIAT DAERAH
			Pelaksanaan Protokol dan	Fasilitasi Keprotokolan	SEKRETARIAT DAERAH

PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS KABUPATEN	PROGRAM PRIORITAS			PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
		PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
			Komunikasi Pimpinan	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	SEKRETARIAT DAERAH SEKRETARIAT DAERAH
			Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	SEKRETARIAT DAERAH SEKRETARIAT DAERAH SEKRETARIAT DAERAH SEKRETARIAT DAERAH
			Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	SEKRETARIAT DAERAH SEKRETARIAT DAERAH SEKRETARIAT DAERAH
			Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
			Layanan Administrasi DPRD	Fasilitasi Fraksi DPRD Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS KABUPATEN	PROGRAM PRIORITAS			PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
		PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
				Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Memantapkan kualitas pelayanan public dan penguatan SDM yang unggul, beriman dan bertaqwa melalui peningkatan kapasitas aparatur, sosial masyarakat, pendidikan dan kesehatan	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
				Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
			Pembahasan Kebijakan Anggaran	Pembahasan KUA dan PPAS	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
				Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
				Pembahasan APBD	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Pembahasan APBD Perubahan	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah			
	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah			
			Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	
			Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	

PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS KABUPATEN	PROGRAM PRIORITAS			PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
		PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
				Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Daerah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
			Peningkatan Kapasitas DPRD	Pendalaman Tugas DPRD Publikasi dan Dokumentasi Dewan Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi Penyusunan Program Kerja DPRD	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
			Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Kunjungan Kerja dalam Daerah Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD Pelaksanaan Reses	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
			Fasilitasi Tugas DPRD	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Memantapkan kualitas pelayanan public dan penguatan SDM yang unggul, beriman dan bertaqwa melalui peningkatan kapasitas aparatur, sosial masyarakat, pendidikan dan kesehatan	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah
				Pelaksanaan Konsultasi Publik	Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah

PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS KABUPATEN	PROGRAM PRIORITAS			PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
		PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
				Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah
			Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah
			Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah
			Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Pengelolaan Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah
Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Memantapkan kualitas pelayanan public dan penguatan SDM yang unggul, beriman dan bertaqwa melalui peningkatan kapasitas aparatur, sosial masyarakat, pendidikan dan kesehatan	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah

PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS KABUPATEN	PROGRAM PRIORITAS			PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
		PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
				<p>Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan</p> <p>Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan</p> <p>Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan</p> <p>Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)</p> <p>Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia</p> <p>Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia</p> <p>Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia</p>	<p>Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah</p>
			Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	<p>Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)</p> <p>Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian</p>	<p>Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah</p> <p>Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah</p>

PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS KABUPATEN	PROGRAM PRIORITAS			PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
		PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
				<p>Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian</p> <p>Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian</p> <p>Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)</p> <p>Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA</p> <p>Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA</p> <p>Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA</p>	<p>Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah</p>
			Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	<p>Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)</p> <p>Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur</p> <p>Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur</p>	<p>Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah</p> <p>Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah</p> <p>Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah</p>
				Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah

PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS KABUPATEN	PROGRAM PRIORITAS			PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
		PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
				Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah  Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah  Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah  Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah
Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Memantapkan kualitas pelayanan public dan penguatan SDM yang unggul, beriman dan bertaqwa melalui peningkatan kapasitas aparatur, sosial masyarakat, pendidikan dan kesehatan	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan	Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah  Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah  Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah
			Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah
Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Memantapkan kualitas pelayanan public dan penguatan SDM yang unggul, beriman dan bertaqwa melalui peningkatan kapasitas aparatur, sosial masyarakat,	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Badan Pengelola Keuangan dan Aset

PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS KABUPATEN	PROGRAM PRIORITAS			PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
		PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
	pendidikan dan kesehatan			Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Daerah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
			Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD Penatausahaan Pembiayaan Daerah	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
				Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS KABUPATEN	PROGRAM PRIORITAS			PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
		PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
				Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah  Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah  Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
			Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah  Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah  Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
				Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS KABUPATEN	PROGRAM PRIORITAS			PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
		PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
			Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Memantapkan kualitas pelayanan public dan penguatan SDM yang unggul, beriman dan bertaqwa melalui peningkatan kapasitas aparatur, sosial masyarakat, pendidikan dan kesehatan	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Penyusunan Standar Harga Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah Penatausahaan Barang Milik Daerah Inventarisasi Barang Milik Daerah Penilaian Barang Milik Daerah Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Memantapkan kualitas pelayanan public dan penguatan SDM yang unggul, beriman dan bertaqwa melalui peningkatan kapasitas aparatur, sosial masyarakat,	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Badan Pengelola Pendapatan Daerah
				Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Badan Pengelola Pendapatan Daerah

PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS KABUPATEN	PROGRAM PRIORITAS			PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
		PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
	pendidikan dan kesehatan			Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)  Penetapan Wajib Pajak Daerah Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah Penagihan Pajak Daerah Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Badan Pengelola Pendapatan Daerah Badan Pengelola Pendapatan Daerah Badan Pengelola Pendapatan Daerah Badan Pengelola Pendapatan Daerah  Badan Pengelola Pendapatan Daerah  Badan Pengelola Pendapatan Daerah Badan Pengelola Pendapatan Daerah
Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Memantapkan kualitas pelayanan public dan penguatan SDM yang unggul, beriman dan bertaqwa melalui peningkatan kapasitas aparatur, sosial masyarakat, pendidikan dan kesehatan	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN  Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia  Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS KABUPATEN	PROGRAM PRIORITAS			PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
		PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
				Perumusan Bahan Kebijakan Pemberhentian ASN Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
			Mutasi dan Promosi ASN	Pengelolaan Mutasi ASN Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
			Pengembangan Kompetensi ASN	Pengelolaan Assessment Center Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
			Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
				Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai	Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS KABUPATEN	PROGRAM PRIORITAS			PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
		PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
				Pembinaan Disiplin ASN  Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Memantapkan kualitas pelayanan public dan penguatan SDM yang unggul, beriman dan bertaqwa melalui peningkatan kapasitas aparatur, sosial masyarakat, pendidikan dan kesehatan	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Memantapkan kualitas pelayanan public dan penguatan SDM yang unggul, beriman dan bertaqwa melalui peningkatan kapasitas aparatur, sosial masyarakat, pendidikan dan kesehatan	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah Reviu Laporan Kinerja Reviu Laporan Keuangan Pengawasan Desa Kerja Sama Pengawasan Internal Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Inspektorat Daerah Inspektorat Daerah Inspektorat Daerah Inspektorat Daerah Inspektorat Daerah Inspektorat Daerah
			Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Inspektorat Daerah Inspektorat Daerah
Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Memantapkan kualitas pelayanan public dan penguatan SDM yang unggul, beriman dan bertaqwa melalui peningkatan kapasitas	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Inspektorat Daerah Inspektorat Daerah

PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS KABUPATEN	PROGRAM PRIORITAS			PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
		PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
	aparatur, sosial masyarakat, pendidikan dan kesehatan		Pendampingan dan Asistensi	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Inspektorat Daerah Inspektorat Daerah Inspektorat Daerah Inspektorat Daerah
Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Memantapkan kualitas pelayanan public dan penguatan SDM yang unggul, beriman dan bertaqwa melalui peningkatan kapasitas aparatur, sosial masyarakat, pendidikan dan kesehatan	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat  Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Bahodopi, Kecamatan Bumi Raya, Kecamatan Bungku Barat, Kecamatan Bungku Pesisir, Kecamatan Bungku Selatan, Kecamatan Menui Kepulauan  Kecamatan Bumi Raya
Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Memantapkan kualitas pelayanan public dan penguatan SDM yang unggul, beriman dan bertaqwa melalui peningkatan kapasitas aparatur, sosial masyarakat, pendidikan dan kesehatan	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan  Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan  Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kecamatan Bungku Tengah, Kecamatan Menui kepulauan  Kecamatan Bungku Tengah, Kecamatan Menui kepulauan Kecamatan Bungku Tengah, Kecamatan Menui kepulauan

PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS KABUPATEN	PROGRAM PRIORITAS			PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
		PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
			Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	<p>Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa</p> <p>Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan</p>	<p>Kecamatan Bahodopi, Kecamatan Bungku Barat, Kecamatan Bungku Pesisir, Kecamatan Bungku Selatan, Kecamatan Bungku Tengah, Kecamatan Bungku Timur, Kecamatan Menui Kepulauan Kecamatan Bahodopi, Kecamatan Bungku Barat, Kecamatan Bungku Pesisir, Kecamatan Bungku Selatan, Kecamatan Bungku Tengah, Kecamatan Menui Kepulauan, Kecamatan Wita Ponda, Kecamatan Bumi Raya</p>
Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Memantapkan kualitas pelayanan public dan penguatan SDM yang unggul, beriman dan bertaqwa melalui peningkatan kapasitas aparatur, sosial masyarakat, pendidikan dan kesehatan	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	<p>Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa</p> <p>Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa</p>	<p>Kecamatan Bahodopi, Kecamatan Bumi Raya, Kecamatan Bungku Barat, Kecamatan Bungku Selatan Kecamatan Bumi Raya, Kecamatan Bungku Barat, Kecamatan Bungku Pesisir, Kecamatan Bungku Timur</p>

PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS KABUPATEN	PROGRAM PRIORITAS			PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
		PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
				<p>Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa</p> <p>Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa</p> <p>Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya</p> <p>Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa</p> <p>Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa</p>	<p>Kecamatan Bumi Raya</p> <p>Kecamatan Bumi Raya, Kecamatan Bungku Barat, Kecamatan Bungku Pesisir, Kecamatan Bungku Selatan, Kecamatan Menui Kepulauan, Kecamatan Wita Ponda</p> <p>Kecamatan Bungku Barat, Kecamatan Bungku Pesisir, Kecamatan Bungku Selatan, Kecamatan Menui Kepulauan, Kecamatan Wita Ponda</p> <p>Kecamatan Bungku Selatan, Kecamatan Menui Kepulauan</p> <p>Kecamatan Menui Kepulauan</p>
Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Memantapkan kualitas pelayanan public dan penguatan SDM yang unggul, beriman dan bertaqwa melalui peningkatan kapasitas aparatur, sosial masyarakat, pendidikan dan kesehatan	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	<p>Kecamatan Bahodopi, Kecamatan Bungku Barat, Kecamatan Bungku Selatan, Kecamatan Bungku Tengah, Kecamatan Menui Kepulauan</p>

PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS KABUPATEN	PROGRAM PRIORITAS			PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
		PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
			Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kecamatan Bahodopi, Kecamatan Bungku Timur
			Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kecamatan Bahodopi, Kecamatan Bumi Raya, Kecamatan Bungku Barat, Kecamatan Bungku Pesisir, Kecamatan Bungku Tengah, Kecamatan Wita Ponda
Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Memantapkan kualitas pelayanan public dan penguatan SDM yang unggul, beriman dan bertaqwa melalui peningkatan kapasitas aparatur, sosial masyarakat, pendidikan dan kesehatan	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional  Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Kecamatan Bahodopi, Kecamatan Bumi Raya, Kecamatan Bungku Barat, Kecamatan Bungku Pesisir, Kecamatan Bungku Timur, Kecamatan Menui Kepulauan Kecamatan Bungku Timur  Kecamatan Menui Kepulauan
Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Memantapkan kualitas pelayanan public dan penguatan SDM yang unggul, beriman dan bertaqwa melalui peningkatan kapasitas aparatur, sosial masyarakat,	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah

PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS KABUPATEN	PROGRAM PRIORITAS			PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
		PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
	pendidikan dan kesehatan			Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah  Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah
Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Memantapkan kualitas pelayanan public dan penguatan SDM yang unggul, beriman dan bertaqwa melalui peningkatan kapasitas aparatur, sosial masyarakat, pendidikan dan kesehatan	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah  Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah
Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Memantapkan kualitas pelayanan public dan penguatan SDM yang unggul, beriman dan bertaqwa melalui peningkatan kapasitas aparatur, sosial masyarakat,	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi	Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah

PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS KABUPATEN	PROGRAM PRIORITAS			PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
		PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
	pendidikan dan kesehatan		Kemasyarakatan	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah
Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Memantapkan kualitas pelayanan public dan penguatan SDM yang unggul, beriman dan bertakwa melalui peningkatan kapasitas aparatur, sosial masyarakat, pendidikan dan kesehatan	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah  Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah  Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah
Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Memantapkan kualitas pelayanan public dan penguatan SDM yang unggul, beriman dan bertakwa melalui peningkatan kapasitas aparatur, sosial masyarakat, pendidikan dan kesehatan	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah

PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS KABUPATEN	PROGRAM PRIORITAS			PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
		PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
				<p>Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah</p> <p>Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota</p>	<p>Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah</p> <p>Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah</p>



## BAB V

### RANCANGAN RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

#### 5.1. Rencana Program Prioritas

Rencana program prioritas daerah Kabupaten Morowali tahun 2023 disusun berdasarkan evaluasi pembangunan tahun 2022, perkiraan kedudukan tahun 2021 dan capaian kinerja yang telah direncanakan dalam RPJMD Kabupaten Morowali tahun 2018-2023. Rencana program dan kegiatan prioritas tahun 2023 ini diharapkan telah mewakili aspirasi dan kepentingan masyarakat Kabupaten Morowali dan sesuai dengan prioritas yang ditetapkan oleh pemerintah pusat dan pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah. Rincian rencana program dan kegiatan prioritas daerah Kabupaten Morowali tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 5.1**  
**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**  
**Kabupaten Morowali Tahun 2023**

		Kode		Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kinerja dan Kerangka Pendanaan 2023		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target	Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif			
1				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
1	1			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						180,770,452,770	261,743,754,073	
1	1	1		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase urusan penunjang pemerintahan yang dilaksanakan	100 %	119,349,465,330	100 %	122,663,400,000			
			Persentase Urusan Penunjang Pemerintahan yang dilaksanakan		100 %	100 %						
1	1	1	2.0 1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Peresentasi akuntabilitas kinerja Dinas Pendidikan Daerah	100 %	0	100 %	0			
1	1	1	2.0 1	3 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKASKPD	1 Dokumen	0	1 Dokumen	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.		
1	1	1	2.0 2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Dinas Pendidikan Daerah	100 %	117,853,584,355	100 %	121,000,000,000			
1	1	1	2.0 2	1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	3000 Orang/bula n	116,774,184,355	3000 Orang/bula n	120,000,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.		
1	1	1	2.0 2	2 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	50 Dokumen	1,079,400,000	50 Dokumen	1,000,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.		

1	1	1	2.0 5		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian yang Tertib	100 %	117,000,000	100 %	200,000,000	
1	1	1	2.0 5	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	0 Orang	117,000,000	0 Orang	200,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

						Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10 Orang		10 Orang		
1	1	1	2.0 6		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan administrasi Umum	100 %	1,143,473,645	100 %	1,208,000,000	
1	1	1	2.0 6	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	194,741,645	1 Paket	203,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
1	1	1	2.0 6	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	49,732,000	3 Paket	55,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
1	1	1	2.0 6	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan	899,000,000	2 Laporan	950,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
1	1	1	2.0 7		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan Ketersediaan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	4,111,250	100 %	5,000,000	
1	1	1	2.0 7	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	4,111,250	1 Unit	5,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
1	1	1	2.0 8		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	67,546,080	100 %	75,900,000	
1	1	1	2.0 8	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terbayarnya listrik bulanan	12 Bulan	66,646,080	12 Bulan	75,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

1	1	1	2.0 8	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Bulan	900	12 Bulan	900	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
1	1	1	2.0 9		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	163,750,000	100 %	174,500,000	
1	1	1	2.0 9	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	3 Unit	69,050,000	3 Unit	70,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

1	1	1	2.0 9	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	75 Unit	18,900,000	75 Unit	20,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
1	1	1	2.0 9	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	75,800,000	1 Unit	84,500,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
1	1	2			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Tingkat parsitipasi warga negara usia 13 - 15 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan menengah pertama	98 %	57,958,647,760	98 %	134,430,354,073	
				Tingkat parsitipasi warga negara usia 5 - 6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD		100 %	100 %				
				Tingkat parsitipasi warga negara usia 7 - 12 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan dasar		98 %	98 %				
1	1	2	2.0 1		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Angka Kelulusan SD/MI	100 %	17,817,618,056	100 %	60,915,354,073	
				Angka melanjutkan ke jenjang SD/MI		100 %	100 %				
				Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI		100 %	100 %				

						Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI	100 %		100 %		
						Angka Partisipasi Sekolah SD/MI	100 %		100 %		
						Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI	100 %		100 %		
1	1	2	2.0 1	1	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun	20 Unit	0	20 Unit	18,000,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
1	1	2	2.0 1	2	Penambahan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	1 Ruang	547,722,432	1 Ruang	1,400,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
1	1	2	2.0 1	3	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	1 Ruang	412,339,294	1 Ruang	500,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
1	1	2	2.0 1	5	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	1 Ruang	237,566,016	1 Ruang	500,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
1	1	2	2.0 1	6	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	1 Unit	198,000,000	1 Unit	350,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
1	1	2	2.0 1	7	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun	9 Unit	1,666,666,400	9 Unit	2,000,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
1	1	2	2.0 1	8	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	Jumlah Ruang Kelas yang Direhabilitasi Sedang/Berat	7 Ruang	1,903,335,264	7 Ruang	7,874,354,073	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
1	1	2	2.0 1	9	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Kelas yang Direhabilitasi Sedang/Berat	10 Ruang	0	10 Ruang	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

1	1	2	2.0 1	1 3	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah DiRehabilitasi Sedang/Berat	12 Unit	0	12 Unit	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
1	1	2	2.0 1	1 4	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah DiRehabilitasi Sedang/Berat	12 Unit	0	12 Unit	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
1	1	2	2.0 1	1 6	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	23 Paket	378,235,000	23 Paket	450,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
1	1	2	2.0 1	1 7	Pengadaan Perlengkapan Siswa	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	2000 Unit	0	2000 Unit	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
1	1	2	2.0 1	2 3	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	184 Satuan Pendidikan	234,874,580	184 Satuan Pendidikan	300,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
1	1	2	2.0 1	2 4	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Dasar	Jumlah Satuan Pendidikan Dasar yang Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi	144 Satuan Pendidikan	0	144 Satuan Pendidikan	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
1	1	2	2.0 1	2 5	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	250 Peserta Didik	340,901,310	250 Peserta Didik	400,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
1	1	2	2.0 1	2 6	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	386 Orang	11,430,720,000	386 Orang	12,546,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
1	1	2	2.0 1	2 7	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	184 Orang	0	184 Orang	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

1	1	2	2.0 1	2 8	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	144 Satuan Pendidikan	264,540,180	144 Satuan Pendidikan	350,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
1	1	2	2.0 1	2 9	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	140 Satuan Pendidikan	0	140 Satuan Pendidikan	16,000,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
1	1	2	2.0 1	3 0	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	140 Orang	202,717,580	140 Orang	245,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
1	1	2	2.0 2		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Angka Kelulusan SMP/MTs	100 %	34,904,558,588	100 %	57,050,000,000	
					Angka melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi	100 %	100 %				
					Angka Partisipasi Sekolah SMP/MTs	100 %	100 %				
					Angka Putus Sekolah SMP/MTs	100 %	100 %				
					APK SMP/MTs	100 %	100 %				
					APM SMP/MTs	100 %	100 %				
1	1	2	2.0 2	1	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun	10 Unit	0	10 Unit	7,000,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
1	1	2	2.0 2	2	Penambahan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	10 Ruang	0	10 Ruang	250,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
1	1	2	2.0 2	3	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	10 Ruang	0	10 Ruang	1,000,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
1	1	2	2.0 2	5	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	8 Ruang	0	8 Ruang	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

1	1	2	2.0 2	9	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun	5 Unit	666,666,560	5 Unit	750,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
1	1	2	2.0 2	1 2	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	10 Unit	0	10 Unit	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
1	1	2	2.0 2	1 4	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1 Ruang	162,831,888	1 Ruang	2,000,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
1	1	2	2.0 2	1 7	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	10 Ruang	0	10 Ruang	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
1	1	2	2.0 2	2 5	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	300 Paket	0	300 Paket	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
1	1	2	2.0 2	2 8	Pengadaan Perlengkapan Siswa	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	1 Paket	19,174,838,400	1 Paket	20,000,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
1	1	2	2.0 2	3 4	Perlengkapan Belajar Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	5 Paket	2,491,188,700	5 Paket	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
1	1	2	2.0 2	3 6	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar dan Ujian	1000 Peserta Didik	313,240,350	1000 Peserta Didik	350,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
1	1	2	2.0 2	3 8	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	150 Peserta Didik	394,577,590	150 Peserta Didik	450,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
1	1	2	2.0 2	3 9	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	350 Orang	11,485,085,440	350 Orang	12,000,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

1	1	2	2.0 2	4 2	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	45 Satuan Pendidikan	0	45 Satuan Pendidikan	13,000,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
1	1	2	2.0 2	4 3	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	100 Orang	216,129,660	100 Orang	250,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
1	1	2	2.0 3	1	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Angka Kelulusan PAUD	100 %	5,003,702,686	100 %	10,715,000,000	
						Angka melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi	100 %		100 %		
						Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD	100 %		100 %		
						Angka Partisipasi Murni (APM) PAUD	100 %		100 %		
						Angka Partisipasi Sekolah PAUD	100 %		100 %		
						Angka Putus Sekolah PAUD	100 %		100 %		
1	1	2	2.0 3	1	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang Telah Dibangun	1 Unit	201,039,616	1 Unit	250,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
1	1	2	2.0 3	1 1	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	1889 Peserta Didik	1,820,000,000	1889 Peserta Didik	1,850,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
1	1	2	2.0 3	1 4	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan PAUD	Jumlah PAUD yang Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi	70 Satuan Pendidikan	163,592,770	70 Satuan Pendidikan	170,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
1	1	2	2.0 3	1 5	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD	176 Orang	2,393,040,000	176 Orang	3,000,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

1	1	2	2.0 3	1 6	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	176 Orang	143,043,070	176 Orang	150,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
1	1	2	2.0 3	1 7	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	176 Satuan Pendidikan	122,217,650	176 Satuan Pendidikan	125,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
1	1	2	2.0 3	1 8	Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP	176 Satuan Pendidikan	0	176 Satuan Pendidikan	5,000,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
1	1	2	2.0 3	1 9	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP PAUD	1750 Orang	160,769,580	1750 Orang	170,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
1	1	2	2.0 4		Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Persentase lembaga Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	100 %	232,768,430	100 %	5,750,000,000	
1	1	2	2.0 4	1 0	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	100 Peserta Didik	0	100 Peserta Didik	5,500,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
1	1	2	2.0 4	1 2	Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar	100 Peserta Didik	232,768,430	100 Peserta Didik	250,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
1	1	2	2.0 4	1 4	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	28 Orang	0	28 Orang	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
1	1	2	2.0 4	1 7	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP	10 Satuan Pendidikan	0	10 Satuan Pendidikan	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
1	1	3			PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Persentase sekolah yang menerapkan Mulok TK/RA. SD/MI dan SMP/MTs	98 %	116,419,710	98 %	150,000,000	

1	1	3	2.0 1		Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Persentasi sekolah yang menetapkan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	100 %	0	100 %	0	
1	1	3	2.0 1	1	Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersusun	1 Dokumen	0	1 Dokumen	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
1	1	3	2.0 1	4	Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah Penyusun Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Meningkatkan Kompetensinya	1 Orang	0	1 Orang	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
1	1	3	2.0 2		Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Persentasi lembaga yang menetapkan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan	0 %	116,419,710	0 %	150,000,000	
1	1	3	2.0 2	1	Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Jumlah Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang Tersusun	2 Dokumen	116,419,710	2 Dokumen	150,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
1	1	4			PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Persentase sekolah yang menerapkan Mulok TK/RA. SD/MI dan SMP/MTs	98 %	3,345,919,970	98 %	4,500,000,000	
1	1	4	2.0 1		Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	100 %	3,345,919,970	100 %	4,500,000,000	
				Rasio Guru/Murid Sekolah SD/MI		100 %	100 %				
				Rasio Guru/Murid Sekolah SMP/MTs		100 %	100 %				
				Rasio Guru/Murid Sekolah TK/RA		100 %	100 %				
1	1	4	2.0 1	2	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	5 Laporan	3,345,919,970	5 Laporan	4,500,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						
2	2 2				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN			1,948,797,840		2,060,000,000	

2	2	2			PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Persentase Kebudayaan Daerah yang di Kembangkan	100 %	1,055,080,250	100 %	1,060,000,000	
2	2	2	2.0		Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase budaya yang dilestarikan	100 %	0	100 %	0	
2	2	2	2.0	1	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan	5 Objek	0	5 Objek	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
2	2	2	2.0	2	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	30 Orang	0	30 Orang	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

2	2	2	2.0		Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kesenian tradisional yang dilestarikan	100 %	1,055,080,250	100 %	1,060,000,000	
2	2	2	2.0	1	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan	10 Objek	696,424,000	10 Objek	700,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
2	2	2	2.0	2	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	Jumlah Laporan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	10 Laporan	358,656,250	10 Laporan	360,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
2	2	2	2.0		Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga adat	10 Lembaga	0	10 Lembaga	0	
2	2	2	2.0	1	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Lembaga Adat	Jumlah Objek Pemajuan Lembaga Adat yang Telah Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan	5 Objek	0	5 Objek	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

2	2	2	2.0	2	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat	Jumlah Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat yang Dibina	30 Orang	0	30 Orang	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
2	2	5			PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Persentase Cagar Budaya yang dikestarikan	100 %	893,717,590	100 %	1,000,000,000	
2	2	5	2.0		Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Jumlah cagar budaya yang dikelola	0 Objek	893,717,590	0 Objek	1,000,000,000	
2	2	5	2.0	2	Penetapan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan	1 Objek	893,717,590	1 Objek	1,000,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						
1	2				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			92,490,544,486		90,873,720,920	
1	2	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Jumlah Kegiatan	100 %	90,890,544,705	100 %	89,497,720,920	
1	2	1	2.0		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Peningkatan Kesejahteraan Pegawai	100 %	45,890,544,705	100 %	39,497,720,920	
1	2	1	2.0	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	0 Orang/bulan	20,720,861,505	0 Orang/bulan	11,812,000,000	Rumah Sakit Umum Daerah Morowali
						Persentase ASN yang menerima Gaji dan Tunjangan	100 %		100 %		
1	2	1	2.0	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	25,169,683,200	1 Dokumen	27,685,720,920	Rumah Sakit Umum Daerah Morowali
1	2	1	2.1		Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase Peningkatan Pelayanan BLUD	100 %	45,000,000,000	100 %	50,000,000,000	
1	2	1	2.1	1	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	45,000,000,000	1 Unit Kerja	50,000,000,000	Rumah Sakit Umum Daerah Morowali
1	2	2			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Pelayanan Kesehatan	100 %	1,599,999,781	100 %	1,376,000,000	

1	2	2	2.0 1		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Mutu Layanan	1 Tahun	1,599,999,781	1 Tahun	1,376,000,000	
1	2	2	2.0 1	1 3	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Prasarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	1 Paket	1,599,999,781	1 Paket	1,376,000,000	Rumah Sakit Umum Daerah Morowali
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						
1	2				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			11,305,883,099		13,180,558,507	
1	2	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Administrasi Perkantoran	100 %	8,987,866,735	100 %	10,490,558,507	
1	2	1	2.0 1		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang dilaksanakan	100 %	24,240,000	100 %	30,000,000	
1	2	1	2.0 1	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKASKPD	2 Dokumen	12,120,000	2 Dokumen	15,000,000	Rumah Sakit Pratama
1	2	1	2.0 1	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPASKPD	2 Dokumen	12,120,000	2 Dokumen	15,000,000	Rumah Sakit Pratama
1	2	1	2.0 2		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Keuangan yang tersusun dan kegiatan yang terlaksana	100 %	6,621,027,985	100 %	8,125,629,977	
1	2	1	2.0 2	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	0 Orang/bulan	1,309,227,985	0 Orang/bulan	625,629,977	Rumah Sakit Pratama
						Persentase Ketersediaan Gaji dan Tunjangan ASN	100 %		100 %		
1	2	1	2.0 2	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	5,311,800,000	1 Dokumen	7,500,000,000	Rumah Sakit Pratama
						Jumlah Pegawai Non ASN yang dibayarkan gajinya	138 orang		138 orang		

1	2	1	2.0 6		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase kegiatan Rutin yang terlaksana	100 %	2,143,550,750	100 %	2,031,928,530	
1	2	1	2.0 6	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	0 Paket	1,864,764,150	0 Paket	1,769,075,930	Rumah Sakit Pratama
						Persentase Ketersediaan Bahan Logistik Kantor yang dibutuhkan	100 %		100 %		
1	2	1	2.0 6	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	0 Paket	156,758,600	0 Paket	156,758,600	Rumah Sakit Pratama
						Persentase Ketersediaan Barang Cetak dan Penggandaan yang dibutuhkan	100 %		100 %		
1	2	1	2.0 6	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	100 %	122,028,000	100 %	106,094,000	Rumah Sakit Pratama
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	0 Laporan		0 Laporan		
1	2	1	2.0 8		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	100 %	32,940,000	100 %	135,000,000	
1	2	1	2.0 8	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	0 %	0	0 %	5,000,000	Rumah Sakit Pratama
1	2	1	2.0 8	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Presentase Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	100 %	32,940,000	100 %	40,000,000	Rumah Sakit Pratama
1	2	1	2.0 8	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	0 Laporan	0	0 Laporan	90,000,000	Rumah Sakit Pratama
1	2	1	2.0 9		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	166,108,000	100 %	168,000,000	

1	2	1	2.0 9	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	0 Unit	124,400,000	0 Unit	125,000,000	Rumah Sakit Pratama
					Persentase Ketersediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	100 %	100 %				
1	2	1	2.0 9	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	0 Unit	24,470,000	0 Unit	25,000,000	Rumah Sakit Pratama
					Persentase Ketersediaan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	100 %	100 %				
1	2	1	2.0 9	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0 Unit	17,238,000	0 Unit	18,000,000	Rumah Sakit Pratama
					Persentase pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	100 %	100 %				
1	2	2			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Angka Kematian Ibu (AKI)	0 %	2,080,256,364	0 %	2,440,000,000	
1	2	2	2.0 1		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP yang tersedia	1 Paket	2,080,256,364	1 Paket	2,440,000,000	
1	2	2	2.0 1	1 6	Pengadaan Obat, Vaksin	Jumlah Obat dan Vaksin yang Disediakan	1 Paket	850,000,000	1 Paket	900,000,000	Rumah Sakit Pratama
1	2	2	2.0 1	1 7	Pengadaan Bahan Habis Pakai	Jumlah Bahan Habis Pakai yang Disediakan	1 Paket	1,200,000,000	1 Paket	1,500,000,000	Rumah Sakit Pratama
1	2	2	2.0 1	2 0	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Persentase Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	100 %	30,256,364	100 %	40,000,000	Rumah Sakit Pratama

1	2	3			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Rasio Tenaga Kesehatan terhadap jumlah penduduk	90 %	237,760,000	90 %	250,000,000		
1	2	3	2.0 3		Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	50 Orang	237,760,000	50 Orang	250,000,000		
1	2	3	2.0 3	1	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	50 Orang	237,760,000	50 Orang	250,000,000	Rumah Sakit Pratama	
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							
1	2				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			77,229,983,949			66,510,626,319	
1	2	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase urusan penunjang pemerintahan yang dilaksanakan	100 %	56,388,201,679	100 %	39,575,626,319		
1	2	1	2.0 1		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan yang tersusun	20 Dokumen	6,307,000	20 Dokumen	100,000,000		
1	2	1	2.0 1	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12 Laporan	6,307,000	12 Laporan	100,000,000	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
1	2	1	2.0 2		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Presentase Dokumen Keuangan yang tersusun dan kegiatan yang terlaksana	100 %	55,745,236,689	100 %	38,729,626,319		
1	2	1	2.0 2	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1 Orang/bulan	36,137,716,689	1 Orang/bulan	21,900,266,319	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	

1	2	1	2.0 2	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	19,607,520,000	12 Dokumen	16,829,360,000	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	2	1	2.0 6		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase kegiatan Rutinyang terlaksana	100 %	386,020,750	100 %	465,000,000	
1	2	1	2.0 6	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	50,925,210	12 Paket	90,000,000	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	2	1	2.0 6	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	5,108,340	12 Paket	25,000,000	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	2	1	2.0 6	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	30,000,200	12 Paket	0	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	2	1	2.0 6	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	299,987,000	12 Laporan	350,000,000	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	2	1	2.0 7		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	76,842,240	100 %	50,000,000	
1	2	1	2.0 7	7	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	12 Unit	76,842,240	12 Unit	50,000,000	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

1	2	1	2.0 8		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	100 %	123,795,000	100 %	156,000,000	
1	2	1	2.0 8	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	4,995,000	12 Laporan	6,000,000	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	2	1	2.0 8	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	118,800,000	12 Laporan	150,000,000	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	2	1	2.0 9		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	50,000,000	100 %	75,000,000	
1	2	1	2.0 9	7	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	12 Unit	50,000,000	12 Unit	75,000,000	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	2	2			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Angka Kematian Balita (AKB)	0.0 %	20,518,857,320	0.0 %	26,535,000,000	
				Angka Kematian Ibu (AKI)		0.00 %	0.00 %				
				Angka Kesakitan		0.00 %	0.00 %				
1	2	2	2.0 1		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang memberikan pelayanan sesuai standar	70 %	4,558,903,750	70 %	5,100,000,000	
1	2	2	2.0 1	1 6	Pengadaan Obat, Vaksin	Jumlah Obat dan Vaksin yang Disediakan	0 Paket	1,500,000,000	0 Paket	3,000,000,000	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

1	2	2	2.0 1	1 7	Pengadaan Bahan Habis Pakai	Jumlah Bahan Habis Pakai yang Disediakan	1 Paket	3,000,000,000	1 Paket	2,000,000,000	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	2	2	2.0 1	2 1	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Makanan dan Minuman ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Makanan dan Minuman yang Didistribusikan ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	12 Paket	58,903,750	12 Paket	100,000,000	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	2	2	2.0 2		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	65 %	15,887,565,420	65 %	21,385,000,000	
1	2	2	2.0 2	1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	12 Orang	158,646,000	12 Orang	200,000,000	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	2	2	2.0 2	6	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	12 Orang	132,962,350	12 Orang	100,000,000	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	2	2	2.0 2	7	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	12 Orang	11,252,750	12 Orang	100,000,000	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	2	2	2.0 2	8	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	12 Orang	10,038,000	12 Orang	100,000,000	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

1	2	2	2.0 2	9	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	12 Orang	30,268,000	12 Orang	100,000,000	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	2	2	2.0 2	1 0	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	12 Orang	15,352,000	12 Orang	100,000,000	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	2	2	2.0 2	1 1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	12 Orang	38,463,000	12 Orang	100,000,000	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	2	2	2.0 2	1 2	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	12 Orang	23,606,500	12 Orang	100,000,000	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	2	2	2.0 2	1 4	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar	12 Dokumen	61,630,000	12 Dokumen	100,000,000	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	2	2	2.0 2	1 5	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	105,913,720	12 Dokumen	150,000,000	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	2	2	2.0 2	1 6	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	12 Dokumen	16,990,000	12 Dokumen	35,000,000	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

1	2	2	2.0 2	1 7	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	57,757,100	12 Dokumen	100,000,000	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	2	2	2.0 2	2 0	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	15,500,000	12 Dokumen	100,000,000	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	2	2	2.0 2	2 5	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	87,908,250	12 Dokumen	100,000,000	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	2	2	2.0 2	2 6	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	1 Dokumen	14,991,480,000	1 Dokumen	19,600,000,000	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	2	2	2.0 2	2 8	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan	12 Paket	47,669,000	12 Paket	100,000,000	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	2	2	2.0 2	3 5	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota	12 Unit	58,278,750	12 Unit	100,000,000	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	2	2	2.0 2	3 6	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	12 Laporan	23,850,000	12 Laporan	100,000,000	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

1	2	2	2.0 3		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Persentase Ketersediaan Data dan terintegrasi	100 %	72,388,150	100 %	50,000,000	
1	2	2	2.0 3	1	Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	15 Dokumen	72,388,150	15 Dokumen	50,000,000	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	2	3			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Rasio Tenaga Kesehatan terhadap Jumlah Penduduk	50 %	38,950,000	50 %	50,000,000	
1	2	3	2.0 2		Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Cakupan Tenaga Kesehatan di Fasyankes	100 %	38,950,000	100 %	50,000,000	
						Pembinaan dan pengawasan sumber daya manusia kesehatan	100 %		100 %		
1	2	3	2.0 2	1	Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	12 Dokumen	12,150,000	12 Dokumen	50,000,000	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	2	3	2.0 2	3	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	12 Dokumen	26,800,000	12 Dokumen	0	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	2	4			PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Presentase Sarana Apotek. Toko Obat. Toko Alkes. Optikal. UMOT. IRTP dan TTU Mamin yang memenuhi Standar	90 %	148,535,000	90 %	200,000,000	
1	2	4	2.0 1		Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Presentase Apotek, Toko Obat, Toko Alkes, Optikal, UMOT, IRTP dan TTU Mamin yang memenuhi Standar	100 %	123,285,000	100 %	150,000,000	

1	2	4	2.0 1	1	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	12 Dokumen	123,285,000	12 Dokumen	150,000,000	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	2	4	2.0 4		Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Pesentase TPM yang di periksa dan memenuhi Syarat	90 %	25,250,000	90 %	50,000,000	
1	2	4	2.0 4	1	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	12 Dokumen	25,250,000	12 Dokumen	50,000,000	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	2	5			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Indeks Keluarga sehat	10 -	135,439,950	10 -	150,000,000	
1	2	5	2.0 1		Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	jumlah kebijakan berwawasan kesehatan	11 Kebijakan	135,439,950	11 Kebijakan	150,000,000	
1	2	5	2.0 1	1	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	12 Dokumen	135,439,950	12 Dokumen	150,000,000	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						
2	1 4				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA			286,732,610		500,000,000	

2	1 4	2			PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Cakupan ketersediaan data bangga kencana	100 %	99,999,190	100 %	150,000,000	
						CBR (Crude Birth Rate)	100 %		100 %		
2	1 4	2	2.0 1		Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Penurunan angka kelahiran total (TFR)	2.1 %	61,722,860	2.1 %	100,000,000	
2	1 4	2	2.0 1	1	Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Terhadap Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (Program KKBPk)	Jumlah Dokumen Hasil Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana )	12 Dokumen	61,722,860	12 Dokumen	100,000,000	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	1 4	2	2.0 2		Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Kepadatan Penduduk	22.5 jiwa/km <sup>2</sup>	38,276,330	22.5 jiwa/km <sup>2</sup>	50,000,000	
2	1 4	2	2.0 2	1 0	Pemanfaatan Data Hasil Pemutakhiran Data Keluarga	Jumlah Data Hasil Pemutakhiran Data Keluarga yang Dimanfaatkan	12 Dokumen	38,276,330	12 Dokumen	50,000,000	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	1 4	3			PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Menurunnya angka kelahiran menurut kelompok umur 15-19 tahun/Age Specific Fertility Ratio (ASFR) 15-19 tahun	0 %	99,999,620	0 %	200,000,000	
						Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	30 %		30 %		
						Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	100 %		100 %		
						TFR (Angka Kelahiran Total)	100 %		100 %		

2	1 4	3	2.0 3		Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Pemenuhan Alat dan Obat Kontrasepsi Serta Pelayanan KB	100 %	99,999,620	100 %	200,000,000		
2	1 4	3	2.0 3	1	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	12 Laporan	99,999,620	12 Laporan	200,000,000	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
2	1 4	4			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Presentase Pendapatan Ekonomi Keluarga melalui Kelompok Usaha Peningkatan pendapatan keluarga sejahtera (UPPKS)	65 %	86,733,800	65 %	150,000,000		
2	1 4	4	2.0 1		Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Presentase Keluarga Yang mempunyai Balita, Remaja, dan Lansia yang sudah membentuk Kelompok	100 %	86,733,800	100 %	150,000,000		
2	1 4	4	2.0 1	1	Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga)	Jumlah Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga) yang Dibentuk	12 Kelompok	86,733,800	12 Kelompok	150,000,000	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							
1	2				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			1,255,621,491			251,124,298	
1	2	2			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN	Angka Kematian Balita (AKB)	0.0 %	1,255,621,491	0.0 %	251,124,298		

				PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Angka Kematian Ibu (AKI)	0.00 %		0.00 %			
					Angka Kesakitan	0.00 %		0.00 %			
1	2	2	2.0 2	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	65 %	1,255,621,491	65 %	251,124,298		
1	2	2	2.0 2	3	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen	1,255,621,491	1 Dokumen	251,124,298	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						
1	2				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			732,841,000		1,200,000,000	
1	2	2		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Angka Kematian Balita (AKB)	0.0 %	732,841,000	0.0 %	1,200,000,000		
					Angka Kematian Ibu (AKI)	0.00 %		0.00 %			
					Angka Kesakitan	0.00 %		0.00 %			
1	2	2	2.0 2	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	65 %	732,841,000	65 %	1,200,000,000		
1	2	2	2.0 2	3	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	732,841,000	12 Dokumen	1,200,000,000	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
					umlah Dokumen Kapitasi Puskesmas	12 Dokumen		12 Dokumen			
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						
1	2				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			825,641,805		1,200,000,000	
1	2	2		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Angka Kematian Balita (AKB)	0.0 %	825,641,805	0.0 %	1,200,000,000		
					Angka Kematian Ibu (AKI)	0.00 %		0.00 %			
					Angka Kesakitan	0.00 %		0.00 %			
1	2	2	2.0 2	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	65 %	825,641,805	65 %	1,200,000,000		
1	2	2	2.0 2	3	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Kapitasi Puskesmas	12 Dokumen	825,641,805	12 Dokumen	1,200,000,000	Dinas Kesehatan, Pengendalian

					Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen		12 Dokumen		Penduduk dan Keluarga Berencana
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					
1	2				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN		1,095,540,200		1,100,000,000	
1	2	2			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Angka Kematian Balita (AKB)	0.0 %	1,095,540,200	0.0 %	1,100,000,000
						Angka Kematian Ibu (AKI)	0.00 %		0.00 %	
						Angka Kesakitan	0.00 %		0.00 %	
1	2	2	2.0 2		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	65 %	1,095,540,200	65 %	1,100,000,000
1	2	2	2.0 2	3 3	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Kapitasi Puskesmas	12 Dokumen	1,095,540,200	12 Dokumen	1,100,000,000
						Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen		12 Dokumen	
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					
1	2				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN		1,120,698,440		1,150,000,000	
1	2	2			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Angka Kematian Balita (AKB)	0.0 %	1,120,698,440	0.0 %	1,150,000,000
						Angka Kematian Ibu (AKI)	0.00 %		0.00 %	
						Angka Kesakitan	0.00 %		0.00 %	
1	2	2	2.0 2		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	65 %	1,120,698,440	65 %	1,150,000,000
1	2	2	2.0 2	3 3	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen	1,120,698,440	1 Dokumen	1,150,000,000
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					
1	2				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN		1,882,832,744		1,950,000,000	
1	2	2			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN	Angka Kematian Balita (AKB)	0.0 %	1,882,832,744	0.0 %	1,950,000,000

				PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Angka Kematian Ibu (AKI)	0.00 %		0.00 %				
					Angka Kesakitan	0.00 %		0.00 %				
1	2	2	2.0 2	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	65 %	1,882,832,744	65 %	1,950,000,000			
1	2	2	2.0 2	3	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	0 Dokumen	1,882,832,744	0 Dokumen	1,950,000,000	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
					Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen			12 Dokumen			
					kapitasi jkn	12 dokumen			12 dokumen			
1				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
1	2			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			1,195,939,706			0		
1	2	2		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Angka Kematian Balita (AKB)	0.0 %	1,195,939,706	0.0 %		0		
					Angka Kematian Ibu (AKI)	0.00 %		0.00 %				
					Angka Kesakitan	0.00 %		0.00 %				
1	2	2	2.0 2	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	65 %	1,195,939,706	65 %		0		
1	2	2	2.0 2	3	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	16 Dokumen	1,195,939,706	16 Dokumen		0	
										Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		
1				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
1	2			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			1,172,026,464			12		
1	2	2		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Angka Kematian Balita (AKB)	0.0 %	1,172,026,464	0.0 %		12		
					Angka Kematian Ibu (AKI)	0.00 %		0.00 %				
					Angka Kesakitan	0.00 %		0.00 %				

1	2	2	2.0 2		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	65 %	1,172,026,464	65 %	12	
1	2	2	2.0 2	3	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	16 Dokumen	1,172,026,464	16 Dokumen	12	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						
1	2				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			1,350,318,594		1,400,000,000	
1	2	2			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN	Angka Kematian Balita (AKB)	0.0 %	1,350,318,594	0.0 %	1,400,000,000	
						Angka Kematian Ibu (AKI)	0.00 %		0.00 %		
					PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Angka Kesakitan	0.00 %		0.00 %		
1	2	2	2.0 2		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	65 %	1,350,318,594	65 %	1,400,000,000	
1	2	2	2.0 2	3	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Kapitasi Puskesmas	12 Dokumen	1,350,318,594	12 Dokumen	1,400,000,000	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
						Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	0 Dokumen		0 Dokumen		
						Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen		12 Dokumen		
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						
1	2				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			397,277,020		1,000,000,000	
1	2	2			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Angka Kematian Balita (AKB)	0.0 %	397,277,020	0.0 %	1,000,000,000	
						Angka Kematian Ibu (AKI)	0.00 %		0.00 %		
						Angka Kesakitan	0.00 %		0.00 %		
1	2	2	2.0 2		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	65 %	397,277,020	65 %	1,000,000,000	

1	2	2	2.0 2	3 3	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	397,277,020	12 Dokumen	1,000,000,000	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						
1	2				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			317,042,200		400,000,000	
1	2	2			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Angka Kematian Balita (AKB)	0.0 %	317,042,200	0.0 %	400,000,000	
						Angka Kematian Ibu (AKI)	0.00 %		0.00 %		
						Angka Kesakitan	0.00 %		0.00 %		
1	2	2	2.0 2		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	65 %	317,042,200	65 %	400,000,000	
1	2	2	2.0 2	3 3	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	317,042,200	12 Dokumen	400,000,000	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						
1	3				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG			63,694,022,709		54,968,694,125	
1	3	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase urusan penunjang pemerintah yang dilaksanakan	100 %	9,978,243,160	100 %	10,495,000,000	
1	3	1	2.0 2		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Gaji ASN dan Tunjangan yang di bayarkan	100 %	8,353,061,455	100 %	9,000,000,000	
1	3	1	2.0 2	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1 Tahun	6,047,341,455	1 Tahun	6,000,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	3	1	2.0 2	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Tahun	2,305,720,000	1 Tahun	3,000,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

1	3	1	2.0 3		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan barang milik daerah	100 %	123,133,400	100 %	140,000,000	
1	3	1	2.0 3	3	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	37 Kegiatan	40,503,400	37 Kegiatan	50,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	3	1	2.0 3	6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	5 Unit	82,630,000	5 Unit	90,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	3	1	2.0 5		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan administrasi kepegawaian daerah	100 %	87,672,000	100 %	75,000,000	
1	3	1	2.0 5	1 1	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	7 Kegiatan	87,672,000	7 Kegiatan	75,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	3	1	2.0 6		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	959,678,305	100 %	890,000,000	

1	3	1	2.0 6	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	7 Komponen	9,994,760	7 Komponen	15,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	3	1	2.0 6	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	23 Unit	251,008,980	23 Unit	150,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	3	1	2.0 6	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	81 buah	188,865,515	81 buah	90,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	0 Paket		0 Paket		

1	3	1	2.0 6	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	0 Paket	142,182,400	0 Paket	85,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
						Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	179048 Lembar		179048 Lembar		
1	3	1	2.0 6	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	57 Kegiatan	367,626,650	57 Kegiatan	550,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	3	1	2.0 8		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	96,340,000	100 %	130,000,000	
1	3	1	2.0 8	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	833 Lembar	0	833 Lembar	15,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	3	1	2.0 8	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	40000 Kwh	43,080,000	40000 Kwh	50,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	3	1	2.0 8	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	37 Unit	24,040,000	37 Unit	30,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	3	1	2.0 8	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	0 Laporan	29,220,000	0 Laporan	35,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
						Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Tahun		1 Tahun		
1	3	1	2.0 9		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah	100 %	358,358,000	100 %	260,000,000	

1	3	1	2.0 9	3	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya	5 Unit	233,288,000	5 Unit	250,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	3	1	2.0 9	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	0 Unit	125,070,000	0 Unit	10,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	9 Unit		9 Unit		
1	3	2			PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	15.60 %	8,800,754,090	15.60 %	12,383,115,325	
1	3	2	2.0 1		Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Kegiatan Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada wilayah sungai dalam satu daerah kabupaten/kota	8.54 %	5,881,526,890	8.54 %	8,800,000,000	
1	3	2	2.0 1	3	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, Drainase Utama Perkotaan dan Pengaman Pantai	Jumlah Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, Drainase Kawasan, dan Pengaman Pantai yang Disusun	1 Dokumen	150,000,000	1 Dokumen	200,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	3	2	2.0 1	9	Pembangunan Tanggul Sungai	Panjang Tanggul Sungai yang Dibangun	940 M	2,346,620,715	940 M	7,000,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	3	2	2.0 1	1 7	Pembangunan Breakwater	Panjang Breakwater yang Dibangun	170 M	254,971,900	170 M	300,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	3	2	2.0 1	1 8	Pembangunan Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya	Panjang Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya yang Dibangun	967 M	2,517,602,375	967 M	500,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

1	3	2	2.0 1	2 4	Rehabilitasi Tanggul Sungai	Panjang Tanggul Sungai yang Direhabilitasi	158 M	409,800,000	158 M	500,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	3	2	2.0 1	4 6	Normalisasi/Restorasi Sungai	Panjang Sungai yang Dinormalisasi/Direstorasi	856 M	202,531,900	856 M	300,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	3	2	2.0 2		Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentasekegiatan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota yang dikembangkan dan dikelola	18.75 %	2,919,227,200	18.75 %	3,583,115,325	
1	3	2	2.0 2	2	Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dibangun	1807 M	1,529,606,900	1807 M	2,000,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	3	2	2.0 2	8	Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Ditingkatkan	735 M	615,785,150	735 M	700,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	3	2	2.0 2	1 4	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi	124 M	102,031,900	124 M	150,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	3	2	2.0 2	1 5	Rehabilitasi Bendung Irigasi	Jumlah Bendung Irigasi yang Direhabilitasi	1 Bendung	102,031,900	1 Bendung	150,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	3	2	2.0 2	2 1	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara	10 DI	569,771,350	10 DI	583,115,325	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

1	3	3			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air minum layak	6.4 %	11,374,264,793	6.4 %	660,000,000	
1	3	3	2.0 1		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Kualitas Air (%)	15.31 %	11,374,264,793	15.31 %	660,000,000	
1	3	3	2.0 1	5	Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	Panjang Jaringan perpipaan yang ditingkatkan di kawasan Perkotaan	4000 M	10,017,252,535	4000 M	10,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
						Peningkatan Kapasitas SPAM IKK/Perkotaan atau SPAM Tematik Tertentu	0 Liter/Detik		0 Liter/Detik		
1	3	3	2.0 1	6	Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan		0	1,357,012,258	0	650,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
						Panjang Jaringan perpipaan yang ditingkatkan di kawasan Perdesaan	2500 M		2500 M		
1	3	4			PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	Persentase Sistem Pengelolaan Persampahan Regional	20 %	300,000,000	20 %	360,000,000	
1	3	4	2.0 1		Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase sistem dan pengelolaan persampahan	20 %	300,000,000	20 %	360,000,000	
1	3	4	2.0 1	5	Peningkatan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	Jumlah Rumah Tangga yang Terlayani Peningkatan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	0 Rumah Tangga	300,000,000	0 Rumah Tangga	360,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
						Jumlah TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang telah ditingkatkan	0 Unit		0 Unit		
1	3	5			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Indeks Kualitas Sanitasi	8.32 %	1,000,000,000	8.32 %	1,150,000,000	
						Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	8.32 %		8.32 %		

1	3	5	2.0 1		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Presentase Jumlah RT yang Memperoleh Layanan Pengolahan Air Limbah Domestik	14.1 %	1,000,000,000	14.1 %	1,150,000,000	
						Presentase Jumlah RT yang Memperoleh Layanan Pengolahan Air Limbah Domestik	230 %		230 %		
1	3	5	2.0 1	1	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPALD dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Disusun	1 Dokumen	400,000,000	1 Dokumen	500,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	3	5	2.0 1	6	Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat	jumlah rumah dengan akses unit pengolahan setempat untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar	41 KK	600,000,000	41 KK	650,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
						Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Tangki Septik	0 Rumah Tangga		0 Rumah Tangga		
						Jumlah Tengki Septik yang terbangunan	200 SR		200 SR		
1	3	6			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase Jalan yang Memiliki Trotoar dan Drainase/Saluran Pembuangan Air (Minimal 1.5 m)	14.92 %	8,018,828,154	14.92 %	6,300,000,000	
1	3	6	2.0 1		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase panjang drainase dalam kondisi baik (%)	33.3 %	8,018,828,154	33.3 %	6,300,000,000	
1	3	6	2.0 1	9	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase	Panjang Saluran Drainase yang Dioperasikan dan Dipelihara	100 M	256,020,000	100 M	300,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	3	6	2.0 1	1 2	Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan	Panjang Saluran Drainase Lingkungan yang Dibangun	3000 M	7,762,808,154	3000 M	6,000,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

1	3	8			PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Persentase bangunan gedung pemerintah/fasilitas umum dalam kondisi baik	4.92 %	6,499,999,998	4.92 %	650,000,000	
					Persentase Jumlah bangunan gedung pemerintah/fasilitas umum dalam kondisi baik	4.92 0	4.92 0				
1	3	8	2.0 1		Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Rasio Kepatuhan IMB	50.82 %	6,499,999,998	50.82 %	650,000,000	
1	3	8	2.0 1	2	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	0 Dokumen	6,499,999,998	0 Dokumen	650,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
						Jumlah Unit Bangunan gedung pemerintah/fasilitas umum yang dibangun	6 Unit		6 Unit		
						Luasan Bangunan gedung yg terbangun	3000 M2		3000 M2		
1	3	9			PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Persentase Penataan Bangunan dan Lingkungannya	100 0	123,167,650	100 0	135,225,950	
					Rasio kepatuhan IMB kab/ kota	100 %	100 %				
1	3	9	2.0 1		Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	Bangunan yang Melanggar Terhadap aturan Perda RTRW Kabupaten/ Kota (%).	100 %	123,167,650	100 %	135,225,950	
1	3	9	2.0 1	2	Supervisi Penataan/Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan	Jumlah Supervisi Penataan/Pemeliharaan Bangun	1 Kegiatan	34,518,650	1 Kegiatan	35,225,950	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

						Jumlah Supervisi Penataan/Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Cagar Budaya dan Tradisional Bersejarah, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya	0 Kawasan		0 Kawasan		
1	3	9	2.0 1	5	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penataan Bangunan dan Lingkungan	Jumlah Peserta yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Penataan Bangunan dan Lingkungan	0 Orang	88,649,000	0 Orang	100,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
						umlah Peserta yang Mengikuti Pemberdayaan Mas	30 Orang		30 Orang		
1	3	1 0			PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Persentase Jalan dalam kondisi baik	11.14 %	22,941,583,758	11.14 %	22,000,000,000	
						Persentase Jembatan dalam kondisi baik	80 %		80 %		
1	3	1 0	2.0 1		Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Persentase jalan dan Jembatan dalam kondisi baik	1.035 %	22,941,583,758	1.035 %	22,000,000,000	
1	3	1 0	2.0 1	4	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Jumlah Data dan Informasi Terkait Kondisi Jalan/Jembatan	2 Dokumen	480,000,000	2 Dokumen	530,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	3	1 0	2.0 1	5	Pembangunan Jalan	Panjang Jalan yang Dibangun	7 KM	2,500,000,000	7 KM	3,000,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	3	1 0	2.0 1	8	Rekonstruksi Jalan	Panjang Jalan yang Dilakukan Rekonstruksi Jalan	8 KM	18,241,583,758	8 KM	16,500,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	3	1 0	2.0 1	1 0	Pemeliharaan Berkala Jalan	Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Berkala	6 KM	500,000,000	6 KM	820,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

1	3	1 0	2.0 1	1 2	Pembangunan Jembatan	Panjang Jembatan yang Dibangun	6 M	200,000,000	6 M	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	3	1 0	2.0 1	2 0	Pemeliharaan Berkala Jembatan	Panjang Jembatan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Berkala	18 M	600,000,000	18 M	700,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	3	1 0	2.0 1	2 2	Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan/Jembatan	Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan/Jembatan	0 Dokumen	220,000,000	0 Dokumen	200,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	3	1 0	2.0 1	2 3	Pengawasan Teknis Penyelenggaraan Jalan/Jembatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penyelenggaraan Jalan/Jembatan	0 Dokumen	200,000,000	0 Dokumen	250,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
						Jumlah Dokumen Pengawasan Teknis Penyelenggaraan Jalan / Jembatan	2 Dokumen		2 Dokumen		
1	3	1 1			PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi	3 %	141,506,764	3 %	250,000,000	
						Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	18.44 %		18.44 %		
1	3	1 1	2.0 1		Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Persentase Jumlah Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	50.67 %	141,506,764	50.67 %	250,000,000	
1	3	1 1	2.0 1	4	Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Mengikuti Pelatihan	30 Orang	141,506,764	30 Orang	250,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	3	1 2			PROGRAM PENYELENGGARAAN	Presentase Ketaatan terhadap RTRW (%)	18.89 0	515,674,340	18.89 0	585,352,850	

					PENATAAN RUANG	Presentase Ketaatan terhadap RTRW (%)	19 %		19 %		
1	3	1 2	2.0 1		Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	Persentase Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kab. Kota. Yang ditetapkan (Dokumen)	100 %	101,437,000	100 %	35,000,000	
1	3	1 2	2.0 1	2	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Persetujuan Substansi, Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota	0 Dokumen	101,437,000	0 Dokumen	35,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
						Jumlah Dokumen Persetujuan Substansi, Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota	1 Dokumen		1 Dokumen		
1	3	1 2	2.0 2		Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Dokumen Materi Teknis RRTR Kabupaten / Kota (%)	100 %	311,058,040	100 %	415,591,500	
1	3	1 2	2.0 2	2		Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pen	1 Dokumen	311,058,040	1 Dokumen	415,591,500	
					Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota	0 Dokumen		0 Dokumen		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	3	1 2	2.0 3		Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Presentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Kabupaten terhadap RTRW/RDTR(%)	100 %	35,600,500	100 %	80,062,550	
1	3	1 2	2.0 3	1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	0 Dokumen	35,600,500	0 Dokumen	30,031,800	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
						Persentase Jumlah rekomendasi Kesesuaian pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah terhadap RTRW/RDTR	100 Dokumen		100 Dokumen		

1	3	1 2	2.0 3	2	Sistem Informasi Penataan Ruang	Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan dari Sistem Informasi Penataan Ruang	0 Dokumen	0	0 Dokumen	50,030,750	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
						Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan dari Sistem Informasi Penataan Ruang	32 Unit		32 Unit			
1	3	1 2	2.0 4		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Luas pengendalian dan pengawasan pemanfaatan ruang (%)	100 %	67,578,800	100 %	54,698,800		
1	3	1 2	2.0 4	2	Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang	0 Dokumen	32,000,000	0 Dokumen	19,120,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
							Persentase Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang yang terlaksana		100 Persen			100 Persen
1	3	1 2	2.0 4	4	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penata	1 Dokumen	35,578,800	1 Dokumen	35,578,800	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
							Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang		0 Dokumen			0 Dokumen
							Persentase Jumlah Pelaksanaan Penataan Ruang		1 Dokumen			1 Dokumen
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							
1	4				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN			40,948,294,508		7,947,201,620		
1	4	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase urusan penunjang pemerintah yang dilaksanakan	100 %	5,792,411,546	100 %	1,192,466,290		
1	4	1	2.0 1		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan dokumen perencanaan	100 %	0	100 %	0		
1	4	1	2.0 1	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan	

						Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen		3 Dokumen		
1	4	1	2.0 2		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase penyediaan gaji dan tunjangan ASN	100 %	4,743,791,256	100 %	0	
1	4	1	2.0 2	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	jumlah gaji dan tunjangan ASN	12 bulan	3,965,711,256	12 bulan	0	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	0 Orang/bulan		0 Orang/bulan		
1	4	1	2.0 2	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	0 Dokumen	778,080,000	0 Dokumen	0	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan
						Jumlah Gaji Non ASN	12 bulan		12 bulan		
1	4	1	2.0 6		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase administrasi perangkat daerah	100 %	547,961,590	100 %	555,961,590	
1	4	1	2.0 6	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	3,461,490	1 Paket	5,461,490	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan
1	4	1	2.0 6	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	0 Paket	207,954,250	0 Paket	207,954,250	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan
						Jumlah Unit Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Unit		12 Unit		
1	4	1	2.0 6	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	39,865,000	1 Paket	40,865,000	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan
1	4	1	2.0 6	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	19,999,850	2 Paket	20,999,850	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan

1	4	1	2.0 6	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	6 Laporan	276,681,000	6 Laporan	280,681,000	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan
1	4	1	2.0 7		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase penyediaan barang milik daerah	100 %	21,646,000	100 %	25,646,000	
1	4	1	2.0 7	1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	3 Unit	21,646,000	3 Unit	25,646,000	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan
1	4	1	2.0 8		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	24,240,700	100 %	25,240,700	
1	4	1	2.0 8	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	24,240,700	1 Laporan	25,240,700	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan
1	4	1	2.0 8	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1 Tahun	0	1 Tahun	0	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	0 Laporan	0 Laporan			
1	4	1	2.0 8	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Biaya Retribusi Sampah	1 Tahun	0	1 Tahun	0	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	0 Laporan	0 Laporan			
1	4	1	2.0 9		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah	100 %	454,772,000	100 %	585,618,000	

1	4	1	2.0 9	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	0 Unit	41,000,000	0 Unit	45,000,000	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan
						jumlah Unit ketersediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	2 Unit		2 Unit		
1	4	1	2.0 9	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit	18,000,000	1 Unit	20,000,000	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan
1	4	1	2.0 9	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	395,772,000	1 Unit	520,618,000	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan
1	4	2			PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota	400 unit	706,336,600	400 unit	710,336,600	
1	4	2	2.0 1		Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	persentase rumah korban bencana yang terdata	100 %	98,112,350	100 %	100,112,350	
						Persentase rumah korban bencana yang terdata	0 %		0 %		
1	4	2	2.0 1	5	Pendataan dan Verifikasi Penerima Rumah bagi Korban Bencana Alam atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota atau yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota yang Terverifikasi	4 Dokumen	98,112,350	4 Dokumen	100,112,350	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan
1	4	2	2.0 3		Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Presentase Jumlah Rumah yang Tertangani	100 %	608,224,250	100 %	610,224,250	

1	4	2	2.0 3	1	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana			0		0	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan
1	4	2	2.0 3	4	Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terbangun	10 Unit Rumah	608,224,250	10 Unit Rumah	610,224,250	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan
1	4	2	2.0 4		Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Presentase Pendistribusian Serah Terima Rumah Korban Bencana yang di Laksanakan	100 %	0	100 %	0	
1	4	2	2.0 4	2	Penatausahaan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Serah Terima Rumah Kepada Korban Bencana Kabupaten/Kota atau yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan
1	4	3			PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Presentase Pengurangan Kawasan Kumuh di Bawah 10 Ha	40 %	20,569,912,120	40 %	50,876,000	
1	4	3	2.0 2		Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	persentase kawasan permukiman kumuh yang di tata	100 %	49,596,000	100 %	50,876,000	
						Persentase Kawasan Permukiman kumuh yang ditata	0 %		0 %		
1	4	3	2.0 2	5	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penataan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penataan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	1 Laporan	49,596,000	1 Laporan	50,876,000	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan
1	4	3	2.0 3		Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki (Unit Rumah)	588 unit	20,520,316,120	588 unit	0	

1	4	3	2.0 3	1	Penyusunan Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED) Peremajaan/Pemugaran Permukiman Kumuh	Jumlah Dokumen Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED) Peremajaan/Pemugaran Permukiman Kumuh	1 Dokumen	146,657,670	1 Dokumen	0	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan
						Jumlah Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED) Peremajaan/Pemugaran Permukiman Kumuh	0 Dokumen		0 Dokumen		
1	4	3	2.0 3	2	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki	401 Unit Rumah	20,373,658,450	401 Unit Rumah	0	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan
1	4	5			PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Persentase perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	100 %	13,879,634,242	100 %	5,993,522,730	
1	4	5	2.0 1		Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Persentase lingkungan yang didukung oleh PSU	100 %	13,879,634,242	100 %	5,993,522,730	
1	4	5	2.0 1	1	Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	3 Dokumen	199,580,000	3 Dokumen	199,580,000	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan
1	4	5	2.0 1	2	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian	35 Lokasi	13,583,308,842	35 Lokasi	5,593,942,730	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan
1	4	5	2.0 1	3	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	173 Laporan	96,745,400	173 Laporan	200,000,000	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						

2	1 0				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN			2,000,000,000		0	
2	1 0	5			PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	Persentase penanganan sengketa tanah garapan yang dilakukan	100 %	2,000,000,000	100 %	0	
2	1 0	5	2.0 1		Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen penerima Ganti Kerugian dan santunan Tanah Untuk Pembangunan	4 Dokumen	2,000,000,000	4 Dokumen	0	
2	1 0	5	2.0 1	2	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	3 Dokumen	2,000,000,000	3 Dokumen	0	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan
						Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	0 Dokumen		0 Dokumen		
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						
1	5				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT			7,907,811,033		9,209,663,641	
1	5	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase urusan penunjang pemerintahan yang dilaksanakan	100 %	4,701,056,650	100 %	3,849,663,641	
1	5	1	2.0 1		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	persentase dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100 %	0	100 %	15,000,000	
1	5	1	2.0 1	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	13 Laporan	0	13 Laporan	15,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

1	5	1	2.0 2		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	persentase realisasi administrasi keuangan	100 %	3,536,814,740	100 %	2,454,663,641	
1	5	1	2.0 2	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1 Orang/bulan	2,438,652,380	1 Orang/bulan	1,454,663,641	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	5	1	2.0 2	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	33 Dokumen	1,098,162,360	33 Dokumen	1,000,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	5	1	2.0 5		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	persentase realisasi administrasi keuangan	100	0	100	200,000,000	
1	5	1	2.0 5	2	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	0 Paket	0	0 Paket	200,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	5	1	2.0 6		Administrasi Umum Perangkat Daerah	persentase realisasi administrasi umum	100 %	862,882,360	100 %	730,000,000	
1	5	1	2.0 6	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	11,389,796	1 Paket	25,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	5	1	2.0 6	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	370,214,976	4 Paket	230,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	5	1	2.0 6	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	111,102,288	2 Paket	250,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	5	1	2.0 6	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	15,631,300	2 Paket	25,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	5	1	2.0 6	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100 Laporan	354,544,000	100 Laporan	200,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	5	1	2.0 8		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa penunjang urusan pemerintahan	100 %	52,997,050	100 %	150,000,000	

1	5	1	2.0 8	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	0	1 Laporan	10,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	5	1	2.0 8	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	35,436,800	1 Laporan	30,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	5	1	2.0 8	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Laporan	16,660,250	3 Laporan	10,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	5	1	2.0 8	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 Laporan	900	4 Laporan	100,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	5	1	2.0 9		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah dalam kondisi baik	100 %	248,362,500	100 %	300,000,000	
1	5	1	2.0 9	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3 Unit	149,137,500	3 Unit	150,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	5	1	2.0 9	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	99,225,000	1 Unit	150,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	5	3			PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Presentase penanganan pra bencana	100 %	3,206,754,383	100 %	5,360,000,000	
				Presentase penanganan tanggap darurat bencana		100 %	100 %				
				Presentase penyelesaian dokumen kebencanaan sampai dengan dinyatakan sah/legal		100 %	100 %				
1	5	3	2.0 1		Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Prosentase warga negara didaerah rawan bencana yang mendapatkan KIE bencana	100 %	508,525,080	100 %	1,200,000,000	

1	5	3	2.0 1	1	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kajian Risiko Bencana yang Dilegalisasi	1 Dokumen	199,781,180	1 Dokumen	400,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	5	3	2.0 1	2	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	Jumlah Orang yang Mendapatkan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana) Secara Tatap Muka kepada Penduduk yang Tinggal di Daerah Rawan Bencana Sesuai Jenis Ancaman yang Ada di Kawasan Tempat Tinggalnya	0 Orang	308,743,900	0 Orang	800,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	5	3	2.0 2		Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	persentase warga negara yang mendapat pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan bencana	100 %	2,033,933,953	100 %	2,650,000,000	
1	5	3	2.0 2	2	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Warga Negara dan Aparatur yang Mengikuti Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	0 Orang	232,410,450	0 Orang	200,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

1	5	3	2.0 2	3	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	0 Dokumen	1,055,106,658	0 Dokumen	1,600,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	5	3	2.0 2	4	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas	0 Unit	165,263,395	0 Unit	300,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	5	3	2.0 2	6	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Jumlah Kawasan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	2 Kawasan	281,198,715	2 Kawasan	350,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

1	5	3	2.0 2	8	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Personil TRC yang Dikembangkan Kapasitas Teknis dan Manajerialnya	0 Orang	299,954,735	0 Orang	200,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	5	3	2.0 3		Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	persentase penanganan korban bencana	100 %	345,447,200	100 %	750,000,000	
1	5	3	2.0 3	2	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat	0 Dokumen	143,480,000	0 Dokumen	150,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	5	3	2.0 3	4	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	0 Orang	201,967,200	0 Orang	600,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	5	3	2.0 4		Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Persentase Bantuan dan Rehabilitasi Pemulihan Kondisi Pasca Bencana	100 %	318,848,150	100 %	760,000,000	
1	5	3	2.0 4	2	Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Tata Kelola Kelembagaan Bencana Daerah	1 Dokumen	116,595,150	1 Dokumen	250,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	5	3	2.0 4	4	Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	Jumlah Data dan Informasi Kebencanaan yang tersedia	1 Dokumen	50,954,000	1 Dokumen	350,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	5	3	2.0 4	6	Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota Melalui Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITU PASNA) Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (R3P)	0 Dokumen	151,299,000	0 Dokumen	160,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						

1	5				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT		17,650,483,540		17,641,204,388		
1	5	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase urusan penunjang pemerintahan yang dilaksanakan	100 %	14,342,444,280	100 %	14,333,165,128	
1	5	1	2.0 2		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah ASN yang terpenuhi gaji dan tunjangannya	26 Orang	13,239,193,380	26 Orang	13,229,914,228	
1	5	1	2.0 2	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	26 Orang/bulan	2,619,193,380	26 Orang/bulan	2,609,914,228	Satuan Polisi Pamongpraja
1	5	1	2.0 2	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	2 Dokumen	10,620,000,000	2 Dokumen	10,620,000,000	Satuan Polisi Pamongpraja
1	5	1	2.0 5		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah pegawai yang mengikuti pelatihan dan pendidikan formal, non formal bimtek dan pengembangan karier	0 Orang	309,090,660	0 Orang	309,090,660	
1	5	1	2.0 5	1	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	3 Unit	3,282,660	3 Unit	3,282,660	Satuan Polisi Pamongpraja
1	5	1	2.0 5	2	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	42 Paket	176,088,000	42 Paket	176,088,000	Satuan Polisi Pamongpraja
1	5	1	2.0 5	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	3 Orang	0	3 Orang	0	Satuan Polisi Pamongpraja
1	5	1	2.0 5	1	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	406 Orang	129,720,000	406 Orang	129,720,000	Satuan Polisi Pamongpraja
1	5	1	2.0 6		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Presentase Ketersediaan peralatan dan perlengkapan kantor	100 %	611,766,480	100 %	611,766,480	
1	5	1	2.0 6	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	13 Paket	108,803,750	13 Paket	108,803,750	Satuan Polisi Pamongpraja

1	5	1	2.0 6	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	25 Paket	191,787,480	25 Paket	191,787,480	Satuan Polisi Pamongpraja
1	5	1	2.0 6	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	25 Paket	53,622,250	25 Paket	53,622,250	Satuan Polisi Pamongpraja
1	5	1	2.0 6	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	5 Laporan	7,600,000	5 Laporan	7,600,000	Satuan Polisi Pamongpraja
1	5	1	2.0 6	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	10 Laporan	249,953,000	10 Laporan	249,953,000	Satuan Polisi Pamongpraja
1	5	1	2.0 8		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prsentase Jasa Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah daerah dalm 1 Tahun	100 %	67,883,760	100 %	67,883,760	
1	5	1	2.0 8	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	5 Laporan	25,993,760	5 Laporan	25,993,760	Satuan Polisi Pamongpraja
1	5	1	2.0 8	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Laporan	16,030,000	5 Laporan	16,030,000	Satuan Polisi Pamongpraja
1	5	1	2.0 8	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	5 Laporan	25,860,000	5 Laporan	25,860,000	Satuan Polisi Pamongpraja
1	5	1	2.0 9		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah dalam kondisi baik	100 %	114,510,000	100 %	114,510,000	
1	5	1	2.0 9	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	12 Unit	114,510,000	12 Unit	114,510,000	Satuan Polisi Pamongpraja
1	5	2			PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase penyelesaian pelanggaran K3	100 %	3,233,839,260	100 %	3,233,839,260	
						Persentase Perda dan Perkada yang ditegakan	100 %		100 %		

1	5	2	2.0 1		Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Presentase Penyelesaian K3	100 %	3,059,364,260	100 %	3,059,364,260	
1	5	2	2.0 1	1	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	10 Kasus	94,150,000	10 Kasus	94,150,000	Satuan Polisi Pamongpraja
1	5	2	2.0 1	2	Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	0 Kasus	57,300,000	0 Kasus	57,300,000	Satuan Polisi Pamongpraja
1	5	2	2.0 1	3	Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	15 Dokumen	14,400,000	15 Dokumen	14,400,000	Satuan Polisi Pamongpraja
1	5	2	2.0 1	4	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	9 Dokumen	0	9 Dokumen	0	Satuan Polisi Pamongpraja
1	5	2	2.0 1	5	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	291 Orang	2,875,514,260	291 Orang	2,875,514,260	Satuan Polisi Pamongpraja

1	5	2	2.0 1	6	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketertarikan dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	9 Dokumen	18,000,000	9 Dokumen	18,000,000	Satuan Polisi Pamongpraja
1	5	2	2.0 2		Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Persentase Perda dan Perkada yang Ditegakkan	100 %	126,000,000	100 %	126,000,000	
1	5	2	2.0 2	1	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Perda/Perkada kepada Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/	18 Laporan	0	18 Laporan	0	Satuan Polisi Pamongpraja
1	5	2	2.0 2	2	Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	15 Laporan	126,000,000	15 Laporan	126,000,000	Satuan Polisi Pamongpraja
1	5	2	2.0 3		Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	Persentase yang mendapatkan pelatihan dan pendidikan PPNS	100 %	48,475,000	100 %	48,475,000	
1	5	2	2.0 3	1	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS dalam Mendukung Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Penegakan Perda dan Perkada	2 Laporan	48,475,000	2 Laporan	48,475,000	Satuan Polisi Pamongpraja
1	5	4			PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	100 %	74,200,000	100 %	74,200,000	
				Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran		100 %	100 %				

1	5	4	2.0 1		Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Presentase pencegahan, pengendalian, penyelamatan dan penanganan bahan berbahaya dan beracun kebakaran dalam daerah	100 %	74,200,000	100 %	74,200,000	
1	5	4	2.0 1	1	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya	2 Dokumen	9,450,000	2 Dokumen	9,450,000	Satuan Polisi Pamongpraja
1	5	4	2.0 1	2	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	10 Laporan	45,750,000	10 Laporan	45,750,000	Satuan Polisi Pamongpraja
1	5	4	2.0 1	3	Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Penyelamatan/Evakuasi Saat Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran	10 Dokumen	19,000,000	10 Dokumen	19,000,000	Satuan Polisi Pamongpraja
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						
1	6				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL			12,784,587,173		10,509,046,000	
1	6	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase urusan penunjang pemerintahan yang dilaksanakan	100 %	3,760,688,623	100 %	1,484,301,450	
1	6	1	2.0 2		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Presentase Administrasi Keuangan	100 %	2,784,587,173	100 %	508,200,000	
1	6	1	2.0 2	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	0 Orang/bulan	2,276,387,173	0 Orang/bulan	0	Dinas Sosial
1	6	1	2.0 2	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Pelaksana Kegiatan ASN	20 Orang	508,200,000	20 Orang	508,200,000	Dinas Sosial

1	6	1	2.0 2	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	0	1 Laporan	0	Dinas Sosial
1	6	1	2.0 5		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pejabat Aparatur Sipil Negara (ASN) yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Struktural dalam persen	27 %	66,500,000	27 %	66,500,000	
1	6	1	2.0 5	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	3 Orang	66,500,000	3 Orang	66,500,000	Dinas Sosial
1	6	1	2.0 6		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase Administrasi Administrasi Umum dalam 1 tahun	100 %	713,625,650	100 %	713,625,650	
1	6	1	2.0 6	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	61 Unit	125,111,540	61 Unit	125,111,540	Dinas Sosial
1	6	1	2.0 6	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	0	1 Paket	0	Dinas Sosial
1	6	1	2.0 6	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5 Paket	85,114,130	5 Paket	85,114,130	Dinas Sosial
1	6	1	2.0 6	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	56,817,180	12 Paket	56,817,180	Dinas Sosial
1	6	1	2.0 6	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	13 Laporan	446,582,800	13 Laporan	446,582,800	Dinas Sosial
1	6	1	2.0 7		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Presentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Dalam setahun	100 %	31,055,000	100 %	31,055,000	
1	6	1	2.0 7	2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	31,055,000	1 Unit	31,055,000	Dinas Sosial

1	6	1	2.0 7	5	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	0 Unit	0	0 Unit	0	Dinas Sosial
1	6	1	2.0 8		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan pemerintahan daerah	100 %	32,300,800	100 %	32,300,800	
1	6	1	2.0 8	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	24,010,800	12 Laporan	24,010,800	Dinas Sosial
1	6	1	2.0 8	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jasa Peralatan Kantor Yang di Perbaiki	11 Unit	7,390,000	11 Unit	7,390,000	Dinas Sosial
1	6	1	2.0 8	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Bulan Pembayaran Retribusi Sampah	12 Bulan	900	12 Bulan	900	Dinas Sosial
1	6	1	2.0 9		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	132,620,000	100 %	132,620,000	
1	6	1	2.0 9	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5 Unit	132,620,000	5 Unit	132,620,000	Dinas Sosial
1	6	1	2.0 9	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0 Unit	0	0 Unit	0	Dinas Sosial
1	6	2			PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase Kelompok di berdayakan	31.5 %	49,973,500	31.5 %	49,973,500	
1	6	2	2.0 1		Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT)	Presentase Komunitas Adat (KAT) terpencil yang diberdayakan	30 %	49,973,500	30 %	49,973,500	
1	6	2	2.0 1	1	Fasilitasi Pemberdayaan Sosial KAT	Jumlah Keluarga pada KAT yang Mendapatkan Fasilitas Pemberdayaan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	50 Keluarga	49,973,500	50 Keluarga	49,973,500	Dinas Sosial
1	6	2	2.0 3		Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Presentasi potensi sumber kesejahteraan sosial yang dikembangkan	33 %	0	33 %	0	

1	6	2	2.0 3	1	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	0 Orang	0	0 Orang	0	Dinas Sosial
1	6	2	2.0 3	2	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	0 Orang	0	0 Orang	0	Dinas Sosial
1	6	2	2.0 3	3	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Keluarga	0	10 Keluarga	0	Dinas Sosial
1	6	2	2.0 3	4	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	0 Lembaga	0	0 Lembaga	0	Dinas Sosial
1	6	2	2.0 3	5	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	Jumlah Sertifikat yang dari Hasil Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kewenangan Kabupaten/Kota	0 Sertifikat	0	0 Sertifikat	0	Dinas Sosial
1	6	4			PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar. anak terlantar. lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	25.50 %	3,108,060,800	25.50 %	3,108,060,800	
1	6	4	2.0 1		Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Presentase Penyandang Disabilitas terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan pengemis diluar panti yang direhabilitasi	18 %	3,108,060,800	18 %	3,108,060,800	

1	6	4	2.0 1	1	Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	462 Orang	2,853,052,000	462 Orang	2,853,052,000	Dinas Sosial
1	6	4	2.0 1	2	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	244 Orang	141,752,000	244 Orang	141,752,000	Dinas Sosial
1	6	4	2.0 1	3	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	27 Orang	113,256,800	27 Orang	113,256,800	Dinas Sosial
1	6	4	2.0 1	6	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	0 Orang	0	0 Orang	0	Dinas Sosial
1	6	4	2.0 2		Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Presentase Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya bukan Korban HIV/AIDS dan Napza diluar panti Sosial	33 %	0	33 %	0	
1	6	4	2.0 2	1	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	0 Orang	0	0 Orang	0	Dinas Sosial

1	6	4	2.0 2	3	Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	0 Orang	0	0 Orang	0	Dinas Sosial
1	6	4	2.0 2	4	Penyediaan Sandang	Jumlah orang yang Menerima pakaian dan kelengkapan lainnya yang Tersedia dalam 1 tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	0 Orang	0	0 Orang	0	Dinas Sosial
1	6	4	2.0 2	5	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga sesuai Kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	0 Orang	0	0 Orang	0	Dinas Sosial
1	6	4	2.0 2	7	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	0 Orang	0	0 Orang	0	Dinas Sosial
1	6	5			PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase penurunan anak terlantar dan fakir miskin (rumah tangga miskin)	98.30 %	5,606,313,600	98.30 %	5,607,159,600	
1	6	5	2.0 1		Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar	Presentase Anak Terlantar yang dipelihara	860 Orang	4,974,313,600	860 Orang	4,974,313,600	
1	6	5	2.0 1	1	Penjangkauan Anak-Anak Terlantar	Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Dijangkau Kewenangan Kabupaten/Kota	791 Orang	4,936,440,500	791 Orang	4,936,440,500	Dinas Sosial
1	6	5	2.0 1	3	Pemantauan Terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar	Jumlah Anak Terlantar yang Terpantau dan Terpelihara Kewenangan Kabupaten/Kota	35 Orang	37,873,100	35 Orang	37,873,100	Dinas Sosial
1	6	5	2.0 2		Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Presentase Data Fakir Miskin Cakupan Daerah yang dikelola	100 %	632,000,000	100 %	632,846,000	
1	6	5	2.0 2	1	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	17.518 Orang	149,154,000	17.518 Orang	150,000,000	Dinas Sosial

1	6	5	2.0 2	2	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota	17.518 Keluarga	482,846,000	17.518 Keluarga	482,846,000	Dinas Sosial
1	6	6			PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	100 %	212,140,000	100 %	212,140,000	
1	6	6	2.0 1		Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Presentase Korban Bencana Alam Sosial Kabupaten/Kota yang dilindungi	100 %	140,820,000	100 %	140,820,000	
1	6	6	2.0 1	1	Penyediaan Makanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	100 Orang	65,536,000	100 Orang	65,536,000	Dinas Sosial
1	6	6	2.0 1	2	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	100 Orang	75,284,000	100 Orang	75,284,000	Dinas Sosial
1	6	6	2.0 2		Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Presentase Pemberdayaan Masyarakat Terhadap kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	100 %	71,320,000	100 %	71,320,000	
1	6	6	2.0 2	1	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	0 Kampung	0	0 Kampung	0	Dinas Sosial

1	6	6	2.0 2	2	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	100 Orang	71,320,000	100 Orang	71,320,000	Dinas Sosial
1	6	7			PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	persentase taman makam pahlawan yang terpelihara	100 %	47,410,650	100 %	47,410,650	
1	6	7	2.0 1		Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	persentase taman makan pahlawan yang terpelihara	100 %	47,410,650	100 %	47,410,650	
1	6	7	2.0 1	1	Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Rehabilitasi serta Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	Dinas Sosial
1	6	7	2.0 1	2	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota	1 TMP	47,410,650	1 TMP	47,410,650	Dinas Sosial
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						
2	7				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA			6,851,819,480		7,165,744,685	
2	7	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase urusan penunjang pemerintahan yang dilaksanakan	100 %	4,823,407,851	100 %	3,770,744,685	
2	7	1	2.0 2		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	3,224,690,352	100 %	2,638,744,685	
2	7	1	2.0 2	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	0 Orang/bulan	2,718,050,352	0 Orang/bulan	2,132,104,685	Dinas Transmigrasi Dan Tenaga Kerja Daerah
						Persentase ASN yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	100 %		100 %		
2	7	1	2.0 2	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	506,640,000	1 Dokumen	506,640,000	Dinas Transmigrasi Dan Tenaga Kerja Daerah

2	7	1	2.0 5		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat daerah	100 %	101,200,000	100 %	110,000,000	
2	7	1	2.0 5	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	0 Orang	101,200,000	0 Orang	110,000,000	Dinas Transmigrasi Dan Tenaga Kerja Daerah
						Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	2 Orang		2 Orang		
2	7	1	2.0 6		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	655,148,920	100 %	595,000,000	
2	7	1	2.0 6	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	256,164,657	1 Paket	185,000,000	Dinas Transmigrasi Dan Tenaga Kerja Daerah
2	7	1	2.0 6	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	66,434,353	1 Paket	95,000,000	Dinas Transmigrasi Dan Tenaga Kerja Daerah
2	7	1	2.0 6	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	31,697,910	1 Paket	40,000,000	Dinas Transmigrasi Dan Tenaga Kerja Daerah
2	7	1	2.0 6	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	20 Laporan	300,852,000	20 Laporan	275,000,000	Dinas Transmigrasi Dan Tenaga Kerja Daerah
2	7	1	2.0 7		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	755,234,717	100 %	325,000,000	
2	7	1	2.0 7	5	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Unit	60,912,027	1 Unit	25,000,000	Dinas Transmigrasi Dan Tenaga Kerja Daerah
2	7	1	2.0 7	1 0	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	694,322,690	1 Unit	300,000,000	Dinas Transmigrasi Dan Tenaga Kerja Daerah

2	7	1	2.0 8		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	100 %	53,833,862	100 %	72,000,000	
2	7	1	2.0 8	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	29,113,862	12 Laporan	27,500,000	Dinas Transmigrasi Dan Tenaga Kerja Daerah
2	7	1	2.0 8	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Laporan	24,720,000	3 Laporan	27,500,000	Dinas Transmigrasi Dan Tenaga Kerja Daerah
2	7	1	2.0 8	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	0 Laporan	0	0 Laporan	17,000,000	Dinas Transmigrasi Dan Tenaga Kerja Daerah
2	7	1	2.0 9		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	100 %	33,300,000	100 %	30,000,000	
2	7	1	2.0 9	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	2 Unit	33,300,000	2 Unit	30,000,000	Dinas Transmigrasi Dan Tenaga Kerja Daerah
2	7	3			PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	100 %	986,044,209	100 %	2,000,000,000	
2	7	3	2.0 1		Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	jumlah gedung workshop LLK (gedung)	2 buah	811,044,390	2 buah	1,800,000,000	
				jumlah pencari kerja yang mengikuti pendidikan pelatihan berdasarkan klaster kopetensi (orang)		128 orang	128 orang				
				jumlah pencari kerja yang mengikuti pendidikan pelatihan berdasarkan klaster kopetensi (orang)		500 orang	500 orang				

2	7	3	2.0 1	1	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	64 Orang	811,044,390	64 Orang	1,800,000,000	Dinas Transmigrasi Dan Tenaga Kerja Daerah
2	7	3	2.0 2		Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	jumlah peserta pelatihan yang ikut serta dalam pelatihan lembaga swasta (orang)	0 orang	174,999,819	0 orang	200,000,000	
2	7	3	2.0 2	1	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina	30 Lembaga	174,999,819	30 Lembaga	200,000,000	Dinas Transmigrasi Dan Tenaga Kerja Daerah
2	7	4			PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah kabupaten/kota	100 %	616,059,620	100 %	785,000,000	
2	7	4	2.0 3		Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan	6.7 %	169,999,620	6.7 %	185,000,000	
2	7	4	2.0 3	2	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub)	0 Orang	169,999,620	0 Orang	185,000,000	Dinas Transmigrasi Dan Tenaga Kerja Daerah
						Jumlah Pencari Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub)	10000 Orang		10000 Orang		
2	7	4	2.0 5		Penerbitan Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase TKA Dalam Perpanjangan IMTA	1.1 %	446,060,000	1.1 %	600,000,000	
2	7	4	2.0 5	1	Koordinasi dan Sinkronisasi Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		0	446,060,000	0	600,000,000	Dinas Transmigrasi Dan Tenaga Kerja Daerah
						Jumlah Perpanjangan Perizinan	4580 Orang		4580 Orang		
2	7	5			PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Presentase Kasus yang terselesaikan	75 %	426,307,800	75 %	610,000,000	
2	7	5	2.0 1		Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran	Jumlah penetapan UMK dan UMKS	1 Buah	146,036,800	1 Buah	160,000,000	

					Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah perselisihan perburuhan	85 Perkara		85 Perkara		
2	7	5	2.0 1	1	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	Jumlah Peraturan Perusahaan Yang di Sahkan	17 Peraturan	146,036,800	17 Peraturan	160,000,000	Dinas Transmigrasi Dan Tenaga Kerja Daerah
2	7	5	2.0 2		Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	jumlah kasus yang ditindak lanjuti oleh tripartite	100 buah	280,271,000	100 buah	450,000,000	
						Jumlah kasus yang ditindak lanjuti oleh tripartite	120 Buah		120 Buah		
						Jumlah Peraturan Perusahaan Yang di sah kan	5 buah		5 buah		
2	7	5	2.0 2	1	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perselisihan perburuhan	85 Perkara	280,271,000	85 Perkara	450,000,000	Dinas Transmigrasi Dan Tenaga Kerja Daerah
						Jumlah Perselisihan yang Dicegah	0 Perkara		0 Perkara		
3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN						
3	3 2				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI			338,644,500		2,100,000,000	
3	3 2	2			PROGRAM PERENCANAAN KAWASAN TRANSMIGRASI	0Persentase penempatan transmigrasi baru yang direncanakan	30 %	52,096,000	30 %	1,000,000,000	
3	3 2	2	2.0 1		Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi	jumlah kawasan transmigrasi yang ditetapkan	1 Dokumen	52,096,000	1 Dokumen	1,000,000,000	

3	3 2	2	2.0 1	1	Identifikasi Potensi Kawasan Transmigrasi	Jumlah Dokumen Hasil Identifikasi Potensi Kawasan Transmigrasi yang Bisa Dibangun dan Dikerja Samakan dengan Daerah Lain	1 Dokumen	52,096,000	1 Dokumen	1,000,000,000	Dinas Transmigrasi Dan Tenaga Kerja Daerah
3	3 2	3			PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Persentase tanah yang disertifikasi	26.5 %	49,999,000	26.5 %	600,000,000	

3	3 2	3	2.0 1		Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	jumlah KK yang mendapatkan penyuluhan	1 %	49,999,000	1 %	600,000,000	
						jumlah UPT yang terbangun	1 %		1 %		
3	3 2	3	2.0 1	2	Penyiapan Lingkungan Hunian Fisik, Sosial, Ekonomi bagi Penduduk Setempat dan Transmigran	Jumlah Pelaporan Kelayakan Lingkungan dan Permukiman Transmigrasi (yang Memenuhi Kriteria Layak Huni, Layak Usaha dan Layak Berkembang)	1 Dokumen	49,999,000	1 Dokumen	600,000,000	Dinas Transmigrasi Dan Tenaga Kerja Daerah
3	3 2	4			PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI	0Persentase penduduk transmigrasi	46.36 %	236,549,500	46.36 %	500,000,000	
3	3 2	4	2.0 1		Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Kemandirian	jumlah KK transmigrasi yang terbinah	50 orang	236,549,500	50 orang	500,000,000	
3	3 2	4	2.0 1	1	Penguatan SDM dalam rangka Kemandirian Satuan Permukiman	Jumlah Kepala Keluarga Transmigran yang Dibina	50 Kepala Keluarga	236,549,500	50 Kepala Keluarga	500,000,000	Dinas Transmigrasi Dan Tenaga Kerja Daerah
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						
2	9				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN			1,364,979,681		1,694,209,750	
2	9	2			PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN	Persentase cadangan pangan masyarakat	0.5 %	0	0.5 %	700,000,000	
						Presentase Desa Mandiri Pangan	42 %		42 %		
2	9	2	2.0 1		Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Perentase Keterediaan Pangan (Teredainya cadangan beras/jagung sesuai kebutuhan)	42 %	0	42 %	700,000,000	
						Tersedianya cadangan Pangan Masyarakat	0.5 %		0.5 %		
2	9	2	2.0 1	1	Penyediaan Infrastruktur Lumbung Pangan	Jumlah Lumbung Pangan yang Tersedia	0 Unit	0	0 Unit	300,000,000	Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan
2	9	2	2.0 1	2	Penyediaan Infrastruktur Lantai Jemur	Jumlah Lantai Jemur yang Tersedia	2 Unit	0	2 Unit	400,000,000	Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan

2	9	3			PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Persentase ketersediaan pangan (Tersedianya cadangan beras/ jagung sesuai kebutuhan)	29 %	1,200,569,331	29 %	755,000,000	
2	9	3	2.0 1		Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Jumlah Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok yang tercapai	12 Kegiatan	630,234,581	12 Kegiatan	675,000,000	
2	9	3	2.0 1	1	Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	13 Laporan	77,253,500	13 Laporan	75,000,000	Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan
2	9	3	2.0 1	4	Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	49 Laporan	77,386,400	49 Laporan	75,000,000	Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan
2	9	3	2.0 1	7	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	20 Keluarga	475,594,681	20 Keluarga	525,000,000	Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan
2	9	3	2.0 2		Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Perentase Keterediaan Pangan (Teredianya cadangan beras/jagung sesuai kebutuhan)	76 Ton	490,400,000	76 Ton	50,000,000	
						Perentase Keterediaan Pangan (Teredianya cadangan beras/jagung sesuai kebutuhan)	80 %		80 %		
2	9	3	2.0 2	3	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	76 Ton	490,400,000	76 Ton	50,000,000	Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan
2	9	3	2.0 4		Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Jumlah Pelaksanaan Pencapaian Target Koonsumsi Pangan yang tercapai	13 Laporan	79,934,750	13 Laporan	30,000,000	

2	9	3	2.0 4	1	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	13 Dokumen	79,934,750	13 Dokumen	30,000,000	Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan
2	9	4			PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Persentase daerah rawan pangan tertangani	33 %	135,984,000	33 %	210,791,750	
2	9	4	2.0 1		Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	Jumlah peta kerwanan Pangan yang di susun	9 Dokumen	33,808,000	9 Dokumen	50,791,750	
2	9	4	2.0 1	1	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutakhirkan	1 Dokumen	33,808,000	1 Dokumen	50,791,750	Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan
						Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutakhirkan	1 Peta		1 Peta		
2	9	4	2.0 2		Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase daerah Rawan Pangan yang tertangani	33 %	102,176,000	33 %	160,000,000	
2	9	4	2.0 2	1	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota	6 Laporan	102,176,000	6 Laporan	60,000,000	Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan
2	9	4	2.0 2	2	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	2 Dokumen	0	2 Dokumen	100,000,000	Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan
2	9	5			PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Persentase pangan segar asal tumbuhan yang memenuhi persyaratan mutu dan keamanan pangan	32 %	28,426,350	32 %	28,418,000	
2	9	5	2.0 1		Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksanya Kegiatan Pengawasan Keamanan Pangan Segar di Daerah	6 Kegiatan	28,426,350	6 Kegiatan	28,418,000	

2	9	5	2.0 1	5	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	28,426,350	1 Dokumen	28,418,000	Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan
3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN						
3	2 7				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN						
3	2 7	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase urusan penunjang pemerintahan yang dilaksanakan	100 %	16,115,045,604	100 %	1,152,787,650	
3	2 7	1	2.0 1		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Ketersediaan Dokumen Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi	12 Dokumen	2,926,290	12 Dokumen	3,500,000	
3	2 7	1	2.0 1	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	100 Dokumen	1,163,160	100 Dokumen	1,500,000	Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan
3	2 7	1	2.0 1	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6 Laporan	1,763,130	6 Laporan	2,000,000	Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan
3	2 7	1	2.0 2		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Daerah	100 %	14,787,228,884	100 %	0	
3	2 7	1	2.0 2	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	108 Orang/bulan	11,332,428,884	108 Orang/bulan	0	Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan
3	2 7	1	2.0 2	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	130 Dokumen	3,454,800,000	130 Dokumen	0	Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan
3	2 7	1	2.0 5		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ASN yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	95 %	167,700,000	95 %	120,000,000	

3	2 7	1	2.0 5	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	5 Orang	167,700,000	5 Orang	120,000,000	Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan
3	2 7	1	2.0 6		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penunjang Administrasi Umum	100 %	485,270,430	100 %	564,689,050	
3	2 7	1	2.0 6	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	8 Paket	128,675,600	8 Paket	230,000,000	Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan
3	2 7	1	2.0 6	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	100 Paket	79,294,830	100 Paket	76,000,000	Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan
3	2 7	1	2.0 6	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	103.164 Paket	27,047,000	103.164 Paket	25,791,050	Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan
3	2 7	1	2.0 6	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100 Laporan	250,253,000	100 Laporan	232,898,000	Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan
3	2 7	1	2.0 7		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Ketersediaan Barang Milik Daerah yang menjadi Kebutuhan	100 %	524,538,000	100 %	350,000,000	
3	2 7	1	2.0 7	1 1	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	100 Unit	524,538,000	100 Unit	350,000,000	Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan
3	2 7	1	2.0 8		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan yang tersedia	100 %	39,382,000	100 %	39,598,600	
3	2 7	1	2.0 8	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	100 Laporan	38,482,000	100 Laporan	38,698,600	Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan
3	2 7	1	2.0 8	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	100 Laporan	900	100 Laporan	900	Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan

3	2 7	1	2.0 9		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketersediaan Anggaran Barang Milik Daerah Yang di pelihara	100 %	108,000,000	100 %	75,000,000	
3	2 7	1	2.0 9	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	100 Unit	108,000,000	100 Unit	75,000,000	Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan
3	2 7	2			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase peningkatan produktivitas perkebunan	90 %	28,414,838,858	90 %	3,150,060,550	
						persentase peningkatan produktivitas peternakan	75 %		75 %		
						Persentase peningkatan produktivitas tanaman hortikultura (c bawang merah)abai dan	75 %		75 %		
3	2 7	2	2.0 1		Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	12 Laporan	19,624,802,935	12 Laporan	1,710,790,250	
						persentase Sarana Tanaman Pangan Holtikultura dan Perkebunan yang tersedia	95 %		95 %		
3	2 7	2	2.0 1	1	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	12 Laporan	19,353,016,935	12 Laporan	1,000,000,000	Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan
3	2 7	2	2.0 1	2	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	12 Laporan	271,786,000	12 Laporan	710,790,250	Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan
3	2 7	2	2.0 6		Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	Jumlah Benih/Bibit yang sumbernya dari Daerah Kabupaten / Kota Lain	900 Ekor	8,790,035,923	900 Ekor	1,439,270,300	

3	2 7	2	2.0 6	1	Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Jumlah Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	100 Ekor	8,790,035,923	100 Ekor	1,439,270,300	Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan
3	2 7	3			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Presentase Pengembangan Infrastruktur Pertanian/Perkebunan	100 %	6,721,305,241	100 %	2,393,212,350	
3	2 7	3	2.0 2		Pembangunan Prasarana Pertanian	Persentase Pengembangan Infrastruktur Pertanian / Perkebunan	80 %	6,721,305,241	80 %	2,393,212,350	
3	2 7	3	2.0 2	1	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	Jumlah Jaringan Irigasi Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi , dan Dipelihara	22 Unit	604,028,156	22 Unit	626,000,000	Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan
3	2 7	3	2.0 2	3	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	60 Unit	5,976,310,000	60 Unit	1,417,212,350	Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan
3	2 7	3	2.0 2	4	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan DAM Parit	Jumlah DAM Parit yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	10 Unit	140,967,085	10 Unit	150,000,000	Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan
3	2 7	3	2.0 2	9	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	2 Unit	0	2 Unit	200,000,000	Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan

3	2 7	4			PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Persentase wilayah yang terkendali dari penyakit hewan menular strategis	100 %	390,576,320	100 %	401,401,325	
3	2 7	4	2.0 1		Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penyakit Hewan Menular yang tertangani	12 Laporan	137,585,520	12 Laporan	158,632,150	

3	2 7	4	2.0 1	2	Pembebasan Penyakit Hewan Menular dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Wilayah yang Mengalami Penurunan Kasus Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	15 Laporan	0	15 Laporan	65,181,150	Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan
3	2 7	4	2.0 1	3	Penanggulangan Daerah Terdampak Wabah Penyakit Hewan Menular	Jumlah Daerah Terdampak Wabah yang Terkendali	15 Laporan	137,585,520	15 Laporan	93,451,000	Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan
3	2 7	4	2.0 2		Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota	Perentase wilayah yang Terkendali dari penyakit hewan menular	100 %	252,990,800	100 %	159,328,375	
3	2 7	4	2.0 2	1	Penilaian Risiko Penyakit Hewan dan Keamanan Produk Hewan	Jumlah Penilaian Risiko Penyakit Hewan dan Keamanan Produk Hewan	15 Laporan	252,990,800	15 Laporan	159,328,375	Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan
3	2 7	4	2.0 2	2	Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan	Jumlah Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan	15 Laporan	0	15 Laporan	0	Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan
3	2 7	4	2.0 3		Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelayanan Jasa Laboratorium Keswan	14 Laporan	0	14 Laporan	83,440,800	
3	2 7	4	2.0 3	1	Penyediaan Pelayanan Jasa Laboratorium	Jumlah Pelayanan Jasa Laboratorium	18 Laporan	0	18 Laporan	83,440,800	Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan
3	2 7	5			PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Presentase luas areal pengendalian dan penanggulangan bencana OPT	100 %	573,674,960	100 %	574,000,000	
3	2 7	5	2.0 1		Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Jumlah Serangan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT0 Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan yang di kendalikan	0 Ha	573,674,960	0 Ha	574,000,000	

3	2 7	5	2.0 1	1	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan	1000 Ha	573,674,960	1000 Ha	574,000,000	Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan
3	2 7	7			PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Jumlah Keg Penyuluh Tingkat Desa/ Kecamatan/ Kabupaten	100 %	5,706,977,450	100 %	675,000,000	
						Presentase Pemberdayaan Penyuluhan Pertanian Lapangan	60 %		60 %		
3	2 7	7	2.0 1		Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Jumlah Kegiatan Penyuluhan Pertanian Yang terlaksana	10 Kegiatan	5,706,977,450	10 Kegiatan	675,000,000	
3	2 7	7	2.0 1	1	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	8 Unit	446,713,000	8 Unit	125,000,000	Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan
3	2 7	7	2.0 1	2	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	6 Unit	5,260,264,450	6 Unit	300,000,000	Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan
3	2 7	7	2.0 1	3	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	6 Unit	0	6 Unit	250,000,000	Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						
2	1 1				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP			14,291,875,427		13,844,850,885	
2	1 1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	5,087,396,387	100 %	4,711,476,485	
2	1 1	1	2.0 2		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Jasa Administrasi Keuangan	29 Orang	3,765,123,527	29 Orang	3,523,292,000	
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	29 Orang		29 Orang		

2	1	1	2.0	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	29 Orang/bulan	3,172,323,527	29 Orang/bulan	2,930,482,000	Dinas Lingkungan Hidup Daerah
2	1	1	2.0	2	Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	592,800,000	1 Dokumen	592,810,000	Dinas Lingkungan Hidup Daerah
2	1	1	2.0		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	4 Orang	22,500,000	4 Orang	22,600,000	
2	1	1	2.0	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	4 Orang	22,500,000	4 Orang	22,600,000	Dinas Lingkungan Hidup Daerah
2	1	1	2.0		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Peralatan Kantor Yang tercukupi	38 Jenis	331,275,660	38 Jenis	271,666,400	
2	1	1	2.0	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	57,212,910	1 Paket	57,213,000	Dinas Lingkungan Hidup Daerah
2	1	1	2.0	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	95,737,700	1 Paket	36,129,000	Dinas Lingkungan Hidup Daerah
2	1	1	2.0	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	25,710,050	1 Paket	25,708,400	Dinas Lingkungan Hidup Daerah
2	1	1	2.0	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	152,615,000	1 Laporan	152,616,000	Dinas Lingkungan Hidup Daerah
2	1	1	2.0		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	47,364,400	100 %	17,430,085	
2	1	1	2.0	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	3,000,000	1 Laporan	3,000,100	Dinas Lingkungan Hidup Daerah
2	1	1	2.0	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	29,984,400	1 Laporan	29,985	Dinas Lingkungan Hidup Daerah

2	1	1	2.0	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	13,480,000	1 Laporan	13,490,000	Dinas Lingkungan Hidup Daerah
2	1	1	2.0	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	900	1 Laporan	910	Dinas Lingkungan Hidup Daerah
2	1	1	2.0		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional Yang Terpelihara	38 Unit	921,132,800	38 Unit	876,488,000	
2	1	1	2.0	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	27 Unit	520,380,000	27 Unit	876,488,000	Dinas Lingkungan Hidup Daerah
2	1	1	2.0	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	400,752,800	1 Unit	0	Dinas Lingkungan Hidup Daerah
2	1	2			PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan wajib lingkungan hidup	100 %	200,000,000	100 %	285,011,000	
2	1	2	2.0		Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan wajib lingkungan hidup	0 %	0	0 %	85,011,000	
2	1	2	2.0	1	Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota	Jumlah Muatan Hasil Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota yang Disusun	1 Dokumen	0	1 Dokumen	85,011,000	Dinas Lingkungan Hidup Daerah
2	1	2	2.0		Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	Persentase Dokumen Yang mempersyaratkan KLHS	100 %	200,000,000	100 %	200,000,000	
2	1	2	2.0	3	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS untuk KRP yang Berpotensi Menimbulkan Dampak/Resiko Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen KLHS KRP Kabupaten/Kota yang Berpotensi Menimbulkan Dampak/Resiko Lingkungan Hidup yang Disusun	1 Dokumen	200,000,000	1 Dokumen	200,000,000	Dinas Lingkungan Hidup Daerah

2	1 1	3			PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Standar Baku Mutu Kualitas Lingkungan	100 %	224,888,800	100 %	224,890,900	
2	1 1	3	2.0 1		Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah Uji Sampel Parameter Kualitas Lingkungan (Tanah, air, udara dan laut)	50 Sampel	138,735,800	50 Sampel	138,735,900	
2	1 1	3	2.0 1	1	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	1 Dokumen	138,735,800	1 Dokumen	138,735,900	Dinas Lingkungan Hidup Daerah
2	1 1	3	2.0 2		Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Persentase Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan yang di Rehabilitasi dan Restorasi	100 %	86,153,000	100 %	86,155,000	
2	1 1	3	2.0 2	1	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan	1 Laporan	36,345,000	1 Laporan	36,346,000	Dinas Lingkungan Hidup Daerah
2	1 1	3	2.0 2	3	Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Jumlah Sumber Pencemar dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang Dihentikan	1 Titik	49,808,000	1 Titik	49,809,000	Dinas Lingkungan Hidup Daerah
2	1 1	4			PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Persentase Ruang Terbuka Hijau	100 %	92,744,740	100 %	92,744,800	
2	1 1	4	2.0 1		Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Persentase Ruang Terbuka Hijau	0 %	92,744,740	0 %	92,744,800	
2	1 1	4	2.0 1	4	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Ha	92,744,740	1 Ha	92,744,800	Dinas Lingkungan Hidup Daerah

2	1 1	5			PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Presentase Pengelolaan Limbah B3	100 %	30,095,000	100 %	30,096,000	
2	1 1	5	2.0 1		Penyimpanan sementara Limbah B3	Persentase Perusahaan Yang Mengelola Limbah B3	100 %	30,095,000	100 %	30,096,000	
2	1 1	5	2.0 1	1	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan sementara Limbah B3 Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Fasilitasi Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	1 Dokumen	30,095,000	1 Dokumen	30,096,000	Dinas Lingkungan Hidup Daerah
2	1 1	6			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Persentase Pelaku Usaha pemilik izin Lingkungan dan Izin PPLH yang terawasi	100 %	124,771,000	100 %	124,771,100	
2	1 1	6	2.0 1		Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pelaku Usaha pemilik izin Lingkungan, Izin PPLH yang terawasi	100 %	124,771,000	100 %	124,771,100	
2	1 1	6	2.0 1	3	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Dari Usaha dan/atau Kegiatan yang Diawasi Izin Lingkungan, Persetujuan Lingkungan, Surat Kelayakan Operasi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1 Laporan	40,000,000	1 Laporan	40,000,000	Dinas Lingkungan Hidup Daerah

2	1 1	6	2.0 1	4	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana PPLH	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana PPLHD	0 Dokumen	84,771,000	0 Dokumen	84,771,100	Dinas Lingkungan Hidup Daerah
					Persentase pelanggaran lingkungan hasil pengawasan usaha dan/atau kegiatan yang diberi sanksi	100 %		100 %			
2	1 1	9			PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase kelembagaan kelompok masyarakat peduli lingkungan hidup yang memperoleh penghargaan	20 %	0	20 %	0	
					Persentase penghargaan lingkungan hidup yang diberikan kepada Lembaga Pendidikan	100 %		100 %			
2	1 1	9	2.0 1		Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penghargaan Lingkungan Hidup dan Peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia	3 Kegiatan	0	3 Kegiatan	0	
2	1 1	9	2.0 1	1	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH	1 Entitas	0	1 Entitas	0	Dinas Lingkungan Hidup Daerah
2	1 1	1 0			PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Kasus Aduan Lingkungan Yang terselesaikan	100 %	80,000,000	100 %	80,000,000	
2	1 1	1 0	2.0 1		Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	Jumlah Kasus Sengketa Lingkungan Hidup Yang diselesaikan	10 Kasus	80,000,000	10 Kasus	80,000,000	
2	1 1	1 0	2.0 1	1	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap PPLH Kabupaten/Kota	Jumlah Pengaduan Masyarakat Terhadap PPLH Kabupaten/Kota yang Ditindaklanjuti/Ditangani	1 Dokumen	40,000,000	1 Dokumen	40,000,000	Dinas Lingkungan Hidup Daerah

2	1 1	1 0	2.0 1	2	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau Melalui Pengadilan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau Melalui Pengadilan	1 Dokumen	40,000,000	1 Dokumen	40,000,000	Dinas Lingkungan Hidup Daerah
2	1 1	1 1			PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase jumlah sampah yang tertangani di Wilayah kota	100 %	8,451,979,500	100 %	8,295,860,600	
2	1 1	1 1	2.0 1		Pengelolaan Sampah	Persentase Sampah Yang terkelola Berdasarkan Prinsip 3R (Reduce, Reuse, Recycle) pada wilayah layanan	100 %	8,431,979,500	100 %	8,275,860,600	
2	1 1	1 1	2.0 1	1	Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota yang Disusun dan Ditetapkan	1 Dokumen	49,782,000	1 Dokumen	49,783,000	Dinas Lingkungan Hidup Daerah
2	1 1	1 1	2.0 1	4	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat	1 Kelompok	6,726,000,000	1 Kelompok	6,569,880,000	Dinas Lingkungan Hidup Daerah
2	1 1	1 1	2.0 1	5	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Bersama Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Pihak Lain di Luar Kabupaten/Kota untuk Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota. Pengelolaan Persampahan Sesuai dengan Rencana Induk Pengelolaan Sampah dan Mengacu pada Jakstrada	1 Dokumen	1,656,197,500	1 Dokumen	1,656,197,600	Dinas Lingkungan Hidup Daerah

2	1 1	1 1	2.0 2		Penerbitan Izin Pendaaurulangan Sampah/Pengelolaan Sampah, Pengangkutan Sampah dan Pemrosesan Akhir Sampah yang Diselenggarakan oleh Swasta	Persentase Pelaku Usaha Yang bergerak dalam pengelolaan sampah	100 %	20,000,000	100 %	20,000,000	
2	1 1	1 1	2.0 2	1	Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Rekomendasi Dari Izin/Persetujuan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Pengelolaan Sampah yang Difasilitasi	1 Rekomendasi	20,000,000	1 Rekomendasi	20,000,000	Dinas Lingkungan Hidup Daerah
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						
2	1 2				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL			5,086,927,648		2,117,237,820	
2	1 2	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase urusan penunjang pemerintahan yang dilaksanakan	100 %	4,321,842,648	100 %	1,396,360,420	
2	1 2	1	2.0 1		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja yang tersedia	61 Dok	17,100,000	61 Dok	17,100,000	
2	1 2	1	2.0 1	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	8,550,000	2 Dokumen	8,550,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Daerah
2	1 2	1	2.0 1	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	8,550,000	1 Laporan	8,550,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Daerah
2	1 2	1	2.0 2		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah adminitrasi ASN +PHL+Jumlah Koordinasi	66 Orang	3,586,927,690	66 Orang	705,320,000	

2	1 2	1	2.0 2	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	0 Orang/bulan	2,883,607,690	0 Orang/bulan	0	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Daerah
2	1 2	1	2.0 2	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	703,320,000	1 Dokumen	705,320,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Daerah
2	1 2	1	2.0 3		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah asset BMD dan rencana kebutuhan barang	542 BMD	8,550,000	542 BMD	9,910,000	
2	1 2	1	2.0 3	5	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	97 Laporan	8,550,000	97 Laporan	9,910,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Daerah
2	1 2	1	2.0 5		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Pegawai Perangkat daerah	50 Org	53,964,000	50 Org	44,354,000	
2	1 2	1	2.0 5	4	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	5 Dokumen	4,560,000	5 Dokumen	4,910,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Daerah
2	1 2	1	2.0 5	1 1	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang - Undangan	50 Orang	49,404,000	50 Orang	39,444,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Daerah
						Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	50 Orang		50 Orang		
2	1 2	1	2.0 6		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase Pelaksanaan Administrasi Umum	100 %	552,832,878	100 %	488,888,340	
2	1 2	1	2.0 6	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	25 Paket	90,322,968	25 Paket	67,612,120	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Daerah

2	1 2	1	2.0 6	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	7,016,050	1 Paket	7,016,050	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Daerah
2	1 2	1	2.0 6	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	25 Paket	213,969,810	25 Paket	177,478,970	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Daerah
2	1 2	1	2.0 6	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	37,794,050	1 Paket	26,051,200	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Daerah
2	1 2	1	2.0 6	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	35 Laporan	203,730,000	35 Laporan	210,730,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Daerah
2	1 2	1	2.0 7		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang	30 BMD	25,236,000	30 BMD	25,236,000	
2	1 2	1	2.0 7	1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit	25,236,000	1 Unit	25,236,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Daerah
2	1 2	1	2.0 8		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Penggunaan Jasa Penunjang Urusan	100 %	77,232,080	100 %	105,552,080	
2	1 2	1	2.0 8	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3000 kwh	52,822,080	3000 kwh	52,822,080	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Daerah
2	1 2	1	2.0 8	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	9,260,000	1 Paket	9,260,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Daerah

2	1 2	1	2.0 8	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2 Laporan	15,150,000	2 Laporan	43,470,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Daerah
2	1 2	2			PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Perekaman KTP elektronik	66.66 %	381,914,000	66.66 %	316,225,400	
						Persentase anak usia 01-7 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA	100 %		100 %		
2	1 2	2	2.0 1		Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Persentase penerbitan dokumen kependudukan atas pendaftaran penduduk	100 %	92,050,000	100 %	90,257,750	
2	1 2	2	2.0 1	4	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	9 Laporan	92,050,000	9 Laporan	90,257,750	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Daerah
2	1 2	2	2.0 2		Penataan Pendaftaran Penduduk	Jumlah anak memiliki Kartu Identitas Anak	7032 Anak	61,975,000	7032 Anak	61,975,000	
2	1 2	2	2.0 2	2	Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-EI, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan	Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-EI, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan yang Tersedia	7032 Dokumen	61,975,000	7032 Dokumen	61,975,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Daerah
2	1 2	2	2.0 3		Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Jumlah sasaran penyelenggaraan pelayanan peristiwa kependudukan	29 Desa	30,450,000	29 Desa	34,676,300	
2	1 2	2	2.0 3	5	Sosialisasi Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pendaftaran Penduduk	1 Laporan	30,450,000	1 Laporan	34,676,300	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Daerah
2	1 2	2	2.0 4		Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Jumlah kelurahan dan desa sasaran pembinaan dan pengawasan	29 Desa	197,439,000	29 Desa	129,316,350	

2	1 2	2	2.0 4	1	Pengelolaan dan Pelaporan Penggunaan Blangko Dokumen Kependudukan, Formulir, dan Buku untuk Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan dan Pelaporan Penggunaan Blangko Dokumen Kependudukan, Formulir, dan Buku untuk Pelayanan Pendaftaran Penduduk	1 Dokumen	197,439,000	1 Dokumen	129,316,350	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Daerah
2	1 2	3			PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Rasio pasangan berakte Nikah	100 %	167,455,000	100 %	194,636,000	
2	1 2	3	2.0 1		Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah kepemilikan dokumen kependudukan atas layanan pencatatan sipil	100 %	19,950,000	100 %	20,139,750	
						Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang ditingkatkan	2 Layanan		2 Layanan		
2	1 2	3	2.0 1	2	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan	2 Layanan	19,950,000	2 Layanan	20,139,750	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Daerah
2	1 2	3	2.0 2		Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Presentase penduduk melaporkan kejadian penting kependudukan	100 %	147,505,000	100 %	174,496,250	
2	1 2	3	2.0 2	4	Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil	15.572 Laporan	73,680,000	15.572 Laporan	74,380,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Daerah
2	1 2	3	2.0 2	8	Sosialisasi Terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil sosialisasi Pencatatan Sipil	9 Laporan	73,825,000	9 Laporan	100,116,250	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Daerah
2	1 2	4			PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Jumlah ketersediaan data base kependudukan skala provinsi	168.733 Jiwa	126,916,000	168.733 Jiwa	126,916,000	

2	1 2	4	2.0 1		Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	Jumlah data base kependudukan skala kabupaten	9 Kecamatan	61,676,000	9 Kecamatan	61,676,000	
2	1 2	4	2.0 1	2	Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	1 Dokumen	61,676,000	1 Dokumen	61,676,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Daerah
2	1 2	4	2.0 2		Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah penduduk tervalidasi data kependudukannya dalam data base	9 Kecamatan	65,240,000	9 Kecamatan	65,240,000	
2	1 2	4	2.0 2	1	Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Dokumen Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan yang Disusun	9 Dokumen	65,240,000	9 Dokumen	65,240,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Daerah
2	1 2	5			PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Pemanfaatan data kependudukan	100 %	88,800,000	100 %	83,100,000	
					Persentase penyajian data kependudukan skala kabupaten dalam 1 tahun	0 %	0 %				
2	1 2	5	2.0 1		Penyusunan Profil Kependudukan	Jumlah bentuk dokumen data kependudukan	2 Dok	88,800,000	2 Dok	83,100,000	
2	1 2	5	2.0 1	1	Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota	Jumlah Data Kependudukan Kabupaten/Kota	0 Dokumen	88,800,000	0 Dokumen	83,100,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Daerah
					Jumlah Data Kependudukan Kabupaten/Kota	2 Dokumen	2 Dokumen				
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						
2	8				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK			466,926,000		484,530,250	
2	8	2			PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	52.76 %	66,530,000	52.76 %	66,530,000	
					Persentase ARG pada belanja langsung APBD	100 %	100 %				

2	8	2	2.0 2		Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Presentase perempuan yang diberdayakan dalam bid.politik, hukum, sosial, ekonomi dan ormas di Kab. Morowali	100 %	66,530,000	100 %	66,530,000	
2	8	2	2.0 2	1	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	66,530,000	1 Dokumen	66,530,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	8	2	2.0 2	2	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah Organisasi Masyarakat yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Kebijakan Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	0 Organisasi	0	0 Organisasi	0	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	8	3			PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	100 %	77,712,000	100 %	83,710,250	
2	8	3	2.0 1		Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	presentase, penyelesaian, pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan	100 %	77,712,000	100 %	83,710,250	
2	8	3	2.0 1	1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	22,750,000	1 Dokumen	28,598,250	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

2	8	3	2.0 1	2	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Perangkat Daerah	54,962,000	1 Perangkat Daerah	55,112,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	8	4			PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Persentase peningkatan keluarga pra sejahtera	50 %	34,824,000	50 %	37,545,900	
2	8	4	2.0 1		Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender dan hak anak tingkat kab. Morowali	2 Kegiatan	34,824,000	2 Kegiatan	37,545,900	
2	8	4	2.0 1	3	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	34,824,000	1 Dokumen	37,545,900	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	8	6			PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Indeks Perlindungan Anak (IPA)	46 %	222,000,000	46 %	231,334,100	
2	8	6	2.0 1		Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga PHA pada Pemerintah, Non Pemerintah dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	5 Lembaga	222,000,000	5 Lembaga	231,334,100	
2	8	6	2.0 1	2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelebagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelebagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	222,000,000	1 Dokumen	231,334,100	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

2	8	7			PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Persentase anak memerlukan perlindungan khusus yang mendapatkan layanan komprehensif	100 %	65,860,000	100 %	65,410,000	
2	8	7	2.0 1		Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan advokasi dan penyelesaian pencegahan kekerasan terhadap anak yang melibatkan para pihak lingkup kab.Morowali	3 Kegiatan	65,860,000	3 Kegiatan	65,410,000	
2	8	7	2.0 1	1	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Perangkat Daerah	65,860,000	1 Perangkat Daerah	65,410,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	1 3				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA			6,858,370,298		3,280,418,267	
2	1 3	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase urusan penunjang pemerintahan yang dilaksanakan	100 %	4,225,448,438	100 %	626,189,217	
2	1 3	1	2.0 2		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Capaian Kinerja (%)	100 %	3,560,957,471	100 %	0	
				Persentase Pemenuhan Urusan Perkantoran		100 %	100 %				
2	1 3	1	2.0 2	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	30 Orang/bulan	3,193,157,471	30 Orang/bulan	0	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

2	1 3	1	2.0 2	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	367,800,000	1 Dokumen	0	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	1 3	1	2.0 6		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase administrasi umum terlaksana	100 %	414,461,560	100 %	376,159,810	
2	1 3	1	2.0 6	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	57,628,980	1 Paket	57,628,980	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	1 3	1	2.0 6	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	81,658,580	1 Paket	80,011,580	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	1 3	1	2.0 6	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	57,432,350	1 Paket	19,995,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

2	1 3	1	2.0 6	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	217,741,650	1 Laporan	218,524,250	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	1 3	1	2.0 8		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penggunaan jasa penunjang urusan Pemda	100 %	41,945,091	100 %	41,945,091	
2	1 3	1	2.0 8	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	41,045,091	1 Laporan	41,045,091	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	1 3	1	2.0 8	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	900	1 Laporan	900	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	1 3	1	2.0 9		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	208,084,316	100 %	208,084,316	
2	1 3	1	2.0 9	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4 Unit	59,750,000	4 Unit	59,750,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

2	1 3	1	2.0 9	1 0	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	148,334,316	1 Unit	148,334,316	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	1 3	3			PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA	Persentase desa yang melakukan kerjasama antar desa	29.3 %	110,378,300	29.3 %	113,344,450	
2	1 3	3	2.0 1		Fasilitas Kerja Sama antar Desa	persentase SDM yang Berkualitas dan Berdaya saing	100 %	110,378,300	100 %	113,344,450	
2	1 3	3	2.0 1	1	Fasilitas Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	1 Dokumen	50,682,000	1 Dokumen	50,682,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	1 3	3	2.0 1	2	Fasilitas Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota	1 Dokumen	59,696,300	1 Dokumen	62,662,450	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	1 3	4			PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa yang tertib administrasi (%)	100 %	1,083,228,100	100 %	1,101,821,900	
					Presentase Bumdes yang Dibina (%)	29.37 %	29.37 %				
2	1 3	4	2.0 1		Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah BUMDes dan lembaga kerjasama antar desa yang di bina dan diawasi	126 BUMDes	1,083,228,100	126 BUMDes	1,101,821,900	

2	1 3	4	2.0 1	1	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	1 Dokumen	114,785,000	1 Dokumen	114,999,750	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	1 3	4	2.0 1	2	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	1 Dokumen	126,637,000	1 Dokumen	117,988,500	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	1 3	4	2.0 1	4	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	126 Dokumen	88,148,950	126 Dokumen	96,586,250	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	1 3	4	2.0 1	5	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	126 Orang	39,596,000	126 Orang	29,996,250	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

2	1 3	4	2.0 1	6	Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa	Jumlah Laporan Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa	0 Laporan	0	0 Laporan	0	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	1 3	4	2.0 1	7	Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa	9 Dokumen	118,204,250	9 Dokumen	118,520,750	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	1 3	4	2.0 1	8	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	1 Dokumen	80,662,050	1 Dokumen	80,662,050	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	1 3	4	2.0 1	9	Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	1 Laporan	449,485,850	1 Laporan	449,986,850	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

2	1 3	4	2.0 1	1 0	Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	1 Laporan	11,700,000	1 Laporan	25,013,500	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	1 3	4	2.0 1	1 1	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Jumlah Dokumen Profil Desa yang tersusun	1 Dokumen	54,009,000	1 Dokumen	68,068,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	1 3	5			PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Persentase Lembaga Kemasyarakatan dan Lembaga Desa yang diberdayakan/dibina (%)	100 %	1,439,315,460	100 %	1,439,062,700	
2	1 3	5	2.0 1		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang terbentuk di desa	7 Lembaga	1,439,315,460	7 Lembaga	1,439,062,700	

2	1 3	5	2.0 1	2	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	1 Dokumen	30,000,000	1 Dokumen	29,815,240	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	1 3	5	2.0 1	3	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	126 Lembaga	34,981,250	126 Lembaga	34,913,250	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	1 3	5	2.0 1	5	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	1 Dokumen	70,012,600	1 Dokumen	70,012,600	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	1 3	5	2.0 1	6	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	1 Laporan	32,912,200	1 Laporan	32,912,200	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

2	1 3	5	2.0 1	9	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	1 Dokumen	1,271,409,410	1 Dokumen	1,271,409,410	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						
2	1 5				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN			10,207,320,503		13,785,888,355	
2	1 5	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase urusan penunjang pemerintahan yang dilaksanakan	100 %	6,461,947,412	100 %	7,485,750,355	
2	1 5	1	2.0 1		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	2,030,000	100 %	2,030,000	
2	1 5	1	2.0 1	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	2,030,000	4 Dokumen	2,030,000	Dinas Perhubungan Daerah
2	1 5	1	2.0 2		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Administrasi Keuangan	100 %	4,872,167,510	100 %	6,126,824,883	
2	1 5	1	2.0 2	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	32 Orang/bulan	3,301,972,310	32 Orang/bulan	4,660,208,883	Dinas Perhubungan Daerah
2	1 5	1	2.0 2	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Pegawai PHL yang Dibayarkan Jasanya	58 Orang	1,570,195,200	58 Orang	1,466,616,000	Dinas Perhubungan Daerah
2	1 5	1	2.0 5		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 %	54,648,000	100 %	98,898,000	
2	1 5	1	2.0 5	2	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	90 Set	54,648,000	90 Set	54,648,000	Dinas Perhubungan Daerah
2	1 5	1	2.0 5	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	2 Orang	0	2 Orang	44,250,000	Dinas Perhubungan Daerah

2	1	1	2.0		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Administrasi Umum	100 %	179,155,340	100 %	257,019,100	
2	1	1	2.0	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	92 Buah	3,019,100	92 Buah	3,019,100	Dinas Perhubungan Daerah
2	1	1	2.0	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Kelengkapan Kantor yang diadakan	6 Unit	28,443,760	6 Unit	75,000,000	Dinas Perhubungan Daerah
2	1	1	2.0	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	11 Buah	0	11 Buah	7,500,000	Dinas Perhubungan Daerah
2	1	1	2.0	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	8 Paket	32,384,480	8 Paket	35,000,000	Dinas Perhubungan Daerah
2	1	1	2.0	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang yang dicetak (Dokumen)	42600 Lembar	14,910,000	42600 Lembar	13,000,000	Dinas Perhubungan Daerah
2	1	1	2.0	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Pemenuhan Fasilitas Kunjungan Tamu	12 Bulan	0	12 Bulan	3,500,000	Dinas Perhubungan Daerah
2	1	1	2.0	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	6 Kegiatan	100,398,000	6 Kegiatan	120,000,000	Dinas Perhubungan Daerah
2	1	1	2.0		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	1,172,760,000	100 %	590,000,000	
2	1	1	2.0	2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	1,146,195,000	1 Unit	450,000,000	Dinas Perhubungan Daerah
2	1	1	2.0	5	Pengadaan Mebel	Jumlah Unit Pengadaan Mebel	10 Buah	26,565,000	10 Buah	105,000,000	Dinas Perhubungan Daerah
2	1	1	2.0	1	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	10 Buah	0	10 Buah	25,000,000	Dinas Perhubungan Daerah

2	1	1	2.0	1	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Cakupan Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	1 Gedung	0	1 Gedung	10,000,000	Dinas Perhubungan Daerah
2	1	1	2.0		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	25,598,372	100 %	25,978,372	
2	1	1	2.0	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Ketersediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Bulan	20,028,372	12 Bulan	20,078,372	Dinas Perhubungan Daerah
2	1	1	2.0	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang diperbaiki	7 Unit	4,670,000	7 Unit	5,000,000	Dinas Perhubungan Daerah
2	1	1	2.0	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Cakupan Kebersihan Lingkungan Kantor OPD	12 Bulan	900	12 Bulan	900	Dinas Perhubungan Daerah
2	1	1	2.0		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	155,588,190	100 %	385,000,000	
2	1	1	2.0	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10 Unit	25,900,000	10 Unit	35,000,000	Dinas Perhubungan Daerah
2	1	1	2.0	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Gedung	14,944,400	2 Gedung	200,000,000	Dinas Perhubungan Daerah
2	1	1	2.0	1	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Cakupan Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	1 Gedung	114,743,790	1 Gedung	150,000,000	Dinas Perhubungan Daerah
2	1	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	25.00 %	1,372,193,000	25.00 %	3,755,588,000	
2	1	2	2.0		Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Presentase Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten yang Ditetapkan	100 %	5,600,000	100 %	60,588,000	

2	1 5	2	2.0 1	1	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Sosialisasi Pelaksanaan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	2 Kegiatan	5,600,000	2 Kegiatan	60,588,000	Dinas Perhubungan Daerah
2	1 5	2	2.0 2		Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Persentase ketersediaan Prasarana pada Jaringan Jalan Di Kab. Morowali	10 %	605,935,000	10 %	600,000,000	
2	1 5	2	2.0 2	2	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Paket Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	3 Paket	605,935,000	3 Paket	600,000,000	Dinas Perhubungan Daerah
2	1 5	2	2.0 5		Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Presentase Pelaksanaan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	20 %	426,688,000	20 %	2,060,000,000	
2	1 5	2	2.0 5	1	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia	1 Gedung	371,700,000	1 Gedung	2,000,000,000	Dinas Perhubungan Daerah
2	1 5	2	2.0 5	8	Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pengujian Kendaraan Bermotor	2 Kegiatan	54,988,000	2 Kegiatan	60,000,000	Dinas Perhubungan Daerah
2	1 5	2	2.0 6		Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Presentase Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas pada Jaringan Jalan Di Kab/Kota	2 Kegiatan	33,970,000	2 Kegiatan	35,000,000	
2	1 5	2	2.0 6	1	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Pengendalian Kegiatan Rekayasa Lalu Lintas Jalan Di Kab. Morowali	8 Kegiatan	33,970,000	8 Kegiatan	35,000,000	Dinas Perhubungan Daerah
2	1 5	2	2.0 9		Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang/Barang	2 Unit	300,000,000	2 Unit	1,000,000,000	
2	1 5	2	2.0 9	1	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia	3 Unit	300,000,000	3 Unit	1,000,000,000	Dinas Perhubungan Daerah

2	1 5	3			PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Persentase Ketersediaan Sarana. Informasi. Korodinasi dan Disiplin Angkutan Penyebrangan	100 %	2,373,180,091	100 %	2,544,550,000	
2	1 5	3	2.0 1		Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut bagi Badan Usaha yang Berdomisili dalam Daerah Kabupaten/Kota dan Beroperasi pada Lintas Pelabuhan di Daerah Kabupaten/Kota	Presentase Pelaksanaan Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut bagi Badan Usaha yang Berdomisili dalam Daerah Kabupaten/Kota dan Beroperasi pada Lintas Pelabuhan di Daerah Kabupaten/Kota	0 %	0	0 %	350	
2	1 5	3	2.0 1	1	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Angkutan Laut Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Rekomendasi yang dikeluarkan untuk penertiban perijinan dan non perijinan	15 Dokumen	0	15 Dokumen	350	Dinas Perhubungan Daerah
2	1 5	3	2.0 2		Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat bagi Orang Perorangan atau Badan Usaha yang Berdomisili dan yang Beroperasi pada Lintas Pelabuhan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat bagi Orang Perorangan atau Badan Usaha yang Berdomisili dan yang Beroperasi pada Lintas Pelabuhan	5 Kegiatan	25,210,000	5 Kegiatan	25,350,000	
2	1 5	3	2.0 2	1	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Rekomendasi yang dikeluarkan untuk penertiban perijinan dan non perijinan	10 Dokumen	0	10 Dokumen	350	Dinas Perhubungan Daerah

2	1 5	3	2.0 2	2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan	4 Kegiatan	25,210,000	4 Kegiatan	25,000,000	Dinas Perhubungan Daerah
2	1 5	3	2.0 6		Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Terletak pada Jaringan Jalan Kabupaten/Kota dan/atau Jaringan Jalur Kereta Api Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Lintas Penyeberangan Persetujuan Pengoperasian Kapal	0 Dokumen	0	0 Dokumen	3,500,000	
2	1 5	3	2.0 6	1	Penyediaan Data dan Informasi Jaringan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Terletak pada Jaringan Jalan Kabupaten/Kota dan/atau Jaringan Jalur Kereta Api Kabupaten/Kota dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Lintas Penyeberangan Persetujuan Pengoperasian Kapal	12 Dokumen	0	12 Dokumen	3,500,000	Dinas Perhubungan Daerah
2	1 5	3	2.0 8		Penerbitan Izin Usaha Jasa terkait dengan Perawatan dan Perbaikan Kapal	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Jasa terkait dengan Perawatan dan Perbaikan Kapal	0 %	0	0 %	350	
2	1 5	3	2.0 8	1	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Jasa terkait dengan Perawatan dan Perbaikan Kapal dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Rekomendasi yang dikeluarkan untuk penertiban perijinan dan non perijinan	3 Dokumen	0	3 Dokumen	350	Dinas Perhubungan Daerah

2	15	3	2.10		Penetapan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Lokal	Persentasi Pelaksanaan Kegiatan Penetapan Rencana Induk dan DLKR/DLKP untuk Pelabuhan Sungai dan Danau	100 %	12,567,500	100 %	15,000,000	
2	15	3	2.10	3	Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Lokal	Jumlah Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Lokal	1 Kegiatan	12,567,500	1 Kegiatan	15,000,000	Dinas Perhubungan Daerah
2	15	3	2.12		Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	Jumlah Pembangunan Dermaga dan Tambatan Perahu	8 Unit	2,335,402,591	8 Unit	2,500,000,000	
2	15	3	2.12	2	Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Lokal	Jumlah Pelabuhan Pengumpan Lokal yang Dibangun	8 Unit	2,335,402,591	8 Unit	2,500,000,000	Dinas Perhubungan Daerah
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						
2	16				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA			7,515,965,760		6,851,154,413	
2	16	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase urusan penunjang pemerintahan yang dilaksanakan	100 %	4,213,530,160	100 %	3,354,599,773	
2	16	1	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Dokumen	0	1 Dokumen	25,000,000	
2	16	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	0 Dokumen	0	0 Dokumen	20,000,000	Dinas Komunikasi dan Informatika

2	1 6	1	2.0 1	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	0 Laporan	0	0 Laporan	5,000,000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	1 6	1	2.0 2		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase peningkatan pelayanan administrasi keuangan yang cepat dan efisien	12 Bulan	3,714,286,037	12 Bulan	2,649,689,773	
2	1 6	1	2.0 2	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	17 Orang/bulan	2,916,166,037	17 Orang/bulan	1,849,889,773	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	1 6	1	2.0 2	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	798,120,000	12 Dokumen	799,800,000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	1 6	1	2.0 5		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen administrasi kepegawaian Perangkat Daerah	2 Dokumen	0	2 Dokumen	65,000,000	
2	1 6	1	2.0 5	2	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	0 Paket	0	0 Paket	20,000,000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	1 6	1	2.0 5	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	0 Orang	0	0 Orang	45,000,000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	1 6	1	2.0 6		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	5 Laporan	347,308,240	5 Laporan	289,914,000	
						Terseleenggaranya Rapat Koordinasi dan konsultasi SKPD	100 %		100 %		
2	1 6	1	2.0 6	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	91,570,050	4 Paket	20,000,000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	1 6	1	2.0 6	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	52,629,540	2 Paket	25,000,000	Dinas Komunikasi dan Informatika

2	1	1	2.0	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	62,222,650	3 Paket	75,000,000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	1	1	2.0	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	13 Laporan	140,886,000	13 Laporan	169,914,000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	1	1	2.0		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	2 Laporan	0	2 Laporan	60,000,000	
2	1	1	2.0	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	0 0	0	0 0	10,000,000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	1	1	2.0	1	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0 0	0	0 0	50,000,000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	1	1	2.0		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	4 Dokumen	116,435,883	4 Dokumen	129,496,000	
2	1	1	2.0	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	0 Laporan	0	0 Laporan	1,596,000	Dinas Komunikasi dan Informatika
						Jumlah Penyediaan Jasa Surat Menyurat	133 Lembar		133 Lembar		
2	1	1	2.0	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Cakupan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Bulan	60,005,883	12 Bulan	67,000,000	Dinas Komunikasi dan Informatika
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan		
2	1	1	2.0	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Cakupan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	27 Unit	56,430,000	27 Unit	60,000,000	Dinas Komunikasi dan Informatika
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 Laporan		6 Laporan		

2	1 6	1	2.0 8	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	0	1 Laporan	900	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	1 6	1	2.0 9		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya pemeliharaan rutin Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	100 %	35,500,000	100 %	135,500,000	
2	1 6	1	2.0 9	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	0 Unit	35,500,000	0 Unit	35,500,000	Dinas Komunikasi dan Informatika
						Jumlah Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional	3 Unit		3 Unit		
2	1 6	1	2.0 9	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0 Unit	0	0 Unit	100,000,000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	1 6	2			PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase Layanan Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah yang diselenggarakan secara online dan offline	100 %	872,201,960	100 %	810,000,000	
2	1 6	2	2.0 1		Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	100 %	872,201,960	100 %	810,000,000	
2	1 6	2	2.0 1	3	Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah	Cakupan Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Dalam Kota	12 Bulan	143,102,000	12 Bulan	190,000,000	Dinas Komunikasi dan Informatika
						Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah	0 Dokumen		0 Dokumen		
2	1 6	2	2.0 1	6	Pelayanan Informasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik	0 Dokumen	309,099,960	0 Dokumen	200,000,000	Dinas Komunikasi dan Informatika
						Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik	4 Dokumen		4 Dokumen		

2	1 6	2	2.0 1	7	Layanan Hubungan Media	Jumlah Layanan Hubungan Media	2 Layanan	420,000,000	2 Layanan	420,000,000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	1 6	2	2.0 1	1 0	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Jumlah Sumber Daya Komunikasi Publik yang Meningkatkan Kapasitasnya	0 Orang	0	0 Orang	0	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	1 6	3			PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Persentase Pengelolaan Aplikasi Informatika	100 %	2,430,233,640	100 %	2,686,554,640	
2	1 6	3	2.0 1		Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengelolaan Nama Domain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah pusat dan sub domain di lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	100 %	1,960,054,000	100 %	2,065,100,000	
2	1 6	3	2.0 1	2	Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1 Tahun	65,100,000	1 Tahun	65,100,000	Dinas Komunikasi dan Informatika
						Jumlah Dokumen Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	0 Dokumen		0 Dokumen		
2	1 6	3	2.0 1	3	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Cakupan penyelenggaraan sistem jaringan intra Pemerintah Daerah	12 Bulan	1,894,954,000	12 Bulan	2,000,000,000	Dinas Komunikasi dan Informatika
						Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	0 Unit		0 Unit		
						Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	29 Unit		29 Unit		

2	1 6	3	2.0 2		Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penatalaksanaan dan Pengawasan E-Government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	470,179,640	1 Dokumen	621,454,640	
2	1 6	3	2.0 2	1	Penatalaksanaan dan Pengawasan E-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penatalaksanaan dan Pengawasan E-Government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	29,025,000	1 Dokumen	40,000,000	Dinas Komunikasi dan Informatika
						Jumlah Penatalaksanaan dan Pengawasan E-Government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	9 Kecamatan		9 Kecamatan		
2	1 6	3	2.0 2	3	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Jumlah Pusat Data Pemerintahan Daerah yang Dikelola	0 Unit	13,250,000	0 Unit	15,000,000	Dinas Komunikasi dan Informatika
						Tersedianya Perangkat Pusat Data Pemerintahan Daerah yang Dikelola	2 Unit		2 Unit		
2	1 6	3	2.0 2	4	Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	0 Dokumen	25,350,000	0 Dokumen	25,350,000	Dinas Komunikasi dan Informatika
						Jumlah Penyediaan perangkat Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	16 Unit		16 Unit		
2	1 6	3	2.0 2	5	Koordinasi dan Sinkronisasi Sistem Keamanan Informasi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Sistem Keamanan Informasi	0 Dokumen	0	0 Dokumen	10,000,000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	1 6	3	2.0 2	6	Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik	Jumlah Perangkat Daerah yang Menerapkan Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik	0 Perangkat Daerah	67,602,000	0 Perangkat Daerah	76,152,000	Dinas Komunikasi dan Informatika

						Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi data dan informasi elektronik	3 Kegiatan		3 Kegiatan		
2	1 6	3	2.0 2	7	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan	5 Tenaga Ahli	300,000,000	5 Tenaga Ahli	420,000,000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	1 6	3	2.0 2	1 0	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	0 Dokumen	34,952,640	0 Dokumen	34,952,640	Dinas Komunikasi dan Informatika
						Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	1 Dokumen		1 Dokumen		
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						
2	1 7				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH			7,118,097,674		30,859,828,525	
2	1 7	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Urusan Penunjang Pemerintahan yang dilaksanakan	100 %	4,033,996,394	100 %	27,691,545,256	
2	1 7	1	2.0 1		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Capaian Realisasi Target Evaluasi Kinerja Dinas Kopumkm	95 %	0	95 %	35,000,000	
2	1 7	1	2.0 1	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	0 Laporan	0	0 Laporan	35,000,000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah
2	1 7	1	2.0 2		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Capaian Realisasi Keuangan Dinas Kopumkm	100 %	3,140,636,164	100 %	26,050,935,600	

2	1	1	2.0	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12 Bulan	2,554,556,164	12 Bulan	25,464,855,600	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah
2	1	1	2.0	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	586,080,000	1 Dokumen	586,080,000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah
2	1	1	2.0		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ASN Dinas Kopumkm yang mengikuti Diklat	19 %	0	19 %	65,000,000	
2	1	1	2.0	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	3 Orang	0	3 Orang	5,000,000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah
2	1	1	2.0	1	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	2 Orang	0	2 Orang	60,000,000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah
2	1	1	2.0		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Capaian Realisasi Target Administrasi Umum	100 %	696,549,780	100 %	715,476,206	
2	1	1	2.0	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	20 Unit	183,287,890	20 Unit	244,528,046	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah
2	1	1	2.0	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	0	1 Paket	20,000,000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah
2	1	1	2.0	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	15 Paket	116,410,890	15 Paket	54,065,360	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah

2	1	1	2.0	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	85.12 Lembar	44,968,200	85.12 Lembar	45,000,000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah
2	1	1	2.0	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	34 Laporan	351,882,800	34 Laporan	351,882,800	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah
2	1	1	2.0		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Capaian Target Pengadaan Barang Milik Daerah	100 %	117,988,450	100 %	298,933,450	
2	1	1	2.0	2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	5 Unit	0	5 Unit	180,945,000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah
2	1	1	2.0	5	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	25 Unit	117,988,450	25 Unit	117,988,450	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah
2	1	1	2.0		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Capaian Target Jasa Penunjang Urusan Pemerintah	100 %	42,822,000	100 %	51,200,000	
2	1	1	2.0	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	41,922,000	1 Laporan	50,000,000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah
2	1	1	2.0	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	900	12 Laporan	1,200,000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah
2	1	1	2.0		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Capaian Target Pemeliharaan Penunjang Urusan Pemerintah	100 %	36,000,000	100 %	475,000,000	

2	1	1	2.0	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4 Unit	36,000,000	4 Unit	75,000,000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah
2	1	1	2.0	1	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	0	1 Unit	400,000,000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah
2	1	2			PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	Persentase izin Usaha simpan pinjam	75 %	0	75 %	85,000,000	
2	1	2	2.0		Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Koperasi yang menerbitkan izin usaha	100 %	0	100 %	50,000,000	
2	1	2	2.0	1	Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	5 Unit Usaha	0	5 Unit Usaha	50,000,000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah
2	1	2	2.0		Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Izin usaha simpan pinjam yang di terbitkan	80 %	0	80 %	35,000,000	

2	1 7	2	2.0 2	1	Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	5 Unit Usaha	0	5 Unit Usaha	35,000,000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah
2	1 7	3			PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase Capaian Koperasi Yang Berkualitas	38 %	106,764,200	38 %	85,000,000	
2	1 7	3	2.0 1		Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah koperasi yang aktif	38 %	106,764,200	38 %	85,000,000	
2	1 7	3	2.0 1	1	Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang Bersertifikat (NIK)	55 Unit	77,264,000	55 Unit	50,000,000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah
					Jumlah Koperasi yang Telah Dilakukan Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	0 Unit Usaha	0 Unit Usaha				
2	1 7	3	2.0 1	2	Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi Terhadap Peraturan PerundangUndangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang melaksanakan RAT	15 Unit	29,500,200	15 Unit	35,000,000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah
					Jumlah Koperasi yang Memenuhi Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota Kinerja	0 Unit Usaha	0 Unit Usaha				
2	1 7	4			PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Persentase Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi yang Dinilai Kesehatannya	50 %	29,992,050	50 %	40,000,000	

2	1 7	4	2.0 1		Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	persentase koperasi yang memiliki pertumbuhan omset yang baik	50 %	29,992,050	50 %	40,000,000	
2	1 7	4	2.0 1	1	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan	10 Unit Usaha	29,992,050	10 Unit Usaha	40,000,000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah
2	1 7	5			PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase Koperasi yang Mengikuti Pelatihan	100 %	419,288,300	100 %	453,588,200	
2	1 7	5	2.0 1		Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan pendidikan dan pelatihan perkoperasian	100 %	419,288,300	100 %	428,588,200	
2	1 7	5	2.0 1	1	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	0 Orang	419,288,300	0 Orang	428,588,200	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah
						Jumlah SDM Yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	40 Orang		40 Orang		
2	1 7	5	2.0 3		Pendidikan dan Pelatihan SDM Usaha Mikro dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan SDM Usaha Mikro	100 %	0	100 %	25,000,000	
2	1 7	5	2.0 3	1	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Usaha Mikro serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Usaha Mikro	Meningkatnya pemahaman dan pengetahuan usaha mikro	100 5	0	100 5	25,000,000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah
2	1 7	6			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Persentase Koperasi yang di Fasilitasi Bantuan Modal	2 %	507,954,000	2 %	507,961,401	

2	1 7	6	2.0 1		Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah koperasi yang mendapatkan bantuan modal	2 %	507,954,000	2 %	507,961,401	
2	1 7	6	2.0 1	1	Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	3 Unit Usaha	507,954,000	3 Unit Usaha	507,961,401	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah
2	1 7	7			PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase usaha mikro yang diberdayakan	6 %	1,180,954,990	6 %	1,108,928,588	
2	1 7	7	2.0 1		Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Jumlah usaha mikro yang diberdayakan	6 %	1,180,954,990	6 %	1,108,928,588	
2	1 7	7	2.0 1	1	Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Data Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	200 Dokumen	313,506,450	200 Dokumen	308,500,000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah
2	1 7	7	2.0 1	2	Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro	20 Unit Usaha	69,997,350	20 Unit Usaha	70,000,000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah
2	1 7	7	2.0 1	3	Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro yang Telah Mendapatkan Perizinan	275 Unit Usaha	50,679,200	275 Unit Usaha	65,000,000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah

2	1 7	7	2.0 1	4	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro	40 Unit Usaha	679,673,990	40 Unit Usaha	600,000,000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah
2	1 7	7	2.0 1	5	Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	Jumlah SDM yang Telah Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	5 Orang	67,098,000	5 Orang	65,000,000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah
2	1 7	7	2.0 1	6	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Usaha Mikro serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Usaha Mikro dan Kewirausahaan	Jumlah Pengurus Koperasi Yang Mengikuti Pendidikan Pelatihan Perkoperasian	40 Orang	0	40 Orang	428,588	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah
						Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Usaha Mikro dan Kewirausahaan	0 Orang		0 Orang		
						Jumlah Unit Usaha Mikro yang Terfasilitasi dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	0 Unit Usaha		0 Unit Usaha		
2	1 7	8			PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Persentase Pelaku Usaha Mikro yang Naik Kelas	6 %	839,147,740	6 %	887,805,080	
2	1 7	8	2.0 1		Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Jumlah usaha mikro yang naik kelas6	6 %	839,147,740	6 %	887,805,080	
2	1 7	8	2.0 1	1	Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	Jumlah Unit Usaha Mikro yang Terfasilitasi dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	10 Unit Usaha	839,147,740	10 Unit Usaha	887,805,080	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						
2	1 8				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL			7,333,660,008		7,801,867,665	

2	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase urusan penunjang pemerintahan yang dilaksanakan	100 %	6,033,803,558	100 %	5,240,239,665	
2	1	1	2.0		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Presentase ketersediaan dokumen perencanaan penganggaran dan evaluasi	2 NA	2,200,000	2 NA	2,200,000	
2	1	1	2.0	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen perencanaan penganggaran dan evaluasi	2 Dokumen	2,200,000	2 Dokumen	2,200,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
						Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	0 Laporan		0 Laporan		
2	1	1	2.0		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	presentase administrasi keuangan perangkat daerah	100 NA	3,833,660,008	100 NA	3,828,254,165	
2	1	1	2.0	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang Menerima Gaji dan Tunjangan	25 orang	3,025,230,008	25 orang	3,019,824,165	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	0 Orang/bulan		0 Orang/bulan		
2	1	1	2.0	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	0 Dokumen	808,430,000	0 Dokumen	808,430,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
						Jumlah PHL yang dibayarkan Honoranya	41 orang		41 orang		
2	1	1	2.0		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Presentase Administrasi Kepegawaian daerah	20 %	309,105,000	20 %	284,730,000	
2	1	1	2.0	2	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah lembar Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	65 lembar	24,375,000	65 lembar	0	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
						Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	0 Paket		0 Paket		
2	1	1	2.0	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	0 Orang	284,730,000	0 Orang	284,730,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

						Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	25 Orang		25 Orang		
2	18	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase administrasi umum perangkat daerah	100 %	1,178,502,550	100 %	269,155,500	
2	18	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah ketersediaan peralatan dan perlengkapan kantor	10 Unit	88,170,500	10 Unit	87,155,500	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	0 Paket		0 Paket		
2	18	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bulan Ketersediaan bahan logistik kantor	12 bulan	154,416,050	12 bulan	20,000,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	0 Paket		0 Paket		
2	18	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Bulan Ketersediaan barang cetakan dan penggandaan	12 Bulan	10,855,000	12 Bulan	12,000,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
						Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	0 Paket		0 Paket		
2	18	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	0 Laporan	925,061,000	0 Laporan	150,000,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
						Jumlah Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi SKPD dalam dan luar daerah	12 Bulan		12 Bulan		
2	18	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Presentase pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	577,766,000	100 %	700,000,000	
2	18	1	2.07	2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Diadakan	3 Unit	27,766,000	3 Unit	100,000,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
						Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	0 Unit		0 Unit		

2	1 8	1	2.0 7	1 0	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang di bangun	1 Unit	550,000,000	1 Unit	600,000,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
					Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0 Unit	0 Unit				
2	1 8	1	2.0 8		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	90,570,000	100 %	105,900,000	
2	1 8	1	2.0 8	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan ketersediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang tersedia	12 bulan	60,000,000	12 bulan	70,000,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	0 Laporan	0 Laporan				
2	1 8	1	2.0 8	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	49 Unit	29,670,000	49 Unit	35,000,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	0 Laporan	0 Laporan				
2	1 8	1	2.0 8	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	jumlah jasa pelayanan umum kantor	12 bulan	900	12 bulan	900	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	0 Laporan	0 Laporan				
2	1 8	1	2.0 9		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	42,000,000	100 %	50,000,000	
2	1 8	1	2.0 9	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan yang tersedia	1 Unit	42,000,000	1 Unit	50,000,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

						Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	0 Unit		0 Unit	
2	1 8	2			PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	capaian pemberian insentif dan kemudahan berusaha	85 persen	310,668,450	85 persen	1,250,000,000
						Persentase PMA yang mendapat kemudahan investasi	85 %		85 %	
						Persentase PMDN yang mendapat kemudahan investasi	85 %		85 %	
2	1 8	2	2.0 1		Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah PMDN yang Dievaluasi	5 PMDN	63,832,500	5 PMDN	800,000,000
2	1 8	2	2.0 1	1	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	0 Dokumen	34,020,000	0 Dokumen	400,000,000
						Jumlah PMDN yang mendapat insentif	5 Komponen		5 Komponen	
2	1 8	2	2.0 1	2	Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Memperoleh Insentif dan Kemudahan Berusaha di Daerah	0 Kegiatan Usaha	29,812,500	0 Kegiatan Usaha	400,000,000
						Jumlah PMDN yang dievaluasi	5 Pelaku Usaha		5 Pelaku Usaha	
2	1 8	2	2.0 2		Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Penanaman Modal	1 Dokumen	246,835,950	1 Dokumen	450,000,000
2	1 8	2	2.0 2	1	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Penanaman Modal	1 Dokumen	200,000,000	1 Dokumen	400,000,000
						Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	0 Dokumen		0 Dokumen	

2	1 8	2	2.0 2	2	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Jumlah peta potensi dan peluang investasi secara digital	1 Peta Digital	46,835,950	1 Peta Digital	50,000,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
						Jumlah Peta Potensi Investasi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	0 Dokumen		0 Dokumen		
2	1 8	3			PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Persentase peningkatan investasi (PMA dan PMDN) di kabupaten/kota	50 %	482,319,250	50 %	50,000,000	
2	1 8	3	2.0 1		Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Capaian Realisasi Penanaman Modal	85 %	482,319,250	85 %	50,000,000	
2	1 8	3	2.0 1	2	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah calon investor yang berminat menanamkan modalnya	6 investor	482,319,250	6 investor	50,000,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
						Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	0 Dokumen				
2	1 8	4			PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase Perizinan yang dikeluarkan tepat waktu sesuai SOP	85 persen	347,052,750	85 persen	1,112,088,000	
2	1 8	4	2.0 1		Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Aduan yang direspon	2 Aduan	347,052,750	2 Aduan	1,112,088,000	
2	1 8	4	2.0 1	1	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Izin yang diterbitkan secara elektronik	1200 izin	117,702,800	1200 izin	370,696,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
						Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	0 Pelaku Usaha				

2	1 8	4	2.0 1	2	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Mendapat Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Penanaman Modal	0 Kegiatan Usaha	84,572,200	0 Kegiatan Usaha	370,696,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
					Jumlah Pelaku usaha yang memenuhi komitmen perizinan usahanya	100 pelaku usaha	100 pelaku usaha				
2	1 8	4	2.0 1	3	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan	Jumlah Aduan Yang direspons	2 Aduan	144,777,750	2 Aduan	370,696,000	
					Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Jumlah Orang yang Memperoleh Layanan Konsultasi dan Terkelolanya Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	0 Orang		0 Orang		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	1 8	5			PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Capaian Realisasi Investasi	10 Triliun	159,816,000	10 Triliun	149,540,000	
2	1 8	5	2.0 1		Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah PMDN yang menyampaikan LKPM	100 Pelaku Usaha	159,816,000	100 Pelaku Usaha	149,540,000	
2	1 8	5	2.0 1	1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	0 Kegiatan Usaha.	159,816,000	0 Kegiatan Usaha.	149,540,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
					Jumlah PMDN yang menyampaikan LKPM	100 Pelaku Usaha	100 Pelaku Usaha				
2	1 8	5	2.0 1	2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	240 Pelaku Usaha	0	240 Pelaku Usaha	0	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

2	1 8	5	2.0 1	3	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan	20 Kegiatan Usaha	0	20 Kegiatan Usaha	0	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						
2	1 9				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA			9,716,578,339		12,464,228,398	
2	1 9	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase urusan penunjang pemerintahan yang dilaksanakan	100 %	6,538,673,975	100 %	6,964,228,398	
2	1 9	1	2.0 1		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang dilaksanakan	100 %	36,280,000	100 %	70,000,000	
2	1 9	1	2.0 1	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPASKPD	6 Dokumen	36,280,000	6 Dokumen	70,000,000	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
2	1 9	1	2.0 2		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang dilaksanakan	100 %	4,740,931,924	100 %	4,729,228,398	
2	1 9	1	2.0 2	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	35 Orang/bulan	3,957,331,924	35 Orang/bulan	3,945,628,398	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
2	1 9	1	2.0 2	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	35 Dokumen	783,600,000	35 Dokumen	783,600,000	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
2	1 9	1	2.0 5		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang dilaksanakan	100 %	32,800,000	100 %	70,000,000	
2	1 9	1	2.0 5	1	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	3 Orang	32,800,000	3 Orang	70,000,000	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata

2	1	1	2.0		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang dilaksanakan	100 %	520,908,134	100 %	660,000,000	
2	1	1	2.0	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	3,785,940	12 Paket	10,000,000	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
2	1	1	2.0	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10 Paket	90,812,484	10 Paket	200,000,000	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
2	1	1	2.0	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	74,487,510	12 Paket	150,000,000	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
2	1	1	2.0	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	36,567,200	12 Paket	30,000,000	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
2	1	1	2.0	8	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	12 Laporan	14,000,000	12 Laporan	20,000,000	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
2	1	1	2.0	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	0 Laporan	301,255,000	0 Laporan	250,000,000	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
						Persentase Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang dilaksanakan	100 %		100 %		
2	1	1	2.0		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang dilaksanakan	100 %	1,036,112,500	100 %	1,150,000,000	
2	1	1	2.0	1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	2 Unit	1,006,770,000	2 Unit	1,100,000,000	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata

2	1 9	1	2.0 7	5	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	5 Paket	29,342,500	5 Paket	50,000,000	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
2	1 9	1	2.0 8		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia	100 %	56,061,917	100 %	65,000,000	
2	1 9	1	2.0 8	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	4,995,000	12 Laporan	5,000,000	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
2	1 9	1	2.0 8	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	30,598,657	12 Laporan	35,000,000	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
2	1 9	1	2.0 8	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Laporan	12,100,000	4 Laporan	15,000,000	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
2	1 9	1	2.0 8	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 Laporan	8,368,260	4 Laporan	10,000,000	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
2	1 9	1	2.0 9		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dilaksanakan	100 %	115,579,500	100 %	220,000,000	
2	1 9	1	2.0 9	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	5 Unit	15,000,000	5 Unit	20,000,000	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
2	1 9	1	2.0 9	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	100,579,500	1 Unit	200,000,000	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
2	1 9	2			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	2 %	1,460,128,250	2 %	3,100,000,000	

2	1 9	2	2.0 1		Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Persentase Wirausaha Muda	1 %	1,068,947,350	1 %	1,600,000,000	
2	1 9	2	2.0 1	2	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula	Jumlah Wirausaha Pemuda Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	20 Orang	56,479,000	20 Orang	100,000,000	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
2	1 9	2	2.0 1	9	Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera	Jumlah Pemuda Kader Kabupaten/Kota yang Diseleksi sebagai Pasukan Pengibar Bendera dan Diberikan Pelatihan	35 Orang	1,012,468,350	35 Orang	1,500,000,000	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
2	1 9	2	2.0 2		Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Organisasi Kepemudaan yang dikembangkan dan diberdayakan	1 Organisasi	391,180,900	1 Organisasi	1,500,000,000	
2	1 9	2	2.0 2	2	Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan	4 Dokumen	391,180,900	4 Dokumen	1,500,000,000	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
2	1 9	3			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Prestasi yang diraih Atlit Morowali pada Tingkat Provinsi	26 %	1,517,775,864	26 %	2,100,000,000	
2	1 9	3	2.0 1		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Olahraga Pendidikan yang dikembangkan	13 Cabor	498,526,166	13 Cabor	900,000,000	

2	1 9	3	2.0 1	2	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Dasar	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga oleh Perkumpulan Olahraga dan Satuan Pendidikan Dasar	3 Dokumen	12,508,000	3 Dokumen	200,000,000	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
2	1 9	3	2.0 1	3	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Termanfaatkan	15 Unit	486,018,166	15 Unit	700,000,000	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
2	1 9	3	2.0 2		Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah yang diselenggarakan	3 Kegiatan	905,712,698	3 Kegiatan	1,000,000,000	
2	1 9	3	2.0 2	2	Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota	3 Dokumen	264,563,889	3 Dokumen	800,000,000	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
2	1 9	3	2.0 2	3	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan	Jumlah Peserta yang Berpartisipasi dalam Kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan	50 Orang	641,148,809	50 Orang	200,000,000	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
2	1 9	3	2.0 3		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Olahraga Prestasi yang dikembangkan	13 Cabor	113,537,000	13 Cabor	200,000,000	
2	1 9	3	2.0 3	4	Pemberian Penghargaan Olahraga Kabupaten/Kota	Jumlah Olahragawan Berprestasi Kabupaten/Kota yang Menerima Penghargaan	15 Orang	113,537,000	15 Orang	200,000,000	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
2	1 9	4			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Persentase Organisasi Kepramukaan yang Aktif	30 %	200,000,250	30 %	300,000,000	
2	1 9	4	2.0 1		Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Jumlah Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang diselenggarakan	5 Kegiatan	200,000,250	5 Kegiatan	300,000,000	
2	1 9	4	2.0 1	2	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkatkan Kapasitasnya	3 Organisasi	200,000,250	3 Organisasi	300,000,000	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata

3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN						
3	2 6				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA			1,523,083,516		2,600,000,000	
3	2 6	2			PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Lama Tinggal Wisatawan (Leng of Stay)	3-5 Hari	632,527,006	3-5 Hari	1,100,000,000	
3	2 6	2	2.0 2		Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata yang diselenggarakan	2 Kegiatan	632,527,006	2 Kegiatan	1,100,000,000	
3	2 6	2	2.0 2	3	Pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Kawasan Pariwisata Strategis Kabupaten/Kota yang Dikembangkan	1 Kawasan	95,871,450	1 Kawasan	200,000,000	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
3	2 6	2	2.0 2	4	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabil- itasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia dan Terpelihara dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	7 Unit	438,784,106	7 Unit	700,000,000	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
3	2 6	2	2.0 2	6	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	2 Laporan	97,871,450	2 Laporan	200,000,000	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
3	2 6	3			PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Persentase Peningkatan Perjalanan Wisatawan Nusantara	20 %	306,320,400	20 %	500,000,000	
3	2 6	3	2.0 1		Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri yang diselenggarakan	6 Kegiatan	306,320,400	6 Kegiatan	500,000,000	
3	2 6	3	2.0 1	2	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	5 Laporan	306,320,400	5 Laporan	500,000,000	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata

3	2 6	5			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Persentase Pertumbuhan Pelaku Usaha Ekonomi Kreatif Pendukung Sektor Pariwisata	10 %	584,236,110	10 %	1,000,000,000	
3	2 6	5	2.0 1		Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Jumlah Kegiatan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang diselenggarakan	2 Kegiatan	584,236,110	2 Kegiatan	1,000,000,000	
3	2 6	5	2.0 1	5	Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi, dan Konservasi Ekonomi Kreatif	6 Laporan	177,290,000	6 Laporan	400,000,000	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
3	2 6	5	2.0 1	6	Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Mengikuti Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	18 Orang	406,946,110	18 Orang	600,000,000	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						
2	2 3				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN			5,323,075,836		5,968,783,142	
2	2 3	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase capaian target keuangan perangkat daerah	100 %	4,705,009,236	100 %	4,708,783,142	
2	2 3	1	2.0 2		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah honorer yang Terbayarkan	19 Orang	3,587,537,526	19 Orang	2,564,819,142	
2	2 3	1	2.0 2	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Presentase ASN Yang Menerima Gaji dan Tunjangan	100 %	3,136,337,526	100 %	2,064,819,142	Dinas Perpustakaan Daerah
2	2 3	1	2.0 2	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	0 Dokumen	451,200,000	0 Dokumen	500,000,000	Dinas Perpustakaan Daerah
						Jumlah Honorer Yang Terbayarkan	19 Orang		19 Orang		

2	2 3	1	2.0 3		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	jumlah laporan hasil penilaian barang milik daerah dan hasil koordinasi penilaian barang milik daerah SKPD	12 laporan	15,948,000	12 laporan	50,000,000	
2	2 3	1	2.0 3	3	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	12 Laporan	15,948,000	12 Laporan	50,000,000	Dinas Perpustakaan Daerah
2	2 3	1	2.0 5		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	jumlah paket pakaian dinas beserta atribut dan kelengkapan	50 paket	94,050,000	50 paket	137,500,000	
2	2 3	1	2.0 5	2	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	75 Paket	35,000,000	75 Paket	37,500,000	Dinas Perpustakaan Daerah
2	2 3	1	2.0 5	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	1 Orang	59,050,000	1 Orang	100,000,000	Dinas Perpustakaan Daerah
2	2 3	1	2.0 6		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Capaian Target Administrasi Umum Perangkat Daerah	76	694,835,410	76	465,704,000	
2	2 3	1	2.0 6	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	27 Paket	274,237,868	27 Paket	150,000,000	Dinas Perpustakaan Daerah
2	2 3	1	2.0 6	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	129 Paket	122,422,142	129 Paket	40,000,000	Dinas Perpustakaan Daerah
2	2 3	1	2.0 6	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	54,208,900	12 Paket	25,000,000	Dinas Perpustakaan Daerah
2	2 3	1	2.0 6	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	27,830,000	12 Laporan	30,000,000	Dinas Perpustakaan Daerah
2	2 3	1	2.0 6	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	8 Laporan	216,136,500	8 Laporan	220,704,000	Dinas Perpustakaan Daerah

2	2 3	1	2.0 7		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unut Gedung kantor atau Bangunan lainnya yang Disediakan	1 Unit	206,560,000	1 Unit	1,206,560,000	
2	2 3	1	2.0 7	2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	0 Unit	0	0 Unit	1,000,000,000	Dinas Perpustakaan Daerah
2	2 3	1	2.0 7	9	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	206,560,000	1 Unit	206,560,000	Dinas Perpustakaan Daerah
2	2 3	1	2.0 8		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Capaian Target Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	34,240,000	100 %	20,200,000	
2	2 3	1	2.0 8	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	19,180,000	12 Laporan	19,300,000	Dinas Perpustakaan Daerah
2	2 3	1	2.0 8	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	15,060,000	12 Laporan	900	Dinas Perpustakaan Daerah
2	2 3	1	2.0 9		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Capaian Pemeliharaan Barang Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan daerah	100 %	71,838,300	100 %	264,000,000	
2	2 3	1	2.0 9	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	52,391,500	1 Unit	58,000,000	Dinas Perpustakaan Daerah
2	2 3	1	2.0 9	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1 Unit	5,480,000	1 Unit	6,000,000	Dinas Perpustakaan Daerah
2	2 3	1	2.0 9	1	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	13,966,800	1 Unit	200,000,000	Dinas Perpustakaan Daerah
2	2 3	2			PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Persentase capaian pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100 %	600,104,600	100 %	1,190,000,000	

2	2 3	2	2.0 1		Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah bahan perpustakaan yang dilakukan pengelolaan dan Pengembangan untuk mewujudkan keberagaman Koleksi Perpustakaan	2000 Eksemplar	371,673,850	2000 Eksemplar	470,000,000	
						Jumlah layanan Perpustakaan Elektronik yang Dikembangkan dengan manajemen Layanan TIK Berbasis ISO2000 (ITSM: Information Technology Service Management)	4 Layanan		4 Layanan		
2	2 3	2	2.0 1	1	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	Jumlah Layanan Perpustakaan Elektronik yang Dikembangkan dengan Manajemen Layanan TIK Berbasis ISO2000 (ITSM : Information Technology Service Management)	4 layanan	33,000,000	4 layanan	70,000,000	Dinas Perpustakaan Daerah
2	2 3	2	2.0 1	9	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	Jumlah Bahan Perpustakaan yang Dilakukan Pengelolaan dan Pengembangan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan	2000 Eksemplar	338,673,850	2000 Eksemplar	400,000,000	Dinas Perpustakaan Daerah
2	2 3	2	2.0 2		Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengunjung Perpustakaan Pertahun	50956	228,430,750	50956	720,000,000	
2	2 3	2	2.0 2	1	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan	0 Lokus	68,013,000	0 Lokus	120,000,000	Dinas Perpustakaan Daerah
						Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan	18 Lokus		18 Lokus		
2	2 3	2	2.0 2	2	Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di TempatTempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah	Jumlah Perpustakaan yang Dibangun di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	0 Perpustakaan	0	0 Perpustakaan	250,000,000	Dinas Perpustakaan Daerah

					Kabupaten/Kota						
2	2 3	2	2.0 2	3	Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Tingkat Kabupaten Kota	0 Orang	122,874,900	0 Orang	200,000,000	Dinas Perpustakaan Daerah
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Tingkat Kabupaten Kota	150 Orang		150 Orang		
2	2 3	2	2.0 2	4	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	Jumlah Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Wilayah Kabupaten/Kota yang Dikembangkan	1 Perpustakaan	37,542,850	1 Perpustakaan	150,000,000	Dinas Perpustakaan Daerah
2	2 3	3			PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	Persentase jumlah koleksi Budaya Etnis yang Ditemukan di Daerah	100 %	17,962,000	100 %	70,000,000	
2	2 3	3	2.0 2		Pengembangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang Ditemukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah koleksi Budaya Etnis Nusantara Hasil seleksi dan penggandaan	20 Eksemplar	17,962,000	20 Eksemplar	70,000,000	
2	2 3	3	2.0 2	1	Seleksi dan Pengadaan Koleksi Budaya Etnis Nusantara	Jumlah Koleksi Budaya Etnis Nusantara Hasil Seleksi dan Pengadaan	20 Eksemplar	17,962,000	20 Eksemplar	70,000,000	Dinas Perpustakaan Daerah
2	2 4				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN			264,461,350		750,000,000	
2	2 4	2			PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Meningkatkan Kinerja pengelola dan penciptaan arsip naskah dinas	100 %	186,762,350	100 %	500,000,000	
2	2 4	2	2.0 1		Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Arsip Dinamis yang Terkelola	189	70,702,350	189	300,000,000	
						Jumlah Sarana dan Prasarana Arsip dan Pengawasan Arsip	10		10		
						Jumlah Tenaga Pengelola Arsip Yang Dibina, Bimtek/Magang	50		50		

2	2 4	2	2.0 1	1	Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis	Jumlah Naskah Dinas yang Diciptakan dan Digunakan	580 Berkas	70,702,350	580 Berkas	100,000,000	Dinas Perpustakaan Daerah
2	2 4	2	2.0 1	2	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	Jumlah Naskah Dinas yang Dilakukan Pemeliharaan dan Penyusutan	0 Berkas	0	0 Berkas	200,000,000	Dinas Perpustakaan Daerah
2	2 4	2	2.0 3		Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah layanan penyediaan informasi, akses dan layanan kearsipan tingkat daerah Kabupaten/Kota melalui JIKN	55 Pengguna	116,060,000	55 Pengguna	200,000,000	
2	2 4	2	2.0 3	1	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN	Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN	55 Pengguna	116,060,000	55 Pengguna	200,000,000	Dinas Perpustakaan Daerah
2	2 4	3			PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	Tingkat keberadaan dan keutuhan Arsip sebagai bahan pertanggung jawaban setiap aspek kehidupan berbagai dan bernegara untuk kepentingan negara. pemerintahan. pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	100 %	77,699,000	100 %	250,000,000	
2	2 4	3	2.0 1		Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	Jumlah Arsip yang Dimusnahkan di Kabupaten/Kota	11	0	11	50,000,000	
2	2 4	3	2.0 1	2	Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun	Jumlah Arsip yang Memiliki Retensi Di Bawah 10 Tahun yang Dimusnahkan	0 Berkas	0	0 Berkas	50,000,000	Dinas Perpustakaan Daerah
2	2 4	3	2.0 5		Pencarian Arsip Statis Kabupaten/Kota yang Dinyatakan Hilang	Jumlah daftar autentisitas arsip statis yang dinyatakan hilang yang dinilai dan ditetapkan	55 Arsip	77,699,000	55 Arsip	200,000,000	
2	2 4	3	2.0 5	1	Penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip Statis yang Dinyatakan Hilang	Jumlah Daftar Autentisitas Arsip Statis yang Dinyatakan Hilang yang Dinilai dan Ditetapkan	55 Arsip	77,699,000	55 Arsip	200,000,000	Dinas Perpustakaan Daerah

3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN						
3	2 5				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN			16,572,226,385		17,105,325,000	
3	2 5	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	persentase urusan penunjang pemerintah yang dilaksanakan	100 %	6,010,706,985	100 %	6,104,440,500	
3	2 5	1	2.0 2		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	persentase gaji dan tunjangan yang dibayarkan	100 %	5,036,268,545	100 %	5,058,996,900	
3	2 5	1	2.0 2	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	37 Orang/bulan	3,823,668,545	37 Orang/bulan	3,846,386,900	Dinas Perikanan Daerah
3	2 5	1	2.0 2	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah PHL yang dibayarkan Jasanya	50 Orang	1,212,600,000	50 Orang	1,212,610,000	Dinas Perikanan Daerah
3	2 5	1	2.0 6		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Kegiatan Administrasi Keuangan	100 %	770,568,440	100 %	802,690,600	
3	2 5	1	2.0 6	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	0 Paket	59,923,920	0 Paket	59,924,000	Dinas Perikanan Daerah
						Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, SDA dan Listrik	12 Bulan		12 Bulan		
3	2 5	1	2.0 6	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	0 Paket	298,395,940	0 Paket	298,396,000	Dinas Perikanan Daerah
						Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor	75 Unit		75 Unit		
3	2 5	1	2.0 6	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	0 Paket	84,206,580	0 Paket	84,206,600	Dinas Perikanan Daerah
						Persentase Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	100 Persen		100 Persen		
3	2 5	1	2.0 6	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan	100000 Lembar	50,180,000	100000 Lembar	50,181,000	Dinas Perikanan Daerah
						Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	0 Paket		0 Paket		

3	2 5	1	2.0 6	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	0 Laporan	277,862,000	0 Laporan	309,983,000	Dinas Perikanan Daerah
						Persentase Waktu Kegiatan Rapat Koordinasi (dalam daerah dan luar daerah)	100 Persen		100 Persen		
3	2 5	1	2.0 7		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Kendaraan Dinas Penunjang Urusan	3 Unit	44,590,000	3 Unit	83,363,000	
3	2 5	1	2.0 7	1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit	44,590,000	1 Unit	83,363,000	Dinas Perikanan Daerah
3	2 5	1	2.0 8		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Angkut Sampah	12 Bulan	900	12 Bulan	1,000,000	
3	2 5	1	2.0 8	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	0 Laporan	900	0 Laporan	1,000,000	Dinas Perikanan Daerah
						Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Bulan		12 Bulan		
3	2 5	1	2.0 9		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Kendaraan Dinas Operasional	19 Unit	158,380,000	19 Unit	158,390,000	
3	2 5	1	2.0 9	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	19 Unit	158,380,000	19 Unit	158,390,000	Dinas Perikanan Daerah
3	2 5	3			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Produksi perikanan Tangkap (Ton)	2500 Ton	7,969,873,000	2500 Ton	8,354,549,000	

3	2 5	3	2.0 1		Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Meningkatnya Produksi Perikanan Tangkap	4072882 TON	5,704,040,000	4072882 TON	5,886,422,000	
3	2 5	3	2.0 1	1	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan di Perairan Darat dalam Satu Kabupaten/Kota yang Tersedia	12 Dokumen	126,278,000	12 Dokumen	131,559,000	Dinas Perikanan Daerah
3	2 5	3	2.0 1	3	Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Terjamin dan Tersedia	120 Unit	5,577,762,000	120 Unit	5,754,863,000	Dinas Perikanan Daerah
3	2 5	3	2.0 2		Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Produksi Perikanan Tangkap	4072840 TON	2,147,335,000	4072840 TON	2,150,583,000	
3	2 5	3	2.0 2	1	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkatkan Kapasitasnya	8 Orang	138,580,000	8 Orang	140,381,000	Dinas Perikanan Daerah
3	2 5	3	2.0 2	2	Pelaksanaan Fasilitas Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	Jumlah Kelompok Nelayan Kecil yang Difasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaannya	55 Kelompok	83,353,000	55 Kelompok	83,354,000	Dinas Perikanan Daerah
3	2 5	3	2.0 2	3	Pelaksanaan Fasilitas Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	Jumlah Unit Usaha yang Difasilitasi Penyaluran Bantuan Pen Danaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	8000 Unit Usaha	1,925,402,000	8000 Unit Usaha	1,926,848,000	Dinas Perikanan Daerah
3	2 5	3	2.0 3		Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Meningkatnya Jumlah Ketersediaan Sarana dan Prasarana TPI	2 Unit	0	2 Unit	199,045,000	
3	2 5	3	2.0 3	1	Penetapan Prosedur dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Standar Operasional Operasional (SOP) TPI	2 Dok	0	2 Dok	79,240,000	Dinas Perikanan Daerah
3	2 5	3	2.0 3	2	Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Jumlah Ketersediaan Sarana dan Prasarana TPI	2 Unit	0	2 Unit	119,805,000	Dinas Perikanan Daerah

3	2 5	3	2.0 4		Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Jumlah Kapal Yang Memiliki Tanda Daftar Kapal	10 TDP	118,498,000	10 TDP	118,499,000	
3	2 5	3	2.0 4	2	Pelayanan Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT	Jumlah Kapal Yang Memiliki Tanda Daftar Kapal	10 TDP	118,498,000	10 TDP	118,499,000	Dinas Perikanan Daerah
					Jumlah Rekomendasi Tanda Daftar Kapal Perikanan	0 Rekomendasi	0 Rekomendasi				
3	2 5	4			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Jumlah waktu yang dibutuhkan	12 bulan	1,652,202,400	12 bulan	1,663,298,500	
3	2 5	4	2.0 1		Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Jumlah Izin Usaha Perikanan di Bidang Budidaya Yang Diterbitkan	100 Dok	0	100 Dok	11,093,000	
3	2 5	4	2.0 1	2	Pelayanan Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya, Lokasi, dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Menggunakan Teknologi Sederhana, Semi Intensif, dan Intensif, serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing	Jumlah Izin Usaha Perikanan di Bidang Budidaya Yang diterbitkan	100 Dok	0	100 Dok	11,093,000	Dinas Perikanan Daerah
					Jumlah Rekomendasi Perizinan Berusaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya, Lokasi, dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Menggunakan Teknologi Sederhana, Semi Intensif, dan Intensif, serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing yang Diterbitkan	0 Rekomendasi	0 Rekomendasi				

3	2 5	4	2.0 4		Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Persentase Pokdakan Penerima Bantuan Sarpras	80 %	1,652,202,400	80 %	1,652,205,500	
3	2 5	4	2.0 4	1	Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi	4 Dokumen	35,680,000	4 Dokumen	35,681,000	Dinas Perikanan Daerah
						Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	0 Dokumen		0 Dokumen		
3	2 5	4	2.0 4	3	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pokdakan Penerima Sarana Prasarana Budidaya	8 Pokdakan	1,452,491,400	8 Pokdakan	1,452,491,500	Dinas Perikanan Daerah
						Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	0 Unit		0 Unit		
3	2 5	4	2.0 4	4	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Hasil Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Teruji Melalui Pengelolaan Kesehatan Ikan	0 Dokumen	109,227,000	0 Dokumen	109,228,000	Dinas Perikanan Daerah
						Jumlah Pembudidaya yang memenuhi standar cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB)	30 RTP		30 RTP		
3	2 5	4	2.0 4	6	Perencanaan, Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan untuk Pembudidayaan Ikan di Darat	Jumlah Pembudidaya penerima asuransi, sertifikasi dan subsidi pupuk	295 RTP	54,804,000	295 RTP	54,805,000	Dinas Perikanan Daerah
						Luas Lahan untuk Pembudidayaan Ikan di Darat yang Direncanakan, Dikembangkan, Dimanfaatkan dan Dilindungi	0 Ha		0 Ha		
3	2 5	5			PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Jumlah waktu yang dibutuhkan	12 bulan	20,900,000	12 bulan	20,900,000	

3	2 5	5	2.0 1		Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota	Berkurangnya kasus illegal fishing	10 Kasus	20,900,000	10 Kasus	20,900,000	
3	2 5	5	2.0 1	1	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Sumber Daya Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	0 Dokumen	20,900,000	0 Dokumen	20,900,000	Dinas Perikanan Daerah
						Jumlah Kasus Illegal Fishing	10 Kasus		10 Kasus		
3	2 5	6			PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Jumlah waktu yang dibutuhkan	12 bulan	918,544,000	12 bulan	962,137,000	
3	2 5	6	2.0 2		Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Meningkatnya Jumlah POKLAHSAR Yang Mendapatkan Bimbingan dan Pelatihan Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran	40 Klp	133,718,000	40 Klp	177,309,000	
3	2 5	6	2.0 2	1	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Jumlah Poklhasar Yang Mendapatkan Bimbingan dan Pelatihan Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran	40 Klp	133,718,000	40 Klp	177,309,000	Dinas Perikanan Daerah
						Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang Mendapatkan Pembinaan Terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Sesuai Skala Usaha dan Risiko	0 Unit Usaha		0 Unit Usaha		

3	2 5	6	2.0 3		Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Meningkatkan Presentase Poklahsar yang memperoleh bantuan	75 %	784,826,000	75 %	784,828,000	
3	2 5	6	2.0 3	1	Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah ketersediaan Ikan untuk konsumsi dan usaha pengolahan	50000 Ton	112,136,000	50000 Ton	112,137,000	Dinas Perikanan Daerah
						Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	0 Ton		0 Ton		
3	2 5	6	2.0 3	2	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi	0 Pelaku Usaha	672,690,000	0 Pelaku Usaha	672,691,000	Dinas Perikanan Daerah
						Jumlah Poklahsar Yang Mendapatkan Bantuan	35 Klp		35 Klp		
3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN						
3	3 0				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN			6,269,416,327		6,011,211,470	
3	3 0	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase urusan penunjang pemerintahan yang dilaksanakan	100 %	4,506,364,584	100 %	4,576,211,470	
3	3 0	1	2.0 2		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi	100 %	3,632,778,988	100 %	3,711,280,000	
3	3 0	1	2.0 2	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	26 Orang/bulan	3,021,498,988	26 Orang/bulan	3,100,000,000	Dinas Perdagangan Dan Perindustrian
3	3 0	1	2.0 2	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	0 Dokumen	611,280,000	0 Dokumen	611,280,000	Dinas Perdagangan Dan Perindustrian
						Jumlah Penyediaan Tenaga Kontrak Administrasi Umum	25 orang		25 orang		
3	3 0	1	2.0 5		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ASN yang ditingkatkan disiplin dan kapasitasnya	23.08 %	77,230,000	23.08 %	180,525,000	

3	3 0	1	2.0 5	2	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Khas Daerah beserta Atribut Kelengkapan	53 buah	19,875,000	53 buah	10,525,000	Dinas Perdagangan Dan Perindustrian
						Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	0 Paket		0 Paket		
3	3 0	1	2.0 5	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	2 Orang	57,355,000	2 Orang	100,000,000	Dinas Perdagangan Dan Perindustrian
3	3 0	1	2.0 5	1 0	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	50 Orang	0	50 Orang	70,000,000	Dinas Perdagangan Dan Perindustrian
3	3 0	1	2.0 6		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Adminitrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	256,256,140	100 %	282,000,000	
3	3 0	1	2.0 6	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	25,031,640	1 Paket	28,000,000	Dinas Perdagangan Dan Perindustrian
3	3 0	1	2.0 6	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	12,022,500	1 Paket	14,000,000	Dinas Perdagangan Dan Perindustrian
3	3 0	1	2.0 6	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang disusun	76 Laporan	219,202,000	76 Laporan	240,000,000	Dinas Perdagangan Dan Perindustrian
3	3 0	1	2.0 7		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase BMD penunjang Urusan yang diadakan	20 %	229,306,720	20 %	225,506,470	
3	3 0	1	2.0 7	1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	3 Unit	98,859,000	3 Unit	75,000,000	Dinas Perdagangan Dan Perindustrian
3	3 0	1	2.0 7	5	Pengadaan Mebel	Jumlah Mebeulair yang Disediakan	12 buah	31,941,250	12 buah	50,000,000	Dinas Perdagangan Dan Perindustrian
							Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		0 Unit		
3	3 0	1	2.0 7	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit	98,506,470	5 Unit	100,506,470	Dinas Perdagangan Dan Perindustrian

3	30	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	72,899,776	100 %	88,900,000	
3	30	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah KWH Jasa Listrik yang Disediakan	64748 KWH	71,999,776	64748 KWH	80,000,000	Dinas Perdagangan Dan Perindustrian
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	0 Laporan		0 Laporan		
3	30	1	2.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	0 Laporan	0	0 Laporan	8,000,000	Dinas Perdagangan Dan Perindustrian
						Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor Yang Diperbaiki	8 unit		8 unit		
3	30	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Cakupan Bulan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Bulan	900	12 Bulan	900	Dinas Perdagangan Dan Perindustrian
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	0 Laporan		0 Laporan		
3	30	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	20 %	237,892,960	20 %	88,000,000	
3	30	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	7 Unit	32,250,000	7 Unit	30,000,000	Dinas Perdagangan Dan Perindustrian
3	30	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	6,740,000	10 Unit	8,000,000	Dinas Perdagangan Dan Perindustrian
3	30	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Kegiatan	198,902,960	2 Kegiatan	50,000,000	Dinas Perdagangan Dan Perindustrian

3	30	2			PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)	26 %	29,236,400	26 %	55,000,000	
3	30	2	2.01		Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan	Persentase pelaku usaha yang memperoleh rekomendasi izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)	95 %	29,236,400	95 %	55,000,000	
3	30	2	2.01	1	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Rekomendasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	15 Dokumen	29,236,400	15 Dokumen	55,000,000	Dinas Perdagangan Dan Perindustrian
3	30	3			PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase Pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan	29 %	1,092,835,405	29 %	850,000,000	
3	30	3	2.01		Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase jumlah pasar yang ditingkatkan sarana dan prasarannya	20 %	1,092,835,405	20 %	850,000,000	
3	30	3	2.01	1	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan	0 Unit	1,092,835,405	0 Unit	850,000,000	Dinas Perdagangan Dan Perindustrian
					Jumlah Sarana/Prasarana Distribusi Perdagangan Yang Disediakan	6 sarana/prasarana	6 sarana/prasarana				
3	30	4			PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Persentase Stabilitas dan Jumlah ketersediaan harga barang kebutuhan pokok	27 %	215,205,500	27 %	115,000,000	
3	30	4	2.02		Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Persentase jenis barang yang dikendalikan	20 %	201,819,350	20 %	90,000,000	

3	3 0	4	2.0 2	1	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	12 Laporan	71,819,000	12 Laporan	90,000,000	Dinas Perdagangan Dan Perindustrian
3	3 0	4	2.0 2	3	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	3 Laporan	130,000,350	3 Laporan	0	Dinas Perdagangan Dan Perindustrian
						Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	0 Laporan		0 Laporan		
3	3 0	4	2.0 3		Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penggunaan Pupuk dan Pestisida bersubsidi yang diawasi	0 %	13,386,150	0 %	25,000,000	
3	3 0	4	2.0 3	3	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90%	12 Laporan	13,386,150	12 Laporan	25,000,000	Dinas Perdagangan Dan Perindustrian
3	3 0	6			PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase Barang beredar yang diawasi yang sesuai dengan ketentuan perundangundangan	16 %	268,687,138	16 %	415,000,000	
						Persentase penanganan pengaduan konsumen	50 %		50 %		
3	3 0	6	2.0 1		Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Persentase alat ukur, takar, timbang dan peratannya yang ditera dan tera ulang	20 %	268,687,138	20 %	415,000,000	
3	3 0	6	2.0 1	1	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang	80 Unit	143,302,138	80 Unit	140,000,000	Dinas Perdagangan Dan Perindustrian
3	3 0	6	2.0 1	2	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	Jumlah Kegiatan Penyuluhan Bidang Metrologi Legal yang Dilaksanakan	2 Kegiatan	125,385,000	2 Kegiatan	180,000,000	Dinas Perdagangan Dan Perindustrian

						Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina	0 Orang		0 Orang		
3	30	6	2.01	3	Penyidikan Metrologi Legal	Jumlah Unit Hasil Penyidikan Metrologi Legal	27 Unit	0	27 Unit	95,000,000	Dinas Perdagangan Dan Perindustrian
3	30	7			PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Persentase Produk Dalam Daerah yang di Promosikan Di luar	33 %	157,087,300	33 %	0	
3	30	7	2.01		Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Persentase event promosi/pameran yang diikuti/diselenggarakan	60 %	157,087,300	60 %	0	
3	30	7	2.01	1	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah IKM yang Mengikuti Event Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota dan Regional/Nasional	10 IKM	157,087,300	10 IKM	0	Dinas Perdagangan Dan Perindustrian
						Jumlah UMKM yang Melaksanakan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	0 UMKM		0 UMKM		
3	31				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN			1,103,337,621		1,930,000,000	
3	31	2			PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase peningkatan Jumlah Industri Kecil dan Menengah Kabupaten	33 %	1,003,358,621	33 %	1,810,000,000	
3	31	2	2.01		Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Persentase IKM yang dibina dan dikembangkan	20 %	1,003,358,621	20 %	1,810,000,000	
3	31	2	2.01	2	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan, Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	0 Dokumen	417,942,881	0 Dokumen	160,000,000	Dinas Perdagangan Dan Perindustrian
						Jumlah Pelaku IKM di dalam Perwilayahan Industri yang dilatih dan ditingkatkan kapasitasnya	30 orang		30 orang		

						Jumlah Sarana Bangunan Industri yang disediakan	1 Sarana		1 Sarana		
3	3 1	2	2.0 1	3	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	0 Dokumen	406,660,440	0 Dokumen	350,000,000	Dinas Perdagangan Dan Perindustrian
						Jumlah Pelaku IKM Pangan yang mengikuti Sosialisasi Sertifikasi Pangan	25 orang		25 orang		
						Jumlah SDM IKM Ranggina yang dilatih dan ditingkatkan kapasitasnya	25 orang		25 orang		
						Jumlah SDM IKM Tenun yang dilatih dan ditingkatkan kapasitasnya	20 orang		20 orang		
3	3 1	2	2.0 1	4	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	1 Dokumen	0	1 Dokumen	1,000,000,000	Dinas Perdagangan Dan Perindustrian
3	3 1	2	2.0 1	5	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	0 Dokumen	178,755,300	0 Dokumen	300,000,000	Dinas Perdagangan Dan Perindustrian
						Jumlah Pelaku IKM yang difasilitasi dan ditingkatkan kapasitas usahanya	11 Usaha IKM		11 Usaha IKM		
3	3 1	3			PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	Persentase Jumlah Hasil Pemantauan dan Pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh Instansi Terkait	20 %	44,977,000	20 %	55,000,000	

3	3 1	3	2.0 1		Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase IKM yang diawasi pemenuhan komitmen perizinannya	20 %	44,977,000	20 %	55,000,000	
3	3 1	3	2.0 1	2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup Perizinan Usaha Industri, Perizinan Perluasan Usaha Industri, Perizinan Kawasan Industri dan Perizinan Perluasan Kawasan Industri Kewenangan Kabupaten/Kota	0 Dokumen	44,977,000	0 Dokumen	55,000,000	Dinas Perdagangan Dan Perindustrian
						Jumlah Dokumen Pemenuhan Komitmen Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup Perizinan Usaha Industri, Perizinan Perluasan Usaha Industri, Perizinan Kawasan Industri dan Perizinan Perluasan Kawasan Industri Kewenangan Kabupaten/Kota	24 Dokumen		24 Dokumen		
3	3 1	4			PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini	37 %	55,002,000	37 %	65,000,000	
3	3 1	4	2.0 1		Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase IKM yang ditampilkan datanya	50 %	55,002,000	50 %	65,000,000	

3	3 1	4	2.0 1	2	Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas	Jumlah Dokumen Hasil Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas	0 Dokumen	55,002,000	0 Dokumen	65,000,000	Dinas Perdagangan Dan Perindustrian
						Jumlah Laporan Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas	12 Laporan		12 Laporan		
4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN						
4	1				SEKRETARIAT DAERAH			1,897,320,000		1,932,320,000	
4	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Kebijakan Strategis Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	100 %	865,459,840	100 %	890,459,840	
4	1	1	2.0 2		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	403,320,000	100 %	413,320,000	
4	1	1	2.0 2	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	0 Dokumen	403,320,000	0 Dokumen	413,320,000	SEKRETARIAT DAERAH
						Jumlah Jasa Tenaga Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN s ASN	16 Orang		16 Orang		
4	1	1	2.0 5		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 %	19,673,000	100 %	20,673,000	
4	1	1	2.0 5	2	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	3 Paket	19,673,000	3 Paket	20,673,000	SEKRETARIAT DAERAH
4	1	1	2.0 6		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	332,064,550	100 %	340,064,550	
4	1	1	2.0 6	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	42,135,750	4 Paket	45,135,750	SEKRETARIAT DAERAH
4	1	1	2.0 6	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	16,485,190	1 Paket	18,485,190	SEKRETARIAT DAERAH

4	1	1	2.0 6	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	9,804,950	3 Paket	10,804,950	SEKRETARIAT DAERAH
4	1	1	2.0 6	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan	263,638,660	4 Laporan	265,638,660	SEKRETARIAT DAERAH
4	1	1	2.0 7		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	76,362,290	100 %	80,362,290	
4	1	1	2.0 7	2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	2 Unit	52,572,000	2 Unit	54,572,000	SEKRETARIAT DAERAH
4	1	1	2.0 7	5	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	19 Unit	23,790,290	19 Unit	25,790,290	SEKRETARIAT DAERAH
4	1	1	2.0 8		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	7,140,000	100 %	8,140,000	
4	1	1	2.0 8	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Laporan	7,140,000	2 Laporan	8,140,000	SEKRETARIAT DAERAH
4	1	1	2.0 9		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	26,900,000	100 %	27,900,000	
4	1	1	2.0 9	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	6 Unit	26,900,000	6 Unit	27,900,000	SEKRETARIAT DAERAH
4	1	3			PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase Kebijakan di Bidang Perekonomian dan Pembangunan	100 %	1,031,860,160	100 %	1,041,860,160	
4	1	3	2.0 2		Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Persentase Kebijakan Strategis Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	100 %	1,031,860,160	100 %	1,041,860,160	
4	1	3	2.0 2	1	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah	2 Dokumen	303,970,800	2 Dokumen	305,970,800	SEKRETARIAT DAERAH

4	1	3	2.0 2	2	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	4 Laporan	316,775,000	4 Laporan	320,775,000	SEKRETARIAT DAERAH
4	1	3	2.0 2	3	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	0 Laporan	411,114,360	0 Laporan	415,114,360	SEKRETARIAT DAERAH
						Persentase Serapan anggaran Perangkat Daerah dengan nilai baik (80-100%)	95 Persen		95 Persen		
4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN						
4	1				SEKRETARIAT DAERAH			1,022,999,850		1,042,446,698	
4	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase urusan penunjang pemerintahan yang dilaksanakan	100 %	448,701,850	100 %	459,148,698	
4	1	1	2.0 2		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Presentase Laporan Keuangan Perangkat Daerah	100	273,000,000	100	275,000,000	
4	1	1	2.0 2	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	273,000,000	12 Dokumen	275,000,000	SEKRETARIAT DAERAH
						Jumlah tenaga honorer yang dibayarkan	11 org		11 org		
4	1	1	2.0 6		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase Pelayanan Administrasi Umum	86	115,909,850	86	121,356,698	
4	1	1	2.0 6	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	0 Paket	8,294,600	0 Paket	9,460,099	SEKRETARIAT DAERAH
						Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Unit		1 Unit		
4	1	1	2.0 6	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	20 jenis	10,000,000	20 jenis	12,000,000	SEKRETARIAT DAERAH
4	1	1	2.0 6	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	8,093,750	1 Paket	9,375,099	SEKRETARIAT DAERAH
4	1	1	2.0 6	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Koordinasi dan Konsultasi SKPD	8 Laporan	89,521,500	8 Laporan	90,521,500	SEKRETARIAT DAERAH

4	1	1	2.0 7		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	43,292,000	100 %	45,292,000	
4	1	1	2.0 7	1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	2 Unit	43,292,000	2 Unit	45,292,000	SEKRETARIAT DAERAH
4	1	1	2.0 9		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	16,500,000	100 %	17,500,000	
4	1	1	2.0 9	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	2 Unit	16,500,000	2 Unit	17,500,000	SEKRETARIAT DAERAH
4	1	3			PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase Perekonomian dan Pembangunan	100 %	574,298,000	100 %	583,298,000	
4	1	3	2.0 1		Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Kebijakan Perekonomian	74 %	426,200,000	74 %	431,200,000	
						persentase kebijakan perekonomian	100 %		100 %		
4	1	3	2.0 1	1	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	1 Dokumen	44,434,000	1 Dokumen	45,434,000	SEKRETARIAT DAERAH
4	1	3	2.0 1	2	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	12 Laporan	325,566,000	12 Laporan	327,566,000	SEKRETARIAT DAERAH
4	1	3	2.0 1	3	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	2 Dokumen	56,200,000	2 Dokumen	58,200,000	SEKRETARIAT DAERAH
4	1	3	2.0 4		Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	98 %	148,098,000	98 %	152,098,000	

4	1	3	2.0 4	1	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja	1 Dokumen	49,736,000	1 Dokumen	50,736,000	SEKRETARIAT DAERAH
4	1	3	2.0 4	2	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian	1 Dokumen	48,416,000	1 Dokumen	50,416,000	SEKRETARIAT DAERAH
4	1	3	2.0 4	3	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan	1 Dokumen	49,946,000	1 Dokumen	50,946,000	SEKRETARIAT DAERAH
4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN						
4	1				SEKRETARIAT DAERAH			2,793,279,995		2,860,491,995	
4	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase urusan penunjang pemerintahan yang dilaksanakan	100 %	664,243,995	100 %	715,363,995	
4	1	1	2.0 2		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Laporan Keuangan Perangkat Daerah	100 %	263,040,000	100 %	300,160,000	
4	1	1	2.0 2	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	263,040,000	12 Dokumen	300,160,000	SEKRETARIAT DAERAH
4	1	1	2.0 5		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 %	0	100 %	0	

4	1	1	2.0 5	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	0 Orang	0	0 Orang	0	SEKRETARIAT DAERAH
4	1	1	2.0 6		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pelayanan Administrasi Umum	100 %	378,773,995	100 %	389,773,995	
4	1	1	2.0 6	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	25,453,185	1 Paket	28,453,185	SEKRETARIAT DAERAH
						Persentase ketersediaan Peralatan dan Perlengkapan yang dibutuhkan	100 %		100 %		
4	1	1	2.0 6	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	148,264,310	1 Paket	150,264,310	SEKRETARIAT DAERAH
						Persentase ketersediaan Bahan logistik kantor yang di butuhkan	100 %		100 %		
4	1	1	2.0 6	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	21,612,500	1 Paket	25,612,500	SEKRETARIAT DAERAH
						Persentase ketersediaan barang cetakan dan penggandaan yang di butuhkan	100 %		100 %		
4	1	1	2.0 6	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	10 Laporan	183,444,000	10 Laporan	185,444,000	SEKRETARIAT DAERAH
						Persentase Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang diikuti dan dilaksanakan	100 persen		100 persen		
4	1	1	2.0 8		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentasi Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	4,380,000	100 %	5,380,000	
4	1	1	2.0 8	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	4,380,000	1 Laporan	5,380,000	SEKRETARIAT DAERAH

4	1	1	2.0 9		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	18,050,000	100 %	20,050,000	
4	1	1	2.0 9	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit	18,050,000	1 Unit	20,050,000	SEKRETARIAT DAERAH
						Persentase Ketersediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	100 persen		100 persen		
4	1	2			PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase produk hukum yang dihasilkan	100 %	2,129,036,000	100 %	2,145,128,000	
4	1	2	2.0 3		Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Persentasi Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	95 %	2,129,036,000	95 %	2,145,128,000	
4	1	2	2.0 3	1	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	10 Dokumen	1,268,808,000	10 Dokumen	1,268,900,000	SEKRETARIAT DAERAH
						Jumlah rancangan Produk Hukum Daerah yang diikuti dan dilaksanakan	100 persen		100 persen		
4	1	2	2.0 3	2	Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	0 Kasus	706,444,000	0 Kasus	720,444,000	SEKRETARIAT DAERAH
						Jumlah Penanganan Perkara yang diselesaikan	30 Perkara		30 Perkara		
4	1	2	2.0 3	3	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	300 Dokumen	153,784,000	300 Dokumen	155,784,000	SEKRETARIAT DAERAH
4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN						
4	1				SEKRETARIAT DAERAH			33,851,285,000		37,799,021,304	
4	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase urusan penunjang pemerintahan yang dilaksanakan	100 %	614,017,960	100 %	614,621,304	
4	1	1	2.0 2		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Presentase Laporan Keuangan Perangkat Daerah	100	369,360,000	100	369,360,000	

4	1	1	2.0 2	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	0 Dokumen	369,360,000	0 Dokumen	369,360,000	SEKRETARIAT DAERAH
						Jumlah Tenaga Stan Non PNS	13 Orang		13 Orang		
4	1	1	2.0 6		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pelayanan Administrasi Umum	86 %	229,657,960	86 %	230,261,304	
4	1	1	2.0 6	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	49,610,760	5 Paket	50,000,000	SEKRETARIAT DAERAH
4	1	1	2.0 6	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	10,250,750	1 Paket	10,159,474	SEKRETARIAT DAERAH
4	1	1	2.0 6	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	10,500,000	1 Paket	10,612,080	SEKRETARIAT DAERAH
4	1	1	2.0 6	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	159,296,450	1 Laporan	159,489,750	SEKRETARIAT DAERAH
4	1	1	2.0 9		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	15,000,000	100 %	15,000,000	
4	1	1	2.0 9	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	15,000,000	1 Unit	15,000,000	SEKRETARIAT DAERAH
4	1	2			PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase Kelembagaan Masyarakat yang aktif	50 %	33,237,267,040	50 %	37,184,400,000	
						Persentase produk hukum yang dihasilkan	100 %		100 %		
						Persentase Rumusan Kebijakan Daerah Yang Dihasilkan	100 %		100 %		
4	1	2	2.0 2		Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Presentase Kegiatan dan Pembinaan Di Bidang Keagamaan , Sosial Pemasarakatan yang di fasilitasi	85 n/a	33,237,267,040	85 n/a	37,184,400,000	

4	1	2	2.0 2	1	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	0 Dokumen	33,158,067,040	0 Dokumen	37,064,400,000	SEKRETARIAT DAERAH
4	1	2	2.0 2	2	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB	7 Dokumen	79,200,000	7 Dokumen	70,000,000	SEKRETARIAT DAERAH
4	1	2	2.0 2	3	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas	7 Dokumen	0	7 Dokumen	50,000,000	SEKRETARIAT DAERAH
4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN						
4	1				SEKRETARIAT DAERAH			1,533,639,060		0	
4	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Kebijakan Strategis Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	77 %	1,533,639,060	77 %	0	
4	1	1	2.0 2		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	226,560,000	100 %	0	
4	1	1	2.0 2	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	9 Dokumen	226,560,000	9 Dokumen	0	SEKRETARIAT DAERAH
4	1	1	2.0 5		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase administrasi kepegawaian perangkat	100 %	117,762,610	100 %	0	

						daerah					
4	1	1	2.0 5	1 0	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	285 Orang	117,762,610	285 Orang	0	SEKRETARIAT DAERAH
4	1	1	2.0 6		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pelayanan Administrasi Umum yang Tersedia	100 %	339,153,150	100 %	0	
4	1	1	2.0 6	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	7 Paket	166,843,300	7 Paket	0	SEKRETARIAT DAERAH
4	1	1	2.0 6	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	57,797,550	3 Paket	0	SEKRETARIAT DAERAH
4	1	1	2.0 6	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	32,414,300	2 Paket	0	SEKRETARIAT DAERAH
4	1	1	2.0 6	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	3 Laporan	82,098,000	3 Laporan	0	SEKRETARIAT DAERAH
4	1	1	2.0 7		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pengadaa Barang Milik Daerah	100 %	63,596,580	100 %	0	
4	1	1	2.0 7	5	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	28 Unit	63,596,580	28 Unit	0	SEKRETARIAT DAERAH
4	1	1	2.0 8		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	5,280,000	100 %	0	
4	1	1	2.0 8	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	5,280,000	1 Laporan	0	SEKRETARIAT DAERAH
4	1	1	2.0 9		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100 %	8,771,950	100 %	0	

4	1	1	2.0 9	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 Unit	8,771,950	2 Unit	0	SEKRETARIAT DAERAH
4	1	1	2.1 3		Penataan Organisasi	Meningkatnya Penataan Organisasi	56 %	772,514,770	56 %	0	
4	1	1	2.1 3	1	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Anjab, ABK dan Peta Jabatan Perangkat Daerah	2 Dokumen	340,048,000	2 Dokumen	0	SEKRETARIAT DAERAH
						Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	1 Dokumen		1 Dokumen		
						Jumlah Dokumen Peraturan Bupati tentang analisis Jabatan	1 Dokumen		1 Dokumen		
						Jumlah Layanan Penataan Kelembagaan dan Pengelolaan Analisis Jabatan	5 Aplikas1		5 Aplikas1		
4	1	1	2.1 3	2	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Inovasi Pelayanan Publik	1 Kegiatan	150,168,370	1 Kegiatan	0	SEKRETARIAT DAERAH
						Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	1 Laporan		1 Laporan		
						Jumlah Peraturan Bupati Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	1 Kegiatan		1 Kegiatan		
						Jumlah Peraturan Bupati Tata Naskah Dinas dan Standar Pakaian Dinas	1 Dokumen		1 Dokumen		
4	1	1	2.1 3	3	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	0 Dokumen	230,298,400	0 Dokumen	0	SEKRETARIAT DAERAH
						Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	47 OPD		47 OPD		
						Jumlah Dokumen Rencana Aksi Road Map Reformasi Birokrasi	15 OPD		15 OPD		
						Jumlah OPD yang mengikuti PMPRB	15 Dokumen		15 Dokumen		

4	1	1	2.1 3	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	1 Dokumen	52,000,000	1 Dokumen	0	SEKRETARIAT DAERAH
4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN						
4	1				SEKRETARIAT DAERAH			2,077,319,850		1,954,993,600	
4	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	persentase kebijakan strategis urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	100 %	1,405,847,520	100 %	1,283,518,200	
4	1	1	2.0 1		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	persentase perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100 %	563,855,680	100 %	387,177,360	
4	1	1	2.0 1	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	0 Laporan	563,855,680	0 Laporan	387,177,360	SEKRETARIAT DAERAH
				Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		2 Dokumen	2 Dokumen				
4	1	1	2.0 2		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	persentase administrasi keuangan perangkat daerah	100 %	284,400,000	100 %	285,400,000	
4	1	1	2.0 2	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Bulan Pembayaran Gaji Non ASN	12 Bulan	284,400,000	12 Bulan	285,400,000	SEKRETARIAT DAERAH
				Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		0 Dokumen	0 Dokumen				
4	1	1	2.0 5		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	persentase kepegawaian perangkat daerah	100 %	3,411,000	100 %	3,500,000	
4	1	1	2.0 5	2	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	3,411,000	1 Paket	3,500,000	SEKRETARIAT DAERAH
4	1	1	2.0 6		Administrasi Umum Perangkat Daerah	persentasi administrasi umum perangkat daerah	100 %	434,659,610	100 %	434,755,610	
4	1	1	2.0 6	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	120,226,000	1 Paket	120,250,000	SEKRETARIAT DAERAH

4	1	1	2.0 6	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Ketersediaan Bahan Logistik	14 Jenis	17,414,460	14 Jenis	17,450,460	SEKRETARIAT DAERAH
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	0 Paket		0 Paket		
4	1	1	2.0 6	5	Penyediaan Barang Cetak dan Peggandaan	Jumlah penyediaan barang cetak dan peggandaan	2 jenis	18,315,150	2 jenis	18,350,150	SEKRETARIAT DAERAH
4	1	1	2.0 6	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	0 Laporan	278,704,000	0 Laporan	278,705,000	SEKRETARIAT DAERAH
						Persentase Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang diikuti dan dilaksanakan	100 Persen		100 Persen		
4	1	1	2.0 7		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	101,521,230	100 %	154,585,230	
4	1	1	2.0 7	1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit	88,683,000	1 Unit	25,745,000	SEKRETARIAT DAERAH
4	1	1	2.0 7	5	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	0 Unit	12,838,230	0 Unit	128,840,230	SEKRETARIAT DAERAH
4	1	1	2.0 9		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	18,000,000	100 %	18,100,000	
4	1	1	2.0 9	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	5 Unit	18,000,000	5 Unit	18,100,000	SEKRETARIAT DAERAH
						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	0 Unit		0 Unit		
4	1	2			PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	persentase kebijakan strategis dibidang pemerintahan	100 %	671,472,330	100 %	671,475,400	

4	1	2	2.0 1		Administrasi Tata Pemerintahan	persentase administrasi tata pemerintahan	84 %	607,890,330	84 %	607,890,400	
4	1	2	2.0 1	1	Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	1 Dokumen	68,556,270	1 Dokumen	68,556,300	SEKRETARIAT DAERAH
4	1	2	2.0 1	2	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	1 Dokumen	444,888,740	1 Dokumen	444,888,750	SEKRETARIAT DAERAH
4	1	2	2.0 1	3	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	1 Dokumen	94,445,320	1 Dokumen	94,445,350	SEKRETARIAT DAERAH
4	1	2	2.0 4		Fasilitasi Kerja Sama Daerah	persentase kerja sama daerah	95 %	63,582,000	95 %	63,585,000	
4	1	2	2.0 4	1	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	1 Dokumen	63,582,000	1 Dokumen	63,585,000	SEKRETARIAT DAERAH
4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN						
4	1				SEKRETARIAT DAERAH			1,573,402,000		1,592,927,500	
4	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase urusan penunjang pemerintahan yang dilaksanakan	100 %	590,152,000	100 %	129,362,500	
4	1	1	2.0 2		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Presentase Laporan Keuangan Perangkat Daerah	100 %	321,360,000	100 %	0	
4	1	1	2.0 2	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	321,360,000	1 Dokumen	0	SEKRETARIAT DAERAH
4	1	1	2.0 6		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pelayanan Administrasi Umum	100 %	245,032,000	100 %	105,602,500	
4	1	1	2.0 6	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 tahun	86,666,500	1 tahun	21,975,000	SEKRETARIAT DAERAH
4	1	1	2.0 6	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	16,475,500	1 Paket	17,877,500	SEKRETARIAT DAERAH

4	1	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	18 Laporan	141,890,000	18 Laporan	65,750,000	SEKRETARIAT DAERAH
4	1	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Capaian Target Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	8,760,000	100 %	8,760,000	
4	1	1	2.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	8,760,000	12 Laporan	8,760,000	SEKRETARIAT DAERAH
4	1	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	15,000,000	100 %	15,000,000	
4	1	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit	15,000,000	1 Unit	15,000,000	SEKRETARIAT DAERAH
4	1	3			PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase pengadaan barang/jasa memenuhi standar ketepatan waktu	100 %	983,250,000	100 %	1,463,565,000	
						Persentase Perekonomian dan Pembangunan	100 %		100 %		
						Persentase Capaian Kinerja OPD	100 %		100 %		
4	1	3	2.03		Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	100 %	983,250,000	100 %	1,463,565,000	
4	1	3	2.03	1	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	250 Dokumen	497,586,000	250 Dokumen	987,765,000	SEKRETARIAT DAERAH
4	1	3	2.03	2	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	115 Dokumen	354,104,000	115 Dokumen	350,250,000	SEKRETARIAT DAERAH
4	1	3	2.03	3	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	10 Orang	131,560,000	10 Orang	125,550,000	SEKRETARIAT DAERAH
4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN						
4	1				SEKRETARIAT DAERAH			2,118,743,890		2,166,040,000	

4	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase urusan penunjang pemerintahan yang dilaksanakan	100 %	2,118,743,890	100 %	2,166,040,000	
4	1	1	2.0 2		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Laporan Keuangan Perangkat Daerah	100 %	518,880,000	100 %	518,880,000	
4	1	1	2.0 2	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	518,880,000	12 Dokumen	518,880,000	SEKRETARIAT DAERAH
4	1	1	2.0 5		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 %	44,466,000	100 %	50,000,000	
4	1	1	2.0 5	2	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	1 Paket	44,466,000	1 Paket	50,000,000	SEKRETARIAT DAERAH
4	1	1	2.0 6		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pelayanan Administrasi Umum	86	1,245,357,890	86	1,220,000,000	
4	1	1	2.0 6	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	388,022,100	5 Paket	400,000,000	SEKRETARIAT DAERAH
4	1	1	2.0 6	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	240,599,940	1 Paket	200,000,000	SEKRETARIAT DAERAH
4	1	1	2.0 6	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	74,695,850	1 Paket	70,000,000	SEKRETARIAT DAERAH
4	1	1	2.0 6	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	542,040,000	1 Laporan	550,000,000	SEKRETARIAT DAERAH
4	1	1	2.0 9		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	103,400,000	100 %	137,160,000	
4	1	1	2.0 9	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	7 Unit	92,520,000	7 Unit	127,010,000	SEKRETARIAT DAERAH
4	1	1	2.0 9	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	0 Unit	10,880,000	0 Unit	10,150,000	SEKRETARIAT DAERAH

						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	19 Unit		19 Unit		
4	1	1	2.1 4		Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Persentase pelaksanaan Protokol dan komunikasi Pimpinan	100 %	206,640,000	100 %	240,000,000	
4	1	1	2.1 4	1	Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	1 Laporan	80,360,000	1 Laporan	80,000,000	SEKRETARIAT DAERAH
4	1	1	2.1 4	2	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	1 Laporan	80,360,000	1 Laporan	80,000,000	SEKRETARIAT DAERAH
4	1	1	2.1 4	3	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	1 Laporan	45,920,000	1 Laporan	80,000,000	SEKRETARIAT DAERAH
4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN						
4	1				SEKRETARIAT DAERAH			31,822,217,994		32,191,836,800	
4	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase urusan penunjang pemerintahan yang dilaksanakan	100 %	31,822,217,994	100 %	32,191,836,800	
4	1	1	2.0 2		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Presentase Laporan Keuangan Perangkat Daerah	100 %	16,166,132,160	100 %	16,107,799,500	
4	1	1	2.0 2	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	110 Orang/bulan	12,654,332,160	110 Orang/bulan	12,595,899,500	SEKRETARIAT DAERAH
4	1	1	2.0 2	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	0 Dokumen	3,511,800,000	0 Dokumen	3,511,900,000	SEKRETARIAT DAERAH
						Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen		1 Dokumen		
						Jumlah honorer	126 Orang		126 Orang		
4	1	1	2.0 5		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Presentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	95 %	470,534,000	95 %	482,500,000	
4	1	1	2.0 5	2	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	134 Paket	88,044,000	134 Paket	100,000,000	SEKRETARIAT DAERAH
4	1	1	2.0 5	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	8 Orang	382,490,000	8 Orang	382,500,000	SEKRETARIAT DAERAH

4	1	1	2.0 6		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase Pelayanan Administrasi Umum	86 %	6,922,146,920	86 %	6,922,149,300	
4	1	1	2.0 6	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	1,483,099,160	12 Paket	1,483,099,500	SEKRETARIAT DAERAH
4	1	1	2.0 6	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	10 Paket	506,319,760	10 Paket	506,319,800	SEKRETARIAT DAERAH
4	1	1	2.0 6	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	2,009,062,500	1 Paket	2,009,063,000	SEKRETARIAT DAERAH
4	1	1	2.0 6	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	71,037,500	1 Paket	71,038,000	SEKRETARIAT DAERAH
4	1	1	2.0 6	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	36 Laporan	2,852,628,000	36 Laporan	2,852,629,000	SEKRETARIAT DAERAH
4	1	1	2.0 8		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	1,470,514,500	100 %	1,783,795,000	
4	1	1	2.0 8	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	733,794,000	3 Laporan	733,795,000	SEKRETARIAT DAERAH
4	1	1	2.0 8	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Laporan	268,182,000	2 Laporan	300,000,000	SEKRETARIAT DAERAH
4	1	1	2.0 8	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2 Laporan	468,538,500	2 Laporan	750,000,000	SEKRETARIAT DAERAH
4	1	1	2.0 9		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	1,867,714,212	100 %	1,867,716,000	

4	1	1	2.0 9	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	22 Unit	328,110,000	22 Unit	328,111,000	SEKRETARIAT DAERAH
4	1	1	2.0 9	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit	1,539,604,212	4 Unit	1,539,605,000	SEKRETARIAT DAERAH
4	1	1	2.1 1		Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Presentase Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah	98 %	3,412,776,202	98 %	3,413,077,000	
4	1	1	2.1 1	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 Orang/Bulan	772,276,202	2 Orang/Bulan	772,277,000	SEKRETARIAT DAERAH
4	1	1	2.1 1	2	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	2 Paket	80,000,000	2 Paket	80,100,000	SEKRETARIAT DAERAH
4	1	1	2.1 1	3	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	1 Orang	400,000,000	1 Orang	400,100,000	SEKRETARIAT DAERAH
4	1	1	2.1 1	4	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 Orang/Bulan	2,160,500,000	2 Orang/Bulan	2,160,600,000	SEKRETARIAT DAERAH
4	1	1	2.1 2		Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Persentase Pelayanan Rumah Tangga Pimpinan	100 %	1,512,400,000	100 %	1,614,800,000	
4	1	1	2.1 2	1	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	1 Paket	674,700,000	1 Paket	750,000,000	SEKRETARIAT DAERAH
4	1	1	2.1 2	2	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	1 Paket	614,700,000	1 Paket	614,800,000	SEKRETARIAT DAERAH

4	1	1	2.1 2	3	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan	1 Paket	223,000,000	1 Paket	250,000,000	SEKRETARIAT DAERAH
4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN						
4	2				SEKRETARIAT DPRD			25,812,155,836		56,690,122,600	
4	2	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase urusan penunjang pemerintahan yang dilaksanakan	100 %	20,228,948,986	100 %	51,096,351,600	
4	2	1	2.0 1		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	160,000,000	100 %	170,000,000	
4	2	1	2.0 1	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12 Laporan	160,000,000	12 Laporan	170,000,000	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4	2	1	2.0 2		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	5,807,640,364	100 %	36,464,523,700	
4	2	1	2.0 2	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	35 Orang/bulan	3,406,320,364	35 Orang/bulan	34,063,203,700	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4	2	1	2.0 2	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	2,401,320,000	12 Dokumen	2,401,320,000	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4	2	1	2.0 3		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100 %	16,800,000	100 %	16,900,000	
4	2	1	2.0 3	6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan	16,800,000	4 Laporan	16,900,000	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4	2	1	2.0 5		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	100 %	122,904,000	100 %	122,950,000	

4	2	1	2.0 5	1	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	15 Orang	122,904,000	15 Orang	122,950,000	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4	2	1	2.0 6		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Peningkatan Pelayanan, Administrasi, Keuangan dan fasilitas Penunjang pekerjaan	100 %	1,016,745,144	100 %	1,211,994,200	
4	2	1	2.0 6	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	0 Paket	0	0 Paket	195,247,000	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4	2	1	2.0 6	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	0 Paket	0	0 Paket	0	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4	2	1	2.0 6	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	30 Paket	598,127,144	30 Paket	598,127,200	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4	2	1	2.0 6	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	20 Paket	147,838,000	20 Paket	147,839,000	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4	2	1	2.0 6	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	35 Laporan	270,780,000	35 Laporan	270,781,000	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4	2	1	2.0 7		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Sarana dan Prasarana Penunjang Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Pimpinan dan Anggota DPRD	100 %	236,992,000	100 %	236,994,000	

4	2	1	2.0 7	1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit	195,247,000	1 Unit	195,248,000	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4	2	1	2.0 7	5	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 Unit	41,745,000	2 Unit	41,746,000	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4	2	1	2.0 8		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	253,219,200	100 %	258,221,300	
4	2	1	2.0 8	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	6,012,000	12 Laporan	6,013,000	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4	2	1	2.0 8	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	157,827,200	12 Laporan	157,827,300	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4	2	1	2.0 8	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	24,380,000	12 Laporan	24,381,000	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4	2	1	2.0 8	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	65,000,000	12 Laporan	70,000,000	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4	2	1	2.0 9		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	160,200,000	100 %	160,300,000	
4	2	1	2.0 9	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	13 Unit	160,200,000	13 Unit	160,300,000	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

4	2	1	2.0 9	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0 Unit	0	0 Unit	0	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4	2	1	2.0 9	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0 Unit	0	0 Unit	0	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4	2	1	2.1 5		Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Persentase Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	100 %	11,181,315,478	100 %	11,181,315,500	
4	2	1	2.1 5	1	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	25 Orang/Bulan	11,181,315,478	25 Orang/Bulan	11,181,315,500	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4	2	1	2.1 5	2	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	0 Paket	0	0 Paket	0	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4	2	1	2.1 5	3	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD	0 Orang	0	0 Orang	0	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4	2	1	2.1 6		Layanan Administrasi DPRD	Terlaksananya Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	100 %	1,273,132,800	100 %	1,273,152,900	
4	2	1	2.1 6	2	Fasilitasi Fraksi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Fraksi DPRD	24 Laporan	34,200,000	24 Laporan	34,210,000	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4	2	1	2.1 6	3	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	24 Laporan	97,320,000	24 Laporan	97,330,000	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

4	2	1	2.1 6	4	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan	42 Paket	1,141,612,800	42 Paket	1,141,612,900	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4	2	2			PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Presentase Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	100 %	5,583,206,850	100 %	5,593,771,000	
4	2	2	2.0 1		Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Terlaksananya Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	100 %	1,482,810,000	100 %	1,482,911,000	
4	2	2	2.0 1	2	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	20 Dokumen	282,810,000	20 Dokumen	282,811,000	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4	2	2	2.0 1	4	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi	12 Dokumen	1,200,000,000	12 Dokumen	1,200,100,000	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4	2	2	2.0 2		Pembahasan Kebijakan Anggaran	Terlaksananya Pembahasan Kebijakan Anggaran	100 %	558,160,000	100 %	558,570,000	
4	2	2	2.0 2	1	Pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS	25 Dokumen	75,200,000	25 Dokumen	75,300,000	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4	2	2	2.0 2	2	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	25 Dokumen	42,800,000	25 Dokumen	42,900,000	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4	2	2	2.0 2	3	Pembahasan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	25 Dokumen	157,200,000	25 Dokumen	157,300,000	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4	2	2	2.0 2	4	Pembahasan APBD Perubahan	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan	25 Dokumen	117,360,000	25 Dokumen	117,370,000	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

4	2	2	2.0 2	6	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	20 Dokumen	165,600,000	20 Dokumen	165,700,000	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4	2	2	2.0 3		Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Terlaksanannya Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	100 %	168,570,000	100 %	168,600,000	
4	2	2	2.0 3	1	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	10 Laporan	56,190,000	10 Laporan	56,200,000	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4	2	2	2.0 3	2	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	10 Laporan	56,190,000	10 Laporan	56,200,000	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4	2	2	2.0 3	4	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	10 Laporan	56,190,000	10 Laporan	56,200,000	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4	2	2	2.0 4		Peningkatan Kapasitas DPRD	Persentase Peningkatan Kapasitas DPRD	100 %	1,248,808,000	100 %	1,258,829,000	
4	2	2	2.0 4	2	Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	75 Dokumen	720,880,000	75 Dokumen	720,890,000	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4	2	2	2.0 4	3	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Jumlah Dokumen Penyebarluasan Produk Hukum Daerah, Publikasi dan Dokumentasi Dewan	25 Dokumen	0	25 Dokumen	0	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4	2	2	2.0 4	4	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli	3 Orang	270,000,000	3 Orang	280,000,000	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

4	2	2	2.0 4	5	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	6 Orang	252,000,000	6 Orang	252,010,000	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4	2	2	2.0 4	7	Penyusunan Program Kerja DPRD	Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD	2 Dokumen	5,928,000	2 Dokumen	5,929,000	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4	2	2	2.0 5		Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Persentase Fasilitas Kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD	100 %	900,209,850	100 %	900,211,000	
						Terlaksananya Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	100 %		100 %		
4	2	2	2.0 5	1	Kunjungan Kerja dalam Daerah	Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD	75 Laporan	143,078,400	75 Laporan	143,078,500	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4	2	2	2.0 5	2	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun	25 Dokumen	34,560,000	25 Dokumen	34,561,000	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4	2	2	2.0 5	3	Pelaksanaan Reses	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	75 Dokumen	722,571,450	75 Dokumen	722,571,500	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4	2	2	2.0 8		Fasilitasi Tugas DPRD	Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	100 Dokumen	1,224,649,000	100 Dokumen	1,224,650,000	
4	2	2	2.0 8	1	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	100 Dokumen	1,224,649,000	100 Dokumen	1,224,650,000	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						
5	1				PERENCANAAN			11,113,546,083		11,737,477,667	

5	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase urusan penunjang pemerintahan yang dilaksanakan	100 %	7,626,991,953	100 %	7,291,112,417	
5	1	1	2.0 1		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi	100 %	11,360,000	100 %	25,000,000	
5	1	1	2.0 1	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	5,600,000	2 Dokumen	15,000,000	Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah
5	1	1	2.0 1	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	5,760,000	1 Laporan	10,000,000	Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah
5	1	1	2.0 2		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan Gaji dan Tunjangan PNS, PPPK, Tenaga Kontrak	100 %	5,849,335,221	100 %	5,298,092,417	
5	1	1	2.0 2	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	39 Orang/bulan	4,730,015,221	39 Orang/bulan	4,176,892,417	Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah
5	1	1	2.0 2	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	1,114,200,000	1 Dokumen	1,114,200,000	Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah
5	1	1	2.0 2	6	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen	5,120,000	1 Dokumen	7,000,000	Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah
5	1	1	2.0 3		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan Barang Milik daerah	100 %	4,800,000	100 %	5,120,000	

5	1	1	2.0 3	2	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	4,800,000	1 Dokumen	5,120,000	Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah
5	1	1	2.0 5		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Daerah yang dilaksanakan	100 %	251,823,700	100 %	350,000,000	
5	1	1	2.0 5	1	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	83 Unit	1,660,000	83 Unit	5,000,000	Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah
5	1	1	2.0 5	2	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	31,125,000	1 Paket	45,000,000	Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah
5	1	1	2.0 5	1 1	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	39 Orang	219,038,700	39 Orang	300,000,000	Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah
5	1	1	2.0 6		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang dilaksanakan	100 %	1,144,788,832	100 %	1,260,000,000	
5	1	1	2.0 6	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	14,682,725	1 Paket	20,000,000	Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah
5	1	1	2.0 6	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	81,955,350	1 Paket	100,000,000	Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah

5	1	1	2.0 6	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	14,523,960	1 Paket	0	Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah
5	1	1	2.0 6	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	306,546,047	1 Paket	300,000,000	Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah
5	1	1	2.0 6	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	92,239,100	1 Paket	180,000,000	Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah
5	1	1	2.0 6	8	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	1 Laporan	60,400,000	1 Laporan	60,000,000	Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah
5	1	1	2.0 6	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	574,441,650	1 Laporan	600,000,000	Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah
5	1	1	2.0 7		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase ketersediaan Barang Milik daerah yang menjadi Kebutuhan	100 %	142,887,000	100 %	100,000,000	
5	1	1	2.0 7	2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	6 Unit	142,887,000	6 Unit	100,000,000	Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah
5	1	1	2.0 8		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang urusan pemerintah daerah yang tersedia	100 %	95,021,200	100 %	102,900,000	
5	1	1	2.0 8	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	5,520,000	1 Laporan	7,000,000	Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah
5	1	1	2.0 8	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	65,251,200	1 Laporan	70,000,000	Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah

5	1	1	2.0 8	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	23,350,000	1 Laporan	25,000,000	Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah
5	1	1	2.0 8	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	900	1 Laporan	900	Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah
5	1	1	2.0 9		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan anggaran Barang Milik daerah yang dipelihara	100 %	126,976,000	100 %	150,000,000	
5	1	1	2.0 9	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10 Unit	76,000,000	10 Unit	80,000,000	Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah
5	1	1	2.0 9	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	50,976,000	1 Unit	70,000,000	Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah
5	1	2			PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Konsistensi Perencanaan Pembangunan Daerah	100 %	1,896,286,430	100 %	2,236,365,250	
5	1	2	2.0 1		Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Konsistensi Perencanaan Pembangunan daerah	100 %	1,182,194,430	100 %	1,246,365,250	
5	1	2	2.0 1	1	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan Jika RPJMD Maka Rancangan Teknokratik)	2 Dokumen	381,365,250	2 Dokumen	381,365,250	Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah
5	1	2	2.0 1	3	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	0 Berita Acara	66,088,280	0 Berita Acara	70,000,000	Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah
						Laporan Berita Acara Konsultasi Publik	1 Dokumen		1 Dokumen		

5	1	2	2.0 1	4	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	1 Berita Acara	152,942,000	1 Berita Acara	155,000,000	Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah
5	1	2	2.0 1	5	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Laporan Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	1 Dokumen	57,730,000	1 Dokumen	60,000,000	Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah
5	1	2	2.0 1	6	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	Jumlah Kecamatan Yang Melaksanakan Musrenbnag	9 Kecamatan	75,764,900	9 Kecamatan	80,000,000	Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah
						Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan	0 Usulan		0 Usulan		
5	1	2	2.0 1	7	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan(RPJPD/RPJMD/RK PD)	2 Dokumen	448,304,000	2 Dokumen	500,000,000	Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah
5	1	2	2.0 2		Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase SDM yang berkualitas dan Berdaya saing	100 %	0	100 %	300,000,000	
5	1	2	2.0 2	1	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	1 Dokumen	0	1 Dokumen	300,000,000	Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah
5	1	2	2.0 3		Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase indikator program perangkat daerah mitra Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia yang tercapai	100 %	677,860,000	100 %	650,000,000	
5	1	2	2.0 3	1	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	1 Laporan	187,230,000	1 Laporan	300,000,000	Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah

5	1	2	2.0 3	3	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	4 Dokumen	490,630,000	4 Dokumen	350,000,000	Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah
5	1	2	2.0 4		Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Persentase Informasi pembangunan Daerah yang Dipublikasi	100 %	36,232,000	100 %	40,000,000	
5	1	2	2.0 4	1	Pengelolaan Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Jumlah Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah yang Dikelola	5 Dokumen	36,232,000	5 Dokumen	40,000,000	Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah
5	1	3			PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase konsistensi capaian program OPD mitra bidang pemerintahan dan pembangunan manusia	100 %	1,590,267,700	100 %	2,210,000,000	
5	1	3	2.0 1		Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persentase konsistensi capaian program OPD mitra bidang pemerintahan dan pembangunan manusia	100 %	604,799,500	100 %	915,000,000	
5	1	3	2.0 1	1	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	2 Dokumen	56,926,000	2 Dokumen	80,000,000	Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah
5	1	3	2.0 1	2	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	2 Laporan	14,025,000	2 Laporan	150,000,000	Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah

5	1	3	2.0 1	3	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	10 Laporan	60,340,000	10 Laporan	85,000,000	Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah
5	1	3	2.0 1	4	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	3 Laporan	73,964,000	3 Laporan	80,000,000	Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah
5	1	3	2.0 1	5	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	2 Dokumen	65,494,000	2 Dokumen	100,000,000	Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah
5	1	3	2.0 1	6	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	6 Laporan	13,680,000	6 Laporan	20,000,000	Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah
5	1	3	2.0 1	7	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	6 Laporan	169,893,000	6 Laporan	200,000,000	Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah
5	1	3	2.0 1	8	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	2 Laporan	150,477,500	2 Laporan	200,000,000	Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah
5	1	3	2.0 2		Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Persentase konsistensi capaian program OPD mitra bidang ekonomi dan SDA	100 %	499,992,500	100 %	610,000,000	

5	1	3	2.0 2	1	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1 Dokumen	86,169,400	1 Dokumen	90,000,000	Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah
5	1	3	2.0 2	2	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	6 Laporan	13,580,000	6 Laporan	15,000,000	Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah
5	1	3	2.0 2	3	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	1 Laporan	34,369,050	1 Laporan	40,000,000	Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah
5	1	3	2.0 2	4	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	1 Laporan	121,160,000	1 Laporan	150,000,000	Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah
5	1	3	2.0 2	5	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1 Dokumen	87,891,000	1 Dokumen	100,000,000	Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah
5	1	3	2.0 2	6	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	2 Laporan	13,580,000	2 Laporan	15,000,000	Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah
5	1	3	2.0 2	7	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	2 Laporan	37,133,050	2 Laporan	50,000,000	Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah

5	1	3	2.0 2	8	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA	1 Laporan	106,110,000	1 Laporan	150,000,000	Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah
5	1	3	2.0 3		Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Persentase konsistensi capaian program OPD mitra bidang Infrastruktur dan kewilayahan	100 %	485,475,700	100 %	685,000,000	
5	1	3	2.0 3	1	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	5 Dokumen	93,180,000	5 Dokumen	100,000,000	Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah
5	1	3	2.0 3	2	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	4 Laporan	8,911,700	4 Laporan	15,000,000	Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah
5	1	3	2.0 3	3	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	6 Laporan	54,840,000	6 Laporan	150,000,000	Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah
5	1	3	2.0 3	4	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	6 Laporan	125,415,000	6 Laporan	150,000,000	Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah
5	1	3	2.0 3	5	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	5 Dokumen	85,634,000	5 Dokumen	100,000,000	Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah

5	1	3	2.0 3	6	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	4 Laporan	7,700,000	4 Laporan	15,000,000	Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah
5	1	3	2.0 3	7	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	6 Laporan	50,260,000	6 Laporan	80,000,000	Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah
5	1	3	2.0 3	8	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan	6 Laporan	59,535,000	6 Laporan	75,000,000	Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah
5	5				PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN			728,379,050		970,000,000	
5	5	2			PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Presentase Hasil Penelitian Dan Pengembangan yang diimplementasikan	100 %	728,379,050	100 %	970,000,000	
5	5	2	2.0 1		Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Presentase Penelitian Dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan yang dilaksanakan	100 %	687,850,860	100 %	895,000,000	
5	5	2	2.0 1	2	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	1 Laporan	249,914,800	1 Laporan	270,000,000	Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah
5	5	2	2.0 1	5	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi	1 Laporan	40,528,190	1 Laporan	75,000,000	Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah

5	5	2	2.0 1	1 2	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	Jumlah Data Kelitbangan dan Peraturan yang Terkelola dengan Baik	2 Laporan	275,823,300	2 Laporan	350,000,000	Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah
5	5	2	2.0 1	1 4	Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan	3 Laporan	121,584,570	3 Laporan	200,000,000	Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah
5	5	2	2.0 4		Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Persentase Pengembangan Inovasi dan Teknologi	100 %	40,528,190	100 %	75,000,000	
5	5	2	2.0 4	3	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	1 Laporan	40,528,190	1 Laporan	75,000,000	Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah
5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						
5	2				KEUANGAN			213,476,809,254		223,563,755,000	
5	2	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Urusan Penunjang Pemerintahan yang dilaksanakan	100 %	15,759,461,711	100 %	1,343,450,140	
5	2	1	2.0 1		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen perencanaan Anggaran dan Akuntabilitas Pertanggungjawaban	4 Dokumen	41,504,600	4 Dokumen	28,370,750	
5	2	1	2.0 1	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	31,875,250	3 Dokumen	17,743,500	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

5	2	1	2.0 1	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 Laporan	9,629,350	5 Laporan	10,627,250	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5	2	1	2.0 2		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pembayaran Jasa Administrasi Keuangan	100 %	14,231,033,863	100 %	0	
5	2	1	2.0 2	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase ASN yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	100 %	8,493,032,263	100 %	0	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5	2	1	2.0 2	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	5,738,001,600	1 Dokumen	0	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5	2	1	2.0 5		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah ASN yang melakukan Pendidikan dan Pelatihan	11 Orang	137,060,000	11 Orang	0	
5	2	1	2.0 5	2	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	0 Paket	0	0 Paket	0	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5	2	1	2.0 5	1	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Persentase Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	100 %	137,060,000	100 %	0	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5	2	1	2.0 6		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terpenuhinya Layanan Kepada Masyarakat/Steckholder Terkait Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	100 %	980,049,090	100 %	977,950,232	
5	2	1	2.0 6	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	36,942,410	1 Paket	40,504,410	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5	2	1	2.0 6	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	11 Paket	219,350,460	11 Paket	219,926,702	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

5	2	1	2.0 6	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	0 Paket	147,204,150	0 Paket	146,157,400	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5	2	1	2.0 6	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	49,440,520	1 Paket	49,412,170	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5	2	1	2.0 6	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	0 Laporan	86,476,000	0 Laporan	86,476,000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5	2	1	2.0 6	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	440,635,550	1 Laporan	435,473,550	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5	2	1	2.0 7		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Peralatan Gedung Kantor	11 Unit	0	11 Unit	0	
5	2	1	2.0 7	1 0	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0 Unit	0	0 Unit	0	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5	2	1	2.0 8		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan	199,054,158	12 Bulan	199,054,158	
5	2	1	2.0 8	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	119,994,158	1 Laporan	119,994,158	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5	2	1	2.0 8	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	22,420,000	1 Laporan	22,420,000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5	2	1	2.0 8	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	56,640,000	12 Laporan	56,640,000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5	2	1	2.0 9		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kegiatan Pemeliharaan Gedung dan Kendaraan Dinas Operasional	14 Unit	170,760,000	14 Unit	138,075,000	

5	2	1	2.0 9	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	16 Unit	144,050,000	16 Unit	138,075,000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5	2	1	2.0 9	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	26,710,000	10 Unit	0	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5	2	1	2.0 9	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	0	1 Unit	0	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5	2	2			PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD	100 %	197,074,972,553	100 %	221,577,557,510	
					Persentase anggaran sisa terhadap total anggaran tahun sebelumnya	100 %	100 %				
					Rasio Belanja Pegawai di luar guru dan tenaga kesehatan	100 %	100 %				
					Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (dikurangi transfer expenditures )	100 %	100 %				
5	2	2	2.0 1		Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Presentase Jumlah dokumen rencana Anggaran Daerah yang tersusun dan tepat waktu	100 %	1,733,340,190	100 %	1,733,369,190	
5	2	2	2.0 1	1	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	1 Dokumen	64,922,000	1 Dokumen	64,922,000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5	2	2	2.0 1	2	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	1 Dokumen	64,922,000	1 Dokumen	64,922,000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

5	2	2	2.0 1	3	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi	65 Dokumen	59,034,950	65 Dokumen	59,034,950	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5	2	2	2.0 1	4	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi	65 Dokumen	59,034,950	65 Dokumen	59,034,950	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5	2	2	2.0 1	5	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi	65 Dokumen	85,814,850	65 Dokumen	85,814,850	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5	2	2	2.0 1	6	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi	65 Dokumen	85,217,300	65 Dokumen	85,217,300	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5	2	2	2.0 1	7	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	2 Dokumen	349,795,340	2 Dokumen	349,824,340	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5	2	2	2.0 1	8	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	2 Dokumen	323,858,800	2 Dokumen	323,858,800	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5	2	2	2.0 1	1 3	Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	7 Orang	640,740,000	7 Orang	640,740,000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5	2	2	2.0 2		Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Persentase anggaran sisa terhadap total anggaran tahun sebelumnya	0 %	763,592,570	0 %	763,593,570	
5	2	2	2.0 2	3	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	0 Dokumen	67,201,440	0 Dokumen	67,201,440	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5	2	2	2.0 2	4	Penatausahaan Pembiayaan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penatausahaan Pembiayaan Daerah	0 Dokumen	39,394,640	0 Dokumen	39,394,640	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

5	2	2	2.0 2	5	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	1 Dokumen	279,927,240	1 Dokumen	279,927,240	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5	2	2	2.0 2	6	Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	1 Dokumen	123,995,000	1 Dokumen	123,996,000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5	2	2	2.0 2	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	1 Laporan	45,224,250	1 Laporan	45,224,250	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5	2	2	2.0 2	1 1	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	1 Orang	207,850,000	1 Orang	207,850,000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5	2	2	2.0 3		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Persentase Jumlah koordinasi Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah yang terlaksan dengan baik	100 %	1,380,594,750	100 %	1,380,594,750	

5	2	2	2.0 3	2	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	3 Dokumen	509,313,000	3 Dokumen	509,313,000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5	2	2	2.0 3	4	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	65 Laporan	175,517,000	65 Laporan	175,517,000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5	2	2	2.0 3	5	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	2 Dokumen	406,010,000	2 Dokumen	406,010,000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5	2	2	2.0 3	8	Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	1 Dokumen	89,036,000	1 Dokumen	89,036,000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5	2	2	2.0 3	1 1	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	10 Orang	200,718,750	10 Orang	200,718,750	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5	2	2	2.0 4		Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Bunga, Subsidi, Hibah dan Bantuan Sosial Pada Belanja APBD	100 %	193,197,445,043	100 %	217,700,000,000	
5	2	2	2.0 4	4	Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah	1 Laporan	1,664,000,000	1 Laporan	1,700,000,000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

5	2	2	2.0 4	8	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	1 Laporan	155,226,103,000	1 Laporan	157,000,000,000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5	2	2	2.0 4	9	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	1 Laporan	6,003,442,043	1 Laporan	9,000,000,000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5	2	2	2.0 4	1 0	Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	1 Laporan	30,303,900,000	1 Laporan	50,000,000,000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5	2	3			PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase Jumlah BMD yang terkelola dengan tertib dan baik	100 %	642,374,990	100 %	642,747,350	
5	2	3	2.0 1		Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah dokumen BMD yang terkelola secara tertib	6 Dokumen	642,374,990	6 Dokumen	642,747,350	
5	2	3	2.0 1	1	Penyusunan Standar Harga	Jumlah Standar Harga yang Disusun	1 Dokumen	114,911,700	1 Dokumen	114,911,800	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5	2	3	2.0 1	3	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	1 Dokumen	28,344,000	1 Dokumen	28,344,000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5	2	3	2.0 1	5	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	6 Laporan	126,198,000	6 Laporan	126,288,000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5	2	3	2.0 1	6	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah	65 Laporan	98,721,350	65 Laporan	98,721,550	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5	2	3	2.0 1	8	Penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah	65 Laporan	243,534,690	65 Laporan	243,578,000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

5	2	3	2.0 1	1 0	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	12 Dokumen	30,665,250	12 Dokumen	30,904,000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						
5	2				KEUANGAN			21,451,422,921		19,751,993,503	
5	2	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Presentase Penunjang Urusan Pemerintahan yang dilaksanakan	100 %	17,905,958,721	100 %	15,909,213,353	
5	2	1	2.0 2		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	16,234,062,971	100 %	14,595,498,353	
5	2	1	2.0 2	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	30 Orang/bulan	14,579,622,971	30 Orang/bulan	14,574,743,203	Badan Pengelola Pendapatan Daerah
5	2	1	2.0 2	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	0 Dokumen	1,654,440,000	0 Dokumen	20,755,150	Badan Pengelola Pendapatan Daerah
						Jumlah Tenaga Kontrak/PHL yang dibayarkan gajinya	67		67		
5	2	1	2.0 5		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat daerah	100 %	95,340,000	100 %	10,934,000	
5	2	1	2.0 5	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	0 Orang	95,340,000	0 Orang	10,934,000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah
						Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10 Orang		10 Orang		
5	2	1	2.0 6		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Adminitrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	1,428,840,570	100 %	1,181,281,000	
5	2	1	2.0 6	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	0 Paket	120,803,050	0 Paket	200,000,000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah

						Persentase Ketersediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100 %		100 %		
5	2	1	2.0 6	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	0 Paket	242,170,440	0 Paket	250,000,000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah
						Persentase Ketersediaan Bahan Logistik Kantor	100 %		100 %		
5	2	1	2.0 6	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	0 Paket	263,741,830	0 Paket	400,000,000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah
						Persentase Ketersediaan Barang Cetak dan Penggandaan	100 %		100 %		
5	2	1	2.0 6	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	0 Laporan	802,125,250	0 Laporan	331,281,000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah
						Terpenuhinya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100 %		100 %		
5	2	1	2.0 8		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	147,715,180	100 %	121,500,000	
5	2	1	2.0 8	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	0 Laporan	51,485,680	0 Laporan	52,500,000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah
						Persentase Ketersediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	100 %		100 %		
5	2	1	2.0 8	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	0 Laporan	96,229,500	0 Laporan	69,000,000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah
						Persentase Ketersediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100 %		100 %		
5	2	4			PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase Potensi PAD yang Ditetapkan Sebagai Objek Penerimaan Daerah	80 %	3,545,464,200	80 %	3,842,780,150	

					Presentase Realisasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	100 %		100 %			
					Rasio Pajak dan Retribusi Daerah Terhadap PAD	84 %		84 %			
5	2	4	2.0 1		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Presentase Realisasi Pajak dan Retribusi Daerah yang dikelola BPPD	100 %	3,545,464,200	100 %	3,842,780,150	
5	2	4	2.0 1	1	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	9 Dokumen	0	9 Dokumen	34,375,000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah
5	2	4	2.0 1	2	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	0 Dokumen	0	0 Dokumen	112,940,950	Badan Pengelola Pendapatan Daerah
						Jumlah Regulasi Yang dibuat tentang pajak dan retribusi daerah	5 Regulasi		5 Regulasi		
5	2	4	2.0 1	3	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	1 Laporan	26,545,000	1 Laporan	26,545,000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah
5	2	4	2.0 1	4	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	2 Unit	2,382,568,750	2 Unit	2,382,568,750	Badan Pengelola Pendapatan Daerah
5	2	4	2.0 1	5	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	9 Laporan	199,029,250	9 Laporan	199,029,250	Badan Pengelola Pendapatan Daerah
5	2	4	2.0 1	6	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	2 Laporan	151,000,000	2 Laporan	151,000,000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah
5	2	4	2.0 1	7	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya	0 Obyek Pajak	215,853,000	0 Obyek Pajak	215,853,000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah
						Jumlah Potensi BPHTB yang ditetapkan	2000 Ketetapan		2000 Ketetapan		
						Jumlah potensi PBB P2 yang terdata	80000 Data		80000 Data		

5	2	4	2.0 1	8	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	9 Dokumen	55,870,000	9 Dokumen	55,870,000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah
5	2	4	2.0 1	9	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Jenis pajak yang terlayani	9 Jenis	0	9 Jenis	150,000,000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah
						Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	0 Layanan		0 Layanan		
5	2	4	2.0 1	1 0	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi	9 Dokumen	20,520,000	9 Dokumen	20,520,000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah
5	2	4	2.0 1	1 1	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	9 Dokumen	177,720,000	9 Dokumen	177,720,000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah
5	2	4	2.0 1	1 2	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	1 Dokumen	77,130,000	1 Dokumen	77,130,000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah
5	2	4	2.0 1	1 3	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	9 Dokumen	171,850,000	9 Dokumen	171,850,000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah
5	2	4	2.0 1	1 4	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	12 Laporan	67,378,200	12 Laporan	67,378,200	Badan Pengelola Pendapatan Daerah
5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						
5	3				KEPEGAWAIAN			6,845,416,647		9,825,515,942	
5	3	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase urusan penunjang pemerintahan yang dilaksanakan	100 %	4,625,554,647	100 %	7,666,515,942	
5	3	1	2.0 1		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6	31,350,000	6	50,000,000	
5	3	1	2.0 1	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	0 Dokumen	31,350,000	0 Dokumen	50,000,000	Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan

						Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen		6 Dokumen		Sumber Daya Manusia
5	3	1	2.0 2		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Presentase pembayaran gaji dan tunjangan	100 %	3,888,143,147	100 %	4,020,715,942	
5	3	1	2.0 2	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	31 Orang/bulan	3,248,903,147	31 Orang/bulan	3,371,475,942	Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	3	1	2.0 2	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	0 Dokumen	639,240,000	0 Dokumen	649,240,000	Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
						Jumlah PHL yang terbayarkan gajinya	27 Orang/bulan		27 Orang/bulan		
5	3	1	2.0 3		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Presentase Pengelolaan Barang Milik Daerah pada perangkat daerah	100 %	0	100 %	15,000,000	
5	3	1	2.0 3	6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	3 Laporan	0	3 Laporan	15,000,000	Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	3	1	2.0 5		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Presentase pelayanan administrasi Kepegawaian perkantoran	100 %	89,092,000	100 %	200,000,000	
5	3	1	2.0 5	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	0 Orang	0	0 Orang	100,000,000	Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
						Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	2 Orang		2 Orang		
5	3	1	2.0 5	1 0	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	150 Orang	89,092,000	150 Orang	100,000,000	Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

5	3	1	2.0 6		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase pelayanan administrasi Umum Perangkat Daerah	100	503,879,500	100	563,000,000	
5	3	1	2.0 6	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	120,295,550	12 Paket	150,000,000	Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	3	1	2.0 6	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	149,285,050	12 Paket	177,000,000	Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	3	1	2.0 6	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	116,144,900	12 Paket	116,000,000	Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	3	1	2.0 6	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	118,154,000	12 Laporan	120,000,000	Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	3	1	2.0 7		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Presentase barang milik daerah yang dipelihara	100	0	100	2,500,000,000	
5	3	1	2.0 7	9	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit	0	2 Unit	2,500,000,000	Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	3	1	2.0 8		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	52,700,000	100 %	52,800,000	

5	3	1	2.0 8	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	51,800,000	12 Laporan	51,800,000	Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	3	1	2.0 8	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	0 Laporan	900	0 Laporan	1,000,000	Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
						Jumlah penyediaan jasa pelayanan umum kantor	12 Bulan		12 Bulan		
5	3	1	2.0 9		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase barang milik daerah yang dipelihara	100 %	60,390,000	100 %	265,000,000	
5	3	1	2.0 9	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 Unit	39,400,000	2 Unit	35,000,000	Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	3	1	2.0 9	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	0 Unit	20,990,000	0 Unit	30,000,000	Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit		10 Unit		
5	3	1	2.0 9	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	0	1 Unit	100,000,000	Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	3	1	2.0 9	1 1	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	0	1 Unit	100,000,000	Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	3	2			PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase Pejabat Struktural Eselon III yang Sudah Mengikuti Diklat PIM	67.11 %	2,219,862,000	67.11 %	2,159,000,000	

						Persentase Pejabat Struktural Eselon II yang Sudah Mengikuti Diklat PIM	73.53 %		73.53 %		
						Persentase Pejabat Struktural Eselon IV yang Sudah Mengikuti Diklat PIM	35.89 %		35.89 %		
5	3	2	2.0 1		Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Jumlah Dokumen Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	12 Dokumen	1,124,101,000	12 Dokumen	1,190,000,000	
5	3	2	2.0 1	2	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	0 Dokumen	357,770,000	0 Dokumen	360,000,000	Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
						Jumlah Formasi Penerimaan CPNS dan PPPK	250 Formasi		250 Formasi		
						Jumlah Pengangkatan Dalam Jabatan Fungsional	164 Orang		164 Orang		
5	3	2	2.0 1	3	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah CPNS dan PPPK yang difasilitasi penetapan NIP	250 Orang	405,089,000	250 Orang	500,000,000	Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
						Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	0 Dokumen		0 Dokumen		
						Jumlah peserta yang lulus CPNS dan PPPK	250 Orang		250 Orang		
5	3	2	2.0 1	5	Perumusan Bahan Kebijakan Pemberhentian ASN	Jumlah ASN yang akan memasuki batas usia pensiun	50 ASN	205,282,000	50 ASN	180,000,000	Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
						Jumlah ASN yang terlayani pengurusan taspen, karpeg, karis/karsu	250 Orang		250 Orang		
						Jumlah Dokumen Hasil perumusan Bahan Kebijakan Pemberhentian ASN	0 Dokumen		0 Dokumen		
5	3	2	2.0 1	1 0	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah ASN yang di mutahirkan datanya	3500 Orang	155,960,000	3500 Orang	150,000,000	Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	0 Dokumen		0 Dokumen		

						Persentase ASN yang difasilitasi dari kelembagaan KORPRI	100 %		100 %		
5	3	2	2.0 2		Mutasi dan Promosi ASN	Jumlah Mutasi dan Promosi Yang Diproses	200 ASN	267,766,000	200 ASN	270,000,000	
5	3	2	2.0 2	1	Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah ASN yang mutasi, promosi, pindah keluar masuk yang di proses	200 Orang	148,868,000	200 Orang	120,000,000	Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
						Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	0 Dokumen		0 Dokumen		
5	3	2	2.0 2	2	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah ASN yang pindah golongan	750 Orang	118,898,000	750 Orang	150,000,000	Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
						Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	0 Dokumen		0 Dokumen		
5	3	2	2.0 3		Pengembangan Kompetensi ASN	Persentase ASN Yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi Aparatur	90 %	502,382,000	90 %	349,000,000	
5	3	2	2.0 3	2	Pengelolaan Assessment Center	Jumlah ASN yang mengikuti Pengembangan Kompetensi Aparatur	48 Orang	265,640,000	48 Orang	160,000,000	Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
						Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center	0 Dokumen		0 Dokumen		
5	3	2	2.0 3	3	Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	Jumlah ASN yang mengikuti ujian dinas dan ujian penyesuaian ijazah	100 Orang	121,742,000	100 Orang	120,000,000	Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	0 Dokumen		0 Dokumen		
5	3	2	2.0 3	4	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan	5 Orang	115,000,000	5 Orang	69,000,000	Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	3	2	2.0 4		Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Persentase Disiplin ASN	98.89 %	325,613,000	98.89 %	350,000,000	

5	3	2	2.0 4	2	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	12 Dokumen	149,550,000	12 Dokumen	150,000,000	Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	3	2	2.0 4	4	Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai	Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan	50 Orang	77,960,000	50 Orang	80,000,000	Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	3	2	2.0 4	7	Pembinaan Disiplin ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan	15 Orang	49,089,000	15 Orang	50,000,000	Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	3	2	2.0 4	8	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Jumlah kasus pelanggaran disiplin yang ditangani	30 Orang	49,014,000	30 Orang	70,000,000	Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
						Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	0 Laporan		0 Laporan		
5	4				PENDIDIKAN DAN PELATIHAN			3,042,726,500		2,100,000,000	
5	4	2			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Presentase penempatan ASN sesuai ANJAB	20.00 %	3,042,726,500	20.00 %	2,100,000,000	
						Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	6.31 %		6.31 %		
						Rasio pegawai Fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	46.76 %		46.76 %		
						Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/Dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	154.47 %		154.47 %		
5	4	2	2.0 2		Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Presentase ASN Yang Mengikuti Diklat	100 %	3,042,726,500	100 %	2,100,000,000	

5	4	2	2.0 2	7	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah ASN yang Mengikuti Diklat Fungsional	1 Orang	3,042,726,500	1 Orang	2,100,000,000	Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
						Jumlah Kepemimpinan Tingkat II (KP)	3 Orang		3 Orang		
						Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	0 Laporan		0 Laporan		
						Jumlah pejabat struktural yang mengikuti seleksi JPT	12 ASN		12 ASN		
						Jumlah Pendidikan Kepemimpinan Administator	15 Orang		15 Orang		
						Jumlah Pendidikan Kepemimpinan Pengawas	40 Orang		40 Orang		
6					UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN						
6	1				INSPEKTORAT DAERAH			14,623,469,840		12,621,124,500	
6	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase urusan penunjang pemerintahan yang dilaksanakan	100 %	11,791,095,940	100 %	8,515,756,600	
6	1	1	2.0 1		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6 Dokumen	16,800,000	6 Dokumen	26,560,000	
6	1	1	2.0 1	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	8,400,000	2 Dokumen	8,280,000	Inspektorat Daerah
6	1	1	2.0 1	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKASKPD	1 Dokumen	0	1 Dokumen	0	Inspektorat Daerah
6	1	1	2.0 1	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKASKPD	1 Dokumen	0	1 Dokumen	0	Inspektorat Daerah

6	1	1	2.0 1	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPASKPD	1 Dokumen	0	1 Dokumen	0	Inspektorat Daerah
6	1	1	2.0 1	5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPASKPD	1 Dokumen	0	1 Dokumen	0	Inspektorat Daerah
6	1	1	2.0 1	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	8,400,000	2 Laporan	18,280,000	Inspektorat Daerah
6	1	1	2.0 2		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Laporan Administrasi Keuangan	100 %	7,527,950,500	100 %	0	
6	1	1	2.0 2	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase ASN yang Menerima Gaji dan Tunjangan	100 %	6,938,270,500	100 %	0	Inspektorat Daerah
6	1	1	2.0 2	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	589,680,000	12 Dokumen	0	Inspektorat Daerah
6	1	1	2.0 2	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	4 Laporan	0	4 Laporan	0	Inspektorat Daerah
6	1	1	2.0 3		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Barang Milik Daerah	100 %	0	100 %	145,720,000	
6	1	1	2.0 3	6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	0	12 Laporan	145,720,000	Inspektorat Daerah
6	1	1	2.0 5		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 %	1,239,203,000	100 %	1,489,913,000	
6	1	1	2.0 5	2	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	67,881,000	1 Paket	87,881,000	Inspektorat Daerah

6	1	1	2.0 5	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	51 Orang	1,062,070,000	51 Orang	1,162,070,000	Inspektorat Daerah
6	1	1	2.0 5	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	7 Orang	11,370,000	7 Orang	42,080,000	Inspektorat Daerah
6	1	1	2.0 5	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	7 Orang	97,882,000	7 Orang	197,882,000	Inspektorat Daerah
6	1	1	2.0 6		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	311,374,240	100 %	441,398,730	
6	1	1	2.0 6	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	75,050,570	3 Paket	51,517,570	Inspektorat Daerah
6	1	1	2.0 6	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	41,460,670	12 Paket	46,443,160	Inspektorat Daerah
6	1	1	2.0 6	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	14,825,000	3 Paket	26,400,000	Inspektorat Daerah
6	1	1	2.0 6	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	63,000,000	12 Laporan	100,000,000	Inspektorat Daerah
6	1	1	2.0 6	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan	117,038,000	4 Laporan	217,038,000	Inspektorat Daerah
6	1	1	2.0 7		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Presentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	2,605,277,750	100 %	6,273,559,750	
6	1	1	2.0 7	1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit	407,000,000	1 Unit	1,484,544,000	Inspektorat Daerah
6	1	1	2.0 7	2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	0	1 Unit	445,720,000	Inspektorat Daerah

6	1	1	2.0 7	5	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	114 Unit	198,277,750	114 Unit	439,795,750	Inspektorat Daerah
6	1	1	2.0 7	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	0 Unit	0	0 Unit	12,060,000	Inspektorat Daerah
6	1	1	2.0 7	9	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	2,000,000,000	1 Unit	3,000,000,000	Inspektorat Daerah
6	1	1	2.0 7	1 0	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0 Unit	0	0 Unit	345,720,000	Inspektorat Daerah
6	1	1	2.0 7	1 1	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0 Unit	0	0 Unit	545,720,000	Inspektorat Daerah
6	1	1	2.0 8		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	38,840,450	100 %	48,705,120	
6	1	1	2.0 8	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	38,840,450	12 Laporan	48,705,120	Inspektorat Daerah
6	1	1	2.0 9		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	51,650,000	100 %	89,900,000	
6	1	1	2.0 9	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	5 Unit	41,500,000	5 Unit	69,750,000	Inspektorat Daerah
6	1	1	2.0 9	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	15 Unit	10,150,000	15 Unit	20,150,000	Inspektorat Daerah
6	1	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase Rekomendasi LHP BPK-RI yang selesai ditindak lanjuti	75 %	1,916,918,100	75 %	2,670,618,100	
6	1	2	2.0 1		Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Jumah LHP Pengawasan Internal	109 Laporan	1,546,755,000	109 Laporan	2,225,555,000	

6	1	2	2.0 1	1	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	10 Laporan	135,000,000	10 Laporan	235,000,000	Inspektorat Daerah
6	1	2	2.0 1	2	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	36 Laporan	638,310,000	36 Laporan	838,310,000	Inspektorat Daerah
6	1	2	2.0 1	3	Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	4 Laporan	252,000,000	4 Laporan	371,000,000	Inspektorat Daerah
6	1	2	2.0 1	4	Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	16 Laporan	111,000,000	16 Laporan	200,000,000	Inspektorat Daerah
6	1	2	2.0 1	5	Pengawasan Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa	4 Laporan	176,885,000	4 Laporan	246,885,000	Inspektorat Daerah
6	1	2	2.0 1	6	Kerja Sama Pengawasan Internal	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk	15 Kesepakatan	93,940,000	15 Kesepakatan	94,740,000	Inspektorat Daerah
6	1	2	2.0 1	7	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	21 Dokumen	139,620,000	21 Dokumen	239,620,000	Inspektorat Daerah
6	1	2	2.0 2		Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah LHP Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	9 Laporan	370,163,100	9 Laporan	445,063,100	
6	1	2	2.0 2	1	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	12 Laporan	290,680,000	12 Laporan	361,380,000	Inspektorat Daerah
6	1	2	2.0 2	2	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	12 Laporan	79,483,100	12 Laporan	83,683,100	Inspektorat Daerah
6	1	3			PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Persentase OPD yang melaksanakan SPIP sesuai ketentuan	76,92 %	915,455,800	76,92 %	1,434,749,800	
				Persentase Pemenuhan Dokumen Pedoman Pengawasan		100 %	100 %				
				Persentase Pemenuhan Elemen Kapabilitas APIP		100 %	100 %				

6	1	3	2.0 1		Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Persentase Pelaksanaan Asistensi dan Pendampingan	100 %	45,837,000	100 %	67,312,000	
6	1	3	2.0 1	1	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun	2 Rekomendasi	25,325,000	2 Rekomendasi	40,512,000	Inspektorat Daerah
6	1	3	2.0 1	2	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun	4 Rekomendasi	20,512,000	4 Rekomendasi	26,800,000	Inspektorat Daerah
6	1	3	2.0 2		Pendampingan dan Asistensi	Persentase Pelaksanaan Asistensi dan Pendampingan	100 %	869,618,800	100 %	1,367,437,800	
6	1	3	2.0 2	1	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	45 perangkat daerah	369,059,800	45 perangkat daerah	437,439,800	Inspektorat Daerah
6	1	3	2.0 2	2	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	45 perangkat daerah	95,893,000	45 perangkat daerah	249,813,000	Inspektorat Daerah
6	1	3	2.0 2	3	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	7 Kegiatan	198,588,000	7 Kegiatan	383,107,000	Inspektorat Daerah
6	1	3	2.0 2	4	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	45 perangkat daerah	206,078,000	45 perangkat daerah	297,078,000	Inspektorat Daerah
7					UNSUR KEWILAYAHAN						
7	1				KECAMATAN			4,450,424,196		4,573,935,000	
7	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase urusan penunjang pemerintahan yang dilaksanakan	100 %	4,020,861,696	100 %	4,129,290,000	

7	1	1	2.0 1		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Ketepatan Waktu Perencanaan	100 %	0	100 %	0	
7	1	1	2.0 1	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	0	2 Dokumen	0	Kecamatan Bahodopi
7	1	1	2.0 1	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKASKPD	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	Kecamatan Bahodopi
7	1	1	2.0 1	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKASKPD	2 Dokumen	0	2 Dokumen	0	Kecamatan Bahodopi
7	1	1	2.0 1	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPASKPD	2 Dokumen	0	2 Dokumen	0	Kecamatan Bahodopi
7	1	1	2.0 2		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Presentase capaian kegiatan administrasi keuangan (%)	100 %	3,453,325,796	100 %	3,492,920,000	
7	1	1	2.0 2	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1 Orang/bulan	3,263,584,196	1 Orang/bulan	3,300,000,000	Kecamatan Bahodopi
7	1	1	2.0 2	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Bulan	186,840,000	12 Bulan	190,000,000	Kecamatan Bahodopi
7	1	1	2.0 2	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	7 Laporan	967,2	7 Laporan	970	Kecamatan Bahodopi
7	1	1	2.0 2	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	4 Laporan	1,934,400	4 Laporan	1,950,000	Kecamatan Bahodopi

7	1	1	2.0 3		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang tertib (%)	100 %	0	100 %	0	
7	1	1	2.0 3	5	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	0 Laporan	0	0 Laporan	0	Kecamatan Bahodopi
7	1	1	2.0 3	6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	0 Laporan	0	0 Laporan	0	Kecamatan Bahodopi
7	1	1	2.0 4		Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Rasio PAD (%)	100 %	10,363,200	100 %	6,670,000	
7	1	1	2.0 4	7	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	24 Kegiatan	10,363,200	24 Kegiatan	6,670,000	Kecamatan Bahodopi
7	1	1	2.0 5		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian yang Tertib (%)	100 %	65,500,000	100 %	66,000,000	
7	1	1	2.0 5	1	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	3 Orang	65,500,000	3 Orang	66,000,000	Kecamatan Bahodopi
7	1	1	2.0 6		Administrasi Umum Perangkat Daerah	jumlah Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	74 kegiatan	339,437,500	74 kegiatan	340,700,000	
7	1	1	2.0 6	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	3 Paket	4,996,600	3 Paket	5,000,000	Kecamatan Bahodopi
7	1	1	2.0 6	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	0 Paket	0	0 Paket	0	Kecamatan Bahodopi
7	1	1	2.0 6	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	0 Paket	0	0 Paket	0	Kecamatan Bahodopi
7	1	1	2.0 6	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	50 Kegiatan	159,682,400	50 Kegiatan	160,000,000	Kecamatan Bahodopi
7	1	1	2.0 6	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	24 Laporan	2,694,500	24 Laporan	2,700,000	Kecamatan Bahodopi

7	1	1	2.0 6	8	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	0 Laporan	0	0 Laporan	0	Kecamatan Bahodopi
7	1	1	2.0 6	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	180 Laporan	172,064,000	180 Laporan	173,000,000	Kecamatan Bahodopi
7	1	1	2.0 7		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan Ketersediaan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (%)	100 %	118,008,000	100 %	119,000,000	
7	1	1	2.0 7	2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	2 Unit	49,842,000	2 Unit	50,000,000	Kecamatan Bahodopi
7	1	1	2.0 7	1	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	6 Unit	68,166,000	6 Unit	69,000,000	Kecamatan Bahodopi
7	1	1	2.0 8		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)	100 %	16,927,200	100 %	79,000,000	
7	1	1	2.0 8	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	200 Laporan	0	200 Laporan	50,000,000	Kecamatan Bahodopi
7	1	1	2.0 8	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Laporan	16,927,200	36 Laporan	24,000,000	Kecamatan Bahodopi
7	1	1	2.0 8	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	0	1 Laporan	5,000,000	Kecamatan Bahodopi
7	1	1	2.0 9		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)	100 %	17,300,000	100 %	25,000,000	
7	1	1	2.0 9	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit	17,300,000	1 Unit	25,000,000	Kecamatan Bahodopi

7	1	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Pelayanan Terpadu Kecamatan	100 %	229,484,600	100 %	244,530,000	
7	1	2	2.0 1		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	10 Kegiatan	99,905,600	10 Kegiatan	114,950,000	
7	1	2	2.0 1	1	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 Kegiatan	99,905,600	1 Kegiatan	99,950,000	Kecamatan Bahodopi
7	1	2	2.0 1	2	Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	0 Dokumen	0	0 Dokumen	15,000,000	Kecamatan Bahodopi
7	1	2	2.0 4		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	3 kegiatan	129,579,000	3 kegiatan	129,580,000	
7	1	2	2.0 4	3	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	3 Kegiatan	129,579,000	3 Kegiatan	129,580,000	Kecamatan Bahodopi
7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Keg Pemberdayaan Masyarakat pada APBDKelurahan dan APBDesa	100 %	70,186,900	100 %	70,200,000	
7	1	3	2.0 1		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Prosentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa dan Kelurahan	16 %	70,186,900	16 %	70,200,000	
7	1	3	2.0 1	1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	24 Kegiatan	25,420,000	24 Kegiatan	25,430,000	Kecamatan Bahodopi

7	1	3	2.0 1	3	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	3 Kegiatan	44,766,900	3 Kegiatan	44,770,000	Kecamatan Bahodopi
7	1	4			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Pelanggaran K3 di Kecamatan	100 %	6,120,000	100 %	6,130,000	
7	1	4	2.0 1		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah penurunan kasus permasalahan trantib	18 Kasus	6,120,000	18 Kasus	6,130,000	
7	1	4	2.0 1	2	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	12 Laporan	6,120,000	12 Laporan	6,130,000	Kecamatan Bahodopi
7	1	5			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	JUMLAH PENYELENGGARA URUSAN PEMERINTAHAN	100 %	122,061,000	100 %	122,065,000	
7	1	5	2.0 1		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	"Jumlah rekomendasi forum koordinasi pimpinan di kecamatan yang disampaikan"	10 Kegiatan	122,061,000	10 Kegiatan	122,065,000	
7	1	5	2.0 1	4	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	1 Kegiatan	122,061,000	1 Kegiatan	122,065,000	Kecamatan Bahodopi
7	1	6			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	JUMLAH DESA YANG AKAN DILAKUKAN PEMBINAAN	100 %	1,710,000	100 %	1,720,000	
7	1	6	2.0 1		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah desa berstatus IDM desa mandiri	12 Desa	1,710,000	12 Desa	1,720,000	

7	1	6	2.0 1	6	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	5 Dokumen	1,710,000	5 Dokumen	1,720,000	Kecamatan Bahodopi
7					UNSUR KEWILAYAHAN						
7	1				KECAMATAN						
7	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase urusan penunjang pemerintahan yang dilaksanakan	100 %	3,436,920,318	100 %	3,435,267,000	
7	1	1	2.0 1		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	12,361,800	100 %	12,420,000	
7	1	1	2.0 1	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	2,280,000	1 Dokumen	2,290,000	Kecamatan Bumi Raya
7	1	1	2.0 1	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKASKPD	1 Dokumen	5,478,600	1 Dokumen	5,480,000	Kecamatan Bumi Raya
7	1	1	2.0 1	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPASKPD	1 Dokumen	4,603,200	1 Dokumen	4,650,000	Kecamatan Bumi Raya
7	1	1	2.0 2		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	2,968,428,018	100 %	2,961,667,000	
7	1	1	2.0 2	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	24 Orang/bulan	2,599,561,818	24 Orang/bulan	2,592,790,000	Kecamatan Bumi Raya
7	1	1	2.0 2	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	366,240,000	1 Dokumen	366,250,000	Kecamatan Bumi Raya
7	1	1	2.0 2	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	2,626,200	1 Laporan	2,627,000	Kecamatan Bumi Raya
7	1	1	2.0 3		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	100 %	2,626,200	100 %	2,630,000	

7	1	1	2.0 3	5	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	2,626,200	1 Laporan	2,630,000	Kecamatan Bumi Raya
7	1	1	2.0 4		Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	100 %	6,160,000	100 %	6,200,000	
7	1	1	2.0 4	5	Pengolahan Data Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah	1 Laporan	6,160,000	1 Laporan	6,200,000	Kecamatan Bumi Raya
7	1	1	2.0 5		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Adminstrasi Kepegawaian	100 %	44,918,500	100 %	45,000,000	
7	1	1	2.0 5	1	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	1 Unit	4,933,500	1 Unit	5,000,000	Kecamatan Bumi Raya
7	1	1	2.0 5	2	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan serta Pakaian Batik Tobungku	55 Paket	39,985,000	55 Paket	40,000,000	Kecamatan Bumi Raya
7	1	1	2.0 6		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Umum	100 %	296,138,130	100 %	299,000,000	
7	1	1	2.0 6	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	3,125,050	1 Paket	3,200,000	Kecamatan Bumi Raya
7	1	1	2.0 6	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	75,450,950	1 Paket	76,000,000	Kecamatan Bumi Raya
7	1	1	2.0 6	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	10,314,000	1 Paket	10,500,000	Kecamatan Bumi Raya
7	1	1	2.0 6	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	45,091,080	1 Paket	46,000,000	Kecamatan Bumi Raya
7	1	1	2.0 6	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	19,920,200	1 Paket	20,000,000	Kecamatan Bumi Raya
7	1	1	2.0 6	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	12,000,000	1 Laporan	13,000,000	Kecamatan Bumi Raya

7	1	1	2.0 6	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	364 Laporan	130,236,850	364 Laporan	130,300,000	Kecamatan Bumi Raya
7	1	1	2.0 7		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Kebutuhan Barang Milik Daerah	100 %	36,304,250	100 %	37,000,000	
7	1	1	2.0 7	1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit	24,921,000	1 Unit	25,000,000	Kecamatan Bumi Raya
7	1	1	2.0 7	5	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	64 Unit	11,383,250	64 Unit	12,000,000	Kecamatan Bumi Raya
7	1	1	2.0 8		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	31,782,720	100 %	32,050,000	
7	1	1	2.0 8	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	19,842,720	12 Laporan	20,000,000	Kecamatan Bumi Raya
7	1	1	2.0 8	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10 Laporan	9,020,000	10 Laporan	9,050,000	Kecamatan Bumi Raya
7	1	1	2.0 8	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	10 Laporan	2,920,000	10 Laporan	3,000,000	Kecamatan Bumi Raya
7	1	1	2.0 9		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	100 %	38,200,700	100 %	39,300,000	
7	1	1	2.0 9	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	21,000,000	1 Unit	22,000,000	Kecamatan Bumi Raya
7	1	1	2.0 9	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	17,200,700	1 Unit	17,300,000	Kecamatan Bumi Raya

7	1	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Pelayanan Terpadu Kecamatan	100 %	19,492,500	100 %	20,000,000	
7	1	2	2.0 4		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Urusan Pemerintah yang dilimpahkan	100 %	19,492,500	100 %	20,000,000	
7	1	2	2.0 4	3	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	100 Laporan	19,492,500	100 Laporan	20,000,000	Kecamatan Bumi Raya
7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Keg Pemberdayaan Masyarakat pada APBDKelurahan dan APBDesa	100 %	296,531,900	100 %	300,000,000	
7	1	3	2.0 1		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Koordinasi Ke Desa	100 %	296,531,900	100 %	300,000,000	
7	1	3	2.0 1	3	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (PKK, PORKAB, HUT RI/Daerah)	3 Kegiatan	296,531,900	3 Kegiatan	300,000,000	Kecamatan Bumi Raya
7	1	4			PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Pelanggaran K3 di Kecamatan	15 %	9,877,000	15 %	10,000,000	
7	1	4	2.0 1		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Prsentase kasus kriminal yang ditinjaulanjuti	100 %	9,877,000	100 %	10,000,000	
7	1	4	2.0 1	1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	13 Laporan	6,540,000	13 Laporan	6,600,000	Kecamatan Bumi Raya
7	1	4	2.0 1	2	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	13 Laporan	3,337,000	13 Laporan	3,400,000	Kecamatan Bumi Raya

7	1	5			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	JUMLAH PENYELENGGARA URUSAN PEMERINTAHAN	100 %	119,354,200	100 %	120,000,000	
7	1	5	2.0 1		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	100 %	119,354,200	100 %	120,000,000	
7	1	5	2.0 1	4	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah kegiatan Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional (MTQ, Maulid Nabi dan Kegiatan Keagamaan lainnya)	5 Kegiatan	119,354,200	5 Kegiatan	120,000,000	Kecamatan Bumi Raya
7	1	6			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	JUMLAH DESA YANG AKAN DILAKUKAN PEMBINAAN	100 %	83,625,900	100 %	85,250,000	
7	1	6	2.0 1		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Rekomendasi dan Koordinasi Ke Desa	100 %	83,625,900	100 %	85,250,000	
7	1	6	2.0 1	2	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	13 Dokumen	8,280,000	13 Dokumen	8,300,000	Kecamatan Bumi Raya
7	1	6	2.0 1	3	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	13 Dokumen	28,192,000	13 Dokumen	29,000,000	Kecamatan Bumi Raya
7	1	6	2.0 1	6	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	6 Dokumen	12,923,900	6 Dokumen	12,950,000	Kecamatan Bumi Raya
7	1	6	2.0 1	9	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	14 Dokumen	34,230,000	14 Dokumen	35,000,000	Kecamatan Bumi Raya

7					UNSUR KEWILAYAHAN						
7	1				KECAMATAN			3,890,021,179		3,810,408,350	
7	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase urusan penunjang pemerintahan yang dilaksanakan	100 %	3,405,739,329	100 %	3,320,190,100	
7	1	1	2.0 1		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Ketepatan Waktu Perencanaan (%)	95 %	15,855,000	95 %	16,687,500	
7	1	1	2.0 1	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	2,255,000	1 Dokumen	3,085,500	Kecamatan Bungku Barat
7	1	1	2.0 1	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	6,950,000	2 Dokumen	6,951,000	Kecamatan Bungku Barat
						Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKASKPD	0 Dokumen		0 Dokumen		
7	1	1	2.0 1	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	6,650,000	2 Dokumen	6,651,000	Kecamatan Bungku Barat
						Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPASKPD	0 Dokumen		0 Dokumen		
7	1	1	2.0 2		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Layanan Administrasi Keuangan	3 Layanan	2,896,706,179	3 Layanan	2,896,107,400	
7	1	1	2.0 2	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1 Orang/bulan	2,636,701,179	1 Orang/bulan	2,630,077,400	Kecamatan Bungku Barat
7	1	1	2.0 2	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Administrasi Pelaksana Tugas ASN	12 Bulan	253,320,000	12 Bulan	253,330,000	Kecamatan Bungku Barat
						Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	0 Dokumen		0 Dokumen		
7	1	1	2.0 2	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	6 Laporan	6,685,000	6 Laporan	6,700,000	Kecamatan Bungku Barat

					SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	0 Laporan		0 Laporan		
7	1	1	2.0 2	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	0	12 Laporan	6,000,000	Kecamatan Bungku Barat
7	1	1	2.0 3		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Layanan Administrasi BMD pada Perangkat Daerah	1 Layanan	2,132,500	1 Layanan	2,580,000	
7	1	1	2.0 3	5	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	0 Laporan	2,132,500	0 Laporan	2,580,000	Kecamatan Bungku Barat
						Jumlah laporan rekonsiliasi barang milik daerah	5 Laporan		5 Laporan		
7	1	1	2.0 4		Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Jumlah Layanan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	1 Layanan	7,034,000	1 Layanan	7,035,000	
7	1	1	2.0 4	7	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	1 Laporan	7,034,000	1 Laporan	7,035,000	Kecamatan Bungku Barat
7	1	1	2.0 5		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Layanan Administrasi Kepegawaian	1 Layanan	65,500,000	1 Layanan	65,600,000	
7	1	1	2.0 5	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	3 Orang	65,500,000	3 Orang	65,600,000	Kecamatan Bungku Barat
7	1	1	2.0 6		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	6 Layanan	292,688,740	6 Layanan	251,688,200	
7	1	1	2.0 6	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	0 Paket	101,318,100	0 Paket	48,388,200	Kecamatan Bungku Barat

						Jumlah peralatan dan perlengkapan Kantor yang disediakan	13 Unit		13 Unit		
7	1	1	2.0 6	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	0 Paket	15,987,570	0 Paket	20,000,000	Kecamatan Bungku Barat
						Jumlah Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	3 Unit		3 Unit		
7	1	1	2.0 6	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan	30 Jenis	28,752,020	30 Jenis	29,000,000	Kecamatan Bungku Barat
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	0 Paket		0 Paket		
7	1	1	2.0 6	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetak dan penggandaan	22003 lembar	7,701,050	22003 lembar	8,400,000	Kecamatan Bungku Barat
						Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	0 Paket		0 Paket		
7	1	1	2.0 6	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu	1 Tahun	22,800,000	1 Tahun	25,900,000	Kecamatan Bungku Barat
						Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	0 Laporan		0 Laporan		
7	1	1	2.0 6	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	67 Kegiatan	116,130,000	67 Kegiatan	120,000,000	Kecamatan Bungku Barat
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	0 Laporan		0 Laporan		
7	1	1	2.0 7		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah	1 Layanan	100,922,910	1 Layanan	7,000,000	
7	1	1	2.0 7	5	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	0 Unit	100,922,910	0 Unit	7,000,000	Kecamatan Bungku Barat
						Jumlah Pengadaan Mebel	46 Unit		46 Unit		
7	1	1	2.0 8		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Layanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	2 Layanan	24,900,000	2 Layanan	23,492,000	
7	1	1	2.0 8	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	141 Laporan	0	141 Laporan	1,692,000	Kecamatan Bungku Barat

						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	141 Lembar		141 Lembar		
7	1	1	2.0 8	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	0 Laporan	15,300,000	0 Laporan	15,300,000	Kecamatan Bungku Barat
						Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Bulan		12 Bulan		
7	1	1	2.0 8	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	0 Laporan	9,600,000	0 Laporan	6,500,000	Kecamatan Bungku Barat
						Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	4 Jenis		4 Jenis		
7	1	1	2.0 9		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah di Kecamatan	0 Layanan	0	0 Layanan	50,000,000	
7	1	1	2.0 9	1 0	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	0	1 Unit	50,000,000	Kecamatan Bungku Barat
7	1	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Pelayanan Terpadu Kecamatan	100 %	209,797,360	100 %	209,797,360	
7	1	2	2.0 1		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Rekomendasi hasil koordinasi/sinergi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan	1 Rekomendasi	84,159,920	1 Rekomendasi	84,159,920	
7	1	2	2.0 1	1	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	0 Laporan	84,159,920	0 Laporan	84,159,920	Kecamatan Bungku Barat
						Jumlah Pelaksanaan Kegiatan PORKAB	1 Kegiatan		1 Kegiatan		

7	1	2	2.0 4		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat	2 Kegiatan	125,637,440	2 Kegiatan	125,637,440	
7	1	2	2.0 4	3	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	0 Laporan	125,637,440	0 Laporan	125,637,440	Kecamatan Bungku Barat
						Jumlah Urusan Pemerintahan yang terkait dengan kewenangan Lain yang Dilimpahkan (HUT-RI dan hari Ibu)	2 Kegiatan		2 Kegiatan		
7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Keg Pemberdayaan Masyarakat pada APBDKelurahan dan APBDesa	100 %	51,983,600	100 %	53,900,000	
7	1	3	2.0 1		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa yang dilaksanakan	3 Kegiatan	51,983,600	3 Kegiatan	53,900,000	
7	1	3	2.0 1	1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Persentase Partisipasi Masyarakat dalam mengikuti Musrenbang tingkat Desa	95 %	3,150,000	95 %	3,300,000	Kecamatan Bungku Barat
7	1	3	2.0 1	3	Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	2 Kegiatan	48,833,600	2 Kegiatan	50,600,000	Kecamatan Bungku Barat
						Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	0 Laporan		0 Laporan		
7	1	4			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Pelanggaran K3 di Kecamatan	100 %	2,850,000	100 %	5,000,000	
7	1	4	2.0 1		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase penurunan kasus permasalahan trantib	1 Kegiatan	2,850,000	1 Kegiatan	5,000,000	
7	1	4	2.0 1	2	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	0 Laporan	2,850,000	0 Laporan	5,000,000	Kecamatan Bungku Barat

					Jumlah penyelesaian permasalahan trantib yang berpotensi SARA (keg)	1 Kegiatan		1 Kegiatan			
7	1	5			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	JUMLAH PENYELENGGARA URUSAN PEMERINTAHAN	100 %	145,396,540	100 %	145,396,540	
7	1	5	2.0 1		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Penyelenggaraan Forum Komunikasi Pimpinan di Kecamatan	85 %	145,396,540	85 %	145,396,540	
7	1	5	2.0 1	4	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	0 Orang	145,396,540	0 Orang	145,396,540	Kecamatan Bungku Barat
						Jumlah pelaksanaan Kegiatan Pembinaan Kerukunan AntarSuku dan Intrasuku, Umat beragama, Ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	3 Kegiatan		3 Kegiatan		
7	1	6			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	JUMLAH DESA YANG AKAN DILAKUKAN PEMBINAAN	100 %	74,254,350	100 %	76,124,350	
7	1	6	2.0 1		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah desa berstatus IDM desa mandiri	3 Desa	74,254,350	3 Desa	76,124,350	
7	1	6	2.0 1	2	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Desa yang menyelesaikan pengisian Profil Desa	10 Desa	23,000,000	10 Desa	24,000,000	Kecamatan Bungku Barat

						Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	0 Dokumen		0 Dokumen		
7	1	6	2.0 1	6	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Desa yang melakukan pemilihan Kepala Desa	7 Desa	25,800,000	7 Desa	25,810,000	Kecamatan Bungku Barat
						Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	0 Dokumen		0 Dokumen		
7	1	6	2.0 1	9	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan	Jumlah Desa yang mengikuti Musrenbang Kecamatan	10 Desa	14,764,350	10 Desa	14,764,350	Kecamatan Bungku Barat
					Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	0 Dokumen		0 Dokumen		
7	1	6	2.0 1	1 7	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	0 Laporan	10,690,000	0 Laporan	11,550,000	Kecamatan Bungku Barat
						Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Koordinasi pendampingan desa	10 Kegiatan		10 Kegiatan		
7					UNSUR KEWILAYAHAN						
7	1				KECAMATAN			3,520,975,270		3,520,150,812	
7	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	persentase urusan penunjang pemerintah yang dilaksanakan	100 %	3,057,916,465	100 %	3,066,368,507	
7	1	1	2.0 1		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen DPA - SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA - SKPD	2 Dokumen	9,000,000	2 Dokumen	9,500,000	
						Jumlah Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah	2 Dokumen		2 Dokumen		
7	1	1	2.0 1	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKASKPD	4 Dokumen	5,400,000	4 Dokumen	5,500,000	Kecamatan Bungku Pesisir

7	1	1	2.0 1	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPASKPD	2 Dokumen	3,600,000	2 Dokumen	4,000,000	Kecamatan Bungku Pesisir
7	1	1	2.0 2		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Presentase capaian kegiatan administrasi Keuangan	100 %	2,523,075,365	100 %	2,517,027,407	
7	1	1	2.0 2	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	persentase ASN yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	100 %	2,140,215,365	100 %	2,134,167,407	Kecamatan Bungku Pesisir
7	1	1	2.0 2	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	380,760,000	1 Dokumen	380,760,000	Kecamatan Bungku Pesisir
7	1	1	2.0 2	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	10 Laporan	2,100,000	10 Laporan	2,100,000	Kecamatan Bungku Pesisir
7	1	1	2.0 3		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Presentase Administrasi Barang Milik Daerah yang tertib	100 %	4,200,000	100 %	5,200,000	
7	1	1	2.0 3	5	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	5 Laporan	4,200,000	5 Laporan	5,200,000	Kecamatan Bungku Pesisir
7	1	1	2.0 6		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase Capaian Kegiatan Administrasi Umum	100 %	429,569,100	100 %	439,569,100	
7	1	1	2.0 6	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket	2,479,360	2 Paket	3,479,360	Kecamatan Bungku Pesisir
7	1	1	2.0 6	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10 Paket	148,733,580	10 Paket	150,733,580	Kecamatan Bungku Pesisir
7	1	1	2.0 6	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	59,017,540	1 Paket	60,017,540	Kecamatan Bungku Pesisir
7	1	1	2.0 6	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	100 Paket	101,337,620	100 Paket	105,337,620	Kecamatan Bungku Pesisir

7	1	1	2.0 6	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	100 Paket	8,925,000	100 Paket	9,925,000	Kecamatan Bungku Pesisir
						Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	4000 Paket		4000 Paket		
7	1	1	2.0 6	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	30 Laporan	109,076,000	30 Laporan	110,076,000	Kecamatan Bungku Pesisir
7	1	1	2.0 7		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan Ketersediaan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (%)	100 %	55,532,000	100 %	56,532,000	
7	1	1	2.0 7	1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit	55,532,000	1 Unit	56,532,000	Kecamatan Bungku Pesisir
7	1	1	2.0 8		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)	100 %	13,860,000	100 %	14,860,000	
7	1	1	2.0 8	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Bulan	13,860,000	12 Bulan	14,860,000	Kecamatan Bungku Pesisir
7	1	1	2.0 9		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)	100 %	22,680,000	100 %	23,680,000	
7	1	1	2.0 9	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	3 Unit	22,680,000	3 Unit	23,680,000	Kecamatan Bungku Pesisir
7	1	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Pelayanan Terpadu Kecamatan	100 %	40,508,105	100 %	43,508,105	
7	1	2	2.0 4		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Presentasejumlah urusan pemerintahan yang di limpahka kepada Camat	100 %	40,508,105	100 %	43,508,105	

7	1	2	2.0 4	3	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1 Laporan	40,508,105	1 Laporan	43,508,105	Kecamatan Bungku Pesisir
7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Keg Pemberdayaan Masyarakat pada APBDKelurahan dan APBDesa	100 %	222,899,200	100 %	225,899,200	
7	1	3	2.0 1		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Presentase jumlah koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	100 %	222,899,200	100 %	225,899,200	
7	1	3	2.0 1	1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	1 Lembaga	6,100,000	1 Lembaga	7,100,000	Kecamatan Bungku Pesisir
7	1	3	2.0 1	3	Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	216,799,200	1 Laporan	218,799,200	Kecamatan Bungku Pesisir
7	1	4			PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Pelanggaran K3 di Kecamatan	100 %	11,400,000	100 %	13,400,000	
7	1	4	2.0 1		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Terlaksananya Upaya Penyelenggaraan Keteteraman dan Ketertiban	100 %	11,400,000	100 %	13,400,000	
7	1	4	2.0 1	2	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	4 Laporan	11,400,000	4 Laporan	13,400,000	Kecamatan Bungku Pesisir
						Jumlah Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	4 kegiatan		4 kegiatan		
7	1	5			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	JUMLAH PENYELENGGARA URUSAN PEMERINTAHAN	100 %	127,975,000	100 %	130,975,000	

7	1	5	2.0 1		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah presentasi Penyelenggaraan Urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah	100 %	127,975,000	100 %	130,975,000	
7	1	5	2.0 1	4	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	10 Orang	127,975,000	10 Orang	130,975,000	Kecamatan Bungku Pesisir
7	1	6			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA			60,276,500		40,000,000	
7	1	6	2.0 1		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa			60,276,500		40,000,000	
7	1	6	2.0 1	2	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	5 Dokumen	33,440,000	5 Dokumen	10,000,000	Kecamatan Bungku Pesisir
7	1	6	2.0 1	9	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	5 Dokumen	21,066,500	5 Dokumen	20,000,000	Kecamatan Bungku Pesisir
7	1	6	2.0 1	1 7	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	10 Laporan	5,770,000	10 Laporan	10,000,000	Kecamatan Bungku Pesisir
7					UNSUR KEWILAYAHAN						
7	1				KECAMATAN			4,373,950,454		4,368,070,000	
7	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase urusan penunjang pemerintahan yang dilaksanakan	100 %	4,043,567,454	100 %	4,037,275,000	
7	1	1	2.0 1		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Ketepatan Waktu Perencanaan	90 %	24,680,000	90 %	25,600,000	

7	1	1	2.0 1	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	0	2 Dokumen	0	Kecamatan Bungku Selatan
7	1	1	2.0 1	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKASKPD	1 Dokumen	16,160,000	1 Dokumen	17,000,000	Kecamatan Bungku Selatan
7	1	1	2.0 1	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPASKPD	1 Dokumen	8,520,000	1 Dokumen	8,600,000	Kecamatan Bungku Selatan
7	1	1	2.0 2		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Presentase capaian kegiatan administrasi keuangan	90 %	3,373,950,807	90 %	3,366,560,000	
7	1	1	2.0 2	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	19 Orang/bulan	3,075,390,807	19 Orang/bulan	3,068,000,000	Kecamatan Bungku Selatan
7	1	1	2.0 2	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	298,560,000	12 Dokumen	298,560,000	Kecamatan Bungku Selatan
7	1	1	2.0 2	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	0	1 Laporan	0	Kecamatan Bungku Selatan
7	1	1	2.0 3		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang tertib	90 %	8,080,000	90 %	8,100,000	
7	1	1	2.0 3	5	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	8,080,000	1 Laporan	8,100,000	Kecamatan Bungku Selatan
7	1	1	2.0 4		Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Rasio PAD	2 %	6,491,900	2 %	6,500,000	
7	1	1	2.0 4	7	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	4 Dokumen	6,491,900	4 Dokumen	6,500,000	Kecamatan Bungku Selatan
7	1	1	2.0 5		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian yang Tertib	85 %	0	85 %	0	

7	1	1	2.0 5	2	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	0	1 Paket	0	Kecamatan Bungku Selatan
7	1	1	2.0 5	1	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	4 Orang	0	4 Orang	0	Kecamatan Bungku Selatan
7	1	1	2.0 6		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase capaian kegiatan adminstrasi umum	80 %	461,550,747	80 %	461,635,000	
7	1	1	2.0 6	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	50,723,097	1 Paket	50,750,000	Kecamatan Bungku Selatan
7	1	1	2.0 6	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	124,048,650	1 Paket	124,050,000	Kecamatan Bungku Selatan
7	1	1	2.0 6	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	13,073,000	1 Paket	13,075,000	Kecamatan Bungku Selatan
7	1	1	2.0 6	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	118,500,000	1 Laporan	118,550,000	Kecamatan Bungku Selatan
7	1	1	2.0 6	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan	155,206,000	4 Laporan	155,210,000	Kecamatan Bungku Selatan
7	1	1	2.0 7		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan Ketrediaan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	80 %	79,026,000	80 %	79,030,000	
7	1	1	2.0 7	2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	3 Unit	79,026,000	3 Unit	79,030,000	Kecamatan Bungku Selatan
7	1	1	2.0 7	5	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	8 Unit	0	8 Unit	0	Kecamatan Bungku Selatan
7	1	1	2.0 7	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	0	2 Unit	0	Kecamatan Bungku Selatan
7	1	1	2.0 8		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	648	100 %	650	

7	1	1	2.0 8	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	0	1 Laporan	0	Kecamatan Bungku Selatan
7	1	1	2.0 8	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 Laporan	648	4 Laporan	650	Kecamatan Bungku Selatan
7	1	1	2.0 8	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Laporan	0	4 Laporan	0	Kecamatan Bungku Selatan
7	1	1	2.0 9		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	65 %	89,140,000	65 %	89,200,000	
7	1	1	2.0 9	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	3 Unit	89,140,000	3 Unit	89,200,000	Kecamatan Bungku Selatan
7	1	1	2.0 9	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	0	1 Unit	0	Kecamatan Bungku Selatan
7	1	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Pelayanan Terpadu Kecamatan	100 %	11,400,000	100 %	11,500,000	
7	1	2	2.0 1		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	26 Desa	11,400,000	26 Desa	11,500,000	
7	1	2	2.0 1	1	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	26 Laporan	11,400,000	26 Laporan	11,500,000	Kecamatan Bungku Selatan

7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Keg Pemberdayaan Masyarakat pada APBDKelurahan dan APBDesa	100 %	284,393,000	100 %	284,495,000	
7	1	3	2.0 1		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat pada APBD Kelurahan dan APBDes	62 %	284,393,000	62 %	284,495,000	
7	1	3	2.0 1	1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	1 Lembaga	56,300,000	1 Lembaga	56,400,000	Kecamatan Bungku Selatan
7	1	3	2.0 1	3	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	4 Laporan	228,093,000	4 Laporan	228,095,000	Kecamatan Bungku Selatan
7	1	4			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Pelanggaran K3 di Kecamatan	100 %	11,400,000	100 %	11,500,000	
7	1	4	2.0 1		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase kasus kriminal yang ditindaklanjuti	100 %	11,400,000	100 %	11,500,000	
7	1	4	2.0 1	2	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	2 Laporan	11,400,000	2 Laporan	11,500,000	Kecamatan Bungku Selatan
7	1	6			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	JUMLAH DESA YANG AKAN DILAKUKAN PEMBINAAN	100 %	23,190,000	100 %	23,300,000	
7	1	6	2.0 1		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	4 Laporan	23,190,000	4 Laporan	23,300,000	
7	1	6	2.0 1	6	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Desa Yang melakukan pemilihan kepala desa	13 Desa	19,200,000	13 Desa	19,300,000	Kecamatan Bungku Selatan

						Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	0 Dokumen		0 Dokumen		
7	1	6	2.0 1	9	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	4 Dokumen	0	4 Dokumen	0	Kecamatan Bungku Selatan
7	1	6	2.0 1	5	Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	3 Dokumen	0	3 Dokumen	0	Kecamatan Bungku Selatan
7	1	6	2.0 1	7	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	4 Laporan	3,990,000	4 Laporan	4,000,000	Kecamatan Bungku Selatan
7					UNSUR KEWILAYAHAN						
7	1				KECAMATAN			9,412,937,891		2,777,688,045	
7	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase urusan penunjang pemerintahan yang dilaksanakan	100 %	9,143,817,891	100 %	2,508,567,625	
7	1	1	2.0 1		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Indikator Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi	100 %	3,262,500	100 %	3,262,600	
7	1	1	2.0 1	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	762,5	2 Dokumen	762,6	Kecamatan Bungku Tengah
7	1	1	2.0 1	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKASKPD	1 Dokumen	1,250,000	1 Dokumen	1,250,000	Kecamatan Bungku Tengah
7	1	1	2.0 1	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPASKPD	1 Dokumen	1,250,000	1 Dokumen	1,250,000	Kecamatan Bungku Tengah
7	1	1	2.0 2		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Presentase capaian kegiatan administrasi keuangan	90 %	8,416,300,469	90 %	335,865,600	

7	1	1	2.0 2	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1 Orang/bulan	8,080,537,969	1 Orang/bulan	0	Kecamatan Bungku Tengah
7	1	1	2.0 2	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	0 Dokumen	332,400,000	0 Dokumen	332,500,000	Kecamatan Bungku Tengah
						Jumlah Tenaga Kontrak/PHL yang dibayarkan gajinya	15 orang		15 orang		
7	1	1	2.0 2	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5 Dokumen	3,362,500	5 Dokumen	3,365,600	Kecamatan Bungku Tengah
						Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	0 Laporan		0 Laporan		
7	1	1	2.0 6		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Umum PD	100 %	396,962,260	100 %	1,842,146,510	
7	1	1	2.0 6	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	173,740,730	1 Paket	173,740,750	Kecamatan Bungku Tengah
7	1	1	2.0 6	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	9 Paket	7,215,340	9 Paket	7,215,350	Kecamatan Bungku Tengah
7	1	1	2.0 6	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	23 Paket	30,523,840	23 Paket	30,523,850	Kecamatan Bungku Tengah
7	1	1	2.0 6	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	24,906,350	4 Paket	24,906,360	Kecamatan Bungku Tengah
7	1	1	2.0 6	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	492 Kegiatan	28,500,000	492 Kegiatan	285,000,100	Kecamatan Bungku Tengah
7	1	1	2.0 6	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	132,076,000	1 Laporan	1,320,760,100	Kecamatan Bungku Tengah

7	1	1	2.0 8		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	69,642,112	100 %	69,642,315	
7	1	1	2.0 8	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	0 Laporan	4,320,000	0 Laporan	4,320,100	Kecamatan Bungku Tengah
						Jumlah Penyediaan Jasa Surat Menyurat	360 Lembar		360 Lembar		
7	1	1	2.0 8	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	42 Laporan	55,982,112	42 Laporan	55,982,115	Kecamatan Bungku Tengah
7	1	1	2.0 8	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Laporan	9,340,000	4 Laporan	9,340,100	Kecamatan Bungku Tengah
7	1	1	2.0 9		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketersediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	100 %	257,650,550	100 %	257,650,600	
7	1	1	2.0 9	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	257,650,550	1 Unit	257,650,600	Kecamatan Bungku Tengah
7	1	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Pelayanan Terpadu Kecamatan	100 %	72,382,000	100 %	72,382,400	
7	1	2	2.0 1		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah rekomendasi hasil koordinsi / senergi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan	100 %	32,449,200	100 %	32,449,500	
7	1	2	2.0 1	1	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	20 Laporan	32,449,200	20 Laporan	32,449,500	Kecamatan Bungku Tengah

7	1	2	2.0 4		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah dokumen pelayanan terpadu kecamatan yang diterbitkan	100 %	39,932,800	100 %	39,932,900	
7	1	2	2.0 4	3	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	20 Laporan	39,932,800	20 Laporan	39,932,900	Kecamatan Bungku Tengah
7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Keg Pemberdayaan Masyarakat pada APBDKelurahan dan APBDesa	100 %	196,738,000	100 %	196,738,020	
7	1	3	2.0 1		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah kegiatan pemberdayaan desa yang terlaksana optimal	100 %	196,738,000	100 %	196,738,020	
7	1	3	2.0 1	1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	0 Lembaga	14,743,350	0 Lembaga	14,743,360	Kecamatan Bungku Tengah
7	1	3	2.0 1	3	Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	5 Laporan	181,994,650	5 Laporan	181,994,660	Kecamatan Bungku Tengah
7					UNSUR KEWILAYAHAN						
7	1				KECAMATAN			999,999,971		984,699,986	
7	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase urusan penunjang pemerintahan yang dilaksanakan	100 %	383,731,510	100 %	368,431,525	
7	1	1	2.0 2		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Presentase capaian kegiatan adminstrasi keuangan	90 %	4,140,000	90 %	4,140,000	
7	1	1	2.0 2	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	0 Dokumen	4,140,000	0 Dokumen	4,140,000	Kecamatan Bungku Tengah
						Jumlah Tenaga PHL	3 Orang		3 Orang		
7	1	1	2.0 6		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Umum PD	100 %	191,973,010	100 %	191,973,010	

7	1	1	2.0 6	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	124,825,420	1 Paket	124,825,420	Kecamatan Bungku Tengah
7	1	1	2.0 6	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	10,286,040	1 Paket	10,286,040	Kecamatan Bungku Tengah
7	1	1	2.0 6	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	16,231,550	1 Paket	16,231,550	Kecamatan Bungku Tengah
7	1	1	2.0 6	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	2,050,000	12 Laporan	2,050,000	Kecamatan Bungku Tengah
7	1	1	2.0 6	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	38,580,000	12 Laporan	38,580,000	Kecamatan Bungku Tengah
7	1	1	2.0 7		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Ketersediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	100 %	26,038,500	100 %	26,038,500	
7	1	1	2.0 7	2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	21,358,000	1 Unit	21,358,000	Kecamatan Bungku Tengah
7	1	1	2.0 7	1 0	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	4,680,500	1 Unit	4,680,500	Kecamatan Bungku Tengah
7	1	1	2.0 8		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	129,720,000	100 %	114,420,015	
7	1	1	2.0 8	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	2,700,000	12 Laporan	2,700,000	Kecamatan Bungku Tengah
7	1	1	2.0 8	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	15,300,000	12 Laporan	15	Kecamatan Bungku Tengah
7	1	1	2.0 8	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	111,720,000	12 Laporan	111,720,000	Kecamatan Bungku Tengah

7	1	1	2.0 9		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketersediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	100 %	31,860,000	100 %	31,860,000	
7	1	1	2.0 9	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	31,860,000	1 Unit	31,860,000	Kecamatan Bungku Tengah
7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Keg Pemberdayaan Masyarakat pada APBDKelurahan dan APBDesa	100 %	616,268,461	100 %	616,268,461	
7	1	3	2.0 2		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase status kelurahan yang berstatus kelurahan cepat berkembang	0 %	616,268,461	0 %	616,268,461	
7	1	3	2.0 2	1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	0 Lembaga	10,631,500	0 Lembaga	10,631,500	Kecamatan Bungku Tengah
7	1	3	2.0 2	2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	8 Unit	148,970,681	8 Unit	148,970,681	Kecamatan Bungku Tengah
7	1	3	2.0 2	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	12 Pokmas / Ormas	456,666,280	12 Pokmas / Ormas	456,666,280	Kecamatan Bungku Tengah
7					UNSUR KEWILAYAHAN						
7	1				KECAMATAN			1,000,000,000		1,203,350,000	
7	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase urusan penunjang pemerintahan yang dilaksanakan	100 %	320,447,380	100 %	332,188,000	
7	1	1	2.0 2		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Presentase capaian kegiatan adminstrasi keuangan	90 %	134,520,000	90 %	134,600,000	

7	1	1	2.0 2	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	6 Dokumen	134,520,000	6 Dokumen	134,600,000	Kecamatan Bungku Tengah
7	1	1	2.0 6		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Umum PD	100 %	156,384,260	100 %	162,300,000	
7	1	1	2.0 6	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	0 Paket	55,976,000	0 Paket	56,000,000	Kecamatan Bungku Tengah
7	1	1	2.0 6	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	0 Paket	20,100,510	0 Paket	20,200,000	Kecamatan Bungku Tengah
7	1	1	2.0 6	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	0 Paket	19,037,750	0 Paket	19,100,000	Kecamatan Bungku Tengah
7	1	1	2.0 6	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	0 Laporan	6,090,000	0 Laporan	7,000,000	Kecamatan Bungku Tengah
7	1	1	2.0 6	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	0 Laporan	55,180,000	0 Laporan	60,000,000	Kecamatan Bungku Tengah
7	1	1	2.0 8		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	8,673,120	100 %	8,688,000	
7	1	1	2.0 8	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	0 Laporan	8,673,120	0 Laporan	8,688,000	Kecamatan Bungku Tengah
7	1	1	2.0 9		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketersediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	100 %	20,870,000	100 %	26,600,000	
7	1	1	2.0 9	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	0 Unit	1,500,000	0 Unit	1,600,000	Kecamatan Bungku Tengah

7	1	1	2.0 9	1 0	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	19,370,000	2 Unit	25,000,000	Kecamatan Bungku Tengah
7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Keg Pemberdayaan Masyarakat pada APBDKelurahan dan APBDesa	100 %	679,552,620	100 %	871,162,000	
7	1	3	2.0 2		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase status kelurahan yang berstatus kelurahan cepat berkembang	0 %	679,552,620	0 %	871,162,000	
7	1	3	2.0 2	1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	0 Lembaga	3,906,000	0 Lembaga	4,000,000	Kecamatan Bungku Tengah
7	1	3	2.0 2	2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 Unit	165,171,220	2 Unit	250,000,000	Kecamatan Bungku Tengah
7	1	3	2.0 2	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	15 Pokmas / Ormas	510,475,400	15 Pokmas / Ormas	617,162,000	Kecamatan Bungku Tengah
7					UNSUR KEWILAYAHAN						
7	1				KECAMATAN			999,998,636		1,000,138,800	
7	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase urusan penunjang pemerintahan yang dilaksanakan	100 %	300,219,436	100 %	300,359,600	
7	1	1	2.0 2		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Presentase capaian kegiatan adminstrasi keuangan	90 %	144,360,000	90 %	144,500,000	
7	1	1	2.0 2	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	144,360,000	12 Dokumen	144,500,000	Kecamatan Bungku Tengah
7	1	1	2.0 6		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Umum PD	100 %	137,139,436	100 %	137,139,600	

7	1	1	2.0 6	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	4,251,036	12 Paket	4,251,200	Kecamatan Bungku Tengah
7	1	1	2.0 6	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	8,817,050	1 Paket	8,817,050	Kecamatan Bungku Tengah
7	1	1	2.0 6	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	0 Paket	34,999,650	0 Paket	34,999,650	Kecamatan Bungku Tengah

7	1	1	2.0 6	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	0 Paket	14,971,700	0 Paket	14,971,700	Kecamatan Bungku Tengah
7	1	1	2.0 6	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	0 Laporan	6,000,000	0 Laporan	6,000,000	Kecamatan Bungku Tengah
7	1	1	2.0 6	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	0 Laporan	68,100,000	0 Laporan	68,100,000	Kecamatan Bungku Tengah
7	1	1	2.0 8		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	18,720,000	100 %	18,720,000	
7	1	1	2.0 8	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	0 Laporan	3,000,000	0 Laporan	3,000,000	Kecamatan Bungku Tengah
7	1	1	2.0 8	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	0 Laporan	10,800,000	0 Laporan	10,800,000	Kecamatan Bungku Tengah
7	1	1	2.0 8	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	0 Laporan	4,920,000	0 Laporan	4,920,000	Kecamatan Bungku Tengah
7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Keg Pemberdayaan Masyarakat pada APBDKelurahan dan APBDesa	100 %	699,779,200	100 %	699,779,200	
7	1	3	2.0 2		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase status kelurahan yang berstatus kelurahan cepat berkembang	0 %	699,779,200	0 %	699,779,200	

7	1	3	2.0 2	1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	0 Lembaga	2,973,000	0 Lembaga	2,973,000	Kecamatan Bungku Tengah
7	1	3	2.0 2	2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	0 Unit	176,820,000	0 Unit	176,820,000	Kecamatan Bungku Tengah
7	1	3	2.0 2	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	0 Pokmas / Ormas	519,986,200	0 Pokmas / Ormas	519,986,200	Kecamatan Bungku Tengah
7					UNSUR KEWILAYAHAN						
7	1				KECAMATAN			1,000,000,000		1,000,001,100	
7	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase urusan penunjang pemerintahan yang dilaksanakan	100 %	265,519,600	100 %	265,520,500	
7	1	1	2.0 2		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Presentase capaian kegiatan administrasi keuangan	90 %	91,920,000	90 %	91,920,100	
7	1	1	2.0 2	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	4 Dokumen	91,920,000	4 Dokumen	91,920,100	Kecamatan Bungku Tengah
7	1	1	2.0 6		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Umum PD	100 %	138,847,600	100 %	138,848,000	
7	1	1	2.0 6	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	89,464,000	3 Paket	89,464,100	Kecamatan Bungku Tengah
7	1	1	2.0 6	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	25,613,600	3 Paket	25,613,700	Kecamatan Bungku Tengah
7	1	1	2.0 6	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	25 Paket	5,020,000	25 Paket	5,020,100	Kecamatan Bungku Tengah

7	1	1	2.0 6	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	0	1 Laporan	0	Kecamatan Bungku Tengah
7	1	1	2.0 6	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan	18,750,000	4 Laporan	18,750,100	Kecamatan Bungku Tengah
7	1	1	2.0 8		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	25,684,000	100 %	25,684,200	
7	1	1	2.0 8	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	3,000,000	1 Laporan	3,000,100	Kecamatan Bungku Tengah
7	1	1	2.0 8	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	2 Laporan	14,364,000	2 Laporan	14,364,000	Kecamatan Bungku Tengah
7	1	1	2.0 8	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Laporan	8,320,000	2 Laporan	8,320,100	Kecamatan Bungku Tengah
7	1	1	2.0 9		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketersediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	100 %	9,068,000	100 %	9,068,200	
7	1	1	2.0 9	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit	350	1 Unit	350,1	Kecamatan Bungku Tengah
7	1	1	2.0 9	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	8,718,000	2 Unit	8,718,100	Kecamatan Bungku Tengah

7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Keg Pemberdayaan Masyarakat pada APBDKelurahan dan APBDesa	100 %	734,480,400	100 %	734,480,600	
7	1	3	2.0 2		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase status kelurahan yang berstatus kelurahan cepat berkembang	0 %	734,480,400	0 %	734,480,600	
7	1	3	2.0 2	1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	0 Lembaga	850	0 Lembaga	850,1	Kecamatan Bungku Tengah
7	1	3	2.0 2	2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit	0	1 Unit	0	Kecamatan Bungku Tengah
7	1	3	2.0 2	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	25 Pokmas / Ormas	733,630,400	25 Pokmas / Ormas	733,630,500	Kecamatan Bungku Tengah
7					UNSUR KEWILAYAHAN						
7	1				KECAMATAN			999,999,992		999,999,992	
7	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase urusan penunjang pemerintahan yang dilaksanakan	100 %	329,381,234	100 %	329,381,234	
7	1	1	2.0 1		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Indikator Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi	100 %	3,078,000	100 %	3,078,000	
7	1	1	2.0 1	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKASKPD	0 Dokumen	3,078,000	0 Dokumen	3,078,000	Kecamatan Bungku Tengah
7	1	1	2.0 2		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Presentase capaian kegiatan adminstrasi keuangan	90 %	140,040,000	90 %	140,040,000	

7	1	1	2.0 2	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	0 Dokumen	140,040,000	0 Dokumen	140,040,000	Kecamatan Bungku Tengah
7	1	1	2.0 5		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Presentase ketersediaan gaji dan tunjangan PNS, PPK dan Tenaga Kontrak	100 %	15,180,000	100 %	15,180,000	
7	1	1	2.0 5	2	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	0 Paket	15,180,000	0 Paket	15,180,000	Kecamatan Bungku Tengah
7	1	1	2.0 6		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Umum PD	100 %	104,072,170	100 %	104,072,170	
7	1	1	2.0 6	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	0 Paket	1,496,460	0 Paket	1,496,460	Kecamatan Bungku Tengah
7	1	1	2.0 6	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	0 Paket	24,650,000	0 Paket	24,650,000	Kecamatan Bungku Tengah
7	1	1	2.0 6	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	0 Paket	20,183,620	0 Paket	20,183,620	Kecamatan Bungku Tengah
7	1	1	2.0 6	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	0 Paket	7,402,090	0 Paket	7,402,090	Kecamatan Bungku Tengah
7	1	1	2.0 6	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	0 Laporan	2,850,000	0 Laporan	2,850,000	Kecamatan Bungku Tengah
7	1	1	2.0 6	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	0 Laporan	47,490,000	0 Laporan	47,490,000	Kecamatan Bungku Tengah
7	1	1	2.0 8		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	34,197,064	100 %	34,197,064	
7	1	1	2.0 8	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5 Laporan	3,000,000	5 Laporan	3,000,000	Kecamatan Bungku Tengah
7	1	1	2.0 8	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	0 Laporan	13,073,064	0 Laporan	13,073,064	Kecamatan Bungku Tengah

7	1	1	2.0 8	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	0 Laporan	11,740,000	0 Laporan	11,740,000	Kecamatan Bungku Tengah
7	1	1	2.0 8	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	0 Laporan	6,384,000	0 Laporan	6,384,000	Kecamatan Bungku Tengah
7	1	1	2.0 9		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketersediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	100 %	32,814,000	100 %	32,814,000	
7	1	1	2.0 9	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	0 Unit	600	0 Unit	600	Kecamatan Bungku Tengah
7	1	1	2.0 9	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0 Unit	32,214,000	0 Unit	32,214,000	Kecamatan Bungku Tengah
7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Keg Pemberdayaan Masyarakat pada APBDKelurahan dan APBDesa	100 %	670,618,758	100 %	670,618,758	
7	1	3	2.0 2		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase status kelurahan yang berstatus kelurahan cepat berkembang	0 %	670,618,758	0 %	670,618,758	
7	1	3	2.0 2	1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	0 Lembaga	4,394,750	0 Lembaga	4,394,750	Kecamatan Bungku Tengah
						Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	0 Unit		0 Unit		
7	1	3	2.0 2	2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	0 Unit	161,612,408	0 Unit	161,612,408	Kecamatan Bungku Tengah

7	1	3	2.0 2	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	0 Pokmas / Ormas	504,611,600	0 Pokmas / Ormas	504,611,600	Kecamatan Bungku Tengah
7					UNSUR KEWILAYAHAN						
7	1				KECAMATAN			999,999,758		1,008,771,588	
7	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase urusan penunjang pemerintahan yang dilaksanakan	100 %	308,108,420	100 %	314,500,000	
7	1	1	2.0 2		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase capaian kegiatan administrasi keuangan	90 %	113,280,000	90 %	113,500,000	
7	1	1	2.0 2	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	0 Dokumen	113,280,000	0 Dokumen	113,500,000	Kecamatan Bungku Tengah
7	1	1	2.0 6		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Umum PD	100 %	171,070,420	100 %	174,000,000	
7	1	1	2.0 6	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	83,772,000	2 Paket	84,000,000	Kecamatan Bungku Tengah
7	1	1	2.0 6	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	33,276,320	1 Paket	34,000,000	Kecamatan Bungku Tengah
7	1	1	2.0 6	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	13,447,100	1 Paket	14,000,000	Kecamatan Bungku Tengah
7	1	1	2.0 6	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	3 Laporan	8,460,000	3 Laporan	9,000,000	Kecamatan Bungku Tengah
7	1	1	2.0 6	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	5 Laporan	32,115,000	5 Laporan	33,000,000	Kecamatan Bungku Tengah
7	1	1	2.0 8		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	22,108,000	100 %	25,000,000	
7	1	1	2.0 8	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	4,500,000	1 Laporan	6,000,000	Kecamatan Bungku Tengah

7	1	1	2.0 8	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	9,288,000	1 Laporan	10,000,000	Kecamatan Bungku Tengah
7	1	1	2.0 8	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Laporan	8,320,000	3 Laporan	9,000,000	Kecamatan Bungku Tengah
7	1	1	2.0 9		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketersediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	100 %	1,650,000	100 %	2,000,000	
7	1	1	2.0 9	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan pajaknya	1 Unit	1,650,000	1 Unit	2,000,000	Kecamatan Bungku Tengah
7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Keg Pemberdayaan Masyarakat pada APBDKelurahan dan APBDesa	100 %	691,891,338	100 %	694,271,588	
7	1	3	2.0 2		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase status kelurahan yang berstatus kelurahan cepat berkembang	0 %	691,891,338	0 %	694,271,588	
7	1	3	2.0 2	1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	0 Lembaga	3,619,750	0 Lembaga	4,000,000	Kecamatan Bungku Tengah
7	1	3	2.0 2	2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 Unit	201,937,678	2 Unit	202,937,678	Kecamatan Bungku Tengah
7	1	3	2.0 2	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	6 Pokmas / Ormas	486,333,910	6 Pokmas / Ormas	487,333,910	Kecamatan Bungku Tengah

7					UNSUR KEWILAYAHAN						
7	1				KECAMATAN			3,059,132,423		3,055,892,130	
7	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase urusan penunjang pemerintahan yang dilaksanakan	100 %	2,568,125,883	100 %	2,564,854,580	
7	1	1	2.0 1		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen DPA - SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA - SKPD	2 Dokumen	8,187,800	2 Dokumen	8,196,300	
7	1	1	2.0 1	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKASKPD	1 Dokumen	1,313,100	1 Dokumen	1,313,200	Kecamatan Bungku Timur
7	1	1	2.0 1	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKASKPD	1 Dokumen	1,750,800	1 Dokumen	1,759,000	Kecamatan Bungku Timur
7	1	1	2.0 1	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPASKPD	2 Dokumen	1,440,000	2 Dokumen	1,440,000	Kecamatan Bungku Timur
7	1	1	2.0 1	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Dokumen	1,613,100	1 Dokumen	1,613,200	Kecamatan Bungku Timur
7	1	1	2.0 1	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi perangkat daerah	2 Dokumen	2,070,800	2 Dokumen	2,070,900	Kecamatan Bungku Timur
						Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	0 Laporan		0 Laporan		
7	1	1	2.0 2		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Keuangan Akhir Tahun	1 Laporan	2,061,385,075	1 Laporan	2,057,001,100	
7	1	1	2.0 2	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	0 Orang/bulan	1,688,572,675	0 Orang/bulan	1,683,794,800	Kecamatan Bungku Timur

						Persentase ASN yang Menerima Gaji dan Tunjangan	100 %		100 %		
7	1	1	2.0 2	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	0 Dokumen	363,480,000	0 Dokumen	363,490,000	Kecamatan Bungku Timur
						Persentase Gaji Non ASN	100 %		100 %		
7	1	1	2.0 2	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	3,106,200	1 Laporan	3,106,300	Kecamatan Bungku Timur
7	1	1	2.0 2	6	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen	2,626,200	1 Dokumen	3,000,000	Kecamatan Bungku Timur
7	1	1	2.0 2	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	3,600,000	12 Laporan	3,610,000	Kecamatan Bungku Timur
7	1	1	2.0 3		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan BMD pada SKPD	4 Laporan	1,035,400	4 Laporan	1,035,500	
						Jumlah pegawai kantor camat	31 Paket		31 Paket		
						Persentase Barang Milik Daerah yang Tertib	100 %		100 %		
7	1	1	2.0 3	5	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan	1,035,400	4 Laporan	1,035,500	Kecamatan Bungku Timur
7	1	1	2.0 5		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas berserta Atribut Kelengkapan	31 Pasang	81,000,000	31 Pasang	81,200,000	
						Presentase Administrasi Kepegawaian yang tertib	100 %		100 %		

7	1	1	2.0 5	2	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	31 Orang	15,500,000	31 Orang	15,600,000	Kecamatan Bungku Timur
7	1	1	2.0 5	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	3 Orang	65,500,000	3 Orang	65,600,000	Kecamatan Bungku Timur
7	1	1	2.0 6		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	2 Unit	284,898,070	2 Unit	284,900,080	
7	1	1	2.0 6	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 unit	95,788,000	3 unit	95,789,000	Kecamatan Bungku Timur
7	1	1	2.0 6	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	7 Paket	62,758,070	7 Paket	62,758,080	Kecamatan Bungku Timur
7	1	1	2.0 6	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100 Persen	126,352,000	100 Persen	126,353,000	Kecamatan Bungku Timur
7	1	1	2.0 7		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Kendaraan Dinas yang di pelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5 Unit	50,472,000	5 Unit	50,473,000	
						Jumlah Kendaran dinas yang tersedia	2 Unit		2 Unit		
7	1	1	2.0 7	2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	2 Unit	50,472,000	2 Unit	50,473,000	Kecamatan Bungku Timur
7	1	1	2.0 8		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Jasa Komunikasi , Sumber Daya Air dan Listrik	100 %	14,897,538	100 %	15,797,600	
7	1	1	2.0 8	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	0 Laporan	3,600,000	0 Laporan	4,500,000	Kecamatan Bungku Timur
						Jumlah penyediaan jasa surat menyurat	1 tahun		1 tahun		
7	1	1	2.0 8	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	13 Laporan	11,297,538	13 Laporan	11,297,600	Kecamatan Bungku Timur

7	1	1	2.0 9		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Gedung Kantor	1 Gedung	66,250,000	1 Gedung	66,251,000	
7	1	1	2.0 9	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5 Unit	24,000,000	5 Unit	24,000,000	Kecamatan Bungku Timur
7	1	1	2.0 9	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Gedung	42,250,000	1 Gedung	42,251,000	Kecamatan Bungku Timur
7	1	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Pelayanan Terpadu Kecamatan	100 %	372,829,000	100 %	372,830,000	
7	1	2	2.0 1		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	5 Kegiatan	372,829,000	5 Kegiatan	372,830,000	
7	1	2	2.0 1	2	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	5 Kegiatan	372,829,000	5 Kegiatan	372,830,000	Kecamatan Bungku Timur
7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Keg Pemberdayaan Masyarakat pada APBDKelurahan dan APBDesa	100 %	19,900,000	100 %	19,910,000	
7	1	3	2.0 1		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Desa Yang Mengikuti Musrenbang tingkat Kecamatan	10 Desa	19,900,000	10 Desa	19,910,000	
7	1	3	2.0 1	1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	10 Lembaga	19,900,000	10 Lembaga	19,910,000	Kecamatan Bungku Timur
7	1	5			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	JUMLAH PENYELENGGARA URUSAN PEMERINTAHAN	100 %	80,977,540	100 %	80,987,550	

7	1	5	2.0 1		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Cakupan kerjasama yang dilaksanakan forkopimcam	10 Kegiatan	80,977,540	10 Kegiatan	80,987,550	
7	1	5	2.0 1	4	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	1 Kegiatan	74,777,540	1 Kegiatan	74,777,550	Kecamatan Bungku Timur
7	1	5	2.0 1	8	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	10 Dokumen	6,200,000	10 Dokumen	6,210,000	Kecamatan Bungku Timur
						Terlaksananya forum koordinasi pimpinan di Kecamatan	10 Kegiatan		10 Kegiatan		
7	1	6			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	JUMLAH DESA YANG AKAN DILAKUKAN PEMBINAAN	100 %	17,300,000	100 %	17,310,000	
7	1	6	2.0 1		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	3 Kegiatan	17,300,000	3 Kegiatan	17,310,000	
7	1	6	2.0 1	2	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	3 Dokumen	17,300,000	3 Dokumen	17,310,000	Kecamatan Bungku Timur
7					UNSUR KEWILAYAHAN						
7	1				KECAMATAN			6,925,802,501		1,651,000,000	
7	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase urusan penunjang pemerintahan yang dilaksanakan	100 %	6,310,313,001	100 %	1,037,000,000	
7	1	1	2.0 1		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Ketepatan Waktu Perencanaan (Tepat/Tidak Tepat)	90 %	29,893,000	90 %	33,500,000	

7	1	1	2.0 1	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	4,693,000	2 Dokumen	5,000,000	Kecamatan Menui Kepulauan
7	1	1	2.0 1	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKASKPD	1 Dokumen	12,600,000	1 Dokumen	12,000,000	Kecamatan Menui Kepulauan
7	1	1	2.0 1	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKASKPD	1 Dokumen	4,200,000	1 Dokumen	5,500,000	Kecamatan Menui Kepulauan
7	1	1	2.0 1	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	4,200,000	4 Laporan	5,500,000	Kecamatan Menui Kepulauan
7	1	1	2.0 1	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	4,200,000	4 Laporan	5,500,000	Kecamatan Menui Kepulauan
7	1	1	2.0 2		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Presentase capaian kegiatan administrasi keuangan (%)	90 %	5,638,402,851	90 %	12,000,000	
7	1	1	2.0 2	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	77 Orang/bulan	5,296,162,851	77 Orang/bulan	0	Kecamatan Menui Kepulauan
7	1	1	2.0 2	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	329,640,000	12 Dokumen	0	Kecamatan Menui Kepulauan
7	1	1	2.0 2	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4 Laporan	12,600,000	4 Laporan	12,000,000	Kecamatan Menui Kepulauan
7	1	1	2.0 3		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang tertib (%)	90 %	4,200,000	90 %	5,500,000	

7	1	1	2.0 3	1	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	4,200,000	1 Dokumen	5,500,000	Kecamatan Menui Kepulauan
7	1	1	2.0 4		Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Rasio PAD (%)	2 %	19,995,000	2 %	20,500,000	
7	1	1	2.0 4	7	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	4 Dokumen	19,995,000	4 Dokumen	20,500,000	Kecamatan Menui Kepulauan
7	1	1	2.0 6		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase capaian kegiatan adminstrasi umum (%)	80 %	362,722,160	80 %	371,500,000	
7	1	1	2.0 6	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	10 Paket	3,573,400	10 Paket	4,000,000	Kecamatan Menui Kepulauan
7	1	1	2.0 6	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	22,262,660	1 Paket	23,000,000	Kecamatan Menui Kepulauan
7	1	1	2.0 6	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	20 Paket	80,951,400	20 Paket	82,000,000	Kecamatan Menui Kepulauan
7	1	1	2.0 6	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	13,981,500	3 Paket	14,500,000	Kecamatan Menui Kepulauan
7	1	1	2.0 6	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	112,000,000	12 Laporan	113,000,000	Kecamatan Menui Kepulauan
7	1	1	2.0 6	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50 Laporan	129,953,200	50 Laporan	135,000,000	Kecamatan Menui Kepulauan
7	1	1	2.0 7		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan Ketersediaan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (%)	75 %	51,903,260	75 %	16,500,000	
7	1	1	2.0 7	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	51,903,260	1 Unit	16,500,000	Kecamatan Menui Kepulauan
7	1	1	2.0 8		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)	100 %	8,489,000	100 %	9,500,000	

7	1	1	2.0 8	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	3,495,000	12 Laporan	4,000,000	Kecamatan Menui Kepulauan
7	1	1	2.0 8	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	4,994,000	12 Laporan	5,500,000	Kecamatan Menui Kepulauan
7	1	1	2.0 9		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)	55 %	194,707,730	55 %	568,000,000	
7	1	1	2.0 9	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	4 Unit	44,260,000	4 Unit	65,000,000	Kecamatan Menui Kepulauan
7	1	1	2.0 9	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 Unit	2,920,000	5 Unit	3,000,000	Kecamatan Menui Kepulauan
7	1	1	2.0 9	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	147,527,730	1 Unit	500,000,000	Kecamatan Menui Kepulauan
7	1	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Pelayanan Terpadu Kecamatan	100 %	13,500,000	100 %	14,000,000	
7	1	2	2.0 1		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Cakupan Kegiatan Pemerintahan di Kecamatan (%)	100 %	13,500,000	100 %	14,000,000	
7	1	2	2.0 1	1	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	4 Laporan	13,500,000	4 Laporan	14,000,000	Kecamatan Menui Kepulauan
7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Keg Pemberdayaan Masyarakat pada APBDKelurahan dan APBDesa	100 %	113,049,500	100 %	180,000,000	

7	1	3	2.0 1		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat pada APBD Kelurahan dan APBDesa	62 %	113,049,500	62 %	180,000,000	
7	1	3	2.0 1	1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	1 Lembaga	30,079,500	1 Lembaga	35,000,000	Kecamatan Menui Kepulauan
7	1	3	2.0 1	3	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	24 Laporan	82,970,000	24 Laporan	145,000,000	Kecamatan Menui Kepulauan
7	1	4			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Pelanggaran K3 di Kecamatan	100 %	50,002,000	100 %	0	
7	1	4	2.0 1		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase kasus kriminal yang ditindaklanjuti (%)	100 %	50,002,000	100 %	0	
7	1	4	2.0 1	2	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	4 Laporan	50,002,000	4 Laporan	0	Kecamatan Menui Kepulauan
7	1	5			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	JUMLAH PENYELENGGARA URUSAN PEMERINTAHAN	100 %	330,668,000	100 %	305,000,000	
7	1	5	2.0 1		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Cakupan kerjasama yang dilaksanakan forkompimcam (%)	100 %	330,668,000	100 %	305,000,000	
7	1	5	2.0 1	4	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	30 Orang	87,100,000	30 Orang	95,000,000	Kecamatan Menui Kepulauan

7	1	5	2.0 1	7	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	25 Dokumen	243,568,000	25 Dokumen	210,000,000	Kecamatan Menui Kepulauan
7	1	6			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	JUMLAH DESA YANG AKAN DILAKUKAN PEMBINAAN	100 %	108,270,000	100 %	115,000,000	
7	1	6	2.0 1		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Desa yang mendapati fasilitasi, rekomendasi dan Pengawasan Pemerintah desa (%)	35 %	108,270,000	35 %	115,000,000	
7	1	6	2.0 1	5	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	23 Dokumen	31,200,000	23 Dokumen	30,000,000	Kecamatan Menui Kepulauan
7	1	6	2.0 1	9	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	23 Dokumen	32,630,000	23 Dokumen	40,000,000	Kecamatan Menui Kepulauan
7	1	6	2.0 1	1 5	Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	5 Dokumen	19,500,000	5 Dokumen	20,000,000	Kecamatan Menui Kepulauan
7	1	6	2.0 1	1 7	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	23 Laporan	24,940,000	23 Laporan	25,000,000	Kecamatan Menui Kepulauan
7					UNSUR KEWILAYAHAN						
7	1				KECAMATAN			999,999,796		1,019,050,000	
7	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase urusan penunjang pemerintahan yang dilaksanakan	100 %	300,380,660	100 %	313,050,000	
7	1	1	2.0 1		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Ketepatan Waktu Perencanaan (Tepat/Tidak Tepat)	90 %	16,800,000	90 %	24,000,000	
						Persentase Capaian Kinerja OPD (%)	90 %		90 %		

7	1	1	2.0 1	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKASKPD	3 Dokumen	4,200,000	3 Dokumen	6,000,000	Kecamatan Menui Kepulauan
7	1	1	2.0 1	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKASKPD	3 Dokumen	4,200,000	3 Dokumen	6,000,000	Kecamatan Menui Kepulauan
7	1	1	2.0 1	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPASKPD	3 Dokumen	4,200,000	3 Dokumen	6,000,000	Kecamatan Menui Kepulauan
7	1	1	2.0 1	5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPASKPD	3 Dokumen	4,200,000	3 Dokumen	6,000,000	Kecamatan Menui Kepulauan
7	1	1	2.0 2		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Presentase capaian kegiatan adminstrasi keuangan (%)	90 %	162,840,000	90 %	165,000,000	
7	1	1	2.0 2	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	7 Dokumen	162,840,000	7 Dokumen	165,000,000	Kecamatan Menui Kepulauan
7	1	1	2.0 6		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase capaian kegiatan adminstrasi umum (%)	80 %	101,639,410	80 %	101,700,000	
7	1	1	2.0 6	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	20,688,510	3 Paket	4,000,000	Kecamatan Menui Kepulauan
7	1	1	2.0 6	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	14,431,200	3 Paket	40,000,000	Kecamatan Menui Kepulauan
7	1	1	2.0 6	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	4,269,700	1 Paket	4,500,000	Kecamatan Menui Kepulauan
7	1	1	2.0 6	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	24 Laporan	62,250,000	24 Laporan	53,200,000	Kecamatan Menui Kepulauan

7	1	1	2.0 7		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan Ketrediaan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (%)	75 %	17,201,250	75 %	20,000,000	
7	1	1	2.0 7	5	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	6 Unit	17,201,250	6 Unit	20,000,000	Kecamatan Menui Kepulauan
7	1	1	2.0 9		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)	55 %	1,900,000	55 %	2,350,000	
7	1	1	2.0 9	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	300	1 Unit	350	Kecamatan Menui Kepulauan
7	1	1	2.0 9	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	3 Unit	1,600,000	3 Unit	2,000,000	Kecamatan Menui Kepulauan
7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Keg Pemberdayaan Masyarakat pada APBDKelurahan dan APBDesa	100 %	699,619,136	100 %	706,000,000	
7	1	3	2.0 2		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Masyarakat Kelurahan yang mendapat Kegiatan Pemberdayaan (%)	65 %	699,619,136	65 %	706,000,000	
7	1	3	2.0 2	1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan			17,245,000		6,000,000	Kecamatan Menui Kepulauan
7	1	3	2.0 2	2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit	219,032,807	1 Unit	50,000,000	Kecamatan Menui Kepulauan
7	1	3	2.0 2	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	12 Pokmas / Ormas	463,341,329	12 Pokmas / Ormas	650,000,000	Kecamatan Menui Kepulauan
7					UNSUR KEWILAYAHAN						
7	1				KECAMATAN			3,537,141,243		2,711,682,621	

7	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase urusan penunjang pemerintahan yang dilaksanakan	100 %	2,924,854,243	100 %	2,094,682,621	
7	1	1	2.0 1		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	10,504,800	100 %	11,000,000	
7	1	1	2.0 1	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	10,504,800	1 Dokumen	11,000,000	Kecamatan Wita Ponda
7	1	1	2.0 2		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Presentase Capaian Kegiatan Administrasi Keuangan	100 %	2,539,901,240	100 %	1,761,574,021	
7	1	1	2.0 2	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12 Bulan	2,197,661,240	12 Bulan	1,422,094,021	Kecamatan Wita Ponda
7	1	1	2.0 2	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Tenaga Administrasi Pelaksana Tugas ASN	12 Bulan	342,240,000	12 Bulan	339,480,000	Kecamatan Wita Ponda
7	1	1	2.0 4		Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Pendapatan	1 Laporan	24,319,500	1 Laporan	31,809,600	
7	1	1	2.0 4	5	Pengolahan Data Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah	1 Laporan	24,319,500	1 Laporan	31,809,600	Kecamatan Wita Ponda
7	1	1	2.0 6		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Umum	1 Laporan	308,938,703	1 Laporan	244,989,000	
7	1	1	2.0 6	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	60,990,000	1 Paket	42,630,500	Kecamatan Wita Ponda
7	1	1	2.0 6	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	47,617,613	1 Paket	15,180,000	Kecamatan Wita Ponda
7	1	1	2.0 6	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	70,786,940	1 Paket	69,532,250	Kecamatan Wita Ponda
7	1	1	2.0 6	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Surat-Surat Kantor yang digandakan	22400 Lembar	6,996,150	22400 Lembar	7,840,000	Kecamatan Wita Ponda

7	1	1	2.0 6	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	122,548,000	1 Laporan	109,806,250	Kecamatan Wita Ponda
7	1	1	2.0 8		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Tahun	22,530,000	1 Tahun	20,280,000	
7	1	1	2.0 8	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1,500,000	1 Laporan	1,200,000	Kecamatan Wita Ponda
7	1	1	2.0 8	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	21,030,000	1 Laporan	19,080,000	Kecamatan Wita Ponda
7	1	1	2.0 9		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Gedung/Kendaraan Dinas Operasional	1 Unit	18,660,000	1 Unit	25,030,000	
7	1	1	2.0 9	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	15,000,000	1 Unit	15,000,000	Kecamatan Wita Ponda
7	1	1	2.0 9	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1 Unit	3,660,000	1 Unit	10,030,000	Kecamatan Wita Ponda
7	1	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Pelayanan Terpadu Kecamatan	100 %	181,798,800	100 %	182,000,000	
7	1	2	2.0 4		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Urusan Pemerintah yang dilimpahkan	100 %	181,798,800	100 %	182,000,000	
7	1	2	2.0 4	3	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1 Laporan	181,798,800	1 Laporan	182,000,000	Kecamatan Wita Ponda
7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Keg Pemberdayaan Masyarakat pada APBDKelurahan dan APBDesa	100 %	377,502,200	100 %	380,000,000	

7	1	3	2.0 1		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Koordinasi ke Desa	100 %	377,502,200	100 %	380,000,000	
7	1	3	2.0 1	3	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	377,502,200	1 Laporan	380,000,000	Kecamatan Wita Ponda
7	1	6			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	JUMLAH DESA YANG AKAN DILAKUKAN PEMBINAAN	100 %	52,986,000	100 %	55,000,000	
7	1	6	2.0 1		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Rekomendasi dan Koordinasi ke Desa	100 %	52,986,000	100 %	55,000,000	
7	1	6	2.0 1	9	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	1 Dokumen	28,986,000	1 Dokumen	30,000,000	Kecamatan Wita Ponda
7	1	6	2.0 1	1 7	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	1 Laporan	24,000,000	1 Laporan	25,000,000	Kecamatan Wita Ponda
8					UNSUR PEMERINTAHAN UMUM						
8	1				KESATUAN BANGSA DAN POLITIK			8,753,191,605		7,114,540,321	
8	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1 Tahun	3,643,894,825	1 Tahun	3,603,697,405	
8	1	1	2.0 2		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Prersentase Administrasi Keuangan Perangkat daerah	100 %	3,153,346,915	100 %	3,144,539,921	
8	1	1	2.0 2	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	25 Orang/bulan	2,898,826,915	25 Orang/bulan	2,890,019,921	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah
8	1	1	2.0 2	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	254,520,000	12 Dokumen	254,520,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah
8	1	1	2.0 5		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya Diklat Kepemimpinan (PIM IV)	2 Orang	43,000,000	2 Orang	45,000,000	

8	1	1	2.0 5	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	2 Orang	43,000,000	2 Orang	45,000,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah
8	1	1	2.0 6		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	310,100,190	100 %	293,998,450	
8	1	1	2.0 6	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	74,715,250	1 Paket	90,000,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah
8	1	1	2.0 6	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase Ketersediaan Bahan Logistik Kantor yang dibutuhkan	100 %	29,299,690	100 %	0	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah
8	1	1	2.0 6	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	25,102,250	1 Paket	24,833,700	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah
8	1	1	2.0 6	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	0 Laporan	180,983,000	0 Laporan	179,164,750	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah
8	1	1	2.0 8		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	46,012,120	100 %	46,398,832	
8	1	1	2.0 8	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1,500,000	1 Laporan	1,500,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah
8	1	1	2.0 8	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	43,612,120	12 Laporan	43,998,832	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah
8	1	1	2.0 8	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	900	1 Laporan	900	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah
						Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1 Tahun		1 Tahun		
8	1	1	2.0 9		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan pemerintahan Daerah	100 %	91,435,600	100 %	73,760,202	

8	1	1	2.0 9	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5 Unit	21,400,000	5 Unit	3,500,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah
8	1	1	2.0 9	1 0	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	12 Unit	70,035,600	12 Unit	70,260,202	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah
8	1	2			PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Presentase ASN yang Mendapatkan Pendidikan Bela Negara	100 %	259,734,500	100 %	260,000,000	
8	1	2	2.0 1		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Presentase ASN yang Mendapatkan Pendidikan Bela Negara	100 %	259,734,500	100 %	260,000,000	
8	1	2	2.0 1	1	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun	1 Dokumen	49,872,000	1 Dokumen	50,000,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah
8	1	2	2.0 1	2	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun	0 Dokumen	149,902,500	0 Dokumen	150,000,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah
8	1	2	2.0 1	4	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	12 Orang	59,960,000	12 Orang	60,000,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah

8	1	3			PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Presentase partai politik yang mendapatkan pendidikan politik serta etika budaya politik	100 %	3,047,979,230	100 %	1,448,135,266	
8	1	3	2.0 1		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Persentase Parpol yang Mendapatkan Pendidikan Politik	5 %	3,047,979,230	5 %	1,448,135,266	
8	1	3	2.0 1	1	Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	10 Dokumen	2,248,140,270	10 Dokumen	648,095,271	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah

8	1	3	2.0 1	5	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	10 Laporan	799,838,960	10 Laporan	800,039,995	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah
8	1	4			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Presentase Pengurus Ormas yang Aktif	78 %	349,570,300	78 %	349,679,650	
8	1	4	2.0 1		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Presentase ASN yang Mendapatkan Pendidikan Bela Negara	100 %	349,570,300	100 %	349,679,650	
8	1	4	2.0 1	1	Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun	2 Dokumen	296,939,500	2 Dokumen	297,095,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah
8	1	4	2.0 1	5	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	46 Laporan	52,630,800	46 Laporan	52,584,650	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah

8	1	5			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	persentase perkembangan kasus ketahanan ekonomi. sosial dan pelestarian budaya di 9 kecamatan	0,33 %	752,056,650	0,33 %	753,028,000	
8	1	5	2.0 1		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	persentase perkembangan kasus ketahanan ekonomi. sosial dan pelestarian budaya di 9 kecamatan	100 %	752,056,650	100 %	753,028,000	
8	1	5	2.0 1	1	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun	4 Dokumen	99,921,950	4 Dokumen	100,000,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah
8	1	5	2.0 1	3	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	65 Orang	240,099,700	65 Orang	250,000,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah
8	1	5	2.0 1	4	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	0 Orang	412,035,000	0 Orang	403,028,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah

8	1	6			PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Persentase Daerah Rawan Konflik	88 %	699,956,100	88 %	700,000,000	
8	1	6	2.0 1		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	.... Presentase Jumlah Hasil Rakor Forkopimda	0 0 100 %	699,956,100	0 0 100 %	700,000,000	
8	1	6	2.0 1	4	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	0 Orang	150,080,000	0 Orang	150,000,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah
8	1	6	2.0 1	5	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	0 Laporan	349,802,100	0 Laporan	350,000,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah
8	1	6	2.0 1	6	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	0 Dokumen	200,074,000	0 Dokumen	200,000,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah
TOTAL								1,127,166,049,368		1,153,527,297,257	



## BAB VI

### KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi misi kepala daerah dari sisi penyelenggaraan pemerintahan daerah. Penetapan kinerja daerah dilaksanakan berdasarkan pada asas spesifik, obyektif, berkesinambungan, terukur, dapat diperbandingkan dan dapat dipertanggungjawabkan. Indikator kinerja dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah secara umum dibagi dalam tiga aspek, yaitu:

1. Aspek Kesejahteraan Masyarakat;
2. Aspek Daya saing Daerah;
3. Aspek Pelayanan Umum;

Indikator Kinerja Daerah ini dituangkan dalam bentuk matriks yang akan dipergunakan sebagai acuan dan dasar dalam perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi kinerja pembangunan daerah. Selengkapnya, matriks indikator tersebut disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 6.1  
Matriks Indikator dan Target Kinerja Utama Daerah  
Kabupaten Morowali Tahun 2023

No.	Indikator	Satuan	Target Tahun 2023
1	Indeks Reformasi Birokrasi Kab. Morowali	Kategori	B
2	Nilai akuntabilitas kinerja Pemerintah (SAKIP)	Nilai	BB
3	Indeks kepuasan masyarakat	Kategori	B
4	Opini hasil pemeriksaan oleh BPK	Opini	WTP
5	Indeks Desa Membangun (IDM) Kab. Morowali	Indeks	0,7647
6	Persentase Status Desa Maju	Persen	12=13
7	Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif	Indeks	5-6
8	Pertumbuhan Ekonomi	Persen	10-15
9	Pertumbuhan Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)	Persen	4-6
10	PDRB Perkapita	Konstan Rp. (juta)	300-400
11	Gini Rasio	Indeks	0,30-0,24
12	Tingkat Pengganguran Terbuka (TPT)	Persen	2-3
13	Nilai Tukar Petani (NTP)	Persen	100-102
14	Nilai Tukar Nelayan (NTN)	Persen	106
15	Skor Pola Pangan Harapan (SPPH)	Poin	86.00-88.00
16	Presentase Penduduk Miskin	Persen	12,40-9,8
17	Persentase PMKS yang terpenuhi Kebutuhan	Persen	75-80

	Dasarnya		
18	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Indeks	75,00-76
19	Indeks Pendidikan	Indeks	50.00-55.00
20	Harapan lama sekolah	Tahun	14.30-14.50
21	Rata-rata lama Sekolah	Tahun	10-10,30
22	Indeks Kesehatan	Indeks	69,50-70
23	Usia Harapan Hidup	Tahun	69,50-70
24	Angka Stunting	Persen	6,60-6,10
25	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan	Persen	100
26	Peningkatan prestasi olahraga	Jumlah Medali	37
27	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Indeks	85-90
28	Persentase Budaya Lokal yang dilestarikan	Persen	75-80
29	Persentase Kesenian Lokal yang dilestarikan	Persen	75-80
30	Indeks Kerukunan Beragama	Indeks	70-80
31	Indeks Infrastruktur Kabupaten	Kategori (Nasional)	1.51-3.75 (Tinggi)
32	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	Persen	25,550-30
33	Rasio elektrifikasi	Persen	99,00-99,2
34	Presentase Rumah Layak Huni	Persen	80-85
35	Persentase RT berakses air bersih	Persen	90-92
36	Persentase Desa/Kelurahan yang memiliki akses jaringan telekomunikasi	Persen	90-95
37	Presentase Koneksi Internet Desa	Persen	80-90
38	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)		55-60
39	Indeks Rawan Bencana	Indeks	90-85
40	Persentase Desa Tangguh Bencana	Persen	19,84-23,8%
41	Cakupan Pelayanan Persampahan Kota	Persen	100
42	Cakupan Layanan Kebakaran skala Kabupaten	Persen	100
43	Angka Kriminalitas	Persen	5-8

Indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang tertuang dalam Tabel 6.1 merupakan indikator program prioritas pada setiap urusan penyelenggaraan pemerintahan yang akan dipergunakan sebagai acuan dan dasar dalam perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi kinerja pembangunan daerah yang dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Morowali.

Indikator kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kabupaten Morowali secara umum dibagi dalam tiga aspek, yaitu:

#### **1. Aspek Kesejahteraan Masyarakat;**

Untuk mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat ada beberapa indikator yang digunakan yaitu diantaranya Penurunan Tingkat kemiskinan, penurunan

Tingkat Pengangguran dan meningkatnya Pendapatan perkapita masyarakat. Untuk lebih jelasnya uraian indikator dan target kinerja masyarakat Kabupaten Morowali Pada tahun 2023 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 6.2  
Matriks Indikator dan Target Kinerja Kesejahteraan Masyarakat  
Kabupaten Morowali Tahun 2023

No.	Aspek/Fokus/Bidang/Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Target Kinerja Tahun 2023
<b>1.</b>	<b>ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT</b>	
<b>1.1.</b>	<b>Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi</b>	
1.1.1	Pertumbuhan PDRB-ADH Berlaku dengan Migas (%)	12-8
1.1.2	Pertumbuhan PDRB- ADH Konstan dengan Migas (%)	10-15
1.1.3	PDRB-ADH Berlaku dengan Migas (Juta Rp)	78.273.734,96
1.1.4	PDRB-ADH Berlaku tanpa Migas (Juta Rp)	78.273.734,96
1.1.5	PDRB-ADH Konstan dengan Migas (Juta Rp)	60.235.606,16
1.1.6	PDRB-ADH Konstan tanpa Migas (Juta Rp)	60.235.606,16
1.1.7	Laju inflasi (Persen)	3-5
1.1.8	Perkembangan PDRB Perkapita (%)	
	- PDRB Perkapita ADH Berlaku (Rp)	465,57
	- PDRB Perkapita ADH Konstan 2010 (Rp)	358,28
	- Perkembangan PDRB Konstan 2010 Perkapita (%)	8,51
1.1.9	Indeks Gini	0,242
1.1.10	Persentase Penduduk Miskin	
	- Garis Kemiskinan (000)	480.193,280
	- Jumlah Masyarakat Miskin (000)	19,97
	- Persentase Kemiskinan (%)	11,88
	- Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)	1,53
	- Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)	0,44
1.1.10	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	74,14
1.1.11	Persentase penduduk diatas garis kemiskinan	88,12
<b>1.2.</b>	<b>Kesejahteraan Sosial</b>	
1.2.1	Angka Melek Huruf	98-99
1.2.2	Angka Rata-Rata Lama Sekolah	10
1.2.3	Angka Harapan Lama Sekolah	13,36
1.2.4	Angka Usia Harapan Hidup (UHH)	70,03
1.2.5	Balita Gizi Buruk	6-4
1.2.6	Prevalensi Angka Stunting	1,92
1.2.7	Angka Partisipasi Angkatan Kerja	44,13
1.2.8	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	67,23
1.2.9	Tingkat pengangguran terbuka	2
1.2.10	Rasio Penduduk yang Bekerja	98
1.2.11	PDRB per tenaga kerja Laju pertumbuhan	
	- PDRB ADHB	253.215,37

	- PDRB ADHK	168.303,63
1.2.11	Persentase PAD terhadap pendapatan	31,26
1.2.12	Opini BPK	WTP
1.2.13	Kontribusi Sektor Pertanian terhadap PDRB Kabupaten	
	- PDRB ADHB	1,34
	- PDRB ADHK	1,43
1.2.14	Kontribusi sector Pertanian (Hortikultura) terhadap PDRB Kabupaten	
	- PDRB ADHB	0,07
	- PDRB ADHK	0,06
1.2.15	Produksi Tanaman Pertanian	
	Padi	36.613,63
	Jagung	1.171,89
	Ubi Kayu	6.970,96
	Ubi Jalar	1.097,89
	Kacang Tanah	68,59
	Kacang Kedelai	765,06
	Kacang Hijau	4,42
1.2.16	Kontribusi Sub-Sektor Perkebunan terhadap PDRB	
	- PDRB ADHB	0,47
	- PDRB ADHK	0,49
1.2.17	Produksi Tanaman Perkebunan	
	Kelapa	1.147,88
	Kelapa Sawit	142.358,12
	Kopi	18.760,01
	Kakao	23.475,56
	Karet	-
1.2.18	Kontribusi Sub Sektor Kehutanan Terhadap PDRB	
	- PDRB ADHB	0,03
	- PDRB ADHK	0,03
1.2.19	Kontribusi Sektor Pertambangan terhadap PDRB	
	- PDRB ADHB	13,99
	- PDRB ADHK	19,39
1.2.20	Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PDRB	
	- PDRB ADHB	0,07
	- PDRB ADHK	0,07
1.2.21	Kontribusi Sektor Perikanan terhadap PDRB	
	- PDRB ADHB	0,77
	- PDRB ADHK	0,54
1.2.22	Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB	
	- PDRB ADHB	0,65
	- PDRB ADHK	0,56
1.2.23	Kontribusi Sektor Industri Terhadap PDRB	
	- PDRB ADHB	120,03

	- PDRB ADHK	111,61
1.2.24	Kontribusi Sektor Industri RT Terhadap PDRB	
	- PDRB ADHB	1,77
	- PDRB ADHK	1,2
1.2.25	Pertumbuhan Industri	0-2
1.2.26	Nilai ICOR	3-5
<b>1.3.</b>	<b>Fokus Seni Budaya dan Olahraga</b>	
1.3.1	Seni Budaya	
	- Jumlah Grup Kesenian per 10.000 penduduk	17-20
	- Jumlah Gedung Kesenian Per 10.000 Penduduk	1,00
1.3.2	Olahraga	
	Jumlah Klub Olah Raga Per 10.000 Penduduk	14-18
	Jumlah Gedung Olahraga Per 10.000 Penduduk	391-395

## 2. Aspek Daya saing Daerah;

Ada beberapa indikator yang dapat mengukur Aspek daya saing daerah salah satunya Fasilitas Wilayah/Infrastruktur untuk lebih jelasnya uraian indikator dan target kinerja Daya Saing Daerah Kabupaten Morowali Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 6.2  
Matriks Indikator dan Target Kinerja Daya Saing  
Daerah Kabupaten Morowali Tahun 2023

No.	Aspek/Fokus/Bidang/Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Target Kinerja Tahun 2023
<b>3</b>	<b>DAYA SAING DAERAH</b>	
<b>3.1.</b>	<b>Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah</b>	
3.1.1	Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Per Kapita	29,56
3.1.2	Produktivitas Total Daerah	1.404,47
<b>3.2.</b>	<b>Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur</b>	
3.2.1	Panjang Ruas Jalan Kabupaten	
3.2.2	Jumlah orang/barang melalui dermaga/bandara/terminal per tahun	
	Angkutan Laut	
	Jumlah Penumpang Turun	11.218,17
	Jumlah Penumpang Naik	10.745,86
	Jumlah Barang Bongkar (Ton)	230.863,65
	Jumlah barang muat (ton)	514.882,60
	Angkutan Udara	-
	Jumlah Penumpang Datang	60.385,06
	Jumlah Penumpang Berangkat	17.242,96
	Jumlah Barang Bongkar(Ton)	128.538,22
	Jumlah barang muat (ton)	43.917,88
3.2.3	Jenis dan jumlah bank dan cabang	

	Bank Umum	17-20
	Bank Perkreditan Rakyat	4-5
3.2.4	Jumlah Restoran/Rumah Makan	
	- Jumlah Rumah Makan	35-40
3.2.5	Jumlah Penginapan/Hotel	40-45
3.2.6	Persentase RT Berakses Air bersih	89,77
3.2.7	Rumah tangga pengguna listrik	93-95
<b>3.3.</b>	<b>Fokus Iklim Berinvestasi</b>	
3.3.1	Angka Kriminalitas	10-13
3.3.2	Jumlah Demonstrasi	6-10
<b>3.4.</b>	<b>Fokus Sumber Daya Manusia</b>	
3.4.1	Tingkat Ketergantungan	
	- Rasio Ketergantungan	43,34

### 3. Aspek Pelayanan Umum;

Indikator kinerja dalam aspek pelayanan umum yang merupakan gambaran kinerja pelayanan pemerintahan Kabupaten Morowali yang menjadi acuan keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan dalam pelaksanaan program dan kegiatan. Adapun indikator kinerja yang terkait dengan pelayanan umum pemerintahan dapat di lihat pada tabel berikut ini :

Tabel 6.4  
Matriks Indikator dan Target Kinerja Pelayanan Umum  
Kabupaten Morowali Tahun 2022

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Target Kinerja Tahun 2023
<b>2.</b>	<b>ASPEK PELAYANAN UMUM</b>	
<b>2.1.</b>	<b>Urusan pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar</b>	
<b>2.1.1</b>	<b>Pendidikan</b>	
2.1.1.1	Pendidikan Anak Usia Dini Rasio Ketersediaan Sekolah Per Murid TK	38,8
	Rasio Ketersediaan Guru Per Murid TK	12,8
2.1.1.2	Angka Partisipasi Kasar (APK)	
	- Angka Partisipasi Kasar SD/MI	104,76
	- Angka Partisipasi Kasar SMP/MTs	100,11
	- Angka Partisipasi Kasar SMU/MA/SMK	80,61
2.1.1.3	Angka Pendidikan yang ditamatkan (APT)	
	- Angka Pendidikan yang ditamatkan SD/MI	100
	- Angka Pendidikan yang ditamatkan SMP/MTs	100
	- Angka Pendidikan yang ditamatkan SMU/MA/SMK	100
2.1.1.4	Angka Partisipasi Murni (APM)	
	- Angka Partisipasi Murni SD/MI	97,22
	- Angka Partisipasi Murni SMP/MTs	77,6
	- Angka Partisipasi Murni SMU/MA/SMK	71,98

2.1.1.5	Angka Partisipasi Sekolah	
	- Tingkat SD/MI	99,09
	- Tingkat SMP/MTs	97,14
	- Tingkat SMA/SMK/MA	92,49
2.1.1.6	Angka Putus Sekolah	
	- Tingkat SD/MI	0,5-0,3
	- Tingkat SMP/MTs	0-2
	- Tingkat SMA/SMK/MA	5 - 10
2.1.1.7	Angka Kelulusan	
	- Tingkat SD/MI	100
	- Tingkat SMP/MTs	100
	- Tingkat SMA/SMK/MA	100
2.1.1.8	Angka Yang Melanjutkan	
	Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs	100
	Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA	100
	Angka Lulusan SMA/SMK/MA Yang melanjutkan ke Perguruan Tinggi	79-81
2.1.1.9	Fasilitas Pendidikan	
	- Tingkat SD/MI	148-150
	- Tingkat SMP/MTs	57-59
	- Tingkat SMA/SMK/MA	26-27
2.1.1.10	Rasio Ketersediaan Sekolah	
	Rasio ketersediaan Sekolah per penduduk usia sekolah SD/MI	0,107638889
	Rasio ketersediaan Sekolah per penduduk usia sekolah SD/MI	0,163194444
	Rasio ketersediaan Sekolah/penduduk usia sekolah SMA/SMK/MI	0,180555556
2.1.1.11	Rasio Guru/Murid jenjang Pendidikan Dasar	10,01
2.1.1.12	Rasio Guru/Murid Jenjang pendidikan Menengah	10,96
2.1.1.13	Rasio guru/murid per kelas	
	- Tingkat SD/MI	01:14
	- Tingkat SMP/MTs	01:12
	- Tingkat SMA/SMK/MA	01:19
<b>2.1.2.</b>	<b>Kesehatan</b>	
2.1.2.1	Angka Kematian Bayi per 1000 Kelahiran	0,01-0,2
	Angka Kematian Balita per 1000 kelahiran hidup	0,29
	Angka Kematian Neonatal per 1000 kelahiran hidup	24,28
2.1.2.2	Angka Kematian Ibu per 100,000 kelahiran hidup	0-0,25
2.1.2.3	Rasio posyandu per satuan balita	6,81
2.1.2.4	Rasio Puskesmas, Poliklinik, Poskesdes dan Pustu per satuan penduduk	
	Rasio Sarana Kesehatan	0,27
	Rasio Puskesmas	0,05

	Rasio Poliklinik	0,13
	Rasio Pustu	-
2.1.2.5	Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk (Per 1.000)	0,02
2.1.2.6	Rasio Dokter per satuan penduduk (Per 1.000)	0,84
2.1.2.7	Rasio tenaga medis per satuan penduduk (Per 1.000)	8,8
2.1.2.8	Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	94-97
2.1.2.9	Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan	100
2.1.2.10	Persentase Balita Yang Pernah diimunisasi campak	100
2.1.2.11	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA (Jumlah)	266
2.1.2.12	Tingkat prevalensi Tuberkulosis (per 100.000 penduduk)	138,67
2.1.2.13	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD	57
2.1.2.14	Penderita Diare Yang Ditangani	1.175,17
2.1.2.15	Angka kejadian Malaria (Per 100.000 Penduduk)	6,84
2.1.2.16	Prevalensi HIV/AIDS (persen) dari total populasi	0-0,2
2.1.2.17	Proporsi jumlah penduduk usia 15-24 tahun yang memiliki pengetahuan komprehensif tentang HIV/AIDS	-
2.1.2.18	Cakupan puskesmas	-
2.1.2.19	Cakupan puskesmas Pembantu	19,55
2.1.2.20	Cakupan kunjungan Ibu hamil K4	97,5
<b>2.1.3.</b>	<b>Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</b>	
2.1.3.1	Proporsi Panjang Jalan Dalam Kondisi Baik	0,27
2.1.3.2	Rasio Panjang Jalan Per Satuan Penduduk	0,006
2.1.3.3	Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik (> 40 KM/Jam)	19,15
2.1.3.4	Persentase rumah tinggal bersanitasi	82,92
2.1.3.5	Rasio jaringan Irigasi	0,76
2.1.3.6	Persentase penduduk berakses air minum	89,77
2.1.3.7	Rasio Tempat Ibadah Per Satuan Penduduk	2,4
<b>2.1.4.</b>	<b>Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;</b>	
2.1.4.1	Rumah layak huni	266,94
<b>2.1.5.</b>	<b>Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat;</b>	
2.1.5.1	Cakupan petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas)	975,99
2.1.5.2	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketenteraman, keindahan)	6-8
2.1.5.3	Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten/kota	9,19

<b>2.1.6.</b>	<b>Sosial</b>	
2.1.6.1	PMKS yang memperoleh bantuan sosial (jiwa)	51.380,71
2.1.6.2	Persentase PMKS yang tertangani	125,01
2.1.6.3	Jumlah panti sosial yang menerima program pemberdayaan sosial melalui kelompok usaha bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya	7
2.1.6.4	Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat (persen)	100
<b>2.2.</b>	<b>Urusan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar</b>	
<b>2.2.1.</b>	<b>Tenaga Kerja</b>	
2.2.2.1	Angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun (orang)	1.967,00
2.2.2.2	Rasio Lulusan S1/S2/S3	10,29
<b>2.2.2.</b>	<b>Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak</b>	
2.2.2.1	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	8,88
2.2.2.2	Proporsi Kursi yang diduduki perempuan di DPRD	4
	Rasio KDRT	0,4
2.2.2.3	Partisipasi angkatan kerja perempuan	38,39
2.2.2.4	Rasio APM perempuan/laki-laki di SD	1,06
2.2.2.5	Rasio APM perempuan/laki-laki di SMP	0,9
2.2.2.6	Rasio APM perempuan/laki-laki di SMA	0,99
<b>2.2.3.</b>	<b>Ketahanan Pangan</b>	
2.2.3.1	Rasio Ketersediaan Pangan Utama	185,8
2.2.3.2	Ketersediaan Energi	3.088,27
2.2.3.3	Ketersediaan protein perkapita	103,51
<b>2.2.5.</b>	<b>Lingkungan Hidup</b>	
2.2.5.1	Tersusunnya RPPLH Kabupaten	Ada
2.2.5.2	Terintegrasinya RPPLH dalam rencana pembangunan kabupaten/kota	Ada
2.2.5.3	Terselenggaranya KLHS untuk K/R/P tingkat daerah provinsi	Ada
2.2.5.4	Terfasilitasi Pendampingan Pengakuan MHA	Ada
2.2.5.5	Penetapan MHA	Ada
2.2.5.6	Terlaksananya pemberian penghargaan lingkungan hidup	Ada
<b>2.2.6.</b>	<b>Kependudukan dan Catatan Sipil</b>	
2.2.6.1	Rasio penduduk ber KTP per satuan penduduk	193.904,89
2.2.6.2	Rasio bayi berakte kelahiran	28.679,12
2.2.6.3	Rasio pasangan berakte nikah	239,41
2.2.6.4	Ketersediaan database kependudukan skala Kabupaten (ada/tidak)	Ada
2.2.6.5	Penerapan KTP Nasional berbasis NIK	Ada

<b>2.2.7.</b>	<b>Pemberdayaan Masyarakat dan Desa</b>	
2.2.7.1	Cakupan Sarana dan Prasarana Perkantoran Pemerintahan Desa yang Baik	100
2.2.7.2	Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK	143
2.2.7.3	Persentase PKK Aktif	100
2.2.7.4	Posyandu aktif	154
<b>2.2.8</b>	<b>Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana</b>	
2.2.8.1	Laju Pertumbuhan Penduduk	01-Feb
2.2.8.2	Persentase Akseptor KB di Kabupaten Morowali	84,14
2.2.8.3	Angka pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15-49	87,44
2.2.8.4	Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	44,54
2.2.8.5	Rasio petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) setiap desa/kelurahan	100
<b>2.2.9.</b>	<b>Perhubungan</b>	
2.2.9.1.	Jumlah Arus Penumpang (Orang)	21.046,88
2.2.9.2	Rasio ijin trayek	25,15
2.2.9.3	Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis	3
2.2.9.4	Pemasangan Rambu-rambu	450
	Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan	01:13
2.2.9.3	Jumlah orang/barang melalui dermaga/bandara/terminal per tahun	
	Angkutan Laut	
	Jumlah Penumpang Turun	11.218,17
	Jumlah Penumpang Naik	10.745,86
	Jumlah Barang Bongkar (Ton)	230.863,65
	Jumlah barang muat (ton)	514.882,60
<b>2.2.10.</b>	<b>Komunikasi dan Informatika</b>	
<b>2.2.11.</b>	<b>Koperasi Usaha Kecil dan Menengah</b>	
2.2.11.1	Persentase koperasi aktif	30,86
<b>2.2.12.</b>	<b>Penanaman Modal</b>	
2.2.12.	Jumlah investor (PMDN/PMA) (Juta)	30-50
2.2.12.2	Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)	20-30 Triliun
<b>2.2.13</b>	<b>Kepemudaan dan Olahraga</b>	
2.2.13.1	Persentase organisasi pemuda yang aktif (jumlah organisasi pemuda).	96,7
<b>2.2.14.</b>	<b>Statistik</b>	
2.2.14.1	Terintegrasinya Sistem Data statistik data terintegrasi	Ada
2.2.14.2	Buku Kabupaten Dalam Angka	Ada
2.2.14.3	Buku PDRB	Ada
<b>2.2.15.</b>	<b>Persandian</b>	
<b>2.2.16.</b>	<b>Kebudayaan</b>	
<b>2.2.17.</b>	<b>Perpustakaan</b>	
2.2.17.1	Jumlah Pengunjung Perpustakaan	5.373

<b>2.3.</b>	<b>Urusan Pemerintahan Pilihan yang Berkaitan Pelayanan Dasar</b>	
<b>2.3.1.</b>	<b>Pariwisata</b>	
2.3.1.1	Jumlah Kunjungan Wisatawan (Orang)	7.095
2.3.1.2	Lama kunjungan Wisata (Hari)	3
<b>2.3.2.</b>	<b>Pertanian</b>	
2.3.2.1	Kontribusi Sektor Pertanian	
	- PDRB ADHB	1,34
	- PDRB ADHK	1,43
2.3.2.2	Kontribusi sector pertanian (palawija) terhadap PDRB	
	- PDRB ADHB	0,07
	- PDRB ADHK	0,06
	Kontribusi sektor perkebunan (tanaman keras) terhadap PDRB	
	- PDRB ADHB	0,47
	- PDRB ADHK	0,49
2.3.2.3	Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar	
	Padi	51,16
	Jagung	95,24
	Ubi Kayu	360,66
	Ubi Jalar	262,48
	Kacang Tanah	12,77
	Kacang Kedelai	24,3
	Kacang Hijau	1,57
<b>2.3.3.</b>	<b>Kehutanan</b>	
2.3.3.1	Rasio luas kawasan lindung untuk menjaga kelestarian keanekaragaman hayati terhadap total luas kawasan hutan	37,2
<b>2.3.4.</b>	<b>Energi dan Sumberdaya Mineral</b>	
2.3.4.1	Rumah tangga pengguna listrik	93-95
2.3.4.2	Daya Terpasang (Kwh)	40-43 Jt Kwh
<b>2.3.5.</b>	<b>Perdagangan</b>	
2.3.4.1	Ekspor Bersih Perdagangan	52.683,40
<b>2.3.6.</b>	<b>Kelautan dan Perikanan</b>	
2.3.5.1	Produksi Perikanan (ton)	
	Produksi Perikanan Laut (ton)	40.728,82
	Produksi Perikanan Darat (Ton)	2.344,30
	Produksi Perikanan Budidaya (Ton)	20.220,51
2.3.5.2	Konsumsi IkanPerkapita	52,331,04
2.3.5.3	Rasio Kawasan Lindung Perairan Terhadap Total Luas Perairan Teritorial	1,04
<b>2.4.</b>	<b>Fokus Layanan Urusan Penunjang</b>	
<b>2.4.1</b>	<b>Perencanaan Pembangunan</b>	
2.4.1.1	Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA	Ada
2.4.1.2	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD	Ada

	yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA	
2.4.1.3	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA	Ada
2.4.1.4	Tersedianya dokumen RTRW yang telah ditetapkan dengan PERDA	
<b>2.4.2</b>	<b>Keuangan</b>	
2.4.2.1	Opini BPK terhadap laporan keuangan	WTP
2.4.2.2	Persentase SILPA	0
2.4.2.3	Persentase belanja langsung	52,15
2.4.2.4	Persentase belanja tidak langsung	47,85
2.4.2.5	Penetapan APBD Tepat Waktu/Tidak Tepat Waktu.	Tepat Waktu
<b>2.4.3</b>	<b>Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan</b>	
<b>2.4.4</b>	<b>Penelitian dan Pengembangan</b>	
<b>2.4.5</b>	<b>Pengawasan</b>	
<b>2.4.6</b>	<b>Sekretariat Dewan</b>	
2.4.6.1	Tersedianya Rencana Kerja Tahunan pada setiap Alat-alat Kelengkapan DPRD Kabupaten Morowali	Ada
2.4.6.2	Tersusun dan terintegrasinya Program-Program Kerja DPRD untuk melaksanakan Fungsi pengawasan, Fungsi pembentukan Perda, dan Fungsi Anggaran dalam Dokumen rencana Lima Tahunan (RPJM) maupun Dokumen Rencana Tahunan (RKPD).	Ada
2.4.6.3	Terintegrasi program-program DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, pembentukan Perda dan Anggaran ke dalam Dokumen Perencanaan dan Dokumen Anggaran Setwan DPRD.	Ada



## BAB VII PENUTUP

Bab Penutup Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Morowali Tahun 2022 terdiri dari dua (2) sub bab yaitu : Kaidah Pelaksanaan dan Kesimpulan.

### 7.1. Kaidah Pelaksanaan

RKPD Tahun 2023 merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahunan daerah. Proses penyusunan RKPD Tahun 2023 berlandaskan pada prioritas pembangunan yang mendukung pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023, RKPD Pemda Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023 dan Perubahan RPJMD Morowali Tahun 2018–2023. Keterkaitan antara dokumen-dokumen tersebut sangat erat, kedudukan dokumen yang lebih tinggi ini masih bersifat makro, dan dokumen perencanaan yang secara hierarkhis lebih tinggi menjadi dasar pijakan dalam penjabaran dokumen di bawahnya secara operasional. RKPD sebagai dokumen perencanaan tahunan daerah, berisi tentang gambaran umum daerah, kerangka ekonomi dan keuangan daerah, program prioritas pembangunan daerah dan rencana kerja, pendanaan/pagu indikatif dan prakiraan maju.

Dokumen RKPD Kabupaten Morowali berfungsi sebagai landasan, pedoman dan acuan resmi bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun Kebijakan Umum APBD (KUA), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dalam bentuk nota kesepakatan antara Eksekutif dan Legislatif. Nota kesepakatan KUA dan PPAS ini akan digunakan sebagai dasar penyusunan RAPBD. Adapun fungsi RKPD lainnya adalah sebagai bahan evaluasi RAPBD untuk memastikan APBD telah disusun berlandaskan pada RKPD dan dokumen RKPD dijadikan sebagai acuan/pedoman bagi Organisasi Perangkat Daerah dalam menyusun dan melaksanakan tugas dan fungsinya dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan.

Dalam rangka keterbukaan dan transparansi informasi publik, maka RKPD dipublikasikan dengan tujuan diketahui oleh semua pihak. Selanjutnya untuk menjamin agar program dan kegiatan masing-masing OPD pelaksanaannya dapat berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan dan dalam rangka meningkatkan efektifitas dan efisiensi alokasi sumberdaya serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan program pembangunan, maka diperlukan

instrumen pengendalian, monitoring dan evaluasi. Adapun instrumen pengendalian terhadap pelaksanaan program dan kegiatan berdasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Menurut tata cara pengendalian tersebut disajikan program dan kegiatan yang sudah direncanakan dengan target-target tertentu dan bagaimana pelaksanaan program dan kegiatan tersebut oleh masing masing OPD. Evaluasi yang dilakukan tidak hanya pada kesesuaian antara rencana dengan pelaksanaan saja, akan tetapi juga mencakup tingkat capaian kinerja pada setiap tahapan pelaksanaannya. Posisi OPD pada tata cara pengendalian ini menjadi strategis, dimana OPD mempunyai kewenangan untuk melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap program dan kegiatan yang dilaksanakan sendiri. Diharapkan apabila terjadi tidak kesesuaian dapat segera diambil langkah tindak lanjut sebagai upaya preventif dan korektif sebelum pelaksanaan program dan kegiatan tersebut menyimpang lebih jauh, sehingga dalam hal ini kemandirian OPD dalam memahami setiap proses dan langkah pengendalian menjadi suatu hal yang sangat penting.

Sehubungan dengan tata cara pengendalian tersebut diatas maka ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan RKPD Tahun 2023 sebagai berikut :

1. Untuk mengupayakan keterpaduan, sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan setiap program dalam rangka koordinasi perencanaan, masing masing OPD agar menyempurnakan Rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Tahun 2023.
2. OPD berkewajiban untuk melaksanakan program-program yang ada di RKPD Tahun 2023 dengan sebaik-baiknya, dengan melibatkan masyarakat dan dunia usaha.
3. Masyarakat luas dapat berperan serta dalam pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan dan kegiatan dalam program-program pembangunan.
4. Untuk menjaga efektifitas dan efisiensi pelaksanaan program, setiap OPD wajib melakukan tindakan koreksi yang diperlukan, dan melaporkan hasil pemantauan

secara berkala kepada Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku.

5. Pada akhir tahun anggaran 2023, setiap OPD wajib melakukan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan yang meliputi evaluasi terhadap pencapaian sasaran kegiatan yang sudah ditetapkan, kesesuaian dengan rencana alokasi anggaran yang ditetapkan dalam APBD, kesesuaian dengan target Perubahan RPJMD serta kesesuaian dengan ketentuan peraturan perundangan yang mengatur pelaksanaan APBD dan peraturan perundangan lainnya.

## 7.2. Kesimpulan

1. Penyusunan RKPD Tahun 2023 berlandaskan pada Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023, RKPD Pemda Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023 dan Prioritas Pembangunan pada Perubahan RPJMD Morowali Tahun 2018 - 2023.
2. Peraturan Bupati tentang RKPD merupakan acuan/pedoman bagi penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah.
3. Pelaksanaan pembangunan daerah diarahkan untuk mencapai target sasaran sesuai dengan tema pembangunan yang dimuat dalam RKPD 2023 yaitu : **“Memantapkan Kesejahteraan Bersama Dengan Majukan Infrastruktur dan Pelayanan Publik”**. Program dan kegiatan yang dilaksanakan di masing-masing OPD diarahkan pada pencapaian tema tersebut. Oleh karena itu untuk menjamin pelaksanaan program kegiatan tersebut agar sesuai dengan rencana yang sudah ditetapkan, maka harus dilakukan pengendalian dan evaluasi secara periodik dan komprehensif. Selanjutnya untuk mewujudkan tema tersebut ditetapkan 3 (tiga) prioritas pembangunan yaitu:
  - a. Mewujudkan ketahanan sosial ekonomi masyarakat masa pandemic covid 19 melalui peningkatan jaring pengaman social, pemberdayaan masyarakat, peningkatan produksi dan produktivitas sektor pertanian, perkebunan, perikanan, UMKM, BUMDES dan IKM.
  - b. Memantapkan kualitas infrastruktur untuk mengurangi kesenjangan wilayah, peningkatan kualitas lingkungan dan ketahanan bencana.
  - c. Memantapkan kualitas pelayanan publik dan penguatan SDM yang unggul, beriman dan bertaqwa.

Pada akhirnya, untuk melaksanakan seluruh prioritas yang telah ditetapkan tersebut diperlukan kerja keras, semangat, komitmen, partisipasi, konsistensi dan disiplin yang tinggi dari pelaksana pemerintahan dan segenap pemangku pembangunan sangat diperlukan dalam pelaksanaan rencana pembangunan daerah, sehingga masing-masing dapat berperan dan bertanggung jawab terhadap proses, hasil dan kinerja pembangunan sesuai dengan tanggung jawabnya masing-masing.

Morowali, Juni 2023

BUPATI MOROWALI

A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized, cursive script that appears to be the name 'Taslim'.

**TASLIM**